



# **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

## **RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**



**BAPPEDA  
KABUPATEN BANGKA, 2023**



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah selama masa transisi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan di gunakan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai daerah dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 5 (lima) tahunan
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
22. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

23. Prioritas Daerah adalah sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RPD DAN SISTEMATIKA RPD

### Pasal 2

RPD merupakan pedoman bagi Penjabat (Pj.) Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah periode 2024-2026.

### Pasal 3

Sistematika penyusunan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Bab I      Pendahuluan
- b. Bab II     Gambaran Umum
- c. Bab III    Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV    Permasalahan dan Isu Strategis
- e. Bab V     Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI    Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas
- g. Bab VII   Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Bab IX    Penutup

### Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAKSANAAN RPD

### Pasal 5

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJMN, RPJPD Kabupaten Bangka, Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Isu Strategis, Kebijakan nasional, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun RKPd dan Rancangan APBD.

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RPD, dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun, RKPD tahunan dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun, paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

RPD dapat dilakukan perubahan, apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

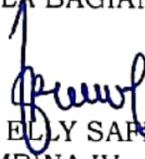
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 Maret 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELY SAPUTRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 22



## KATA PENGANTAR



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati.

RPD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini berisikan penjabaran arah pembangunan daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2015-2025, lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, permasalahan dan analisis isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga diselaraskan dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh *stakeholder* untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut.





Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan *stakeholder* pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan RPD Tahun 2024-2026 ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Sungailiat,      Maret 2023





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xv
<b>BABI PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembanguna Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Dokumen Renca Penganggaran Daerah serta Dokumen Rencana Pembangunan Antar Daerah.....	I-9
1.3.1. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	I-10
1.3.2. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025.....	I-20
1.3.3. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Tahun 2019-2023.....	I-22
1.3.4. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 .....	I-25
1.3.5. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.....	I-27
1.3.6. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD .....	I-32
1.3.7. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Penganggara Daerah .....	I-33
1.3.8. Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.....	I-33
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-34
1.4.1. Maksud .....	I-34
1.4.2. Tujuan .....	I-34
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-35
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1. Kondisi Geografi Daerah .....	II-1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Administrasi .....	II-1
2.1.1.2. Kondisi Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	II-3
2.1.1.3. Kondisi Klimatologi .....	II-7
2.1.1.4. Kondisi Lahan .....	II-8
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-12
2.1.2.1. Potensi Perkebunan .....	II-12
2.1.2.2. Potensi Pertanian .....	II-15
2.1.2.3. Potensi Perikanan .....	II-16



2.1.2.4.	Potensi Peternakan.....	II-17
2.1.2.5.	Potensi Pertambangan .....	II-19
2.1.2.6.	Potensi Industri.....	II-20
2.1.2.7.	Potensi Pariwisata .....	II-23
2.1.2.8.	Potensi Perdagangan dan Jasa.....	II-26
2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana.....	II-28
2.1.4.	Demografi .....	II-32
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-36
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-37
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB .....	II-37
2.2.1.2.	Laju Inflasi.....	II-45
2.2.1.3.	Koefisien Gini .....	II-46
2.2.1.4.	Indeks Ketimpangan Williamson .....	II-47
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-48
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia .....	II-48
2.2.2.2.	Kemiskinan .....	II-50
2.2.2.3.	Pendidikan .....	II-53
2.2.2.4.	Kesehatan .....	II-57
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-64
2.3.	Aspek Layanan Umum .....	II-65
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-65
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	II-81
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II-99
2.3.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-104
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-113
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-113
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita .....	II-113
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani (NTP) .....	II-116
2.4.1.3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	II-116
2.4.1.4.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita .....	II-117
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-118
2.4.2.1.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan .....	II-118
2.4.2.2.	Luas Wilayah Produktif.....	II-119
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-119
2.4.3.1.	Angka Kriminalitas .....	II-119
2.4.3.2.	Kemudahan Perizinan .....	II-120
2.4.3.3.	Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-122
2.4.3.4.	Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha .....	II-124
2.4.3.5.	Indeks Demokrasi Indonesia .....	II-127
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-128
2.4.4.1.	Kualitas Tenaga Kerja .....	II-128
2.4.4.2.	Rasio Ketergantungan .....	II-128
2.4.4.3.	Perpustakaan .....	II-130
2.4.4.4.	Kepegawaian.....	II-130
2.5.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	II-131
2.6.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	II-135



<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 .....	III-1
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah .....	III-2
3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah .....	III-4
3.1.1.2. Kinerja Pendapatan Transfer.....	III-8
3.1.1.3. Kinerja Lain-Lain Pendapatan yang Sah .....	III-9
3.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah .....	III-10
3.1.2.1. Belanja Operasi .....	III-12
3.1.2.2. Belanja Modal .....	III-12
3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga .....	III-13
3.1.2.4. Belanja Transfer.....	III-14
3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah .....	III-16
3.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan.....	III-16
3.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan.....	III-17
3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-17
3.1.4.1. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....	III-17
3.1.4.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah .....	III-18
3.1.4.3. Analisa Pembiayaan .....	III-19
3.2. Neraca Daerah .....	III-21
3.2.1. Pertumbuhan Neraca Daerah.....	III-21
3.3. Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah .....	III-25
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-26
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah .....	III-27
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah .....	III-28
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.....	IV-1
4.1.1 Permasalahan Daerah .....	IV-1
4.1.2 Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah .....	IV-10
4.1.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III-10
4.1.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III-15
4.1.2.3. Urusan Pilihan.....	III-23
4.1.2.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah .....	III-26
4.1.2.5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah.....	III-27
4.1.2.6. Urusan Pengawasan Pemerintah.....	III-29
4.2. Analisis dan Penetapan Isu Strategis .....	IV-29
4.2.1 Analisis Isu Strategis.....	IV-29
4.2.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	IV-30
4.2.1.2. <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> .....	IV-31
4.2.1.3. <i>Forum Group of Twenty (G 20)</i> .....	IV-34
4.2.2 Penetapan Isu Strategis.....	IV-35
4.2.2.1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih ( <i>Clean Governance</i> ).....	IV-35



4.2.2.2. Peningkatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik.....	IV-35
4.2.2.3. Penguatan Rantai Nilai ( <i>Value Chain</i> ) Tata Niaga Produk Pertanian .....	IV-36
4.2.2.4. Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah .....	IV-36
4.2.2.5. Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian .....	IV-36
4.2.2.6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata dan Berkualitas .....	IV-37
4.2.2.7. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan pendidikan harus Berkualitas .....	IV-37
4.2.2.8. Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.....	IV-38
4.2.2.9. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender .....	IV-38
4.2.2.10. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur serta konektivitas antara wilayah.....	IV-39
4.2.2.11. Peningkatan Kualitas Fungsi Ekologis.....	IV-39
<b>BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	V-1
5.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah .....	V-3
5.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah.....	V-4
5.2. Cascading Kinerja Pembangunan Daerah.....	V-11
<b>BAB VI STRATEGI &amp; ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.1.1. Strategi Pencapaian Sasaran .....	VI-2
6.1.2. Arah Kebijakan untuk Mendukung Strategi .....	VI-5
6.2. Program Pembangunan Daerah .....	VI-8
6.2.1. Unggulan Pembangunan Daerah .....	VI-9
6.2.2. Program Pembangunan Daerah.....	VI-10
6.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-22
6.2.4. Kerangka Pendaan Program Perangkat Daerah .....	VI-23
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-1
7.1.1. Kerangka Pendapatan Daerah 2024-2026.....	VII-4
7.1.2. Kerangka Belanja Dearah 2024-2026.....	VII-5
7.1.3. Kerangka Pembiayaan Daerah 2024-2026.....	VII-6
7.2. Program Perangkat Daerah dan Dukungan Anggarannya.....	VII-9
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. Indikator Kinerja Daerah .....	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VIII-3
8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VIII-6



<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	<b>IX-1</b>
9.1. Pedoman Transisi .....	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan .....	IX-2



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Program Prioritas Nasional dan Target Indikator RPJMN Tahun 2020-2024.....	I-12
1.2. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bnagka Tahun 2019-2023.....	I-23
2.1. Luas Wilayah Adminstrasi Kabupaten Bangka .....	II-2
2.2. Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan .....	II-5
2.3. Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-8
2.4. Distribusi Luasan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-9
2.5. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-11
2.6. Sentra Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka.....	II-13
2.7. Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022 .....	II-15
2.8. Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-21
2.9. Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-22
2.10. Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-22
2.11. Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka .....	II-25
2.12. Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-29
2.13. Indikator Kependudukan Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 .....	II-32
2.14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km <sup>2</sup> Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 .....	II-33
2.15. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-34
2.16. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2022 (%).....	II-34
2.17. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-35
2.18. Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2021.....	II-36
2.19. PDRB Tahun 2018–2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka (Juta Rupiah).....	II-37
2.20. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen) .....	II-39
2.21. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 (Persen) .....	II-40
2.22. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	II-41
2.23. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 (Juta-Rupiah) .....	II-43
2.24. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022.....	II-49
2.25. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022.....	II-50



2.26. Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-52
2.27. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-52
2.28. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bnagka Tahun 2018-2022 .....	II-53
2.29. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-54
2.30. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-57
2.31. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-58
2.32. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-58
2.33. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-59
2.34. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bangka Tahun 2018- 2022 .....	II-60
2.35. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Bangka Berdasarkan Riskesdes dan SSGI Tahun 2013, Tahun 2018 dan Tahun 2021.....	II-60
2.36. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGM Tahun 2019-2022.....	II-61
2.37. Progres Capaian dan Target Indikator Program HIV PIMD Tahun 2020-2024 .....	II-62
2.38. Progres Capaian dan Target Indikator TBC Tahun 2020-2024.....	II-63
2.39. Capaian dan Target Indikator Utama TBC Resistan Obat Tahun 2020-2024 .....	II-64
2.40. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-65
2.41. Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-66
2.42. Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-67
2.43. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka 2018-2022.....	II-68
2.44. Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-68
2.45. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-69
2.46. Daftar Sepuluh Penyakit Terbanyak Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-69
2.47. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-70
2.48. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-71
2.49. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-73
2.50. Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-74
2.51. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-75
2.52. Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-76
2.53. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-76
2.54. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-77
2.55. Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-78
2.56. Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-78
2.57. Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-79
2.58. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022 .....	II-80





2.59. Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-81
2.60. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-81
2.61. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-82
2.62. Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-85
2.63. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2022.....	II-86
2.64. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-88
2.65. Perkembangan Rata - Rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-89
2.66. Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-90
2.67. Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-91
2.68. Kontribusi Sektor Transparansi terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-92
2.69. Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-92
2.70. Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-93
2.71. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-95
2.72. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-96
2.73. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-97
2.74. Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-97
2.75. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-98
2.76. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-100
2.77. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Spending of Money Tourism Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-101
2.78. Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-101
2.79. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-103
2.80. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022 .....	II-103
2.81. Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-104
2.82. Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-105
2.83. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-105



2.84. Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-106
2.85. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-107
2.86. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2016-2022 .....	II-108
2.87. Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-114
2.88. Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022 .....	II-116
2.89. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bangka Tahun 2018 -2022 .....	II-116
2.90. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per Kapita di Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022.....	II-117
2.91. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-118
2.92. Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-119
2.93. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-120
2.94. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bangka .....	II-128
2.95. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-129
2.96. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-130
2.97. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-131
2.98. Bidang dan Tujuan Utama <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) dan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2022.....	II-132
2.99. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-136
2.100. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2022 Parawisata.....	II-137
2.101. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-138
2.102. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-139
2.103. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-139
2.104. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	II-140
3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2021 .....	III-2
3.2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 .....	III-3
3.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 (ribuan rupiah) .....	III-4
3.4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2022 (ribuan rupiah).....	III-9
3.5. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-11
3.6. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022.....	III-15
3.7. Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-16



3.8. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-16
3.9. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-17
3.10. Target dan Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-18
3.11. Proporsi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-18
3.12. Surplus/(Defisit) Rill Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	III-20
3.13. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	III-20
3.14. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	III-22
3.15. Proyeksi Keuangan Daerah 2024-2026 .....	III-30
4.1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) .....	IV-32
5.1.1. Matriks Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 .....	V-4
5.1.2. Matriks Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	V-5
5.3. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Kinerja RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.....	V-7
5.4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.....	V-8
6.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah .....	VI-3
6.2. Fokus Strategi Arah Kebijakan 2024-2026 .....	VI-5
6.3. Kerangka Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah 2024-2026 .....	VI-6
6.4. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	V-11
6.5. Tema Fokus Pembangunan .....	V-22
6.6. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	V-24
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	VII-8
7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 .....	VII-10
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	VIII-2
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	VIII-4
8.3. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.....	VIII-9



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka.....	II-2
2.2. Peta Geologi Kabupaten Bangka .....	II-5
2.3. Peta Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Bangka September 2022 .....	II-8
2.4. Peta Distribusi Luasan Pola Ruang Kabupaten Bangka .....	II-10
2.5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2021 .....	II-11
2.6. Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka .....	II-12
2.7. Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka .....	II-13
2.8. Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka.....	II-16
2.9. Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka .....	II-16
2.10. Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka.....	II-17
2.11. Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka .....	II-18
2.12. Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka.....	II-19
2.13. Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka .....	II-21
2.14. Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka.....	II-23
2.15. Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2020 .....	II-24
2.16. Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka .....	II-27
2.17. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bangka.....	II-28
2.18. Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	II-132
4.1. Kerangka Pikir Analisis Isu Strategis .....	IV-30
5.1. Misi Nawcita Kedua pada RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-2
5.2. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-12
5.3. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-13
5.4. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-14
5.5. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-15
5.6. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-16
5.7. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 1 .....	V-17
5.8. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-18
5.9. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-19
5.10. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-20
5.11. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-21
5.12. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-22
5.13. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 2 .....	V-23
5.14. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 3 .....	V-24
5.15. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 3 .....	V-25
5.16. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 3 .....	V-26
5.17. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 3 .....	V-27
5.18. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 3 .....	V-28
5.19. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-29
5.20. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-30
5.21. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-31
5.22. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-32
5.23. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-33
5.24. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-34



5.25. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 4 .....	V-35
5.26. Logical Framework, Pencapaian Tujuan 5 .....	V-36
7.1. Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026 .....	VII-3



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2021 .....	II-25
2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2022 (%).....	II-35
2.3. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-39
2.4. PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-45
2.5. Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-46
2.6. Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-47
2.7. Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-48
2.8. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-51
2.9. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 .....	II-55
2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-56
2.11. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-57
2.12. Capaian SPM Program Aids/HIV per Kecamatan Tahun 2022 .....	II-63
2.13. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022.....	II-72
2.14. Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2017–2022 .....	II-84
2.15. Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	II-85
2.16. Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 .....	II-87
2.17. Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022.....	II-94
2.18. Rata-rata Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) di Kabupaten Bangka .....	II-115
3.1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan Realisasi Pajak Daerah terdapat Target .....	III-5
3.2. Realisasi Pajak Daerah 2018-2022 .....	III-5
3.3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dan Realisasi Pajak Daerah terhadap target .....	III-6
3.4. Realisasi Retribusi Daerah 2018-2022.....	III-7
3.5. Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap PAD dan Realisasi terhadap target.....	III-7
3.6. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dan Realisasi terhadap target .....	III-8
3.7. Kinerja Pendapatan Transfer 2018-2022 .....	III-9
3.8. Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bangka 2018-2022.....	III-12
3.9. Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-13
3.10. Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-14
3.11. Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Bangka 2018-2022 .....	III-14
3.12. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	III-26



3.13. Proyeksi % Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	III-27
3.14. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	III-28
3.15. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	III-29
7.1. Kerangka Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	VII-4
7.2. Kerangka Distribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	VII-5
7.3. Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 .....	VII-6
7.4. Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026.....	VII-7



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada Tahun 2023 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2023. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati hingga dilakukannya pemilihan Kepala Daerah serentak dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sekaligus merupakan penetapan visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Dengan kondisi di atas otomatis sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Tahun 2023 maka telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang didalamnya menyatakan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Tahun 2024, yang merupakan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 sebagai rangkaian proses/tahapan





penyusunan APBD Tahun 2024, diinstruksikan kepada Kepala Daerahnya untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 (untuk daerah yang berakhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2023), yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan menjadi pedoman strategis pembangunan tahunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 hingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa penyusunan RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan penyelerasan target indikator makro program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten sampai dengan 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten tahun 2019-2023, RPJMD Provinsi atau RPD Provinsi tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku. Penentuan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten tahap ke empat dan isu strategis aktual.

Dokumen RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, karenanya penyusunan dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/ tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran *money follow program priority* dengan memperhatikan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial. Begitu juga tetap fokus pada isu strategis pembangunan yang masih menjadi permasalahan pembangunan jangka pendek dan menengah.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan



- Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542)
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  26. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
  28. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  29. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);



30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri e);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);



49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D), sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 Nomor 2 seri C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
54. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

### **I.3 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan antar daerah**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi (RPJMD-Transisi) yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah selama berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah 2019-2023 hingga



dilantiknya kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak kepala daerah pada Tahun 2024. Selain itu RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka dari Tahun 2024 hingga Tahun 2026.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJP Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa RPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi yang menjalankan tugas dan menduduki posisi sebagaimana layaknya RPJMD. Hubungan keterkaitan dan keselarasan dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya lebih jauh adalah sebagaimana penjelasan dibawah ini.

### **I.3.1 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

Sebagaimana arahan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka hubungan antara RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah dalam penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;



3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kemudian dalam upaya pelaksanaan 9 Misi tersebut Presiden Republik Indonesia didalam RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pencapaian yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka didalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan sasaran ekonomi makro yang harus menjadi perhatian dan diselaraskan dalam penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan 5,7% – 6,0% pada Tahun 2024;
2. Angka Inflasi menurun menjadi 2,7% pada Tahun 2024;
3. Tingkat Kemiskinan menurun menjadi 6,0% – 7,0% pada Tahun 2024;
4. Angka Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,6% - 4,3% pada Tahun 2024;
5. Rasio Gini berada pada angka 0,360 – 0,374 pada Tahun 2024;
6. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,54 pada Tahun 2024;
7. Penurunana Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada angka 27,3% pada Tahun 2024.

Selain target indikator makro pembangunan sebagaimana hal tersebut diatas terdapat program prioritas nasional yang harus menjadi perhatian dan diselaraskan dalam menyusun RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Program Prioritas Nasional dan Target Indikator**  
**RPJMN Tahun 2020-2024**

7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas	Pemenuhan kebutuhan energi Dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam bauran energi Nasional* (persen)	19,5
		Indeks ketahanan energi (indeks)	70,3
	Peningkatan kuantitas/ ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (us\$/m <sup>3</sup> )	5,4
	Peningkatan ketersediaan, akses dan Kualitas konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan	95,2
		Angka kecukupan energi (ake) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0
		Angka kecukupan protein (akp) (gram/ kapita/hari)	57,0
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi Pangan (prevelence of undernourishment/Pou)	5,0
		Prevalensi penduduk dengan Kerawanan pangan sedang atau berat (food insecurity experience Scale/fies)	4,0
	Peningkatan pengelolaan Kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (juta ha)	26,9
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang Berada dalam batasan biologis yang Aman (14.4.1*) (%) (persen)	≤ 80
	Penguatan kewirausahaan, usaha Mikro, kecil menengah (umkm), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (persen)	4,0
		Kontribusi umkm terhadap pdb (persen )	65%
		Kontribusi koperasi terhadap pdb (persen )	5,5
	Peningkatan nilai tambah, lapangan Kerja, dan investasi di sektor riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan pdb pertanian (persen)	4,1
		Kontribusi pdb kemaritiman (persen)	7,8
		Pertumbuhan pdb industri Pengolahan (9.2.1(a)) (persen)	8,1
		Kontribusi pdb pariwisata	5,5



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
		(8.9.1*) (persen)	
		Nilai tambah ekonomi kreatif (rp triliun)	1.689
		Pertumbuhan investasi (pmtb) (persen)	8,4
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,7-3,0
		Laju pertumbuhan pdb per tenaga kerja (8.2.1*) (persen)	3,5-4,5
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (persen)	15,7
		Jumlah tenaga kerja industri (juta orang)	22,0
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	15,0
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	21,0
	Peningkatan ekspor bernilai tambah Tinggi dan penguatan tingkat kandungan Dalam negeri (tkdn)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (persen)	6,2
		Neraca perdagangan barang (usd Miliar)	15,0
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (usd Miliar) (usd miliar)	30,0
	Penguatan pilar pertumbuhan dan Daya saing ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/pdb (persen)	4,4
		Biaya logistik terhadap pdb (persen)	18,0
		Peringkat travel and tourism Competitiveness index (tci) (peringkat)	Na
	-	-	-
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perlindungan sosial dan tata Kelola kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup Dalam program jaminan sosial (%)	98
		Angka kelahiran total (total fertility Rate/tfr)	2,1
		Proporsi rumah tangga miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan Sosial pemerintah (%)	80
	Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup Dalam program jaminan sosial	98
		Proporsi rumah tangga miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan	80



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
	Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan	Sosial pemerintah	
		Angka kematian ibu (aki) (per 100.000 kelahiran hidup)	183
		Angka kematian bayi (akb) (per 1000 kelahiran hidup)	16
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	10
		Angka prevalensi kontrasepsi Modern/modern contraceptive Prevelance rate (mcpr)	63,4
		Persentase kebutuhan ber-kb yang Tidak terpenuhi (unmet need)	7,4
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun/ age specific fertility rate (asfr 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	18
		Prevalensi stunting (pendek dan Sangat pendek) pada balita (persen)	14
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat Kurus) pada balita (persen)	7
		Insidensi hiv (per 1.000 penduduk Yang tidak terinfeksi hiv)	0,18
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	190
		Jumlah kabupaten/kota yang Mencapai eliminasi malaria	405
		Insidensi hepatitis b (persen)	1,09
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,7
		Prevalensi obesitas pada penduduk Usia > 18 tahun (persen)	21,8
		Persentase tekanan darah	34,1



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
		tinggi	
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat Pertama terakreditasi	100
		Persentase rumah sakit terakreditasi	100
	Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil pisa: A. Membaca B. Matematika C. Sains	399,7 392,3 406,2
		Proporsi anak di atas batas Kompetensi minimal dalam test pisa (persen): A. Membaca B. Matematika C. Sains	35,6 47,4 51
		Rata-rata lama sekolah penduduk Usia 15 tahun keatas (tahun)	9,16
		Harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas(tahun)	14,16
	Peningkatan kualitas anak, Perempuan dan pemuda	Indeks perlindungan anak (ipa)	73,49
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun Yang pernah mengalami kekerasan Sepanjang hidupnya (%)	Menurun
		Indeks pembangunan gender (ipg)	91,386
		Indeks pemberdayaan gender (idg)	74,177
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) perempuan	55
		Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan usia 15-64 tahun di 12 Bulan terakhir	Menurun
		Indeks pembangunan pemuda (ipp)	57,67
	Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan Rentan yang memiliki asset produktif	40



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
		(layanan keuangan, modal, lahan, Pelatihan)	
		Persentase rumah tangga miskin dan Rentan yang mengakses pendanaan Usaha	50
		Luas kawasan hutan yang dikelola Oleh masyarakat dan dilepaskan Untuk tora (ha)	1.100.000
		Bidang tanah yang didistribusi	7.750.000
		Bidang tanah yang dilegalisasi	56.286.087
	Peningkatan produktivitas Dan daya saing	Persentase angkatan kerja Berpendidikan menengah ke atas	52,1
		Jumlah pt yang masuk ke dalam World class university	
		A. Top 200	1
		B. Top 300	2
		C. Top 500	3
		Proporsi pekerja berkeahlian Menengah dan tinggi (%)	50
Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan Pembinaan ideologi pancasila Untuk memperkuat ketahanan Budaya bangsa dan membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern, dan berkarakter	-	-
	Meningkatkan pemajuan dan Pelestarian kebudayaan untuk Memperkuat karakter dan Memperteguh jati diri bangsa, Meningkatkan kesejahteraan Rakyat, dan mempengaruhi arah Perkembangan peradaban dunia	-	-
	Memperkuat moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, kerukunan dan Harmoni sosial	Indeks kerukunan umat beragama	Na



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
	Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan kreativitas bagi Terwujudnya masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	-	-
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan kecukupan Luas lantai per kapita (%)	95
		Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan ketahanan Bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	87
		Persentase rumah tangga yang Memiliki sertifikat hak atas tanah Untuk perumahan (%)	60
		Rasio outstanding kpr terhadap pdb (%)	4,00
		Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	90% akses Layak (termasuk 15% akses Aman)
		Persentase rumah tangga yang masih Mempraktikkan buang air besar Sembarangan (%)	0
		Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan akses Sampah yang terkelola dengan baik (%)	80% Penanganan; 20% Pengurangan
		Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan akses air Minum layak (%)	100% (jp: 30.4%, Bjp: 69.5%)
		Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan akses air Minum aman (%)	15
		Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	58,498
Jumlah daerah irigasi yang	1		





7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR	
		Dimodernisasi		
		Luas lahan pertanian padi dan nonpadi Yang beririgasi meningkat (hektare)	116342,708	
		Provinsi dengan penurunan risiko Bencana di wilayah risiko bencana	20	
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan Air minum, industri, dan kawasan Unggulan (m3/detik)	11,4325	
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi Dasar 2010) (persen)	65	
	Infrastruktur ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi Dalam 5 tahun (2.500 km)	-	
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang Memenuhi standar (7 pelabuhan)	-	
		Kinerja tepat waktu (on time Performance) penerbangan (90%)	-	
			Panjang jaringan ka yang beroperasi (7.635 km's)	-
		Infrastruktur perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum Masal perkotaan yang dibangun dan Dikembangkan (kota)	-
Energi dan ketenagalistrikan		Rasio elektrifikasi (%)	100	
		Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) Listrik (kwh)	1408	
		Penurunan emisi co2 pembangkit (juta ton)	6,07	
Transformasi digital		Persentase pertumbuhan sektor tik (rata-rata)	8,8	
		Persentase pengguna internet (persentase)	82,3	
		Persentase populasi yang dijangkau Oleh jaringan bergerak pitalebar (4g)	100	



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR	
		Existing q2 2019 : 97,59%		
		Proporsi individu yang Menguasai/memiliki telepon genggam (persentase)	75,7	
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup	Indeks kualitas udara (iku)	84,5	
		Indeks kualitas air (ika)	55,5	
		Indeks kualitas air laut (ikal)	60,5	
		Indeks kualitas tutupan lahan dan Ekosistem gambut (iktl)	65,5	
	Peningkatan ketahanan Bencana dan iklim	Persentase potensi kehilangan pdb Akibat dampak bencana (persen)	0,10	
		Persentase penurunan potensi Kehilangan pdb sektor terdampak Bahaya iklim (persen)	1,15	
		Kecepatan penyampaian informasi Peringatan dini bencana kepada Masyarakat (menit)	3,0	
	Pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi grk Terhadap baseline pada sektor energi (persen)	13,2	
			Persentase penurunan emisi grk Terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	58,3
			Persentase penurunan emisi grk Terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9,4
		Persentase penurunan emisi grk Terhadap baseline pada sektor ippu (persen)	2,9	
		Persentase penurunan emisi grk Terhadap baseline pada sektor pesisir Dan kelautan (persen)	7,3	
Memperkuat stabilitas	Konsolidasi demokrasi 17	-	-	



7 AGENDA PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS (PP) NASIONAL	INDIKATOR PP	TARGET INDIKATOR
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Optimalisasi kebijakan luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia Di dunia internasional	95,67
	Penegakan hukum nasional	Indeks pembangunan hukum	0,73
	Reformasi birokrasi dan tata Kelola	Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/ lembaga) dengan Indeks rb baik keatas*	85
		Persentase instansi pemerintah Daerah (provinsi) dengan indeks rb Baik keatas*	85
		Persentase instansi pemerintah Daerah (kabupaten/kota) dengan Indeks rb baik keatas*	70
	Menjaga stabilitas keamanan Nasional	Global fire power index	0,20
		Global terrorism index	4,24
		Proporsi orang yang merasa aman Berjalan sendiri	>60%
		Indeks keamanan dan ketertiban Nasional	3,4

Sumber: RPJMN Tahun 202-2024

Namun tidak semua program prioritas nasional ini bisa diintervensi atau didukung secara langsung melalui pelaksanaan program daerah Kabupaten Bangka karena dibatasi oleh kewenangan sebagaimana yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan terhadap program prioritas nasional di Kabupaten Bangka yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten akan didukung secara tidak langsung saja.

### I.3.2 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025

Terkait hubungan antara RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, sebagaimana arahan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan



Daerah Otonomi Baru menyatakan bahwa keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah pada keselarasan tujuan dan sasarannya, dimana penentuan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 tahap keempat.

Didalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 ditetapkan Visi Kabupaten Bangka adalah “Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera”. Dalam upaya pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 6 Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*)

Selain Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005-2025 yang akan menjadi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, yang juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 Tahap Keempat.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 Tahap Pembangunan Lima Tahun Keempat (Tahun 2021-2025) maka Sasaran Pokok dan Arah Kebijakannya adalah:

1. Melaksanakan transformasi ekonomi menuju pembangunan industri klaster yang mendukung strategi pengembangan industri nasional dan perdagangan berdasarkan konsep agropolitan serta pariwisata yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai motor pertumbuhan (*engine of growth*),

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan akan mendorong terjadinya transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.
3. Arah kebijakan pembangunan kesehatan, pendidikan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender tetap menjadi prioritas pada pembangunan tahap ke empat RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.
4. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang tertinggal sebagai dampak negatif dari pembangunan akan dijadikan prioritas pembangunan pada pembangunan lima tahunan keempat ini untuk memastikan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Bangka.
5. Pemberdayaan masyarakat dan desa tertinggal akan menjadi prioritas dalam upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 prioritas pembangunan Kabupaten Bangka pada tahap keempat ( Tahun 2021-2025) adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial
2. Ekonomi
3. Pengembangan SDM
4. Pemerintahan
5. Sarana dan Prasarana
6. Lingkungan Hidup

### **I.3.3 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Tahun 2019-2023**

Keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah dalam penetapan sasaran dan prioritas pembangunan dimana penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 harus memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023. Hasil evaluasi capaian indikator pembangunan yang masih memiliki gap yang tinggi terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Bangka Tahun 2019-2023 menjadi isu/permasalahan yang harus diselesaikan dan dituntaskan target dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Berdasarkan RPJMD tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan alat ukur keberhasilan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ini akan menjadi acuan penetapan target indikator kinerja utama dalam RPD kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Untuk melihat capaian kinerja utama RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.2**  
**Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Sasaran Prioritas**  
**RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS	RASIO CAPAIAN AKHIR (%) (2022)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN	75,11	T
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN	100,00	ST
3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100,00	ST
4	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	102,78	ST
5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS	82,41	T
6	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL	88,82	T
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KETENAGAKERJAAN	86,24	T
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	90,28	ST



NO	PROGRAM PRIORITAS	RASIO CAPAIAN AKHIR (%) (2022)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
9	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN	101,47	ST
10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PERTANAHAN	68,18	S
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	90,11	ST
12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98,04	ST
13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	88,23	T
14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	93,55	ST
15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN	96,46	ST
16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99,64	ST
17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	79,13	T
18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL	99,80	ST
19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	90,32	ST
20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG STATISTIK	100,00	ST
21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PERSANDIAN	100,00	ST
22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEBUDAYAAN	99,06	ST
23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PERPUSTAKAAN	100,00	ST
24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN	98,79	ST
25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	92,81	ST
26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA	100,31	ST
27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	80,72	T
28	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN	84,56	T
29	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	74,96	S
30	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	97,52	ST
31	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	99,77	ST
32	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	80,00	T
33	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	99,31	ST



NO	PROGRAM PRIORITAS	RASIO CAPAIAN AKHIR (%) (2022)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
34	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	100,50	ST
35	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	98,69	ST
36	UNSUR PENDUKUNG URUSAN (SEKRETARIAT DAERAH)	91,11	ST
37	UNSUR PENDUKUNG URUSAN (SEKRETARIAT DPRD)	92,86	ST
38-1	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN SUNGAILIAT)	98,00	ST
38-2	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PEMALI)	96,87	ST
38-3	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN MERAWANG)	86,86	T
38-4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PUDING BESAR)	84,31	T
38-5	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN BAKAM)	99,88	ST
38-6	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN MENDO BARAT)	100,00	ST
38-7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN RIAU SILIP)	96,12	ST
38-8	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN BELINYU)	99,93	ST
39	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	95,20	ST
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Urusan Kabupaten Bangka (%)		93,02	ST

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023

#### **1.3.4 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

Keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah pada penyelarasan tema, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, ditetapkan 6 tujuan Pembangunan tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat





6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Selain itu RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 menetapkan juga tema prioritas pembangunan daerah per tahun selama periode Tahun 2023-2026 sebagai berikut:



1. Tahun 2023, Tema Proritas Pembangunan “Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan
2. Tahun 2024, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024
3. Tahun 2025, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025
4. Tahun 2026, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026

RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 juga menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

### **I.3.5 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030**

Penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga memperhatikan RTRW Kabupaten Bangka yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2010-2030. Hal-hal yang menjadi perhatian dan dipedomani dalam RTRW dalam penyusunan RPD adalah dalam kebijakan dan strategi pembangunan di wilayah-wilayah strategis Kabupaten Bangka. Penetapan lokus pembangunan di wilayah-wilayah strategis Kabupaten Bangka mengacu pada penetapan wilayah strategis Kabupaten Bangka yang telah



ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030. Begitu juga perencanaan pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan penetapan wilayah perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.

Penataan Ruang Kabupaten Bangka bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan penataan ruang, maka beberapa kebijakan RTRW Kabupaten Bangka 2010- 2030 yang menjadi perhatian dan dipedomani dalam penyusunan RPD kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bangka yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 adalah :
  - a) peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
  - b) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
  - c) perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat;
  - d) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
2. Strategi penataan ruang Kabupaten Bangka yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 adalah :



- a) Untuk peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, dilaksanakan dengan strategi:
- menjaga keterkaitan antara PKL dan PKLp Kabupaten dengan PKW, ibukota kecamatan, kelurahan/perdesaan;
  - mengembangkan dan mendorong pertumbuhan PKL, PKLp dan pusat pertumbuhan kecamatan
  - mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan
- b) Untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian, dilaksanakan dengan strategi:
- Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten;
  - menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
  - meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
  - mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun di pantai;
  - mendorong kegiatan industri dan perdagangan;
  - melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan strategis provinsi
- c) Untuk perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi:
- mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
  - mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya
  - mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - menjaga keterpaduan dan keharmonisan pemanfaatan ruang;



- mengembangkan kegiatan budidaya sektor - sektor unggulan;
  - mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek social budaya serta ilmupengetahuan dan teknologi;
  - mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
  - mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - menyeimbangkan ketersediaan ruang untuk kepentingan investasi masyarakat dan swasta;
  - meningkatkan fungsi kawasan guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
  - mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang berskala luas
- d) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai kapasitas, daya dukung, dan fungsi lingkungan;
  - mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan dan non pangan yang berwawasan lingkungan;
  - mengembangkan kawasan yang berfungsi lindung;
  - mencegah dampak negatif kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
3. Penetapan fungsi pusat–pusat pelayanan, dimana berdasarkan hierarkinya rencana sistem kota-kota di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kota Sungailiat dan Belinyu
  - b. Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi (PKLp) adalah kecamatan Puding Besar
  - c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah Desa Petaling , Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Batu Rusa.
4. Penetapan wilayah pengembangan menjadi 3 wilayah sebagai berikut:



- a) Wilayah Pengembangan I dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Sungailiat
  - b) Wilayah Pengembangan II dengan pusat pengembangan di Kecamatan Belinyu.
  - c) Wilayah Pengembangan III dengan pusat pengembangan di Kecamatan Puding Besar
5. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten
- a) Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis ini terletak di Kecamatan Sungailiat yaitu Kawasan Industri Jelitik Sungailiat, Kecamatan Belinyu yaitu Kawasan Industri Terpadu Teluk Kelabat, dan Kecamatan Merawang yaitu Kawasan Industri Muara Sungai Batu Rusa,
  - b) Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis ini berada di wilayah *hinterland* Kota Pangkalpinang, Kota Baru Air Anyir, Situs Kota Kapur dan wilayah sekitar Kampus UBB (Universitas Bangka Belitung) Balun Ijuk. kawasan ini difungsikan sebagai kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman seni budaya. Kota Baru Air Anyir terus di dorong perkembangannya untuk wilayah permukiman perkotaan baru yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang dan memiliki akses sangat baik dimana dilalui oleh jalan lingkar timur yang langsung menuju Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Kawasan strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata budaya dan pendidikan
  - c) Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis ini berada di Kawasan Hutan Konservasi Gunung Maras yang berada diantara Kecamatan Bakam dan Kecamatan Riau Silip. kawasan ini dilindungi dan difungsikan sebagai kawasan konservasi tempat perlindungan keanekaragaman hayati yang memberikan perlindungan ekosistem, flora dan fauna. Kawasan Hutan Konservasi Gunung Maras merupakan kawasan yang terus di dorong perkembangannya, mengingat

kawasan ini memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan lingkungan hidup kawasan di Kabupaten Bangka.

d) Kawasan Strategis Kepentingan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan strategis ini berada di Kecamatan Mendo Barat. Kecamatan Mendo Barat sebagai sentra pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi kawasan agropolitan. Pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dipusatkan di kecamatan ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kawasan strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan agrowisata tanpa mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi utamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **I.3.6 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD**

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan keselarasan sasaran yang diukur melalui indikator-indikator SPM untuk urusan-urusan tertentu berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbagai dokumen lainnya.

Untuk mewujudkan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dalam upaya mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka SDGs/TPB atau menjadi bagian yang diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan Kabupaten Bangka. Penyusunan rencana pembangunan harus menerapkan pengarusutamaan SDGs/TPB sebagai upaya yang dilakukan untuk menjamin pembangunan dilaksanakan dengan memperhitungkan kondisi lingkungan dan berkelanjutan. Di dalam SDGs/TPB telah mempertimbangkan semua aspek/dimensi dan merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya.



Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*no one left behind*" atau "tidak ada seorangpun yang tertinggal". Keselarasan antara perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dengan SDGs/TPB melalui integrasi berbagai indikator SDGs/TPB menjadi indikator dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, sehingga pengukuran capaian dapat dilakukan secara kontinyu begitu juga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan di Kabupaten Bangka.

### **I.3.7 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Penganggaran Daerah**

Sebagaimana arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menyatakan bahwa RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka hubungan keterkaitan antara dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Penganggaran Daerah terjadi secara tidak langsung. Dokumen RPD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang menjadi pedoman penyusunan dokumen penganggaran. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui integrasi kebijakan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam Bab III RKPD kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara didalam dokumen Rencana Penganggaran Daerah Kabupaten Bangka yang selanjutnya akan menjadi Rancangan APBD.

### **I.3.8 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan antar Daerah**

Dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 kebijakan pembangunan daerah sekitar yang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Bangla menjadi sangat penting untuk diselaraskan. Hal ini untuk mengantisipasi pertentangan pembangunan yang akan mengakibatkan



perbedaan dan mengganggu keharmonisan hubungan kerja antar daerah dan akan menghambat proses pembangunan.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan tersebut dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan tata ruang wilayah daerah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mendobarat, Puding Besar, Merawang sebagai daerah *hinterland* dan Kecamatan Belinyu.

## **I.4 Maksud dan Tujuan**

### **I.4.1 Maksud**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

- 1) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk jangka waktu Tahun 2024-2026.
- 2) Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 hingga dilantiknya Kepala Daerah terpilih;
- 3) Memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan selama periode Tahun 2024-2026;
- 4) Menjaga konsistensi antara perencanaan dan keterpaduan perencanaan nasional, provinsi dan daerah Kabupaten.

### **I.4.2 Tujuan**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan tujuan:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangka periode Tahun 2024-2026;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan sebagai dasar lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode Tahun 2024-2026;
- 3) Menjadi Instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bangka periode Tahun 2024-2026;

- 4) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka periode Tahun 2024-2026.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Gambaran umum kondisi daerah yang menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

### **BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Menguraikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka dari tahun 2019-2021 yang meliputi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca Daerah dan Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah.

### **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka dan isu-isu strategis saat ini yang akan mempengaruhi penetapan prioritas dalam perencanaan pembangunan kedepan. Merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk

diselesaikan, serta isu-isu strategis lainnya yang berkembang secara Nasional dan International.

**BAB V : TUJUAN, DAN SASARAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

**BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bagian ini diuraikan strategi pembangunan daerah yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat analisis keuangan daerah, kerangka pendanaan, dan indikasi rencana program perangkat daerah yang tertuang dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

**BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

**BAB IX : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1 Kondisi Geografi Daerah**

###### **2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Administrasi**

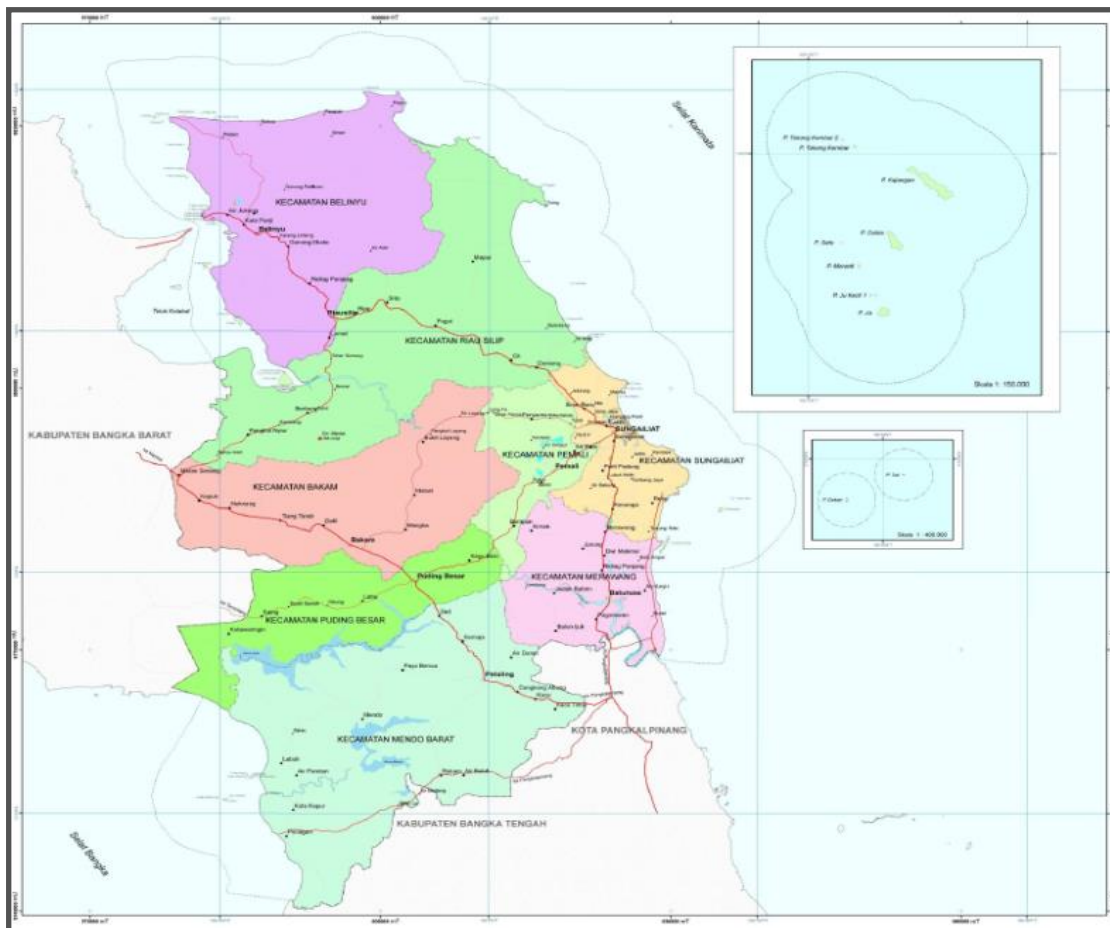
Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka, pada posisi antara 105<sup>0</sup>38'-106<sup>0</sup>18' Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>3'-2<sup>0</sup>21' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terbagi atas dua kategori daerah, yaitu

- a. Daerah Pantai, yang meliputi wilayah Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; dan
- b. Daerah Dataran Rendah, yang meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo Barat, wilayah Kecamatan Pemali, wilayah Kecamatan Puding Besar, dan wilayah Kecamatan Bakam

Luas Kabupaten Bangka kurang lebih sebesar 3.028,79km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Secara administrasi, Kabupaten Bangka terdiri dari delapan kecamatan, enam puluh dua desa dan sembilan belas kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Sungailiat	147,05	12	1
2	Bakam	426,26	-	9
3	Pemali	140,46	-	6

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
4	Merawang	215,89	-	10
5	Puding Besar	272,10	-	7
6	Mendo Barat	685,64	-	15
7	Belinyu	515,48	7	5
8	Riau Silip	625,91	-	9
	<b>Jumlah</b>	<b>3.028,79</b>	<b>19</b>	<b>62</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

### 2.1.1.2 Kondisi Topografi, Geologi, dan Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bangka pada umumnya memiliki topografi yang relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit. Tanah di Kabupaten Bangka mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti pasir kwarsa, kaolin, batu gunung, dan lain - lain. Gambaran topografi Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 4% berbukit seperti dengan Gunung Maras sebagai puncak tertinggi dengan ketinggian lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol yang berasal dari Batuan Plutonik Masam;
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam;
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit;
- 25% rawa dan bench/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Gleis Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

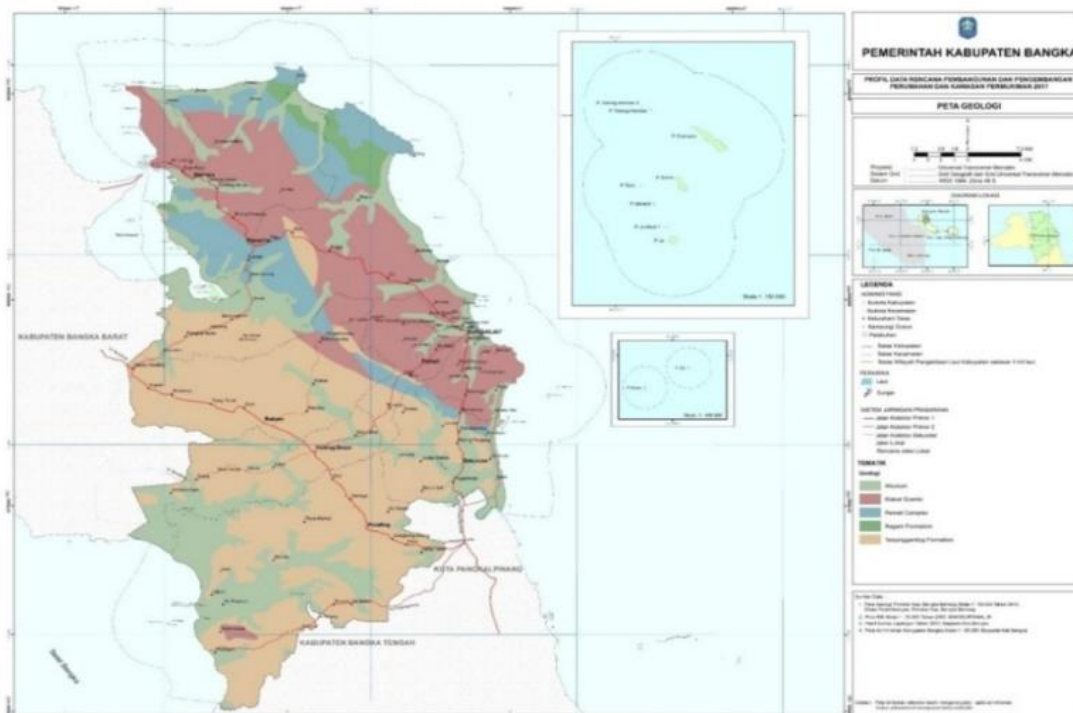


Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam *Sundaland* dan merupakan bagian terangkat dari Peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari Granite Belt yang berumur Yura-Kapur yang membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malaysia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. *Granite Belt* sendiri merupakan deretan formasi batuan granite kaya akan mineral *cassiterite* yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Tin Belt*.

Pulau-pulau dari *The Tin Belt* diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya *Sunda Shelf*. Pupili (1973) menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak *Paleozoikum* Bawah dimana berdasarkan Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah penunjaman (*subduction zone*) berada di bagian timur Malaysia dan pada *Mesozoikum* Bawah-Tengah menghasilkan busur gunung api (*magmatic arc*) dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat.

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan, pengayaan (*leaching*), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (*craton*) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.

**Gambar 2.2**  
**Peta Geologi Kabupaten Bangka**



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Pada umumnya, sungai – sungai di Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai – sungai besar yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah Sungai Baturusa, Sungai Layang, Sungai Jeruk. Secara detail, Kabupaten Bangka memiliki 35 (tiga puluh lima) aliran sungai, dengan Sungai Baturusa sebagai sungai terpanjang dengan panjang mencapai 31.250 m dan terletak di Kecamatan Merawang.

**Tabel 2.2**  
**Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan**

Kecamatan		Nama Sungai	Panjang (m)	Fungsi
1.	Sungailiat	S. Jelitik	3.000	Transportasi Nelayan
2.	Bakam	S. Telang	5.000	Irigasi
		S. Mabat	15.000	Irigasi
		S. Layang	32.500	-
3.	Merawang	S. Baturusa	31.250	Irigasi





Kecamatan		Nama Sungai	Panjang (m)	Fungsi
4.	Puding Besar	S. Perai	10.000	Irigasi dan Transportasi Nelayan
		S. Kotawaringin	20.000	Irigasi dan Transportasi Nelayan
		S. Kayu Besi	500	Irigasi, Perkebunan dan Pertanian
		S. Jeruk	15.000	Irigasi
		S. Lubang	6.000	Irigasi
5.	Mendo Barat	S. Mendo	28.500	Irigasi dan Transportasi Nelayan
		S. Rukam	20.000	Irigasi
		S. Air Pandan	20.000	Irigasi dan Transportasi Nelayan
		S. Sembilang	2.000	Irigasi
		S. Penagan	2.500	Irigasi dan Transportasi Nelayan
		S. Penjirang	5.000	Irigasi
		S. Kelabingil	3.000	Irigasi
6.	Belinyu	S. Panji Belinyu	10.000	Drainase
		S. Pasir	5.000	Drainase
		S. Pejem	4.500	Transportasi Nelayan
		S. Tengkalak	2.000	Transportasi Nelayan
		S. Bayat	9.000	Drainase
		S. Kerang	8.000	Transportasi Nelayan
		S. Jelutung	12.000	Drainase
		S. Belinyu	6.000	Drainase
		S. Berok	6.000	Transportasi Nelayan
		S. Romodong	3.000	Transportasi Nelayan
		S. Bubus	4.000	Transportasi Nelayan

Kecamatan		Nama Sungai	Panjang (m)	Fungsi
		S. Sembuang	5.000	Transportasi Nelayan
		S. Sekak	5.000	Transportasi Nelayan
7.	Riau Silip	S. Tengkalak Riau Silip	50.000	Transportasi Nelayan
		S. Bedukang	900	Transportasi Nelayan
		S. Deniang Laut	1.300	Transportasi Nelayan
		S. Mapur	21.250	Transportasi Nelayan
		S. Semubur	3.000	Irigasi
		S. Perimping	2.750	Transportasi Nelayan
8.	Pemali	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023, data diolah

### 2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bangka memiliki iklim tropis tipe A yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan pengamatan unsur iklim oleh Stasiun Meteorologi Depati Amir pada tahun 2021 (BPS, 2022), suhu rata – rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 26,1°C – 27,8°C. Suhu terendah adalah 20,8°C pada bulan November sedangkan suhu tertinggi adalah 35°C pada bulan April. Kelembaban udara di Kabupaten Bangka berkisar antara 83,6% - 92,4%, dengan kelembaban udara terendah 39% pada bulan April dan kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juli, September – Desember.

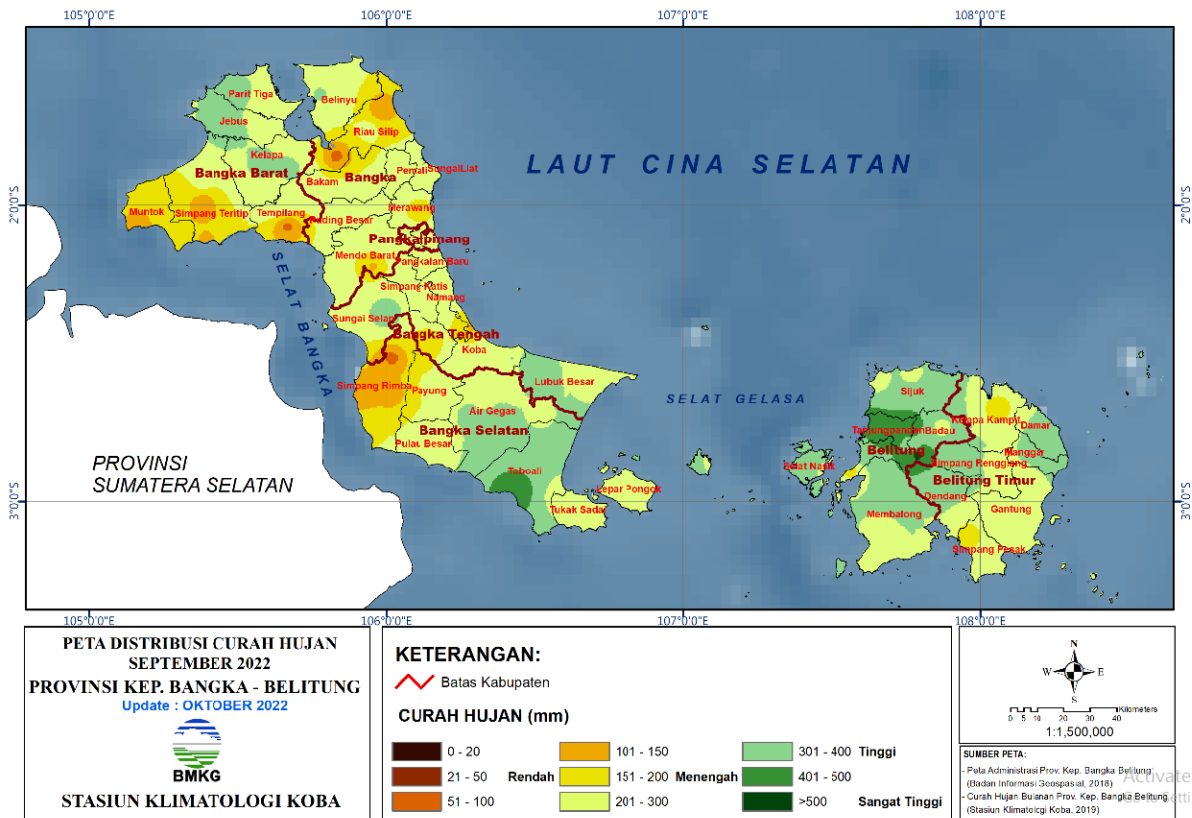
Sementara itu, kecepatan udara rata – rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 3,1 m/dtk hingga 5,8 m/dtk, dengan kecepatan angin maksimum 20 m/dtk. Tekanan udara rata – rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 1004,5 – 1006,4 mbar, dengan tekanan udara minimum sebesar 999,5 mbar dan tekanan udara maksimum sebesar 1011,2 mbar. Curah hujan di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 berkisar antara 39,3 mm pada bulan Februari hingga 530 mm pada bulan November.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Bangka tahun 2022 dapat dilihat pada peta di bawah ini. Secara umum, tidak ada perbedaan distribusi curah hujan di wilayah Kabupaten Bangka dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**Gambar 2.3**

**Peta Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Bangka September 2022**



Sumber: Stasiun Klimatologi Kelas IV Bangka Tengah, 2022

### 2.1.1.4 Kondisi Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Berdasarkan data tutupan lahan Kabupaten Bangka, kawasan pertanian berkontribusi sebesar 20.918,99 Ha untuk pertanian lahan kering dan 140.753,7 Ha untuk pertanian lahan kering campur sari. Kawasan perkebunan berkontribusi sebesar 49.358 Ha, dan kawasan pertambangan berkontribusi sebesar 25.665,31 Ha. Distribusi tutupan lahan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Penutup Lahan	Luas (Ha)
1	Belukar	19.611,120
2	Belukar Rawa	7.655,890
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.511,000
4	Hutan Mangrove Primer	4.037,120

No	Penutup Lahan	Luas (Ha)
5	Hutan Mangrove Sekunder	5.856,120
6	Hutan Rawa Primer	277,394
7	Hutan Rawa Sekunder	9.097,980
8	Lahan Terbuka	779,889
9	Perkebunan	49.358,000
10	Permukiman	8.383,410
11	Pertambangan	25.665,310
12	Pertanian Lahan Kering	20.918,990
13	Pertanian Lahan Kering Campur Sari	140.753,700
14	Rawa	1.397,690
15	Savana	478,782
16	Sawah	1.123,540
17	Tambah	516,271
18	Tubuh Air	1.448,050

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Secara perencanaan tata ruang, penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi berbagai kawasan. Seluas 158.881 Ha atau 52,62% merupakan peruntukan kawasan perkebunan. Kawasan permukiman terdistribusi seluas 13.761 Ha atau sebesar 4,56%. Kawasan pariwisata terdistribusi seluas 1.036 Ha atau 0,34%. Distribusi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Distribusi Luasan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022**

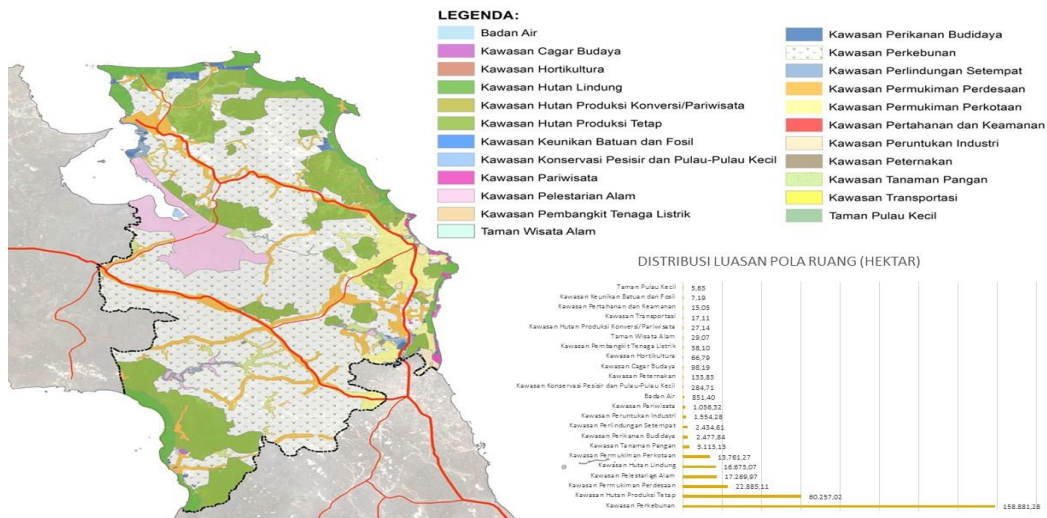
NO	KAWASAN	LUAS (HA)	%
1	Kawasan Hutan Produksi	70,105.04	23.21
2	Kawasan Hutan Rakyat	13,894.97	4.60
3	Kawasan Pertanian	15,220.87	5.04
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	10,346.93	3.43
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	4,873.94	1.61
4	Kawasan Perkebunan	98,662.13	32.66
	Kawasan Usaha Perkebunan	56,297.17	18.64
	Kawasan Perkebunan Rakyat	42,364.96	14.02
5	Kawasan Peternakan	700.00	0.23
6	Kawasan Perikanan	3,309.54	1.10
7	Kawasan Pertambangan	28,441.33	9.42

NO	KAWASAN	LUAS (HA)	%
8	Kawasan Pertambangan Rakyat	4,125.00	1.37
9	Kawasan Industri	983.13	0.33
10	Kawasan Pariwisata	948.23	0.31
11	Kawasan Pemukiman Kota	9,680.43	3.20
12	Kawasan Pemukiman Pedesaan	19,906.87	6.59
13	Kawasan Peruntukan Lainnya	681.49	0.23
	<b>TOTAL</b>	<b>266,659.03</b>	<b>88,28%</b>

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bangka, 2023 (data diolah)

Gambar 2.4

Peta Distribusi Luasan Pola Ruang Kabupaten Bangka



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Tabel 2.5

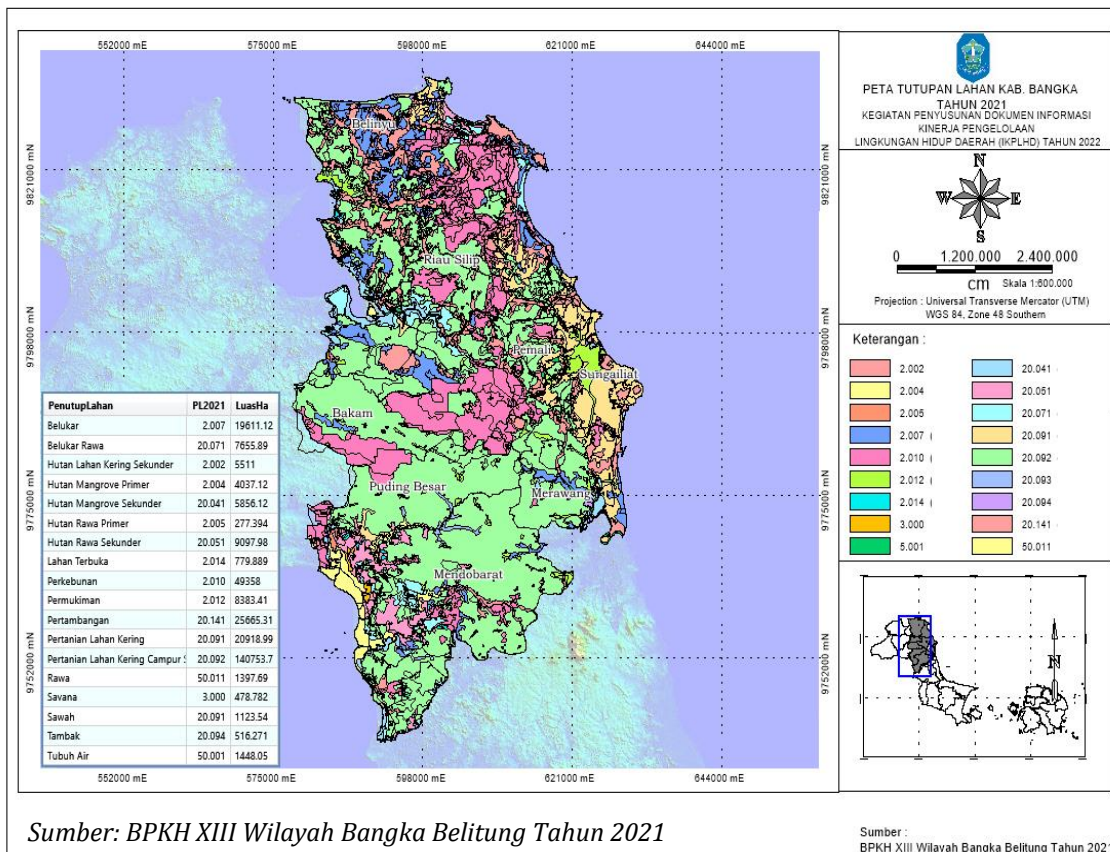
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	(%)
1	Kawasan Hutan Lindung	16.897,95	5,68
2	Kawasan Perlindungan Setempat	2.162,39	0,73
	Kawasan Sempadan Pantai	963,43	0,32
	Kawasan Sempadan Sungai	1.062,64	0,36
	Kawasan Sempadan Danau/Kolong	136,32	0,05
3	Kawasan Hutan Konservasi	15.619,51	5,25
4	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	600,00	0,20

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	(%)
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	130,12	0,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.409,97</b>	<b>11,72</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

**Gambar 2.5**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2021**



Sumber: BPKH XIII Wilayah Bangka Belitung Tahun 2021

Sumber: BPKH XIII Wilayah Bangka Belitung Tahun 2021

## 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

### 2.1.2.1 Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat. Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi

perkebunan skala besar/średang/kecil adalah komoditas seperti kelapa sawit dan singkong. Sedangkan komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perkebunan rakyat adalah komoditas seperti lada, karet, dan singkong. Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi Perkebunan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada peta berikut ini.

**Gambar 2.6**  
**Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

**Gambar 2.7**  
**Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Wilayah sentra produksi tanaman perkebunan tersebar pada beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Bangka sesuai komoditi unggulan. Wilayah sentra produksi komoditi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Sentra Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka**

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Lada	Bakam, Puding Besar, Mendo Barat
2	Karet	Mendo Barat, Puding Besar, Riau Silip, Merawang, Bakam, Pemali
3	Ubi Kayu	Riau Silip, Belinyu, Puding Besar, Bakam, Mendo Barat
4	Kelapa Sawit	Puding Besar, Mendo Barat, Bakam, Riau Silip, Belinyu, Merawang
5	Kelapa	Sungailiat, Pemali, Riau Silip





No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
6	Kakao	Riau Silip, Belinyu, Sungailiat, Pemali, Puding Besar

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2023

Luas panen dan produksi komoditi tanaman perkebunan Kabupaten Bangka kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Luas panen komoditi lada tahun 2020 seluas 2.190,84 ha menurun dibanding tahun 2019 seluas 4.138,95 ha. Demikian juga produksinya, tahun 2020 sebesar 3.121,50 ton menurun dibanding tahun 2019 sebesar 4.479,21 ton. Luas panen komoditi lada tahun 2022 seluas 1.473,49 ha menurun dibanding tahun 2021 seluas 4.673,94 ha. Demikian juga produksinya, tahun 2022 sebesar 2.896,87 ton menurun dibanding tahun 2021 sebesar 3.510,15 ton. Sementara luas panen komoditi karet tahun 2020 sebesar 16.889,40 ha menurun dibanding tahun 2019 sebesar 17.075,17 ha. Sama juga dengan produksinya, tahun 2020 sebesar 50.236,11 ton menurun dibanding tahun 2019 sebesar 51.304,93 ton. Luas panen komoditi karet tahun 2022 sebesar 14.671,64 ha menurun dibanding tahun 2021 sebesar 20.385,62 ha. Sama juga dengan produksinya, tahun 2022 sebesar 29.399,20 ton menurun dibanding tahun 2021 sebesar 31.009,12 ton.

Salah satu komoditi perkebunan yang mulai dikembangkan di wilayah Kabupaten Bangka adalah singkong casesa sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka. Hal ini didukung dengan keberadaan pabrik pengolahan tapioka di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Sungailiat. Luas panen dan produksi singkong casesa pada tahun 2022 meningkat. Luas panen untuk komoditi singkong casesa 1.615,50 ha dengan produktivitas sebesar 47.782,50 ton. Luas panen komoditi kelapa sawit tahun 2020 seluas 8.943,72 ha, meningkat dibanding tahun 2019 seluas 8.697,32 ha. Produksinya juga meningkat pada tahun 2020 sebesar 41.884,09 ton dibanding tahun 2019 sebesar 39.067,04 ton. Luas panen komoditi kelapa sawit tahun 2022 seluas 14.468,65 ha, menurun dibanding tahun 2021 seluas 15.750,99 ha. Namun, produksinya meningkat pada tahun 2022 sebesar 98.099,16 ton dibanding tahun 2021 sebesar 66.430,57 ton.

**Tabel 2.7**  
**Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Komoditi	2018		2019		2020		2021		2022	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Lada	3.464,82	4.259,94	4.138,95	4.479,21	2.190,84	3.121,50	4.673,94	3.510,15	1.473,49	2.896,87
2	Karet	17.140,20	22.672,30	17.075,17	51.304,93	16.889,40	50.236,11	20.385,62	31.009,12	14.671,64	29.399,20
3	Singkong Casesa	1.517,00	22.755,00	1.848,50	28.707,50	2.092,45	31.386,8	579,9	17,27	1.615,50	47.782,50
3	Kelapa Sawit	8.616,70	38.550,50	8.697,32	39.067,04	8.943,72	41.884,09	15.750,99	66,43	14,46	98.099,16
4	Kelapa	2.901,90	2.140,10	2.935,77	2.343,53	2.988,03	2.442,27	4.008,52	5.826,53	3.079,42	4.941,84

Sumber : Data Statistik Perkebunan, Dinas Pangan Pertanian Kab. Bangka, 2023

### 2.1.2.2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi cukup besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Sektor pertanian juga berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan serta peningkatan daya saing komoditi produk pertanian tahun 2021. Peningkatan daya saing komoditas dan produk olahan pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna peningkatan *Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian* serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir.

Secara keseluruhan, potensi pertanian memiliki luas kurang lebih 15.220,87 ha atau 5,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertanian ini terdiri dari: (i) potensi pertanian lahan basah yaitu dengan luas kurang lebih 10.346,93 ha atau 3,43% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (ii) potensi pertanian lahan kering yaitu dengan luas kurang lebih 4.873,94 ha atau 1,61% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertanian tersebut seperti disajikan pada peta di bawah ini.

**Gambar 2.8**  
**Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

**Gambar 2.9**  
**Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

### 2.1.2.3. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bangka merupakan salah satu untur ketahanan pangan Kabupaten Bangka. Pengamanan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air laut, konservasi dan rehabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan,

perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing komoditi produk perikanan. Potensi perikanan ini memiliki luas kurang lebih 3.309,54 ha atau 1,10% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka.

Jumlah produksi dan nilai tangkapan ikan tahun 2021 sebesar 27.923,83 ton dan Rp. 1.066.558.595,18 (ribu) rupiah. Jumlah produksi dan nilai tangkapan ikan tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah produksi dan nilai tangkapan ikan tahun 2020 yaitu 26.994 ton dan jumlah produksi 1.068.306.297.750,01 (ribu) rupiah nilai tangkapan. Sedangkan jumlah produksi dan nilai budidaya ikan tahun 2021 sebesar 3.555,52 ton dan 221.438.431.000,00 (ribu) rupiah. Jumlah produksi dan nilai budidaya ikan tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah produksi dan nilai budidaya ikan tahun 2020 sebesar 3.455,52 ton dan nilainya 234.509.161.100 (ribu) rupiah. Sebagian besar penduduk bekerja disektor perikanan dengan jumlah rumah tangga yang melakukan perikanan tangkap 2.995 RT, rumah tangga budidaya 351 RT dan rumah tangga pengolah ikan 217 RT.

**Gambar 2.10**  
**Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

#### 2.1.2.4. Potensi Peternakan

Kabupaten Bangka memiliki potensi peternakan yang cukup besar karena kawasan peternakan ini menyebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan ini dapat terintegrasi dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya



### 2.1.2.5. Potensi Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang masih berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Peruntukan kawasan pertambangan yang memiliki potensi untuk diusahakan melalui penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan usaha pertambangan. WIUP di Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, nonlogam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu:

- WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat);
- WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Namun, berdasarkan pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka, secara keseluruhan potensi pertambangan di Kabupaten Bangka memiliki luas lebih kurang 32.566,33 Ha atau 10,78% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertambangan ini terdiri dari: (1) potensi pertambangan dengan luas 28.441,33 ha atau 9,42% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (2) potensi pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha atau 1,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertambangan tersebut seperti disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.12**  
**Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023



Bahan galian yang paling banyak dieksploitasi dan telah banyak diusahakan secara besar-besaran di Kabupaten Bangka adalah timah. Sedangkan bahan galian lainnya belum diusahakan sebesar-besaran dan masih dilakukan pengelolaannya oleh penduduk setempat atau oleh swasta dengan jumlah terbatas. Potensi bahan galian lainnya di Kabupaten Bangka tersebar di beberapa Kecamatan. Potensi bahan galian lainnya tersebut berupa produk non logam. Untuk sebaran produk non logam yang ada di Kabupaten Bangka adalah pasir kuarsa di Kecamatan Sungailiat, kaolin di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip, granit di Kecamatan Merawang dan zirkon di kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang.

Produksi bijih timah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 produksi bijih timah mencapai 6.866 ton, menurun di tahun 2020 menjadi 6.865 ton. Pada tahun 2021 produksi bijih timah terbesar berada di Kecamatan Sungailiat sebesar 3.603 ton, pada tahun 2020 bijih timah terbesar berada di Kecamatan Bakam sebesar 3.442 ton.

#### **2.1.2.6. Potensi Industri**

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kabupaten Bangka sebagai daerah industri dan perdagangan. Pemerintah daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2005 menetapkan Kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Secara keseluruhan, potensi industri direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang dengan luasan lebih kurang 983,13 ha atau 0,33% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.13**  
**Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Perkembangan jumlah industri besar, menengah dan kecil di Kabupaten Bangka tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022\***

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	4	279	401.987.550.000
2	Merawang	4	194	167.907.551.000
3	Pemali	-	-	-
4	Puding Besar	2	100	229.340.000.000
5	Mendo Barat	1	143	377.216.070.000
6	Bakam	5	208	1.952.139.374.000
7	Riau Silip	2	6	62.855.519.000
8	Belinyu	1	526	151.000.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>1.456</b>	<b>3.342.446.064.000</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2023



**Tabel 2.9**  
**Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022\***

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	24	1.195	80.565.399.000
2	Merawang	11	479	60.940.353.000
3	Pemali	3	43	14.275.000.000
4	Puding Besar	1	119	8.200.000.000
5	Mendo Barat	2	157	18.031.305.000
6	Bakam	0	0	0
7	Riau Silip	4	315	22.732.000.000
8	Belinyu	3	200	7.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>2.508</b>	<b>212.244.057.000</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2023

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2022\***

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	1.222	3.474	40.506.188.528
2	Merawang	407	1.195	16.625.642.000
3	Pemali	496	1.060	9.492.200.000
4	Puding Besar	218	375	2.199.400.000
5	Mendo Barat	471	795	8.150.850.000
6	Bakam	213	360	2.380.200.000
7	Riau Silip	278	503	2.435.180.000
8	Belinyu	488	1.063	8.572.080.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.793</b>	<b>8.825</b>	<b>47.180.282.000</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2023

### 2.1.2.7. Potensi Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 948,23 ha atau 0,31% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat, seperti disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.14**  
**Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Potensi pariwisata di Kabupaten Bangka ini semakin memberikan keyakinan bagi para investor seiring upaya kuat dan intens yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dalam upaya menciptakan dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang lebih 600 ha dari 948,23 Ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka. Pada kawasan ini akan dibangun *golf resort, leisure and entertainment, cultural resort, wellness resort, dan tourism village*, seperti disajikan pada di bawah ini.

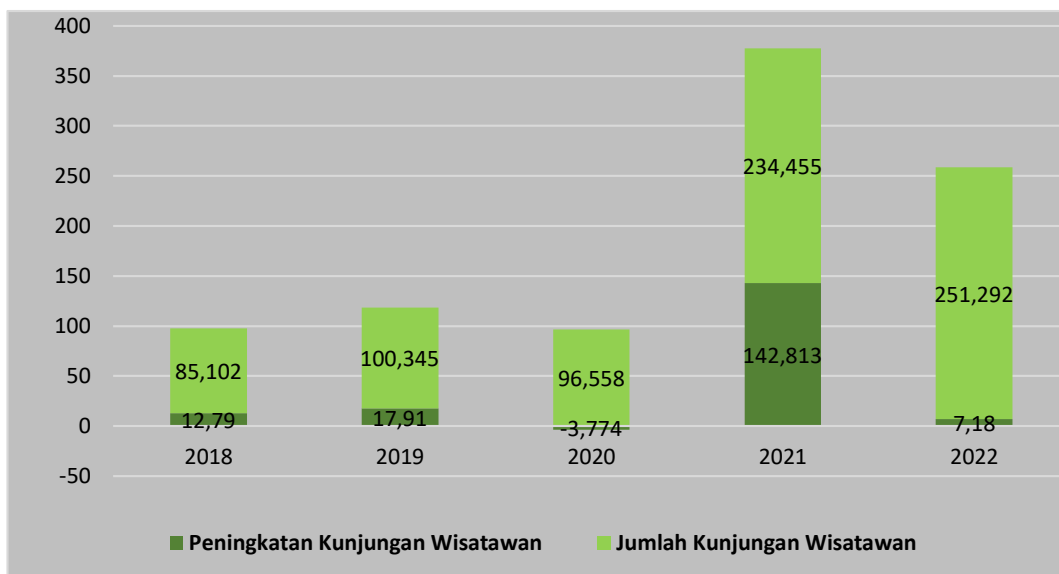
**Gambar 2.15**  
**Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2020**



*Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2018*

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2018–2021 memiliki kecenderungan fluktuatif dengan rata-rata sebanyak 129.115 orang. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka berjumlah 100.345 orang, mengalami pertumbuhan hingga 17,91 persen atau bertambah sebanyak 15.243 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 9.650 orang saja, dan kembali mengalami penurunan jumlah kunjungan hanya mencapai 96.558 orang dengan pertumbuhan (-3,774) persen. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata diseluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Drastisnya penurunan permintaan ini disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal itu. Indonesia dalam hal ini Kabupaten Bangka sebagai salah satu daerah pilihan tujuan wisata juga tidak luput dari imbas ini. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan ke Kabupaten Bangka meningkat drastis hingga 234.455 orang. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.1**  
**Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**



Sumber: Dinparbud Kabupaten Bangka, 2022

Munculnya beberapa spot baru destinasi wisata di Kabupaten Bangka seperti Pantai Tongachi dengan penangkaran penyunya, Pantai Tikus Emas, Pagoda Nusantara yang merupakan hasil dari reklamasi bekas tambang dan lain-lain sebagai pemacu peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka, disamping beberapa lokasi wisata yang telah ada lebih dulu dan tetap menarik untuk dikunjungi. Selengkapny beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka**

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
1	Sungailiat	1. Pantai Matras 2. Pantai Parai Tenggara 3. Pantai Tanjung Pesona 4. Pantai Tongachi 5. Pantai Tikus Emas 6. Pantai Rebo 7. Pantai Rambak 8. Pantai Mang Kalok 9. Pantai Takari 10. Novila Kuala 11. Puri Tri Agung 12. Bukit Mahayana	- Hotel Tanjung Pesona, Hotel Parai, Novilla Hotel, Puri Ansel, Batu Bedaun Resort, Hotel Sunjaya, Hotel ST 12, Boss Hotel, Hotel Tri Mustika - Penginapan - Restoran - Rumah makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
		13. Pantai Teluk Uber	
2	Pemali	1. Pemandian Air Panas Tirta Tapta 2. Air Simpur 3. Bukit Tujuh Sempan 4. <i>Ecopark</i> Pemali	- Rumah makan - Cafe - Tempat Ibadah
3	Merawang	1. Pantai Air Anyir 2. Pantai Temberan 3. Hutan Nyato Kimak	- Hotel Jatimas - Rumah makan - Tempat Ibadah
4	Belinyu	1. Pantai Penyusuk 2. Pantai Remodong 3. Pantai Lepar 4. Wisata Aik Bedelew 5. Mangrove Perpat Permai 6. Mangrove Sungai Buntu 7. Situs Benteng Kutopanji 8. Kelenteng Bongkap 9. Goa Maria Belinyu 10. Kuil Pha Kak Liang	- Hotel Dragon, Sam Pesaren Hotel, Mink-Mink Inn - Penginapan - Rumah Makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
5	Riau Silip	1. Gunung Maras 2. Pantai Tuing	- Cafe - Tempat Ibadah
6	Bakam	Hutan Raya Rimbe Mambang	- Rumah makan - Tempat Ibadah
7	Mendo Barat	Situs Benteng Kota Kapur	- Rumah makan - Tempat Ibadah

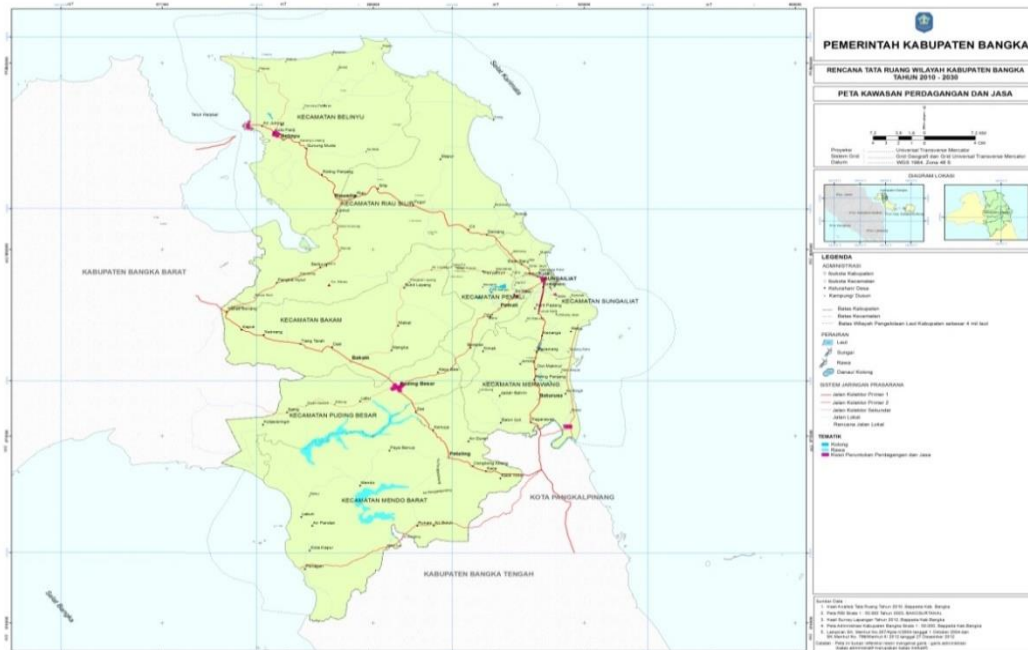
Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2023

#### 2.1.2.8. Potensi Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan potensi kawasan seluas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada gambar 2.16. Potensi sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut skalanya, yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, kawasan perdagangan Belinyu, kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan

peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

**Gambar 2.16**  
**Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan Belinyu dikembangkan di sepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktifitas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat Tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan, showroom mobil, motor, *sparepart* kendaraan, bengkel, dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum wilayah di Pulau Bangka termasuk Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat

dijelaskan karena bentuk morfologi Pulau Bangka yang cenderung datar. Gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten Bangka seperti dijelaskan dalam peta berikut.

**Gambar 2.17**  
**Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bangka**



Sumber: Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana Kab. Bangka, Bappeda, 2014

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya banjir genangan air di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan air laut saat pasang dan tingginya curah hujan pada musim penghujan. Namun, genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Kejadian bencana lainnya secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah kebakaran hutan pada musim kemarau dan adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan data bencana di Kabupaten Bangka Tahun 2022.



**Tabel 2.12**  
**Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2022**

Tanggal	Jumlah KK / Rumah	Jumlah Jiwa	Jenis Bencana	Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ket
10 Januari 2022	2	9	Banjir/Genangan Air	Desa Pangkal Niur	Desa Pangkal Niur	Riau Silip	2 Rumah Tergenang Banjir
14 Februari 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Pagarawan	Desa Pagarawan	Merawang	1 Rumah tedampak
19 Februari 2022	-	-	Pohon Tumbang	Kuburan Kemujan	Karya Makmur	Pemali	-
23 Januari 2022	1	3	Banjir/Genangan Air	Kp. Jawa	Kel. Sri Pemandang	Sungailiat	1 Rumah, Masih terpantau aman
25 Februari 2022	1	3	Kebakaran	Kimak	Kimak	Merawang	1 Rumah, berhasil Dipadamkan
27 Februari 2022	1	-	orang hilang	Hilang Di Kebun	Desa Zed	Mendo Barat	-
6 Maret 2022	-	-	Pohon Tumbang	Air Hanyut luar	Kel. Kuday	Sungailiat	Menimpa sumber mata air dari Kampung tersebut
6 Maret 2022	-	-	Pohon Tumbang	Bukit Betung	Kel Bukit Betung	Sungailiat	Pohon Menghalangi Jalan
6 Maret 2022	-	-	Pohon Tumbang	Bokor	Bokor	Pemali	Pohon tumbang menimpa kabel telpon
6 Maret 2022	3	10	Angin Puting Beliung	Lubuk Kelik	Desa Lubuk Kelik	Sungailiat	1 Rumah terdampak, atap melayang
6 Maret 2022	7	23	Angin Puting Beliung	Kota Kapur	Desa Kota Kapur	Mendo Barat	7 Rumah Terdampak
23 Maret 2022	15	46	Angin Puting Beliung	Bakam	Desa Bakam	Bakam	15 Rumah Terdampak
23 Maret 2022	25	76	Angin Puting Beliung	Labu	Desa Labu	Puding Besar	25 Rumah Terdampak, 1 Fasilitas Umum (Sekolah MTS)
24 Maret 2022	10	32	Angin Puting Beliung	Zed	Desa Zed	Mendo Barat	10 Rumah Terdampak, 2 Rusak Sedang 8 Rusak Ringan
26 Maret 2022	151	455	Angin Puting Beliung	Batu Rusa	Desa Batu Rusa	Merawang	151 Rumah Terdampak





Tanggal	Jumlah KK / Rumah	Jumlah Jiwa	Jenis Bencana	Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ket
31 Maret 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Link. Senang Hati	Kel. Sri Pemandang	Sungailiat	1 Rumah Terdampak, Rusak Sedang
01 April 2022	15	46	Angin Puting Beliung	Jl. Rambutan Dusun 3	Desa Petaling	Mendo Barat	15 Rumah Terdampak
01 April 2022	5	18	Angin Puting Beliung	Kemuja	Desa Kemuja	Mendo Barat	5 Rumah Terdampak, 1 Rusak Ringan 4 Rusak Sedang
01 April 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Sri Menanti	Sri menanti	Sungailiat	1 Gudang sebuah rumah, Tiang Kabel Telpon
01 April 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Tiang Tara	Desa Tiang Tara	Bakam	1 Rumah terdampak, Rusak Sedang
02 April 2022	61	183	Angin Puting Beliung	Air Buluh	Desa Air Buluh	Mendo Barat	61 Rumah Terdampak
06 April 2022	23	77	Angin Puting Beliung	Kd Mentok	Desa Cit	Riau Silip	23 Rumah Terdampak
11 April 2022	-	-	Pohon Tumbang	Jalan Raya	Sungailiat	Sungailiat	Pohon menimpa kabel listrik di belakang rumah warga
18 Mei 2022	-	-	Hujan Deras dan Tersambar Petir	Stisipol Pahlawan 12	Sungailiat	Sungailiat	Fasilitas Umum pada ruangan server Stisipol Pahlawan 12 tersambar petir
25 Mei 2022	2	9	Angin Puting Beliung	Dusun Air layang dan Dusun Sudimulyo	Kel. Bukit layang	Bakam	2 Rumah Terdampak, Rusak ringan
26 Mei 2022	1	2	Angin Puting Beliung	Jelutung	Kel. Sinar Jaya Jelutung	Sungailiat	1 Rumah terdampak
26 Mei 2022	2	7	Angin Puting Beliung	Rambak	Kel. Jelitik	Sungailiat	2 Rumah Terdampak
26 Mei 2022	2	3	Angin Puting Beliung	Link. Ake	Kel. Sinar Jaya Jelutung	Sungailiat	2 Rumah Terdampak
26 Mei 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Sri Pemandang	Sungailiat	Sungailiat	3 Rumah Terdampak
28 Mei 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Jalan Maras Senang	Desa Maras Senang	Bakam	1 Rumah Terdampak



Tanggal	Jumlah KK / Rumah	Jumlah Jiwa	Jenis Bencana	Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ket
4 Juni 2022	-	-	Kebakaran	Jade Bahrin	Desa Jade Bahrin	Merawang	Kandang Ayam Kebakaran
28 Juni 2022	1	4	tersambar Petir	Mapur	Desa Mapur	Riau Silip	1 Rumah Terdampak
29 Juni 2022	-	1	Orang Hilang	Desa Penagan	Desa Penagan	Mendo Barat	-
22 Juli 2022	1	4	Angin Puting Beliung	Sempan	Desa Sempan	Pemali	1 Rumah Terdampak, Rusak Ringan
12 Sep 2022	1	4	Angin Puting Beliung	Desa Bukit Layang	Desa Bukit layang	Bakam	1 Rumah Terdampak, Rusak Sedang
13 Sep 2022	3	11	Banjir/Genangan Air	Desa Air Duren	Desa Air Duren	Pemali	3 Rumah Terdampak
14 Sep 2022	-	1	Orang Hilang	Desa Tuing	Desa Tuing	Belinyu	-
13 Okt 2022	2	7	Angin Puting Beliung	Gang Merbabu	Kel Parit Padang	Sungailiat	2 Rumah Terdampak
20 Okt 2022	70	197	Banjir/Genangan Air	Desa Kayu Besi	Desa Kayu Besi	Puding Besar	70 Rumah Terdampak
1 Nov 2022	-	-	Banjir/Genangan Air	jl. A. Yani	Kel. Bukit Betung	Sungailiat	-
1 Nov 2022	-	-	Banjir/Genangan Air	Pasar Inpres	Kel. Sri Pemandang	Sungailiat	-
1 Nov 2022	7	23	Banjir/Genangan Air	Kp. Jawa	Kel. Sri Pemandang	Sungailiat	7 Rumah Terdampak
7 Nov 2022	1	3	Kebakaran	Perumahan Ahim	Desa Air Ruai	Pemali	1 Rumah Terdampak
12 Nov 2022	1	6	tersambar Petir	Desa Air Duren	Desa Air Duren	Pemali	1 Rumah Terdampak
17 Nov 2022	1	4	Angin Puting Beliung	Desa Mentabak	Desa Mentabak	Pemali	1 Rumah Terdampak
22 Nov 2022	29	67	Angin Puting Beliung	Dusun taruna Setia	Dusun taruna Setia	Pemali	29 Rumah Terdampak
22 Nov 2022	-	1	Orang di Terkam Buaya	Desa Pohin	Desa Pohin	Pemali	-
23 Nov 2022	3	11	Angin Puting Beliung	Kp. Pasir	Kel. Kuday	Sungailiat	3 Rumah Terdampak
23 Nov 2022	2	9	Angin Puting Beliung	Parit Padang	Kel. Parit Padang	Sungailiat	2 Rumah Terdampak
29 Nov 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Sri Menanti	Kel. Sri Menanti	Sungailiat	1 Rumah Terdampak
13 Des 2022	-	1	Orang Tenggelam	Jelitik	Kel. Jelitik	Sungailiat	Meninggal Dunia
19 Des 2022	3	9	Angin Puting Beliung	Desa Kayu Besi	Desa Kayu Besi	Puding Besar	3 Rumah Terdampak
22 Des 2022	1	3	Angin Puting Beliung	Desa Pohin	Desa Pohin	Pemali	1 Rumah Terdampak
23 Des 2022	-	-	Pohon Tumbang	Bukit Betung	Kel. Bukit Betung	Sungailiat	Menimpa 1 Bengkel Motor
25 Des 2022			Banjir/Genangan Air	Air Hanyut	Kel. Kuday	Sungailiat	Masih Terpantau Aman



Tanggal	Jumlah KK / Rumah	Jumlah Jiwa	Jenis Bencana	Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ket
25 Des 2022			Banjir/Genangan Air	Kp. Pasir	Kel. Kuday	Sungailiat	Masih Terpantau Aman
25 Des 2022			Banjir/Genangan Air	Nelayan	Sungailiat	Sungailiat	Masih Terpantau Aman
25 Des 2022			Banjir/Genangan Air	Jelitik	Kel. Jelitik	Sungailiat	Masih Terpantau Aman
<b>TOTAL</b>	<b>58 Kejadian Bencana Alam dan Non Alam</b>						

Sumber: BPBD Kabupaten Bangka, 2023

### 2.1.4 Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Bangka secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13**  
**Indikator Kependudukan Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	317.052	318.756	320.552	323.107	327.394
	a. Laki-laki		163.189	163.957	164.802	165.869	167.890
	b. Perempuan		153.863	154.799	155.750	157.238	159.504
2	Kepadatan Penduduk	jiwa/km <sup>2</sup>	104,68	105,24	105,84	106,68	108,09
3	Rasio Jenis Kelamin	persen	106,06	105,92	105,81	105,5	105,26
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,07	0,54	0,56	0,80	0,35

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023, data diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebanyak 327.394 jiwa dengan kepadatan 108.09 jiwa per km<sup>2</sup>, meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebanyak 323.107 jiwa dengan kepadatan 106,68 jiwa per km<sup>2</sup>, seperti tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km<sup>2</sup> Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Bangka Tahun 2018 – 2022**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk 2022 (jiwa)	Kepadatan per km <sup>2</sup> (jiwa)
1	SUNGAILIAT	147,05	94.190	640,53
2	BELINYU	515,48	50.225	97,43
3	MERAWANG	215,89	30.713	142,26
4	MENDO BARAT	685,64	50.378	73,48
5	PEMALI	140,46	34.950	248,83
6	BAKAM	426,26	18.828	44,17
7	RIAU SILIP	625,91	28.297	45,21
8	PUDING BESAR	272,10	19.813	72,82
Time series	<b>2022</b>	<b>3.028,79</b>	<b>327.394</b>	<b>108,09</b>
	<b>2021</b>	<b>3.028,79</b>	<b>323.107</b>	<b>106,68</b>
	<b>2020</b>	<b>3.028,79</b>	<b>320.552</b>	<b>105,84</b>
	<b>2019</b>	<b>3.028,79</b>	<b>318.756</b>	<b>105,24</b>
	<b>2018</b>	<b>3.028,79</b>	<b>317.052</b>	<b>104,68</b>

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi penambahan penduduk sebanyak 4.287 jiwa. Pertambahan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar karena berkembangnya daerah Kabupaten Bangka dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka.

Selama tahun 2018 – 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan, seperti disajikan pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 167.890 jiwa atau sebesar 51,28 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 159.504 jiwa atau sebesar 48,72 persen. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.15**  
**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK*			Sex Ratio
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	SUNGAILIAT	47.746	46.444	94.190	102,80
2	BELINYU	25.626	24.599	50.225	104,17
3	MERAWANG	15.731	14.982	30.713	105,00
4	MENDO BARAT	26.212	24.166	50.378	108,47
5	PEMALI	17.837	17.113	34.950	104,23
6	BAKAM	9.784	9.044	18.828	108,18
7	RIAU SILIP	14.598	13.699	28.297	106,56
8	PUDING BESAR	10.356	9.457	19.813	109,51
	<b>2022</b>	<b>167.890</b>	<b>159.504</b>	<b>327.394</b>	<b>105,26</b>
	<b>2021</b>	<b>165.869</b>	<b>157.238</b>	<b>323.107</b>	<b>105,5</b>
	<b>2020</b>	<b>164.802</b>	<b>155.750</b>	<b>320.552</b>	<b>105,81</b>
	<b>2019</b>	<b>163.957</b>	<b>154.799</b>	<b>318.756</b>	<b>105,92</b>
	<b>2018</b>	<b>163.189</b>	<b>153.863</b>	<b>317.052</b>	<b>106,06</b>

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2023, data diolah

Penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun**  
**2016 - 2022 (%)**

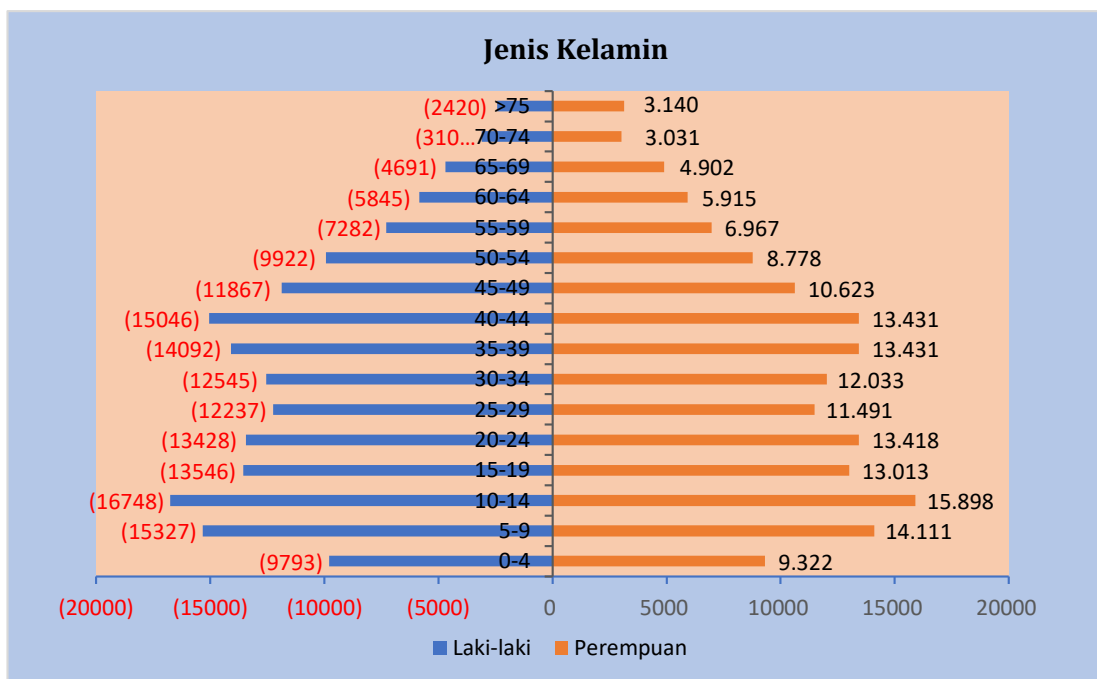
Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 4	7,68	7,36	7,8	7,76	7,52	7,56	5,84
5 - 9	9,24	9,02	9,28	9,76	9,82	9,62	8,99
10 - 14	9,31	9,4	9,21	9,5	9,53	9,72	9,97
15 - 19	8,61	8,78	8,71	8,94	8,67	7,9	8,11
20 - 24	7,9	7,84	7,77	7,89	8,00	8,1	8,20
25 - 29	9,11	8,71	8,34	7,46	7,17	7,11	7,25
30 - 34	9,47	9,21	8,99	8,72	8,58	8,29	7,51
35 - 39	8,77	9,15	9,11	8,78	8,52	8,62	8,41
40 - 44	7,13	7,24	7,23	7,41	7,85	8,06	8,70
45 - 49	5,79	6,03	6,06	6,09	6,22	6,57	6,87
50 - 54	4,8	4,78	4,76	4,91	5,07	5,19	5,71
55 - 59	4,28	4,31	4,25	4,1	4,10	4,14	4,35
60 - 64	3,37	3,42	3,43	3,46	3,61	3,54	3,59
65 - 69	2,07	2,23	2,34	2,49	2,53	2,67	2,93

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70 - 74	1,05	1,06	1,11	1,3	1,44	1,52	1,87
≥ 75	1,41	1,46	1,6	1,44	1,39	1,39	1,70
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023 (Data Diolah)

Dalam bentuk piramida penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2022, tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2022 (%)**



Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023 (Data Diolah)

Pada tahun 2022, Kabupaten Bangka memperoleh bonus demografi yang dalam kata lain jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non Produktif (0-14 tahun dan  $\geq 65$  tahun) seperti yang tergambar di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.17**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	41.868	25	39.331	25	81.199	25

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
2	15-64	115.810	69	109.100	68	224.910	69
3	>=65	10.212	6	11.073	7	21.285	7
<b>Jumlah</b>		<b>167.890</b>	<b>100</b>	<b>159.504</b>	<b>100</b>	<b>327.394</b>	<b>100</b>

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita peroleh rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang secara definisinya merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Secara struktur, pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 (tiga) sektor yaitu primer, sekunder dan tersier, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan, perikanan, usaha pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup pekerjaan dalam usaha industri pengolahan dan usaha konstruksi. Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Tabel 2. 18**  
**Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2021**

SEKTOR	TAHUN				RATAAN
	2018	2019	2020	2021	
PRIMER	47,3	44,36	43,04	43,04	44,9
SEKUNDER	15,3	16,19	13,9	13,9	15,13
TERSIER	37,4	39,45	43,06	43,06	39,97
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2022

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka dalam menyusun rancangan RKPD 2024 terlebih dahulu disusun capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari 3 (tiga) fokus yaitu (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) kesejahteraan sosial; dan (3) seni budaya dan olah raga.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka selama kurun waktu Tahun 2018-2022 dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019, perekonomian Kabupaten Bangka terus meningkat. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Kabupaten Bangka, menyebabkan penurunan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh adanya kondisi pandemi Covid-19 yang mulai mereda di tahun 2021. Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bangka meningkat lagi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19**  
**PDRB Tahun 2018–2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka (Juta Rupiah)**

NO	PDRB	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	13.310.570	13.765.430	13.933.620	16.174.021	17.958776,52





NO	PDRB	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	9.778.030	10.058.790	9.987.140	10.733.700	11.256.218,82

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kabupaten Bangka secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

Nilai PDRB Kabupaten Bangka atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 17,95 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 11,03 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 16,17 triliun rupiah.

Begitu juga dengan Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mencapai 11,25 triliun rupiah, naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 10,73 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Berikut tabel Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.

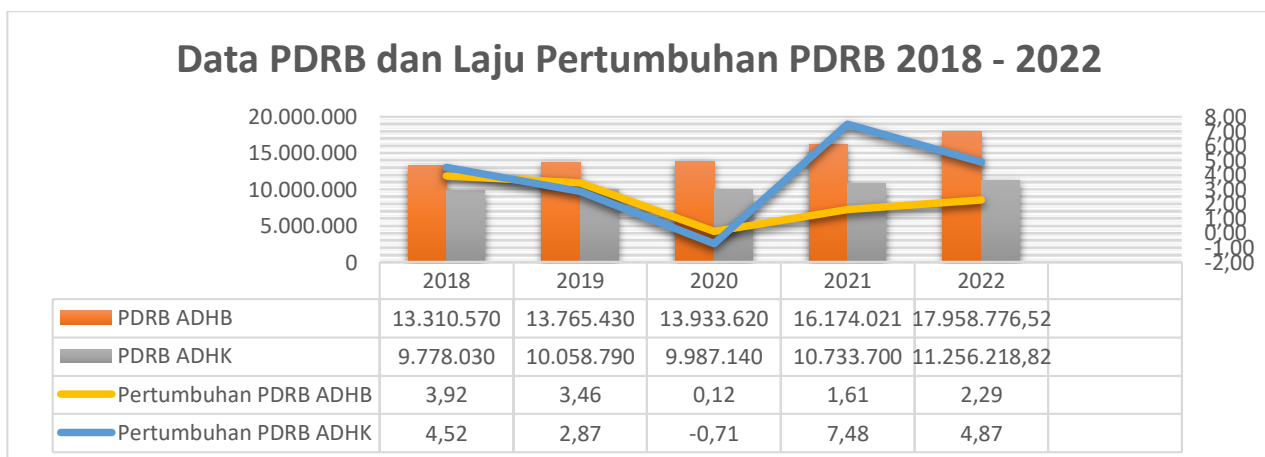
**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bangka	4,52	2,87	-0,71	7,48	4,87
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,45	3,32	-2,3	4,44	4,40
3	Nasional	5,17	5,02	-4,37	3,70	5,40

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2023

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka terus menurun, bahkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, menyebabkan kontraksi sebesar 0,71 pada tahun 2020. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,48 persen setelah sempat berkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 0,71 persen sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka menurun menjadi 4,87 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik berikut ini.

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Sementara Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 (persen) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten**  
**Bangka Tahun 2018-2022 (Persen)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,41	3,29	6,41	2,15	1,33
<b>B</b>	Pertambangan dan Pengalihan	0,11	0,84	-2,16	9,73	1,79
<b>C</b>	Industri Pengolahan	1,49	-1,01	0,09	12,09	8,05
<b>D</b>	Pengadaan Listrik & Gas	8,47	-3,95	5,75	15,05	4,05
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,95	3,01	5,15	5,07	3,64
<b>F</b>	Konstruksi	5,14	8,11	-3,92	4,81	0,19
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,05	2,40	-7,46	7,07	10,47
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	7,97	5,71	-11,48	10,57	9,23
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,26	8,94	-6,23	12,03	11,68
<b>J</b>	Informasi & Komunikasi	12,87	12,97	13,07	8,83	9,46
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	3,05	-9,66	5,53	6,63
<b>L</b>	Real Estate	9,01	2,47	1,38	6,83	5,02
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	6,95	2,43	-15,64	5,90	10,62
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,78	5,83	-2,18	4,75	0,91

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
	Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	8,80	6,69	-0,41	3,45	3,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	9,98	1,14	15,77	2,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,24	11,51	-8,07	4,80	8,18
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>4,52</b>	<b>2,87</b>	<b>-0,71</b>	<b>7,48</b>	<b>4,87</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Struktur PDRB Kabupaten Bangka menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar Rp. 4.670.925,71 juta ; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 3.576.942,11 juta; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.357.759,23 juta; Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 1.695.971,44 juta serta Konstruksi sebesar Rp. 1.633.463,27 juta. Dari kelima sektor tersebut, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus meningkat selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 namun terus meningkat sampai tahun 2022. Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 melanda. Perkembangan PDRB Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha selama periode tahun 2018-2022 di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)**

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.601.390	2.690.080	2.996.390	3.305.420	3.576.942,11
B	Pertambangan dan Penggalian	1.472.320	1.347.490	1.317.090	1.712.540	1.695.971,44
C	Industri Pengolahan	2.986.620	2.955.320	3.014.090	3.917.730	4.670.925,71



Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
D	Pengadaan Listrik & Gas	34.960	34.230	36.560	41.850	40.846,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.070	3.250	3.400	3.750	3.945,54
F	Konstruksi	1.305.430	1.470.460	1.418.860	1.549.680	1.633.463,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.850.590	1.935.240	1.815.510	1.988.310	2.357.759,23
H	Transportasi dan Pergudangan	316.430	350.570	320.100	358.590	412.040,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	345.550	399.720	402.900	461.490	531.745,10
J	Informasi & Komunikasi	266.650	303.320	339.570	370.670	410.954,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	380.650	398.500	358.460	398.580	466.620,34
L	Real Estate	475.060	498.790	514.330	557.560	601.589,42
M,N	Jasa Perusahaan	34.970	38.140	34.130	38.040	44.433,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	702.770	747.040	760.880	813.850	809.399,72
P	Jasa Pendidikan	301.180	327.040	337.060	358.860	382.497,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.600	146,610	150.580	176.630	184.425,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	103.400	119.790	113.680	120.610	135.217,13

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produk Domestik Regional Bruto	13.317.040	13.794.180	13.944.330	16.174.210	17.958.776,52

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, nilai PDRB lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.986.620 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 4.670.925,71 juta. Untuk Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp. 2.601.390 juta meningkat menjadi Rp. 3.576.942,11 juta, nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp. 1.850.590 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 2.357.759,23 juta, nilai PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian Rp. 1.472.320 juta meningkat menjadi Rp. 1.695.971,44 juta, serta nilai PDRB sektor Konstruksi sebesar Rp. 1.305.430 juta meningkat menjadi 1.633.463,27 juta. Selanjutnya perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha selama periode tahun 2018-2022 di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.23**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)**

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.912.910	1.975.900	2.102.590	2.147.870	2.176.400,31
B	Pertambangan dan Penggalian	1.387.000	1.398.700	1.368.470	1.501.600	1.528.511,61
C	Industri Pengolahan	2.354.470	2.330.650	2.332.810	2.614.850	2.825.349,80
D	Pengadaan Listrik & Gas	20.210	19.410	20.520	23.610	22.654,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.880	1.940	2.040	2.140	2.217,94



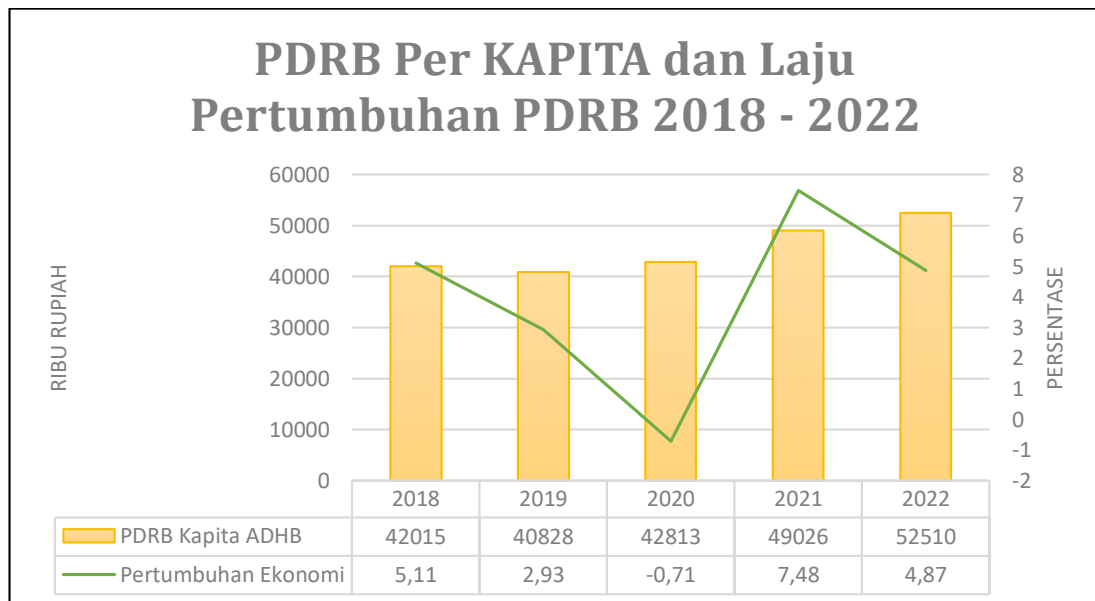
Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
F	Konstruksi	819.400	885.870	851.120	892.080	893.738,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.185.490	1.213.960	1.123.380	1.202.800	1.328.715,95
H	Transportasi dan Pergudangan	211.110	223.160	197.540	218.410	238.572,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222.240	242.120	227.030	254.330	284.048,38
J	Informasi & Komunikasi	237.480	268.290	303.340	330.120	361.336,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	256.640	264.450	238.900	252.120	268.840,83
L	Real Estate	338.140	346.540	351.340	375.330	394.161,92
M,N	Jasa Perusahaan	21.230	21.740	18.350	19.430	21.493,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	472.450	500.010	489.120	512.370	507.685,42
P	Jasa Pendidikan	180.070	192.120	191.330	197.940	205.622,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.470	101.700	102.860	119.070	121.589,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	64.780	72.230	66.400	69.590	75.279,51
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9.778.030</b>	<b>10.058.790</b>	<b>9.987.140</b>	<b>10.733.700</b>	<b>11.256.218,82</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Struktur PDRB Kabupaten Bangka menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 juga didominasi oleh lima lapangan usaha yakni: Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.825.349,90 juta; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 2.176.400,31 juta; Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 1.528.511,61 juta, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 1.328.715,95 juta; serta Konstruksi sebesar Rp. 893.738,40 juta.

Sementara perkembangan PDRB per kapita dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

**Grafik 2.4**  
**PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



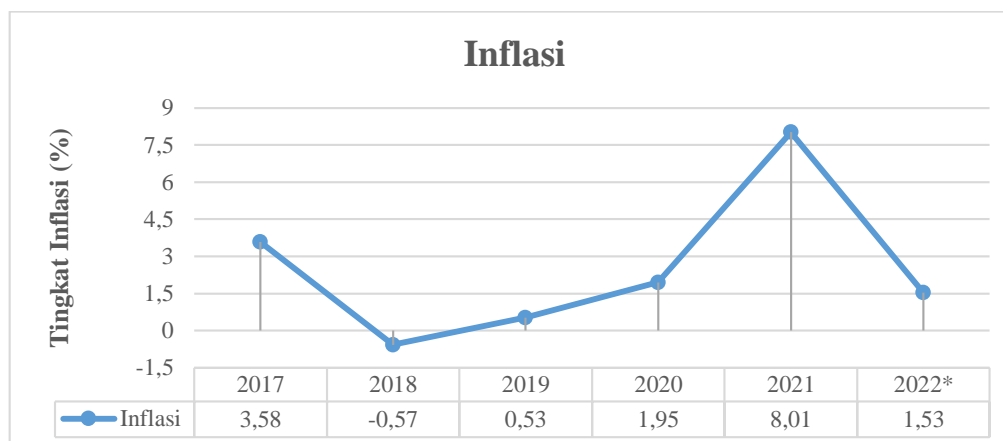
Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

#### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Sepanjang tahun 2018–2022 secara keseluruhan tingkat Inflasi di Kabupaten Bangka mengalami fluktuasi. Laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada Grafik berikut.



**Grafik 2.5**  
**Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2022

Pada tahun 2018 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar (0,57) persen. Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 angka inflasi terus meningkat menjadi 8,01 persen dan tahun 2022 angka inflasi mengalami penurunan menjadi 1,53 persen.

### 2.2.1.3. Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

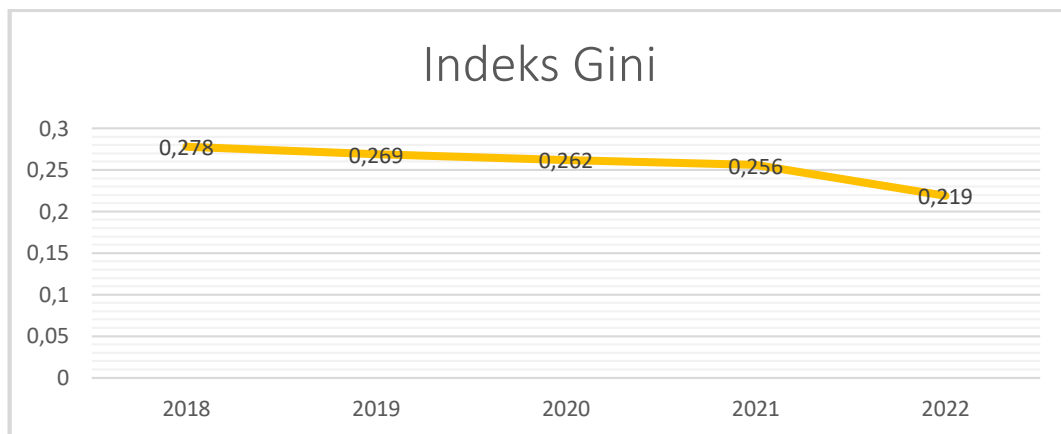
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- $GR < 0.4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada periode 2018-2022, Gini Ratio berkisar pada angka 0,278 hingga 0,262, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ketimpangan pendapatan ini cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Gini Ratio berada pada angka 0,278, mengalami penurunan hingga mencapai 0,219 pada tahun 2022, seperti disajikan pada Grafik 2.6.

**Grafik 2.6**  
**Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan nilai indeks ini, maka ketimpangan pembangunan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Bangka semakin rendah yang menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mendekati merata.

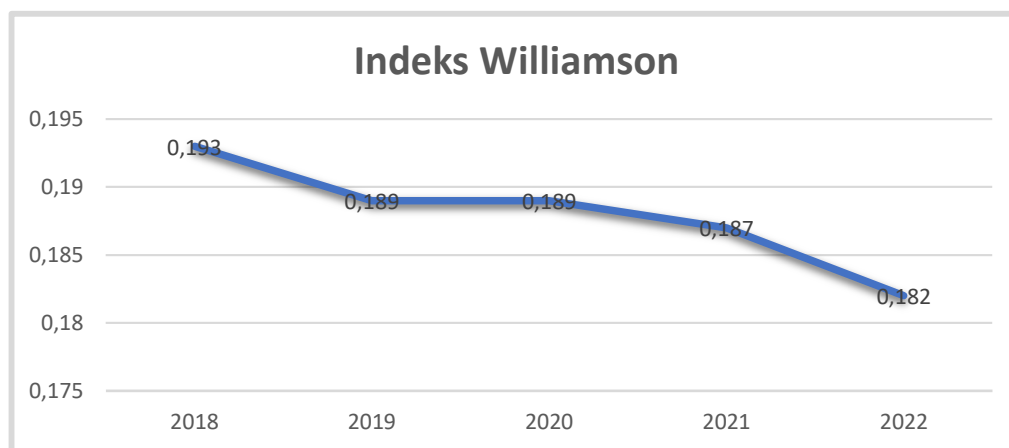
#### **2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Williamson**

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka digunakan teknik analisis Indeks Williamson.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai indeks sebesar 0,193 – 0,182. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Bangka termasuk

dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan.

**Grafik 2.7**  
**Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS Kab Bangka, 2023

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan terhadap indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya tren perkembangan IPM dalam lima tahun terakhir, tersaji pada Tabel berikut.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,80	72,39	72,40	72,46	72,95
2	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	12.043	12.480	12.416	12.424	12.863
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,68	12,76	12,77	12,78	12,80
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,20	8,23	8,24	8,25	8,27
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,73	70,99	71,06	71,14	71,37

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018-2022, IPM terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Bangka sebesar 71,80 pada tahun 2018, terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2019 menjadi 72,39 dan 72,40 pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai 72,46 dan pada tahun 2022 menjadi 72,95. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuknya.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,20 pada tahun 2018 menjadi 8,27 di tahun 2022. Begitu juga dengan Harapan lama sekolah meningkat dari 12,68 di tahun 2018 menjadi 12,80 di tahun 2022. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,73 pada tahun 2018 menjadi 71,37 di tahun 2022. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 12.043 ribu rupiah pada tahun 2018 menjadi 12.863 ribu rupiah di tahun 2022. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

## 2.2.2.2. Kemiskinan

### a. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Berikut ini Tabel Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

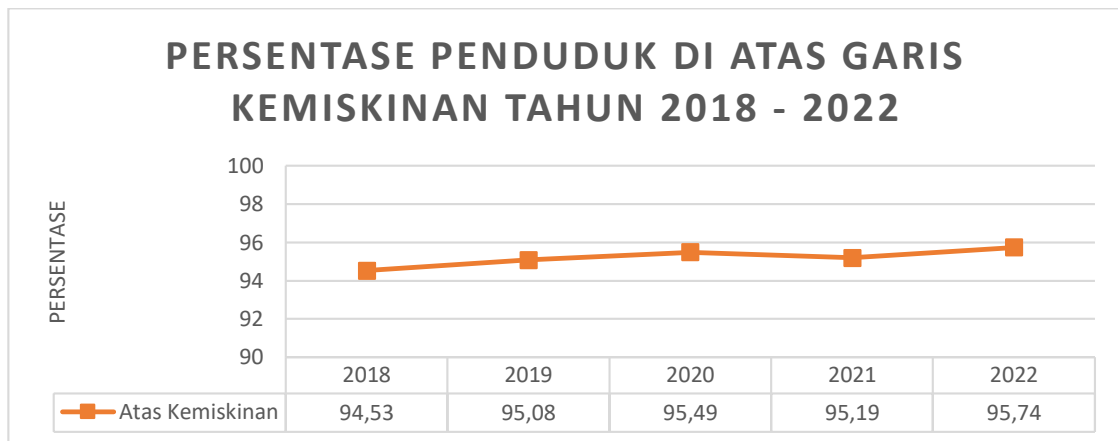
No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,47	4,92	4,51	4,81	4,26
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	18,02	16,52	15,41	16,19	14,50
3	Garis Kemiskinan (%)	94,53	95,08	95,49	95,19	95,74
4	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,65	0,47	0,39	0,67
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,17	0,14	0,09	0,06	0,15

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 5,47 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4,92 persen dan tahun 2020 menjadi 4,51. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,81 persen dan pada 2022 menurun kembali menjadi 4,26 persen.

Sementara untuk melihat perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2018 – 2022 disajikan pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.8**  
**Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2018 – 2022 mempunyai trend yang terus meningkat. Pada tahun 2018 penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 94,53 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 95,49 persen pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 95,19 persen pada tahun 2021 serta meningkat lagi menjadi 95,74 persen pada tahun 2022.

#### **b. Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangka**

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), Atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Angka kemiskinan ekstrem kabupaten bangka tahun 2022 sebesar 1,13% angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem provinsi kepulauan bangka belitung yaitu 0,82% dan lebih rendah dari angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.26**  
**Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022**

KABUPATEN/KOTA	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)
Bangka	0,82	0,24	3,85	1,13
Belitung	0,00	0,00	3,95	2,06
Bangka Barat	0,00	0,00	0,88	0,41
Bangka Tengah	0,94	0,48	0,96	0,48
Bangka Selatan	0,00	0,00	0,05	0,02
Belitung Timur	2,07	1,60	1,06	0,81
Kota Pangkal Pinang	1,98	0,94	1,53	0,71
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>5,81</b>	<b>0,39</b>	<b>12,27</b>	<b>0,82</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka ini tidak lepas dari belum membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Bangka ditandai dengan turunnya harga beberapa komoditas pertanian seperti turunnya harga sawit, karet serta harga singkong di pasaran, tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Bangka yang menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka semakin tinggi.

Upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem “0%” tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

- a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:



1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako
  2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
  3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
  4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana
  2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
  3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
  4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
  5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.



2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai ukuran persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Secara rinci Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,10	63,71	63,93	62,68	62,68*
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,12	3,72	5,42	5,97	5,39

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 62,68 persen artinya sebesar 62,68 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka tahun yang sama sebesar 5,39 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5 orang mencari pekerjaan.

#### d. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting sekaligus persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022*
Angkatan Kerja yang Bekerja	149.323	153.874	151.310	149.844	204.935
Angkatan Kerja	155.733	159.950	159.985	159.365	222.290
Rasio Penduduk yang Bekerja	0,959	0,962	0,946	0,940	0,921

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,959, terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menjadi 0,962, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,946 dan 0,940 yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. bahkan terus menurun di tahun 2022 menjadi 0.921 walaupun pertumbuhan ekonomi mulai bangkit dan angkatan kerja yang bekerja meningkat namun angkatan kerja juga mengalami peningkatan sehingga rasio penduduk yang bekerja jadi menurun di tahun 2022.

#### 2.2.2.3. Pendidikan

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut :

#### a. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis **huruf** latin dan **huruf** lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018– 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Persentase Penduduk berusia 15 Tahun keatas yang bisa membaca	98,49	99,66	96,12	99,69	99,72
2	Angka Buta Huruf	1,53	0,34	3,88	0,31	0,30

Sumber: Dindikpora Kabupaten Bangka, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca di Kabupaten Bangka selama periode 2018-2022 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, angka melek huruf 98,49 persen meningkat pada tahun 2019 yaitu 99,66 persen. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 96,12 kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,69 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 99,72.

#### b. Angka Harapan Lama Sekolah

Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi “*Knowledge Based Society*”. Pengertian “*Knowledge Based Society*” muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Knowledge yang menyatu (embeded) dengan sumber daya manusia sebagai human capital dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga knowledge merupakan bagian langsung yang

mempengaruhi faktor produksi. Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling - EYS*).

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>	12,68	12,76	12,77	12,78	12,80

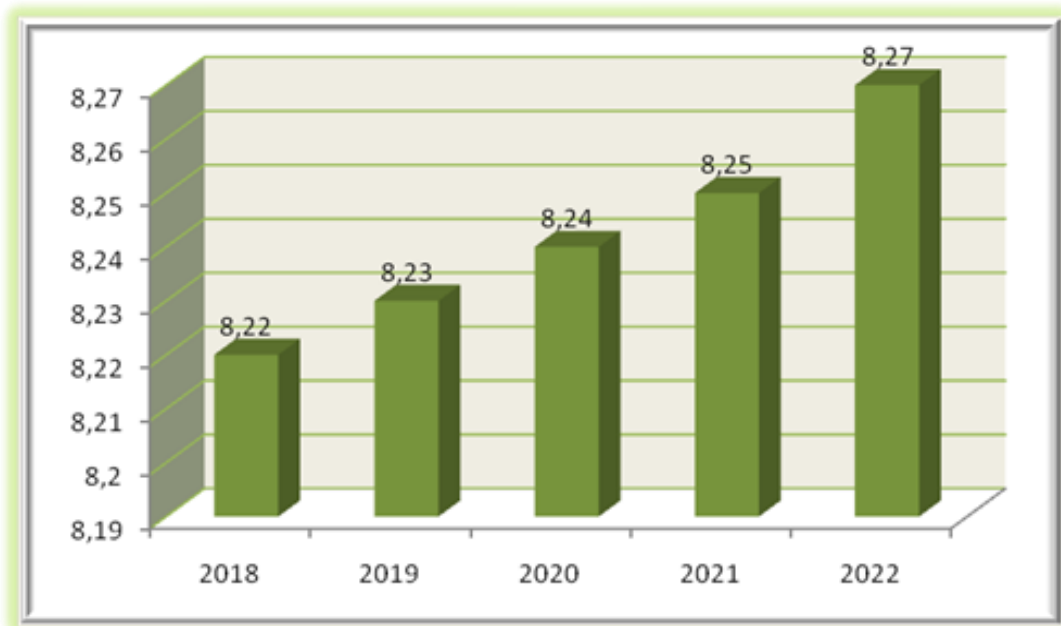
Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2022

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka dari tahun 2018 terus meningkat sampai tahun 2022 yaitu dari 12,68 tahun pada tahun 2018, 12,76 tahun pada tahun 2019, 12,77 tahun pada tahun 2020, 12,78 tahun pada tahun 2021 dan 12,80 tahun pada tahun 2022.

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Selengkapnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2018 hingga 2022, tersaji pada Grafik berikut.

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: Dindikpora Kabupaten Bangka, 2023

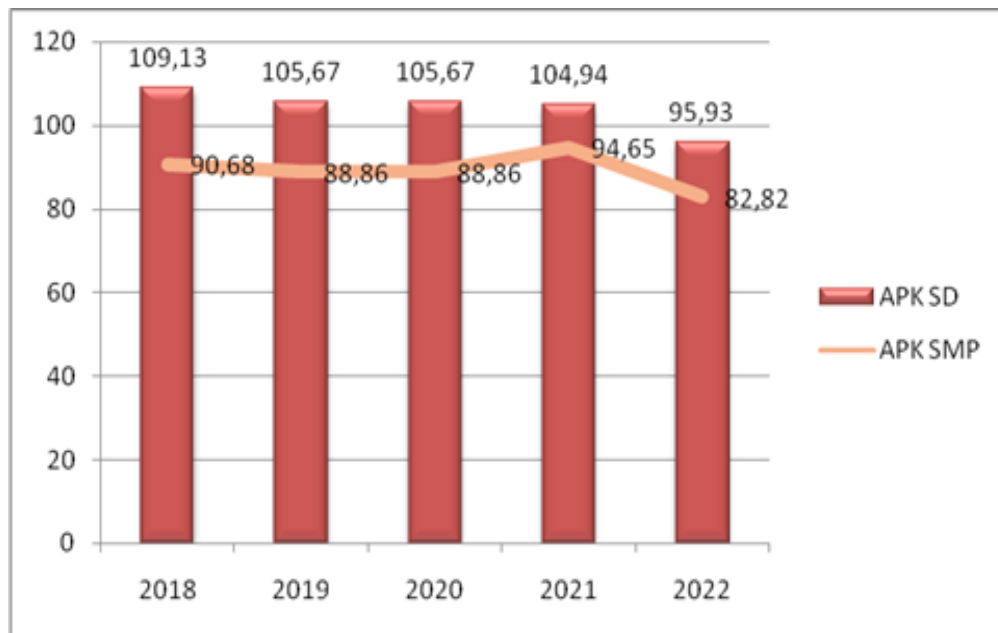
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka sebesar 8,22, pada tahun 2019 sebesar 8,23, pada tahun 2020 sebesar 8,24, pada tahun 2021 sebesar 8,25 dan pada tahun 2022 sebesar 8,27.

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang terus meningkat dengan interval antara 8,22 tahun sampai dengan 8,27 tahun.

#### d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada grafik berikut

**Grafik 2.10**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

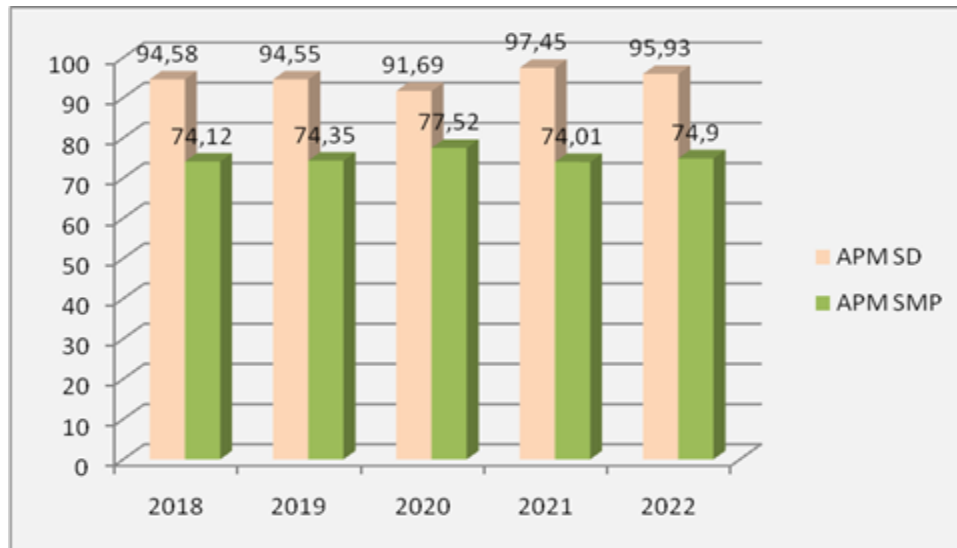


Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

e. **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Selengkapnya perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten Bangka tahun 2018-2022 tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 2.11**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber: Dindikpora Kabupaten Bangka, 2023

#### 2.2.2.4. Kesehatan

Beberapa indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018- 2022**

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Angka kematian bayi	3,39	3,25	4,81	6,37	1,12
Angka usia harapan hidup	70,73	70,99	71,06	71,14	71,37
Persentase balita gizi buruk	0,02	0,02	0,017	0,02	0,02

Sumber: BPS Kabupaten Bangka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 2023

##### a. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Angka harapan hidup di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,99	71,06	71,14	71,37

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2022

Pada tahun 2022 AHH di Kabupaten Bangka telah mencapai 71,37 tahun, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

#### **b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu prioritas nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan dihitung menggunakan rumusan jumlah kematian ibu selama 1 tahun dibagi dengan jumlah lahir hidup selama 1 tahun yang sama dikali dengan konstanta 100.000. AKI memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Berikut tabel angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bnangka Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.33**  
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

Uraian	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup</b>	0,65	0,61	0,80	309,6	57,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023



Secara umum selama tahun 2018-2019 AKI di Kabupaten Bangka terus menunjukkan penurunan, yaitu 0,65 pada tahun 2018 dan menurun menjadi 0,61 pada tahun 2019 namun mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 0,80. Di Tahun 2021 angka kematian ibu mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 309,6. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan dan terinfeksi virus Covid 19. Kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 57,29.

### c. Angka Kematian Bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi dan Balita merupakan indikator yang termasuk dalam prioritas nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Berikut perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	4,19	3,25	4,81	6,37	1,12
2	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4,56	6,04	5,34	6,92	6,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2018–2022 di Kabupaten Bangka menunjukkan tren yang fluktuatif. Perkembangan angka kematian bayi dari tahun 2018 terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 3,25. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,81 dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 6,37. Pada tahun 2022, angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 1,12. Sedangkan perkembangan angka kematian balita dari tahun 2017 mengalami

penurunan menjadi 4,56 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,04 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 5,34. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 6,92.

#### d. Prevalensi Stunting dan Wasting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka adalah balita gizi buruk. Persentase balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.35**  
**Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bangka Tahun 2018– 2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase balita gizi buruk	0,02	0,02	0,017	0,02	0,02

Sumber: BPS Kabupaten Bangka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 2023

Persentase balita gizi buruk menurun dari 0,02 persen pada tahun 2018 hingga mencapai 0,017 persen saja pada tahun 2020. Kemudian meningkat pada lagi pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,02. Khusus indikator persentase balita gizi buruk ini sangat erat kaitannya dengan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka sebagaimana dijelaskan dalam pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan Riskesdas dan SSGI Tahun 2013, Tahun 2018 dan Tahun 2021**

Uraian	Tahun		
	2013	2018	2021
Angka Stunting (%)	32,27	18,20	17,5

Sumber : Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2013, 2018  
Hasil SSGI Tahun 2021

**Tabel 2.37**  
**Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM**  
**Tahun 2019 - 2022**

Uraian	Tahun			
	2019 (23 Feb 2019)	2020 (23 Feb 2020)	2021 (Agustus 2021)	2022*
Angka <i>Stunting</i> (%)	8,9	5,05	1,68	1,34

Sumber : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel 2.36 di atas, prevalensi angka *stunting* Kabupaten Bangka hasil Riskesdas yang dilakukan penghitungan per lima tahun sekali diperoleh data di tahun 2013 sebesar 32,27 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 18,20 persen. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan pengukuran prevalensi *stunting* berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per tanggal 23 Februari yang menunjukkan penurunan angka *stunting* dari sebesar 8,9 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,68 persen di tahun 2021 dan pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 1,34.

e. Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit menjadi salah satu arahan RPJMN khususnya pada penyakit menular Aids, Tuberkolosis dan Malaria (ATM). Pengendalian penyakit menjadi salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat yang berpengaruh pada angka harapan hidup.

Kondisi penanganan malaria di Kabupaten Bangka sudah berstatus eliminasi, tetapi terus dilakukan upaya pencegahan mengingat nyamuk malaria sangat tergantung pada kebersihan lingkungan dan kondisi cuaca/iklim.

Untuk aids/HIV progres capaian dan target indikator program HIV PIMD dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 2.37**  
**Progres Capaian dan Target Indikator Program HIV PIMD Tahun 2020-2024**

Indikator		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indikator RPJMN	Insidensi HIV (per 100.000 penduduk tidak terinfeksi)	0,19	0,10	0,19	0,10	0,19	-	0,18	-	0,18	-
Indikator Kinerja Program (IKP)	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA onART)	40%	40%	45%	39%	45%	42%	50%	-	60%	-
Indikator Kinerja kegiatan (IKK)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	60%	85%	-	90%	-
Indikator Kinerja kegiatan (IKK)	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART	77%	78%	80%	82%	85%	80%	90%	-	90%	-
Indikator Kinerja kegiatan (IKK)	Persentase pasien sifilis yang diobati	75%	60%	75%	65%	75%	68%	85%	-	90%	-

Capaian dan Target Indikator Program HIV PIMD Tahun 2020-2024, tahun 2022 pada tabel di atas menunjukkan jumlah kasus (insidensi) HIV per 100.000 penduduk tidak terinfeksi capaian cukup baik, capaian di bawah target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) mengalami kenaikan 3% dibandingkan tahun 2021. Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV tahun 2022 sebanyak 60%. Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan ditahun 2022 mengalami kenaikan 5% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini perlu dicermati dan diidentifikasi ditangani dengan baik, terutama dengan melakukan screening dilokasi yang memiliki resiko

besar, dan melakukan pengawasan terhadap pasien yang terinfeksi agar dapat dikendalikan penyebarannya. Untuk distribusi kasus HIV/AIDS berdasarkan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Distribusi Kasus Aids/HIV Berdasarkan Wilayah**

NO	NAMA PUSKESMAS	Jumlah Kasus
1	Sungailiat	14
2	Sinar Baru	3
3	Kenanga	11
4	Pemali	3
5	Bakam	1
6	Belinyu	3
7	Gunung Muda	2
8	Riau Silip	6
9	Baturusa	9
10	Puding Besar	1
11	Petaling	0
12	Penagan	0
13	Luar Wilayah	23
	<b>Kabupaten</b>	<b>76</b>

**Grafik 2.12**  
**Distribusi Kasus Aids/HIV Berdasarkan Wilayah**



Untuk capaian target SPM Program Aids/HIV per Kecamatan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Pemeriksaan AIDS/HIV SPM 2022**

Puskesmas	Target SPM	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Total	%
Sungailiat	1.012	35	90	56	61	83	102	117	44	95	64	115	145	1007	100
Sinar Baru	385	22	21	25	21	21	18	15	35	36	37	60	45	356	92
Kenanga	1.349	78	45	53	103	38	506	174	174	125	129	111	63	1599	119
Pemali	785	82	90	78	63	83	76	77	71	79	73	46	41	859	109
Bakam	473	45	62	32	30	52	31	35	26	39	29	45	25	451	95
Belinyu	906	68	58	64	43	70	92	124	82	95	82	85	57	920	102
Gunung Muda	319	24	28	22	41	20	37	34	36	31	21	38	21	353	111
Riau Silip	643	66	67	57	66	52	53	63	37	53	22	117	45	698	109
Baturusa	924	68	76	86	60	83	105	133	124	112	47	97	57	1048	113
Puding Besar	484	38	40	38	30	54	41	21	36	45	38	45	58	484	100
Petaling	928	69	94	71	69	61	105	81	82	74	75	66	80	927	100
Penagan	292	21	25	20	15	27	29	18	30	28	19	28	20	280	96
RS Depati Bahrin		9	9	2	7	10	16	7	10	24	18	20	21	153	-
RS Soekarno Hatta		0	12	0	9	5	3	3	0	5	16	12	10	75	-
RS Medika Stania										0	3	14	12	29	-
RS Eko Maulana												1	2	3	-
RS Arsani													23	23	-
<b>Kabupaten</b>	<b>8.500</b>	<b>625</b>	<b>717</b>	<b>604</b>	<b>618</b>	<b>659</b>	<b>1214</b>	<b>902</b>	<b>787</b>	<b>841</b>	<b>673</b>	<b>900</b>	<b>725</b>	<b>9265</b>	<b>109</b>

Capaian kinerja SPM per puskesmas ada yang mencapai melebihi target, artinya jumlah pasien melebihi target yang ditetapkan, hal ini perlu di tanggulangi agar tidak terjadi penularan yang menimbulkan kasus baru. Pada kasus yang terjadi di Rumah Sakit tidak ada capaian SPM belum ditetapkannya target SPM, sifatnya pemantauan terhadap pasien berdasarkan tempat tinggal, untuk pencegahan penularan.

Progres capaian dan target indikator Tuberkulosis tahun 2022 cukup baik sebesar 231 kasus lebih rendah jika dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 354 kasus, dan mengalami penurunan kasus sebesar 21 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan 252 kasus. Data selengkapnya terkait progres capaian target dan indikator Tuberkulosis (TBC) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.38**  
**Progres Capaian dan Target Indikator TBC Tahun 2020-2024**

Indikator		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indikator RPJMN	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	301	252	354	231	-*	211	-	190	-
Indikator Kinerja Program (IKP)	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	80%	48%	85%	46%	90%	74%	90%	-	90%	-
Indikator Kinerja kegiatan (IKK)	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90%	83%	90%	86%	90%	85%	90%	-	90%	-

**Tabel 2.39**  
**Capaian Dan Target Indikator Utama TBC Resistan Obat Tahun 2020-2024**

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Cakupan Pengobatan Tuberkulosis Resistan Obat	42%	16%	60%	20,6%	70%	13%	75%	-	80%	-
Persentase Pasien Tuberkulosis Resistan Obat yang Memulai Pengobatan ( <i>Enrollment Rate</i> )	80%	54%	86%	61%	93%	58%	94%	-	95%	-
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Resistan Obat	75%	47%	75%	45,6%	80%	51%	80%	-	80%	-

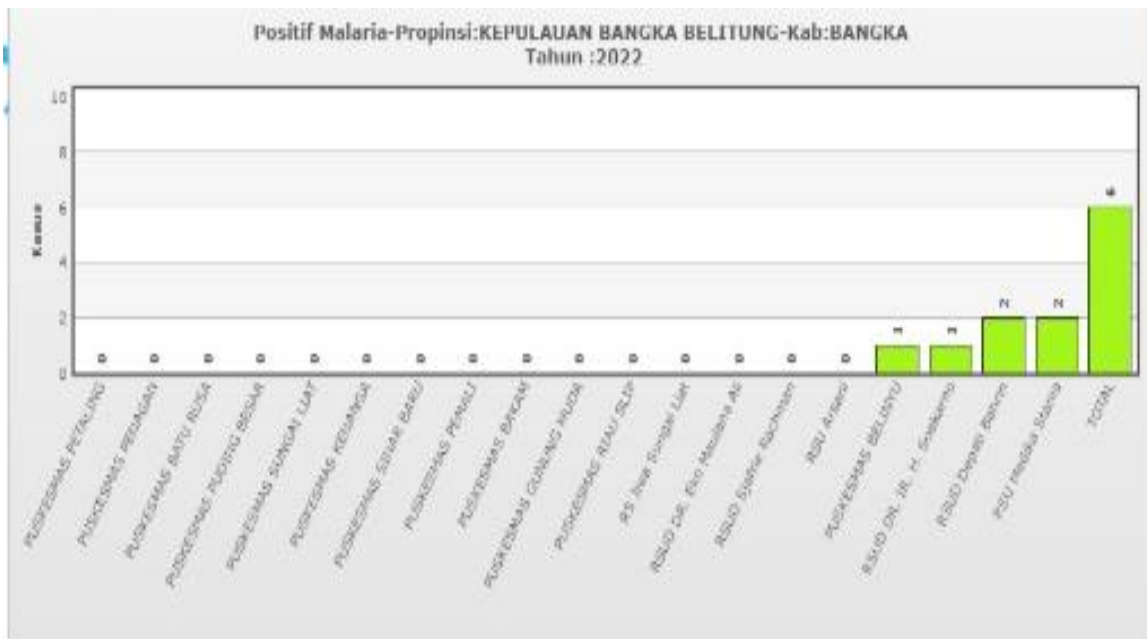
**Tabel 2.40**  
**Capaian Kinerja TB Tahun 2022**

NO	Puskesmas	Target Terduga TBC	Jumlah Total	Capaian %
1	SUNGAILIAT	655	1422	217,10
2	SINARBARU	302	376	124,50
3	KENANGA	403	357	88,59
4	PEMALI	353	364	103,12
5	BAKAM	403	487	120,84
6	BELINYU	454	457	100,66
7	GUNUNG MUDA	302	314	103,97
8	RIAU SILIP	302	319	105,63
9	BATURUSA	404	568	140,59
10	PUDING BESAR	504	551	109,33
11	PETALING	605	612	101,16
12	PENAGAN	353	370	104,82
13	RSUD Depati Bahrin		456	-
14	RSUD Ir Soekarno		200	-
15	RS Arsani		41	-
16	RSMS		199	-
17	Rumah Sakit Jiwa Sungailiat		7	-
18	RSUD DR Eko maulana		37	-
19	RSUD Sjafrie Rachman		5	-
20	KLINIK AL-HUSNI		0	-
21	KLINIK AL-HADI		0	-
22	KLINIK MEDIKA STANIA BELINYU		0	-
	<b>KABUPATEN</b>	<b>5040</b>	<b>7142</b>	<b>141,71</b>

Capaian kinerja untuk kasus TBC semuanya melebihi target artinya kasus TBC berkembang dengan pesat, ini perlu langkah pencegahan untuk meminilisir angka penularan atau jumlah pasien baru.



**Grafik 2.13**  
**Distribusi Positif Malaria Tahun 2022**



Kasus malaria terpantau disetiap puskesmas dan Rumah Sakit, tahun 2022 kasus malaria terdapat 1 (Satu) kasus di Puskesmas Belinyu, 1 (Satu) kasus di RSUD Dr. Ir. H. Soekarno, 2 (Dua) kasus di RSUD Depati Bahrin dan 2 (Dua) kasus di RSU Medika Stania, jumlah 6 (Enam) kasus. Secara konsisten malaria terus dicegah dan ditanggulangi dengan cepat dengan sistem yang baik, karena Kabupaten Bangka sudah berstatus eliminasi sejak tahun 2014.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator seperti jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	8	0	0	3

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	10	10	10	10	10
3	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	478	479	479	479	479
4	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	10	11	11	10	11
5	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
6	Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk	1,52	1,52	1,52	1,45	1,52

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2023

## 2.3. Aspek Layanan Umum

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Mengingat pentingnya pendidikan dasar, maka diperlukan sistem pembelajaran, kualifikasi dan sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini erat kaitannya dengan hasil belajar siswa yang dapat diukur dari pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran teori ataupun praktek yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Disamping itu, beberapa indikator kinerja terkait dengan pelayanan dasar bidang pendidikan menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Fasilitas Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APUS), Angka Kelulusan (AL).

### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan. Selengkapnya perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**  
**Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100,00	103,56	97,97	105,06	99,91
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	95,35	96,27	91,88	87,88	85,85
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5
4	Rasio Guru/Murid	35	35	20,45	18,17	19,30
5	Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata	0,2	0,2	0,7	17,77	19,80

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

### b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat

belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan yang berkualitas. Selengkapanya perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.43**  
**Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sekolah SD Bangunan Baik	93,73	93,92	84,53	94,5	94,6
2	Sekolah SMP Bangunan Baik	96,68	97,78	75,00	85,1	93,5

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

Kriteria Sekolah dengan bangunan baik ini adalah bangunan yang memenuhi persyaratan kenyamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum. Kriteria bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan adalah sebagai berikut:

- Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
- Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
- Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

### c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak, dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu.

**Tabel 2.44**  
**Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,03	73,05	72,54	39,23	53,73

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

Tabel 2.29 menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2018 – 2022 terus mengalami fluktuasi. Persentase PAUD terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 39,23 persen. Di tahun 2022 persentase PAUD mengalami sedikit peningkatan menjadi 53,73 persen.

#### **d. Angka Putus Sekolah (APUS)**

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**  
**Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI	0,05	0,06	0,19	0,7	1,6
2	Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs	0,16	0,23	0,33	1,9	0,3

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

#### **e. Angka Kelulusan (AL)**

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang sama. Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka tahun 2018-2022 tersaji pada tabel 2.42.

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan SD/ MI	99,60	99,85	98,20	99,6	96,4
2	Angka Kelulusan SMP/ MTs	99,88	99,61	99,10	98,7	91,9
3	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	99,97	99,85	99,10	93,5	87,8
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV	82,19	84,54	86,4	88,8	89,3

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2023

## 2. Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru yang dicanangkan PBB yaitu SDG's sebagai kelanjutan dari program MDG's, bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun data sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 disajikan pada table berikut ini.

**Tabel 2.47**  
**Daftar Sepuluh Penyakit Terbanyak Kabupaten Bangka Tahun 2022**

NO	JENIS PENYAKIT ICD10	JUMLAH PENDERITA
1	I10- Essential (Primary) Hypertension / Tekanan Darah Tinggi	13.143
2	J00- Acute Nasopharyngitis / Common Cold / Flu Biasa	16.141
3	K30- Dyspepsia / Gangguan Pencernaan	8.484
4	E11- Non Insulin – dependent Diabetes Mellitus	5.028
5	M79.1- Myalgia / Nyeri Otot	5.611

NO	JENIS PENYAKIT ICD10	JUMLAH PENDERITA
6	J06.9- Acute upper respiratory infection, unspecified / Infeksi Saluran Pernapasan Atas	7.182
7	K04.1- Necrosis of pulp / Kerusakan Gigi	3.510
8	E78.0- Pure Hypercholesteroaemia / Kolesterol Tinggi	2.027
9	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	684
10	Pulpitis	416
<b>TOTAL</b>		<b>62.226</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

#### a. Angka Kematian Bayi

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

**Tabel 2.48**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	4,19	3,25	4,81	6,37	1,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 4,19, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 3,25 namun terjadi peningkatan di tahun 2020 menjadi 4,81 kemudian Kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 6,37 dan kembali menurun pada Tahun 2022 menjadi 1,12.

#### b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (*maternal mortality rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	0,65	0,61	0,80	309,6	57,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

Secara umum selama tahun 2018-2022 AKI di Kabupaten Bangka cenderung bersifat fluktuatif, yaitu 0,65 pada tahun 2018 dan menurun menjadi 0,61 pada tahun 2019 namun mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 0,80. Di Tahun 2021 angka kematian ibu mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 309,6 dan kembali menurun pada Tahun 2022 menjadi 57,29. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan dan terinfeksi virus Covid 19. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak

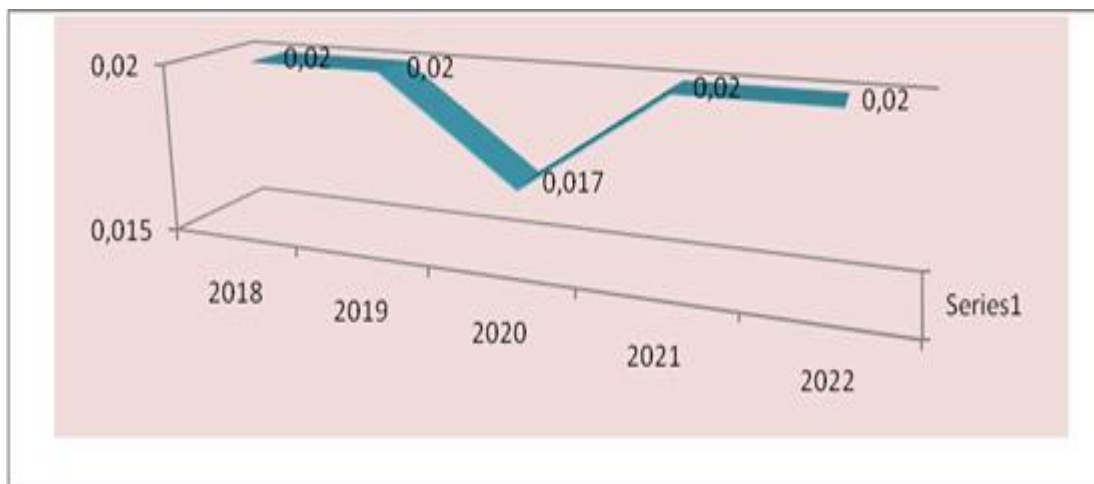


pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat dan dengan optimalisasi inovasi “SMS Bunda Cerdas”. Pemberian tablet penambah daerah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

### c. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Persentase Balita gizi buruk mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 0,02 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 0,017 persen pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 0,02 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022, perkembangan balita gizi buruk tetap diangka 0,02.

**Grafik 2.14**  
**Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2023

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penanganan terhadap jalan di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah persentasi panjangan jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2018 – 2022 sesuai tabel di bawah ini. Namun, memang terdapat penurunan persentasi jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2021 sebesar 72,34%, dimana pada tahun sebelumnya (2020) persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 78,26%. Penurunan persentase jaringan jalan dalam kondisi dalam kondisi baik pada tahun 2021 bukanlah suatu penurunan yang signifikan karena merupakan data kondisi jalan pada triwulan tiga tahun 2021. Tahun 2022, persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Bangka kembali mengalami peningkatan menjadi 75,61%. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyediakan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang memang bergantung pada konektivitas jalan, di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

**Tabel 2.50**  
**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	547.343	547.864	574.877	531.338	555.365
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
Persentase (%)	73,25	74,59	78,26	72,34	75,61

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

#### b. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2018 - 2022 terlihat mengalami peningkatan mulai pada tahun 2021. Berdasarkan data perkembangan jaringan irigasi, dari kurun waktu tahun 2018 – 2020

memang terlihat tidak ada peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran terhadap peningkatan kualitas daerah irigasi serta terkonsentrasinya anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan jaringan irigasi di Kabupaten Bangka untuk sementara dialihkan. Pada tahun selanjutnya, penanganan jaringan irigasi dilakukan kembali sehingga pada tahun 2021, luas jaringan irigasi Kabupaten Bangka yang dalam kondisi baik sebesar 2.255,04 Ha atau 98,73%. Pada tahun 2022, luas jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 99,55%. Dengan kondisi daerah irigasi Kabupaten Bangka yang hamper 100% dalam kondisi baik, diharapkan ketersediaan infrastruktur ini menjadi salah satu dukungan terhadap peningkatan sentra produksi pangan di Kabupaten Bangka, sehingga kedepannya Kabupaten Bangka dapat menjadi daerah yang mandiri pangan, bahkan dapat berkontribusi secara nasional dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

**Tabel 2.51**  
**Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	2.240	2.240	2.240	2.255,04	2.273,63
Luas irigasi Kabupaten	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
<b>Ratio (%)</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>	98,07	<b>98,73</b>	<b>99,55</b>

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bangka perlu dilakukan penyusunan indikasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketaatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/*urgensi* dari program/sub program maupun sektor/sub sektor yang harus diprioritaskan.

**Tabel 2.52**  
**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	100	100	93	100	72,22
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	76,79	91,26	95	98,44	98,38
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	88,40	95,63	94	99,22	85,30

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

Persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka dilihat dari tiga indikator, yaitu persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung, persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya, dan persentase ketaatan terhadap RTRW. Berdasarkan time series tahun 2018 – 2022 pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW.

#### d. Luas Wilayah Produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2022 memiliki luas sebesar 248.324,6 Ha dari luas seluruh wilayah/kawasan budidaya sebesar 261.823,44 ha, secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini. Pola ruang kawasan budidaya secara

spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi.

**Tabel 2.53**  
**Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah Produktif (Ha)	260.544,25	210.052,5	202.000,22	249.910,43	248.324,6
2	Luas Wilayah Budidaya (Ha)	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44
3	Rasio (1/2)	99,51	80,23	77	95,45	94,84

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
  - Kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
  - Kawasan peruntukan pertanian lahan kering
3. Kawasan peruntukan perkebunan;
4. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
5. Kawasan peruntukan peternakan;
6. Kawasan peruntukan perikanan;
7. Kawasan peruntukan pertambangan;
8. Kawasan peruntukan industri;
9. Kawasan peruntukan pariwisata.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Permukiman**

Pada urusan wajib perumahan ini yang menjadi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Persentase Rumah Layak Huni**

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 yakni sebesar 98,16%.

**Tabel 2.54**  
**Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Layak Huni	76.814	77.627	77.627	77.766	84.094
Jumlah Seluruh Rumah	78.376	79.669	79.695	79.695	85.667
Ratio	98,01	97,40	97,40	97,57	98,16

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2023

b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada Tabel 2.51. Realisasi persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,05 persen dibanding tahun 2021 sebesar 89,74 persen. Dukungan pencapaian target ini dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan dari APBN melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) I dan II baik reguler maupun berupa Hibah Insentif Desa (HID).

**Tabel 2.55**  
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	87.782	89.820	90.220	90.743	72.084
Jumlah RT	95.734	90.998	95.984	101.115	80.045
Rasio (%)	91,69	98,71	93,99	89,74	90,05

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2023

c. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan listrik di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 meningkat menjadi 67.868 rumah tangga atau sebesar 74,58% dibanding tahun 2019 sebanyak 59.932 rumah tangga, seperti tersaji pada Tabel 2.52. Pada prinsipnya seluruh desa di Kabupaten Bangka sudah dialiri listrik walaupun

belum semua masyarakat memiliki sambungan rumah terhadap listrik yang sudah tersedia.

**Tabel 2.56**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah RT yang memiliki sambungan listrik (Unit)	77.395	82.481	83.457	92.231	70.548
Jumlah RT (Unit)	78.004	96.892	95.984	99.950	102.189
Ratio (%)	99,21	85,13	86,95	92,28	69,04

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 91,69% dan terus meningkat sampai pada tahun 2022 menjadi sebesar 95,38%, seperti tersaji pada tabel 2.53.

**Tabel 2.57**  
**Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
% Rumah Tangga Bersanitasi	91,69	94,12	95,15	95,32	95,40

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka,/DINPUPR Kabupaten Bangka, 2023

Kenaikan jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bangka merupakan keberhasilan kinerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bangka yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan jamban yang didanai dari APBD Kabupaten (pemicuan), Program Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten Bangka 2021, Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2021, Program Pembangunan Rumah Layak Huni dari APBD Provinsi 2021, peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta (*Corporate Social Responsibility/CSR*)serta

program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan.

e. Lingkungan Permukiman Kumuh

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka adalah :

- Kecamatan Sungailiat yaitu Lingkungan Nelayan I seluas 26,32 ha, Lingkungan Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday 3,572 ha, dan
- Kecamatan Belinyu yaitu Kelurahan Kuto Panji seluas 2,44 ha dan Kelurahan Air Jukung seluas 27,98 ha;
- Dengan total luas 105,42 ha.

Namun, setelah dilakukan verifikasi data melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diperoleh data kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bangka untuk tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/607/DINPERKPP/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/325.5/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka seluas 49,36 ha. Kawasan Kumuh yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah tersebut adalah Nelayan seluas 16.52 Ha, Parit Pekir seluas 20.67 Ha, HOS Cokroaminoto seluas 1.20 Ha, dan Mantung seluas 10.97 Ha.

**Tabel 2.58**  
**Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	50,02	49,27	73,60	49,36	45,26
Luas Wilayah	302.879	302.879	302.879	302.879	302.879
Ratio (%)	0,017	0,016	0,024	0,016	0,015

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2023

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 seluas 45,26 ha atau sebesar 0,015% mengalami penurunan dibandingkan dengan



tahun 2021 kurang lebih 49,36 ha atau sebesar 0,016 persen dari total luas wilayah, seperti tersaji pada Tabel 2.53.

Kondisi ini disebabkan keberhasilan dari program pengentasan kumuh kota terhadap lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan dan perbaikan drainase, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana persampahan seperti bank sampah, dan pengelolaan air limbah. Program pengentasan kawasan kumuh bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi dan APBN melalui kegiatan skala kawasan (Nelayan II).

## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol, dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja yaitu angka kriminalitas kabupaten seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.59**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	273	342	311	189	189*
2.	Jumlah Penduduk	316.093	318.756	320.552	323.107	334.344
3.	Angka Kriminalitas	0,00086	0,00107	0,00097	0,00058	0,00056

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2023 (data diolah)

Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami trend yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka kriminalitas sebesar 0,00086 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,00056.

## 6. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan. Tabel berikut ini menunjukkan

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu kurun waktu 2018-2022 yang cenderung fluktuatif.

**Tabel 2.60**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
1. Jumlah Penduduk miskin (RT)	17.290	16.520	15.410	85.000	103.120
2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial					
a. Lanjut Usia Terlantar (orang)	35	35	35	126	177
b. Komunitas Adat Terpencil (orang)	-	-	-	-	-
c. Penyandang Cacat (orang)	930	1.714	363	858	1.048
d. Pengungsi dan Korban Bencana (orang)	343	138	214	1.578	247
4. Jumlah Penghuni Panti Asuhan (orang)	106	125	65	136	136
5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					
a. Karang Taruna (orang)	76	67	62	89	90
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) (orang)	8	8	8	4	8

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bangka dan BPS Kabupaten Bangka, 2023

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 sebanyak 159.365 orang dan pada tahun 2022 menjadi 222.288 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61

## Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	155.733	159.950	159.985	159.365	222.288
2	Jumlah Penduduk usia 15 - 64 Tahun	230.001	153.874	227.206	233.953	219.111
3	Jumlah Pekerja yang Ditempatkan	897	103	94	108	72
4	Jumlah Pekerja yang Mendaftar	989	285	252	153	451

Sumber : Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2023

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki.

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (*Gender Parity Index/GPI*) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 2018-2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**  
**Anak Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022*
<b>Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar</b>					
▪ <b>Rasio APM perempuan / laki-laki di SD</b>	1,01	1,01	1,01	0,99	0,99
▪ <b>Rasio APM perempuan / laki-laki di SMP</b>	1,50	0,96	0,96	1,04	1,04
<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b>	16,67	17,14	17,14	14,28	14,28

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, 2023

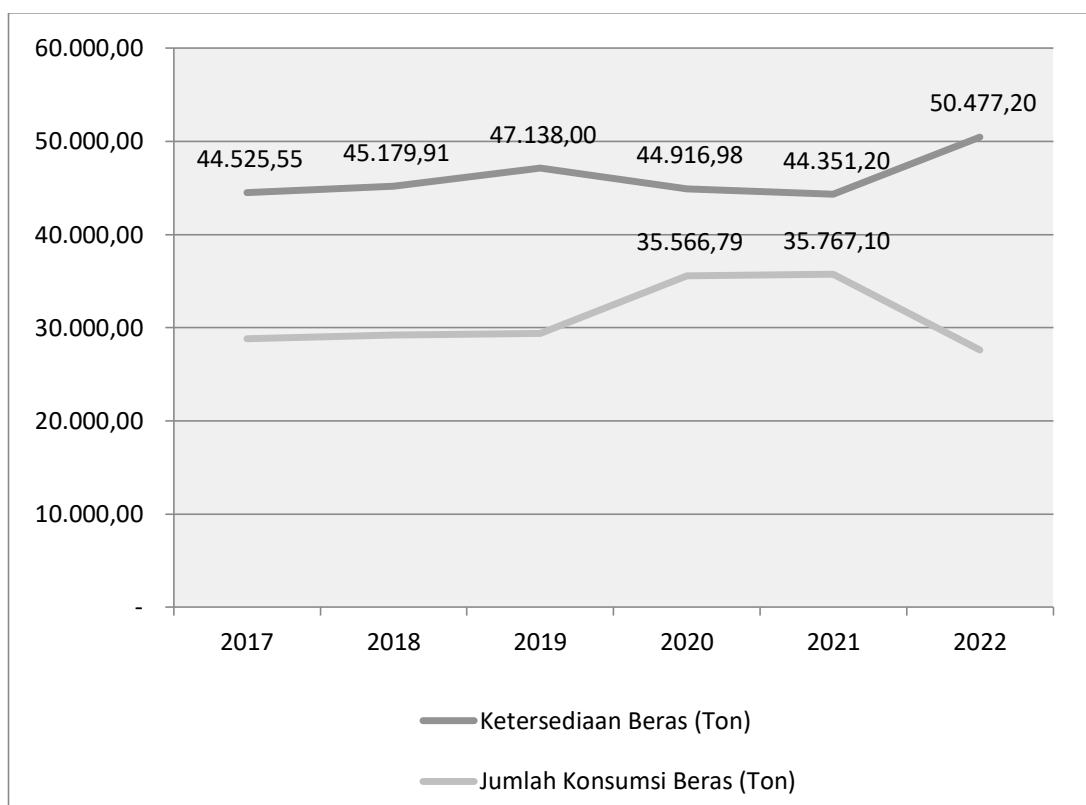
### 3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting, disamping ketersediaan pangan itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi.

Di bawah ini ditampilkan tabel ketersediaan bahan pangan beras dan jumlah konsumsi beras di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2017 – 2022. Pada kurun waktu tahun 2017 – 2019 ketersediaan beras lebih banyak hingga hampir dua kalinya dari konsumsi besar. Pada tahun 2018 misalnya, ketersediaan beras sebesar 44.525,55 ton, sedangkan konsumsi beras hanya sekitar 29.000 ton. Demikian juga pada tahun 2019, persediaan beras di Kabupaten Bangka sebesar 47.138 ton sedangkan konsumsi beras hanya sekitar 30.000 ton. Namun pada tahun 2020 dan 2021, ketersediaan beras

di Kabupaten Bangka menurun, yaitu 44.916,98 ton pada tahun 2020 dan 44.431,20 ton pada tahun 2021. Berbanding terbalik dengan ketersediaan beras yang menurun pada tahun 2020 dan 2021 tersebut, jumlah konsumsi beras Kabupaten Bangka pada tahun tersebut meningkat. Pada tahun 2020, konsumsi beras Kabupaten Bangka sebesar 35.566,79 ton dan konsumsi beras pada tahun 2021 sebesar 35.767,10 ton. Angka ini dikatakan meningkat disbanding konsumsi beras di tahun 2017 – 2019 yang di bawah 30.000 ton. Pada tahun 2022 ketersediaan beras sebesar 50.477,20 ton dan jumlah konsumsi beras sudah dibawah 30.000 ton.

**Grafik 2.15**  
**Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2017 - 2022**



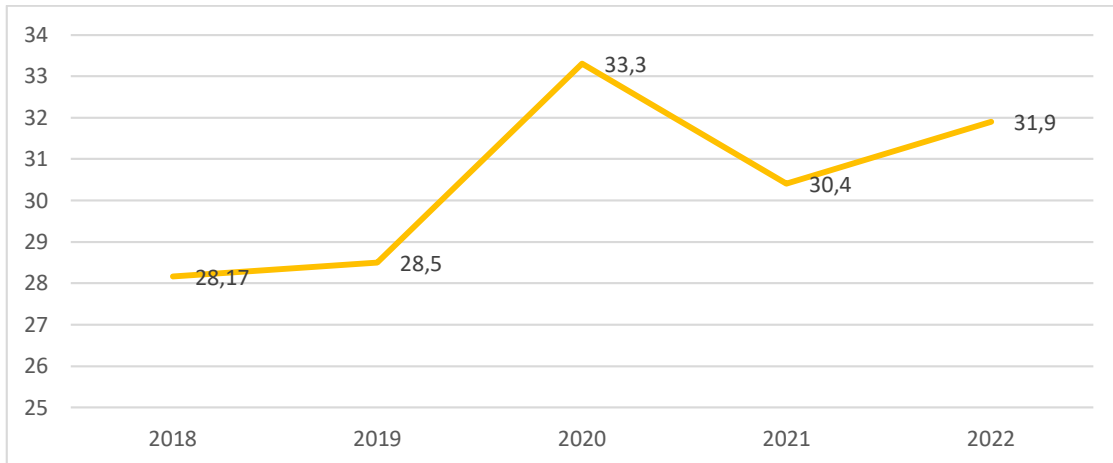
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2023

#### 4. Pertanian

Indikator kinerja bidang pertanian di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2018-2022. Tahun 2018 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 28,17 persen saja, meningkat hingga mencapai 28,5 persen pada tahun 2019, tahun 2020 menjadi 33,33% dan pada

tahun 2021 menurun menjadi 30,4%. Pada Tahun 2022 persentase luas lahan yang bersertifikat mencapai 31,9% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021.

**Grafik 2.16**  
**Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber: DINPERKPP Kab Bangka, 2023

## 5. Lingkungan Hidup

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2018-2022 tersaji pada tabel 2.59.

**Tabel 2.63**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*
<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	91,72	91,70	98,91	88,22	87,5
<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	1,56	7,42	8,74	9,08	10,01

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah TPS per Satuan Penduduk	0,25	0,25	0,25	0,15	1,03

Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2023

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 87,5%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 88,22%. Penurunan penanganan persampahan ini disebabkan oleh daya tampung TPA yang semakin menurun. Jika dilihat dari tabel, persentase pengurangan sampah semakin meningkat dan jumlah penduduk per satuan penduduk juga meningkat, namun secara keseluruhan, pembangunan TPS3R dan bank sampah masih terbilang minim, apalagi terdapat TPS3R yang menjadi tidak aktif. Pengelolaan persampahan pada tahun 2022 hanya sebesar 62,86% saja. Hal ini disebabkan karena layanan persampahan baru mencakup wilayah perkotaan saja, terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, serta rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan hidup daerah ini adalah Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah. Untuk memastikan kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka maka ditetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kinerja Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana.

Berikut ini tabel indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

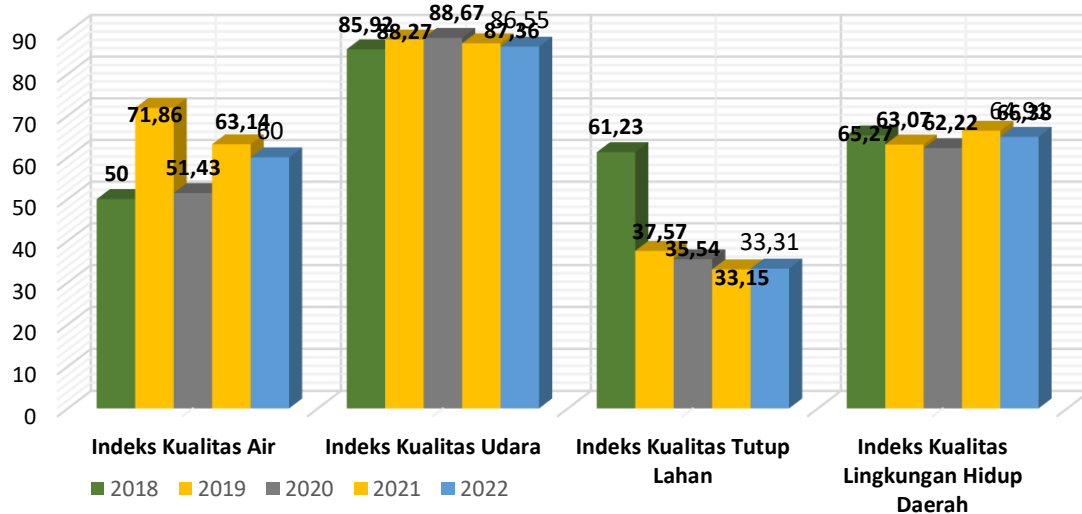
**Tabel 2.64**  
**Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2019 - 2022**

NO	INDIKATOR SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,27	63,07	62,22	66,38	64,91
2.	Indeks Resiko Bencana	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40

Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 mencapai 64,91, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 66,38. Penurunan IKLH tersebut sebesar 0,25% dari target pembangunan tahun 2022 atau menurun 2,21% dari pencapaian indeks di tahun 2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan akumulasi dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Perkembangan komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.17**  
**Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**



Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pengukuran indeks kualitas air sebesar 60,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat penurunan kualitas air di Kabupaten Bangka. Namun, jika dilihat dari tolak ukur kualitas air, maka kualitas air di Kabupaten Bangka masih masuk kategori tercemar ringan.

Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 86,55, mengalami penurunan dibanding hasil pengukuran IKU pada tahun 2021 memiliki nilai 87,36. Hasil pengukuran ini termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi  $\text{NO}_2$  yang rata-rata berasal dari sektor transportasi



masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO<sub>2</sub> yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah.

Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), luas tutupan lahan di Kabupaten Bangka seluas 35.589,8730 hektar dari luas wilayah administrasi 302.879,47 hektar sehingga skor IKTL pada tahun 2022 sebesar 33,31. Nilai ini meningkat dari angka IKTL Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebesar 33,15. Namun jika dibandingkan dengan skor IKTL tahun 2020 sebesar 35,54 mengalami penurunan. Dengan skor IKTL Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 33,31 menunjukkan bahwa indeks kualitas lahan Kabupaten Bangka berada pada kriteria kurang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penambangan, perluasan permukiman penduduk, kebakaran hutan, dan belum optimalnya penegakan aturan terkait tata ruang yang mendukung pelestarian lingkungan. Untuk itu perlu upaya untuk penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH), salah satunya melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan perlu publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Indikator lain yang menjadi indikator kinerja pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah Indeks Resiko Bencana. Indeks resiko bencana menggambarkan kondisi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan capaian yang sangat baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari rasio kepemilikan KTP pada tahun 2021 mencapai 99,37 persen, meningkat dibandingkan rasio kepemilikan KTP tahun 2020 sebesar 99,36 persen, seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,97	0,96	0,97	0,98	1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,88	0,88	0,89	0,90	0,97
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,79	0,79	0,79	0,48	0,48
4	Kepemilikan KTP (%)	92,79	99,11	99,36	99,37	100
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	88,20	92,60	95,67	90,42	96,82

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.50, untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2022 telah mencapai nilai sebesar 96,82%. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi covid sudah berangsur pulih sehingga masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasanya dan mendorong animo masyarakat untuk mengurus akte kelahirannya.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun dan persentase Desa Swasembada. Perkembangan capaian masing-masing indikator tersebut dalam periode tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan Rata - Rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa**  
**Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rata-rata Indeks Desa membangun	0,6711	0,6760	0,6842	0,7133	0,7133
	Jumlah Desa Mandiri	0	0	1	8	8
	Jumlah Desa Maju	10	11	14	21	21
	Jumlah Desa Berkembang	52	51	47	33	33
	Jumlah Desa Tertinggal	0	0	0	0	0



2	Persentase Desa Swasembada (%)	24,19	25,81	27,42	46,77	46,77
	Jumlah Desa Swasembada	15	16	17	29	29
	Jumlah Desa se- Kabupaten Bangka	62	62	62	62	62

Sumber : Dinpemdes Kabupaten Bangka, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rata-rata Indeks Desa membangun Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari 0,6842 pada tahun 2020 menjadi 0,7133 pada tahun 2021. Hal ini seiring dengan peningkatan status perkembangan desa, di mana pada tahun sebelumnya belum terdapat desa dengan status mandiri sedangkan untuk tahun 2021 sudah terdapat 1 Desa mandiri. Pada tahun 2017 masih terdapat 10 Desa yang termasuk kategori Desa Tertinggal, mengalami peningkatan status pada tahun 2021 sehingga seluruhnya memenuhi kategori Desa Berkembang. Demikian pula halnya dengan Desa yang termasuk kategori Desa Maju meningkat dari 4 Desa pada tahun 2017 menjadi 14 Desa pada tahun 2020. Sementara jumlah Desa Swasembada juga mengalami peningkatan dari 10 Desa pada tahun 2017 menjadi 29 Desa pada tahun 2021.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

**Tabel 2.67**

### **Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS	49.017	52.450	51.938	51.798	48.332
2	Jumlah Peserta KB Aktif	38.092	38.393	40.804	40.300	35.796

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah PUS di Kabupaten Bangka sebanyak 48.332 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta KB aktif tahun 2022

sebanyak 35.796 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 40.300 orang.

**Tabel 2.68**  
**Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
1.	Keluarga Prasejahtera	469	271	281	NA	NA
2.	Keluarga Sejahtera 1	2.921	2.076	2.385	1296	1296
<b>Jumlah</b>		<b>14.163</b>	<b>3.390</b>	<b>2.666</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2018 Keluarga Prasejahtera berjumlah 469 dan Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 2.921. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 jumlah Keluarga Prasejahtera tinggal sebanyak 281 kepala keluarga dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 2.385 keluarga.

Pada tahun 2020 di masa pandemic covid-19 yang berdampak signifikan pada tatanan kehidupan masyarakat, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan keluarga prasejahtera pada tahun mengalami sedikit kenaikan sebanyak 10 keluarga dibandingkan pada tahun 2019, menjadi 281 keluarga prasejahtera. Sedangkan keluarga prasejahtera I juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 pada angka 2.076 keluarga prasejahtera I, pada tahun 2020 naik menjadi 2.385 keluarga prasejahtera I. pada tahun 2021 terjadi perubahan metode pencatatan pendataan Keluarga, pencatatan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 digabungkan menjadi satu data, di tahun 2021 keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 sebesar 1.296 menurun secara signifikan di bandingkan tahun 2020.

## 9. Perhubungan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Perhubungan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa kontribusi sub sektor transportasi terhadap PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun

2018 – 2022. Dimana pada tahun 2018 kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB sebesar 2,38%, meningkat menjadi 2,54% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan, menjadi 2,30%, 2,22%, dan meningkat kembali menjadi 2,29% pada tahun 2022. Penurunan ini dinilai sebagai dampak dari Covid-19 yang membatasi mobilitas manusia, keterbatasan bahan baku sehingga mempengaruhi aktivitas perdagangan dan jasa yang didukung oleh sektor transportasi dan perdagangan. Meskipun saat ini sudah memasuki new normal, aktivitas remote ini mungkin mengubah gaya hidup masyarakat pada umumnya, sehingga mobilitas menjadi menurun dan menyebabkan sektor transportasi terdampak.

**Tabel 2.69**  
**Kontribusi Sektor Transportasi Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi Sektor Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	2,38%	2,54%	2,30%	2,22%	2,29%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam 5 (tiga) tahun terakhir (2018 – 2020) mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.70**  
**Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Indeks SPBE	2,36	2,47	2,77	2,25	1,8

Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Cukup
----------	-------	-------	------	-------	-------

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Bangka, 2023

## 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif sebanyak 138 unit dan di tahun 2022 sebanyak 109 unit. Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Bangka juga menunjukkan tren positif dimana pada tahun 2019 sebanyak 32.118 unit, meningkat menjadi 34.113 unit pada 2020. Namun pada tahun 2022, jumlah Usaha Mikro menurun menjadi 31.379 unit. Data terkait koperasi dan usaha menengah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.71**  
**Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Koperasi Aktif (unit)	138	140	136	108	109
2	Koperasi Tidak Aktif (unit)	65	65	71	101	102
3	Jumlah Induk Koperasi (unit)	-	-	-	-	-
4	Jumlah Koperasi Primer (unit)	203	205	207	210	211
5	Jumlah KUD (unit)	8	8	8	8	8
6	Jumlah Non KUD (unit)	195	197	199	202	203
7	Pengusaha Besar	-	-	-	-	-
8	Pengusaha Menengah	37	37	-	37	37*
9	Pengusaha Kecil	22.615	22.615	22.740	22.654	22.654*
10	Pengusaha Mikro	32.021	32.118	34.113	32.118	31.379

Sumber : DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, 2023

## 12. Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Komoditi inilah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modal di

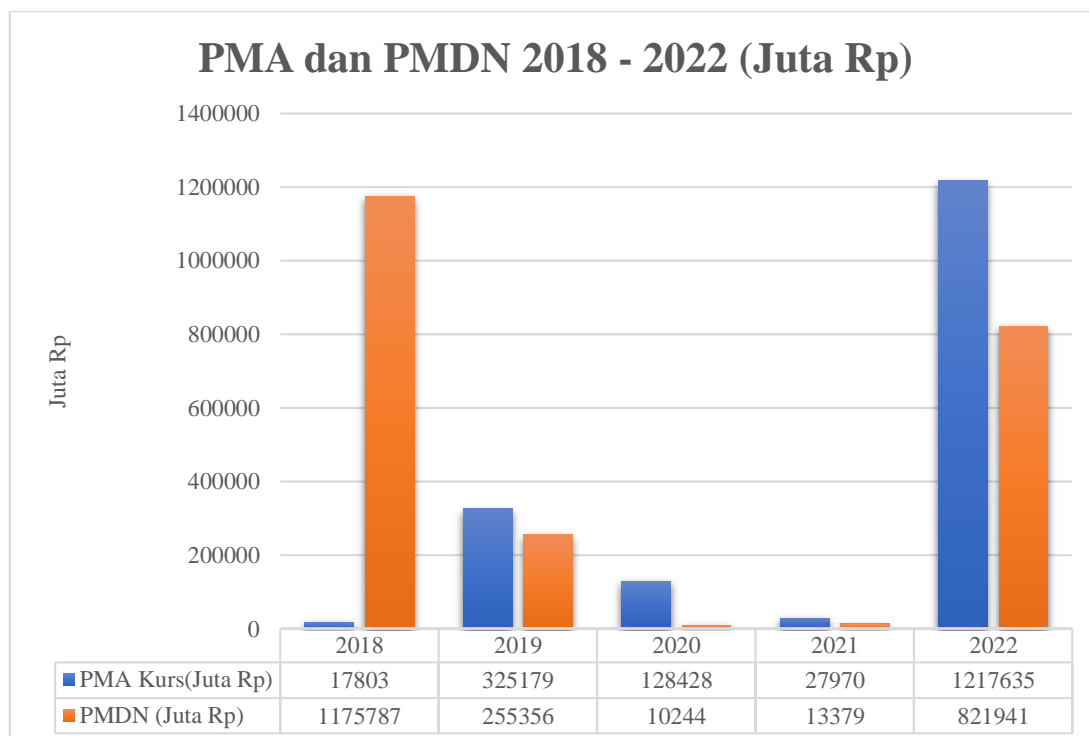
Kabupaten Bangka, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa. Sektor ini dibentuk oleh 3 (tiga) sub sektor yaitu: sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel, dan sub sektor restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sektor yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.

Pada tahun 2020 nilai investasi di Kabupaten Bangka baik PMDN dan PMA mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Nilai PMDN turun sebesar Rp. 245.112.000.000,- dan nilai PMA naik menjadi sebesar Rp 172.244.960.000,-

Pada tahun 2021 nilai investasi di Kabupaten Bangka PMDN sebesar Rp. 13.379.000.000,- dan PMA sebesar Rp. 27.970.000.000,-. Dan pada triwulan III tahun 2022 nilai invstasi di Kabupaten Bangka PMDN sebesar Rp 164.795.000.000,- dan PMA sebesar Rp 396.309.000.000,-.

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 2.18**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**



Sumber : DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, 2023

Terjadi pergeseran sektor investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 investor lebih tertarik untuk berinvestasi ke bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta perdagangan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus berjalan meskipun tidak lagi ditopang oleh sektor pertambangan sebagai sektor penggerak utama perekonomian. Dengan demikian, Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah berhasil menghadapi era pasca pertambangan timah dengan mencari sektor alternatif penggerak perekonomiannya.

Pada tahun 2022 triwulan III, terjadi kenaikan investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) terutama di sektor industri pengolahan, pertanian, peternakan dan perikanan terutama budidaya udang. Kenaikan investasi signifikan juga terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama di sektor industri pengolahan makanan, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.72**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	478	479	479	479	479
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	10	11	11	11	11



No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022*
3	Rasio Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk	1,52	1,52	0,99	1,39	1,39

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2023

#### 14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diukur melalui indikator persentase ketersediaan data informasi indikator yang akurat dan *up to date*, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2021 angka capaian 0% mendapat kriteria kurang baik/tidak berhasil (SK). Kondisi ini terjadi karena untuk tahun 2021 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pada anggarannya di *refocusing* dan dialokasikan untuk penanganan wabah Virus Corona (COVID-19). Untuk Tahun 2022 indikator ketersediaan data informasi statistik pada Dinas Kominfotik dengan capaian 100 persen.

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan up to date	100 %	100 %	0%	0%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Dinkominfotik Kab.Bangka, 2023

#### 15. Kebudayaan

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kebudayaan dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.74**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	8	0	0	6
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	10	10	0	0	10

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2023

Pada tahun 2021 capaian pembangunan penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak dapat terlaksana akibat wabah Virus Corona (COVID-19). Semua kegiatan dihentikan untuk mencegah penyebaran virus. Pada tahun 2022 capaian pembangunan penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 3 kali.

#### 16. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam penguasaan informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan daerah Kabupaten Bangka hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan daerah	11.713	12.643	12.643	12.643	11.979
2	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah	16.038	18.751	18.751	18.751	17.590

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	79.351	143.486	1.504	521	5.503

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, 2023

Pada tahun 2022, jumlah koleksi judul buku sebanyak 11.979 judul buku, jumlah tersebut berkurang dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah koleksi buku pada tahun 2022 sebanyak 17.590 berkurang juga dari tahun sebelumnya. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2021 berjumlah 521 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.504 orang pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh Virus Corona (COVID-19) yang memaksa masyarakat untuk mengurangi kunjungan ke tempat umum dan berinteraksi dengan banyak orang. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung perpustakaan meningkat menjadi 5.503.

## 17. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka diukur melalui beberapa indikator, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang tertib arsip (baku, sesuai ketentuan Permendagri)	67,43	69,57	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang dibina dan dilatih (pembinaan dan pelatihan pengelola arsip)	100,00	20,00*	64,29	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Persentase arsip dinamis dan statis yang terdata dan tertata baik (sama dengan terselamatkan, tidak kacau)	20,04	21,88*	73,91	78,91*	93
4.	Persentase arsip dinamis dan statis yang tertata dan terpelihara baik (dirawat)	100,00	24,96*	73,91	78,91*	100
5.	Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (didata arsip statis)	17,65	17,65	50,00	52,31	65

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, 2023

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2021 sebanyak 27.923,83 ton, meningkat sebesar 929,83 ton dari tahun 2020. Ketersediaan sarana kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2021 sebanyak 2.725 unit, meningkat 5 unit dari tahun sebelumnya.

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2022 sebanyak 28.055,24 ton, meningkat sebesar 123,41 ton dari tahun 2021. Ketersediaan sarana kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2022 bertambah 22 unit menjadi total sebanyak 2.747 unit.

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	TAHUN					SATUAN
	2018	2019	2020	2021	2022	
Perikanan Laut						
1. Jumlah Tangkapan	27.261	26.214	26.994	27.923,83	28.055,24	Ton
2. Jumlah Kapal Penangkap Ikan	2.982	2.842	2.720	2.725	2.747	Unit
3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan	8.949	6.669	5.941	6.721	2.977	RTP
4. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	1	1	1	1	1	Unit
Perikanan Darat						
1. Tambak						
a. Luas	66,11	271,26	271,02	361,895	170.337	Ha
b. Jumlah Produksi Perikanan Darat	596,07	1.925,21	1.910,61	3.389,522	2.373.219	Ton
2. Kolam						
a. Luas	9,63	32,27	33,12	22,591	22.590	Ha
b. Jumlah Produksi Rumah Tangga	187,02	200,28	212,32	165,999	295.594	Ton

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2023

## 2. Pariwisata

Menipisnya cadangan sumber daya alam terutama timah yang menjadi tumpuan industri ekstraktif membuat pemerintah daerah perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap cukup potensial untuk dikembangkan karena potensi pariwisata Kabupaten Bangka yang sangat besar, menjadi harapan penunjang sektor lainnya sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan *spending of money tourism* selama kurun waktu 2018 - 2022 seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.78**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Spending of Money Tourism Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	77.130	90.714	91.563	234.455	251.292
2	Spending Of Money Tourism	Milyar/tahun	8,77	16,31	16,90	121,942	154,277

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2023

### 3. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bangka merupakan program prioritas karena terkait dengan peningkatan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi pada padi dan jagung yang mengakibatkan kebutuhan beras dan jagung dari luar daerah semakin tinggi.

**Tabel 2.79**  
**Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

Uraian	Capaian					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
A. Padi						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	5.078	5.315,70	6.079,38	4.365,45	4.154,80	Ha
2). Produksi Beras	9.569,40	10.092,50	14.977,38	12.317,30	11.635,25	Ton
3). Jumlah Konsumsi Beras	35.088	30.498,70	40,460	27.022,53	27.613,5	Ton/ Tahun
B. Jagung						
1). Jumlah Areal	895,4	759,9	358,1	262	240,45	Ha



Uraian	Capaian					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Produksi (Panen)						
2). Jumlah Produksi	4924,7	3.799,50	1.848,08	1.319,34	1.203,41	Ton
3). Jumlah Konsumsi	634,1	637,5	648,1	128,22	131,9	Ton/ tahun
C. Singkong dan Hasil Umbi- Umbian						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	1.826,00	2.049,00	2.158,10	2.093,40	1.615,50	Ha
2). Jumlah Produksi	24.779,00	28.281,00	44.557,70	57,581	47.782,50	Ton
3). Jumlah Konsumsi	10.640,30	10.697,50	32,000	3.718,403	5.278,5	Ton/ tahun

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 luas panen padi seluas 4.154,80 hektar dengan produksi beras sebesar 11.635,28 ton, sementara jumlah konsumsi beras sebesar 27.613,5 ton/tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap beras dari luar daerah masih tinggi yaitu sekitar 15,972,22 ton/tahun.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2022 seluas 240,45 Ha, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seluas 262 Ha, demikian juga dengan produksi jagung pada tahun 2022 menjadi 1.203,41 ton. Konsumsi perkapita jagung selama tahun 2022 sebanyak 131,9 ton.

Tabel 2.75 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong dan umbi-umbian pada tahun 2022 menurun menjadi 1.765,60 Ha dibandingkan tahun sebelumnya seluas 2.093,40 Ha. Demikian juga produksinya menurun pada tahun 2022 menjadi 48.988,50 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 57.581 ton.

#### 4. Perdagangan

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2018 - 2021. Penurunan yang terjadi akibat kontraksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 12,29% menjadi 13,13% pada tahun 2022.

**Tabel 2.80**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 - 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,90%	14,09%	13,02%	12,29%	13,13%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

#### 5. Industri

Pelaksanaan urusan industri di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 sebesar 22,44% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 21,42%. Kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2022, kontribusi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 26,01% pada tahun 2022 yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.81**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	22,44%	21,42%	21,56%	24,22%	26,01%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023



## 2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Perkembangan hasil EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**  
**Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022*
TAHUN LPPD	2017	2018	2019	2020	2021
SKOR EKPPD	3,1147	3,2853	3,5611	3,5611	3,5611
PERINGKAT NASIONAL	60	60	-	-	-

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka, 2023

### b. Bidang Perencanaan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah hasil penilaian perencanaan dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat Provinsi dan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tingkat Nasional.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan hasil penilaian terhadap perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bangka memperlihatkan hasil yang sangat positif sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83**  
**Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022*
<b>HASIL PENILAIAN TINGKAT PROVINSI</b>	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2018	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2019	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2020	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2021	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2022
<b>HASIL PENILAIAN TINGKAT NASIONAL</b>	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2018	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2019	Penghargaan Top 3 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2020	Penghargaan Top 1 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2021	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2022

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2023

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perencanaan adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemkab Bangka mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84**  
**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja)**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Hasil Penilaian AKIP (Komponen Perencanaan Kinerja)</b>	22,30	22,95	23,57	23,75	23,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2023

### c. Bidang Keuangan

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir semakin membaik, dalam hal ini dapat dilihat melalui opini hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.85**  
**Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LKPD Pemkab Bangka</b>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka, 2023

#### **d. Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah**

Fokus layanan pada Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah termasuk Pemkab Bangka adalah Indeks Profesionalitas ASN yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi (pendidikan formal), Kompetensi (Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya), Kinerja (penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja individu dan organisasi), dan Disiplin (riwayat hukuman disiplin).

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka selama empat tahun terakhir, walaupun masih berada pada kategori “Rendah”, akan tetapi menunjukkan perbaikan secara kontinyu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.86**  
**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018**	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	58,80	67,26	63,73	63,86	64,00
Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga masuk kategori “Sangat Rendah” dengan nilai 58,80. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi pengukuran berdasarkan ketentuan dari pusat. Selanjutnya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, maka pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,26 dengan kategori “Rendah”, namun untuk tahun 2020 Indeks Profesionalitas ASN turun lagi menjadi sebesar 63,73 dengan kategori “Rendah”. Untuk tahun 2021 dan 2022, Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 63,86 masih dengan kategori “Rendah”.

#### **e. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka termasuk salah satu pemerintah daerah dengan kategori “Sangat Inovatif” berdasarkan hasil penilaian *Innovative Government Award* (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam lima tahun terakhir juga selalu mendapatkan apresiasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan beberapa inovasi berhasil menembus Top 35, Top 45 dan Top 99 Inovasi Terbaik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.87**  
**Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Kompetisi Inovasi**  
**Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2016-2022**

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
1	2016	5 inovasi	1	SIM data AMPL Bangka, Tak Lekang oleh Waktu	BAPPEDA	3 Inovasi TOP 99,
			2	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan "Ibu"	DINKES	1 inovasi TOP 35
			3	Kurangi Risiko Kecacatan dan Kematian Melalui Layanan Gawat Darurat oleh PSC SPGDT yang berbasis IT.	SPGTD	
			4	Eliminasi Malaria	DINKES	
			5	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
2	2017	9 inovasi	1	SENSASI SILET PSC 119 (Sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan Emergency Terpadu)	SPGTD	1 inovasi TOP 99, Bang Muda
			2	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
			3	Si Surtam (Survey Kontak Malaria, Eliminasi Malaria Di Bangka)	DINKES	
			4	SMS Bunda Cerdas	DINKES	
			5	Bangka Jambanisasi Total (Bang Jamal)	BAPPEDA	
			6	Kemiskinan Bangka dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			7	"MAJELIS SABTU!!" - Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			8	Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR) - Petani Menjadi Tuan Tanah Di Daerahnya Sendiri	DINAS PERTANIAN	
			9	BANG MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) - Solusi Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	DINAS DUKCAPIL	
3	2018	11 inovasi	1	Perburuan Si Resti Turunkan AKI	DINKES	11 inovasi telah melalui seleksi administrasi KEMENPAN RB, SIMPANAN CANTIK
			2	Rumah Bang Baliga (Rumah Penimbangan Balita Siaga) Solusi Pemantauan Status Gizi Balita Diluar Jadwal Posyandu	DINKES	



NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			3	Layanan Emergency Berbasis IT Solusi Kegawatdaruratan Medis Dan Non Medis Kabupaten Bangka	DINKES	memperoleh TOP 99
			4	"SIMPANAN CANTIK" (Sistem Pelayanan Cepat Akurat dan Tepat Medik) RSUD DEPATI BAHRIN Kabupaten Bangka	RSUD DEPATI BAHRIN	
			5	MADU SARI (Masyarakat Peduli Sampahnya Sendiri)	DINAS LH	
			6	Nelayan Mudah Informasi, Pembinaan, dan Administrasi (NeMu IPad)	DINAS PERIKANAN	
			7	Bang Rasyid (Bangka Rumah Sehat Idaman)	BAPPEDA	
			8	"Jari Manis Si Kembang Desa" Jaring Informasi Masyarakat Miskin Dengan Sistem Dan Aplikasi Kembang Desa	BAPPEDA	
			9	"Majelis Sabtu!!" - Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			10	Tujuh Pendekar Tampan (Tuntas Dan Rampungkan Pembangunan Jamban)	BAPPEDA	
			11	Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN	
4	2019	12 inovasi	1	Anak Bangka Sehat Cerdas (ABSC)	DINKES	2 inovasi TOP 99
			2	Gerlingan ODGJ	DINKES	Ransel Si Dora
			3	Ojek Lansia	DINKES	Ojek Lansia
			4	Matras TB	DINKES	
			5	SMS Bunda Cerdas	DINKES	1 inovasi TOP 45
			6	Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Si Resti Cikar	DINKES	Ransel Si Dora
			7	Ransel Si Dora	DINKES	
			8	"Nganggung" Germas	DINKES	
			9	Si Manis Teman Kelompok Wanita Tani	PANGAN	
			10	Pintu Kite	DIN PMP2KUKM	
			11	PORCATWIN 5 in 1	DINKES	
			12	"Lada Putih" RSUD Depati Bahrin Turunkan AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	



NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
5	2020	14 inovasi	1	Laboratorium Terpadu Publikasi Inovasi Bangka (LA REPUBLIKA)	BAPPEDA	
			2	Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			3	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			4	Si Tumbuh Cerdas (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Hidup Cerdas dan Sehat)	BAPPEDA	
			5	Timah Corner sebagai Efektifitas Upaya Penyelamatan Arsip Sejarah Timah Bangka di Kabupaten Bangka	DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN	
			6	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan "Ibu"	DINKES	
			7	PAMOR KANCIL	DINKES	
			8	SMART-IN PIRT	DINKES	
			9	"GERLINGAN ODGJ" Gerakan Perlindungan ODGJ	DINKES	
			10	"Matras" TBC	DINKES	
			11	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	TOP 99
			12	Peningkatan Layanan Paten dengan Sistem Aplikasi	KECAMATAN BAKAM	
			13	"SILADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
			14	Open Links : Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Sekolah Oleh Seluruh Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua dan Peserta Didik) Dalam Rangka Memperkuat Pembentukan Karakter di SD Negeri 12 Sungailiat Kabupaten Bangka	SDN 12 Sungailiat	
6	2021	14 inovasi	1	SI LUKI DAN SI EKO TEMAN BAIK (Reklamasi Laut untuk Pemulihan Ekosistem Lautan dan Penanganan Perubahan Iklim)	BAPPEDA	



NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			2	Pundok Digital Informatika Setara	DINKOMINFOTIK	
			3	KOLAK BESTI 2023 (Kolaborasi untuk Bangka Bebas Stunting 2023)	BAPPEDA	
			4	PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA	DINAS PERIKANAN	
			5	Eccovillage Strategi Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Dan Pasca Pandemi	KEC. MENDO BARAT	
			6	DIBUKA TABUNGAN UNTUK MENIKAH (Subsidi Bunga Kredit Usaha Perorangan Tanpa Syarat Berat dengan Cicilan Ringan untuk Usaha Mikro Se Kabupaten Bangka Agar Omset Meningkatkan dan Bertambah	DINPMP2KUKM	
			7	RUMPIS (Rumah Pusat Informasi Serviks)	KECAMATAN SUNGAILIAT	
			8	INTAN ANGGUN (Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Anggungan)	BAPPEDA	
			9	GERBANG MULYA (Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama)	DINAS SOSIAL	
			10	HERBAL BALLS (Terapi Komplementer Untuk Membantu Dalam Mengatasi Nyeri dan merangsang Kontraksi Miometrium)	RSUDDB	
			11	IPB BOGOR (Industri Pangan Berkelanjutan Berbasis Sagu Rumbia; Inovasi Berbasis Halal, Digital dan Integral)	BAPPEDA	
			12	DULANG YAMANI PRIDE Disabilitas (Dulang Yamani Peduli, Responsif, Digital, Efektif terhadap Disabilitas)	RSUDDB	
			13	SI INTAN HUTAN KOTA SUNGAILIAT	DLH	
			14	LETS GO (Layanan Emergency Tanggap Sigap dan Gratis Secara Online)	DINKES	





NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
7	2022	17 Inovasi	1	SI LUKI DAN SI EKO TEMAN BAIK (REKLAMASI LAUT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM LAUTAN DAN PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM)	BAPPEDA	
			2	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA ( LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA PADI SAWAH)	DINPANPERTAN	
			3	PUNDOK DIGITAL INFORMATIKA SETARA	DINKOMINFOTIK	
			4	KOLAK BESTI 2023 (KOLABORASI UNTUK BANGKA BEBAS STUNTING 2023)	BAPPEDA	
			5	PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA	DINPERKAN	
			6	ECCOVILAGE STRATEGI KETAHANAN PANGAN KELUARGA DI MASA DAN PASCA PANDEMI	KEC. SUNGAILIAT	
			7	RANSEL SI DORA	DINKES	
			8	DIBUKA TABUNGAN UNTUK MENIKAH (SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA PERORANGAN TANPA SYARAT BERAT DENGAN CICILAN RINGAN UNTUK USAHA MIKRO SE KABUPATEN BANGKA AGAR OMSET MENINGKAT DAN BERTAMBAH)	DINPMP2KUKM	
			9	NYAMAN STOP "BABS" DIBALIK KOCOKAN ARISAN IBU	DINKES	
			10	RUMPIS (RUMAH PUSAT INFORMASI SERVIKS)	KEC. SUNGAILIAT	
			11	INTAN ANGGUN (PINJAMAN TANPA BUNGA TANPA AGUNAN)	BAPPEDA	
			12	GERBANG MULYA (GERAKAN BANGKA MENINGKATKAN UPAYA PELAYANAN SOSIAL BERSAMA)	DINSOS	



NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			13	"HERBAL BALLS" TERAPI KOMPLEMENTER UNTUK MEMBANTU DALAM MENGATASI NYERI DAN MERANGSANG KONTRAKSI MIOMETRIUM	RSUD DEPATI BAHRIN	
			14	IPB BOGOR (INDUSTRI PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SAGU RUMBIA: INOVASI BERBASIS HALAL, DIGITAL DAN INTEGRAL)	BAPPEDA	
			15	DULANG YAMANI PRIDE DISABILITAS (DULANG YAMANI PEDULI, RESPONSIF, DIGITAL EFEKTIF TERHADAP DISABILITAS)	RSUD DEPATI BAHRIN	
			16	SI INTAN HUTAN KOTA SUNGAILIAT	DLH	
			17	LAYANAN EMERGENCY TANGGAP SIGAP DAN GRATIS SECARA ONLINE (LETS GO	DINKES	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2023

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, baik domestik ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi.

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pengeluaran konsumsi rumah

tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non makanan per kapita dan pengeluaran konsumsi makanan per kapita di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.88**  
**Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.420	12.043	12.480	12.416	12.424	12.863
Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (%)	45,21	50,13	46,75	47,55	47,52	43,60
Pengeluaran konsumsi makanan per kapita (%)	54,79	49,87	53,25	52,45	52,48	56,40

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka selama tahun 2018-2022 menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 12,04 juta rupiah/orang/tahun menjadi 12,48 juta rupiah/orang/tahun.

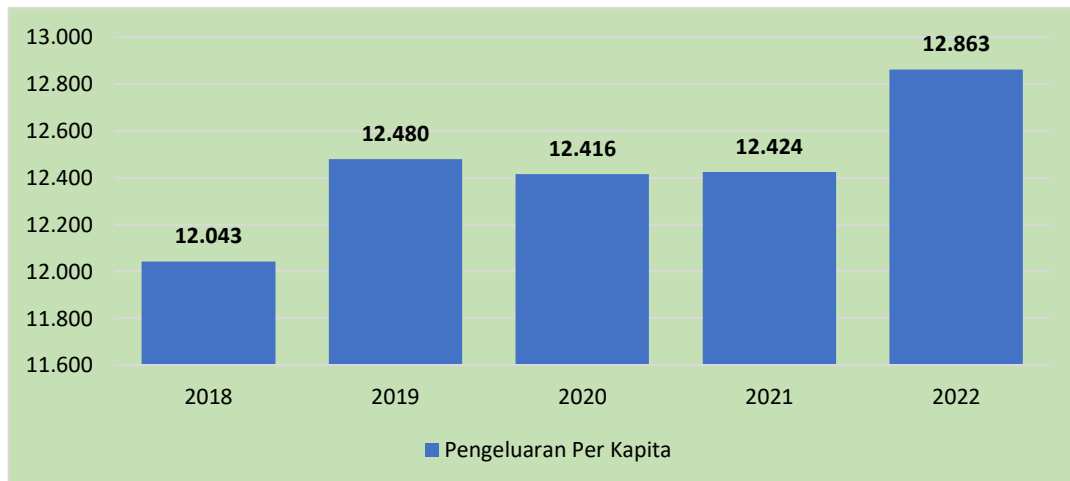
Pada tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran per kapita karena adanya Pandemi COVID-19, penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,48 juta rupiah/orang/tahun menjadi 12,41 juta rupiah/orang/tahun. Dilihat menurut komposisinya, pada tahun 2020 pengeluaran makanan mendominasi pola konsumsi penduduk Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 52,45 persen. Sementara itu untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan adalah sebesar 47,55 persen. Pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi makanan mengalami peningkatan persentase, yaitu menjadi 52,48 persen. Sementara untuk pengeluaran konsumsi non makanan mengalami penurunan menjadi 47,52 persen. Akan tetapi pengeluaran per kapita ini mulai naik kembali pada tahun 2021, menandakan mulai pulihnya kembali daya beli masyarakat pasca pandemi.

Pengeluaran per kapita pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 12,424 juta rupiah/orang/tahun menjadi 12,862

juta rupiah/orang/tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor antara lain bertambahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (meningkatnya konsumsi barang dan jasa) atau juga bisa disebabkan oleh kenaikan harga. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bangka pada tahun 2018-2022 berkisar pada rentang dua belas juta rupiah perorang setiap tahunnya. Pengeluaran perkapita ini juga sangat dipengaruhi oleh harga timah dan kelapa sawit di pasaran mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bangka sangat terikat dengan timah dan kelapa sawit. Berikut Grafik Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Bangka.

**Grafik 2.19**  
**Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)**  
**di Kabupaten Bangka**



Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Meningkatnya pengeluaran per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non makanan per kapita dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi non makanan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi per kapita selama tahun 2015-2021 rata-rata sebesar 47,52 persen sedangkan pengeluaran konsumsi makanan per kapita rata-rata sebesar 52,48 persen.

#### 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani.

**Tabel 2.89**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Nilai Tukar Petani	91,45	95,17	113,46	124,50	125,95

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018-2022 Nilai Tukar Petani menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 sebesar 91,45, dan terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 125,95. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah cukup sejahtera.

#### 2.4.1.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan memberikan gambaran tentang kemampuan nelayan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. NTN tahun 2022 sebesar 112,30 berarti harga produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan subsektor perikanan tangkap lebih tinggi dari harga barang/jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi nelayan subsektor perikanan tangkap.

**Tabel 2.90**  
**Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bangka Tahun 2018 -2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Nilai Tukar Nelayan	113,10	113,17	113,20	113,28	112,30

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018-2022, NTN menunjukkan trend yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Nelayan sudah cukup sejahtera.

#### 2.4.1.4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Berikut tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.91**  
**Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per Kapita di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (Rupiah/Orang/Tahun)	617.810	710.173	674.074	696.823	696.823	696.823
Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (%)	45,21	50,13	46,75	47,55	47,52	47,52

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 adalah 45,21 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 50,13 persen. Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 46,75 persen. Pada tahun 2020, Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita di Kabupaten Bangka meningkat lagi menjadi 47,55 persen dan pada tahun 2021 menurun menjadi 47,52 persen.

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

### 2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

**Tabel 2.92**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
2	Jumlah Kendaraan	246.799	252.993	196.557	216.709	216.709
3	Rasio	2,98	2,9	3,74	3,39	3,39

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan data di atas dari tahun 2018-2019 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 2,98 menurun pada tahun 2019 menjadi 2,9. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,74 dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,39.

#### 2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif

Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Kabupaten Bangka menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.93**  
**Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2018–2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah Produktif (Ha)	260.544,25	210.052,5	202.000,22	249.910,43	248.324,6
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44
3	Rasio (1/2)	99,51	80,23	77	95,45	94,84

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2022 memiliki luas sebesar 248.324,6 Ha dari luas seluruh wilayah/kawasan budidaya sebesar 261.823,44 ha.

Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, lama proses perijinan, jenis pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

##### 2.4.3.1. Angka kriminalitas

Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2021 cenderung mengalami



penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020. Untuk kejahatan tindak pidana yang dilaporkan untuk tahun 2021 sebanyak 292, ini ada penurunan dari tahun lalu sebanyak 358, seperti disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.94**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2018–2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	273	365	358	189	189
2.	Jumlah Penduduk	316.093	318.756	320.552	323.107	327.395
3.	<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>0,00086</b>	<b>0,00107</b>	<b>0,00097</b>	<b>0,00058</b>	<b>0,00058</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023 (data diolah)

#### 2.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM. Adapun penerbitan perizinan yang dilayani meliputi 14 (empat belas) bidang, yaitu:

- 1) Bidang Kesehatan
- 2) Bidang Pekerjaan Umum
- 3) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- 4) Bidang Perhubungan
- 5) Bidang Lingkungan Hidup
- 6) Bidang Usaha Kepariwisata
- 7) Bidang Pertanahan
- 8) Bidang Peternakan
- 9) Bidang Pendapatan
- 10) Bidang Perikanan
- 11) Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

- 12) Bidang Pertanian dan Perkebunan
- 13) Bidang Penanaman Modal dan KUKM
- 14) Bidang Pendidikan

Dalam rangka mendorong investasi melalui percepatan penerbitan perijinan usaha, maka diterbitkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bangka di mana penandatanganan perizinan langsung dilakukan oleh Kepala PTSP sehingga proses penerbitan perizinan lebih cepat.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kini para pelaku usaha PMA-PMDN, baik mikro-kecil, perseorangan maupun non perorangan (Badan Usaha – PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) kini bisa langsung mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS (Online Single Submission). Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, Pemerintah melalui UU Cipta Kerja, mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based). Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. OSS telah melakukan pengembangan sistem melalui Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi 4 kategori yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

### 2.4.3.3. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu komponen penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah di sektor pajak dan retribusi. Beberapa regulasi sudah diterbitkan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :

- Peraturan Daerah Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 65 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Untuk Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2021;



- Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Bangka; dan
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha untuk Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dibawah ini dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka :

1. Pajak Daerah terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Pajak BPHTB
2. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Persampahan
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Retribusi Jasa Usaha :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir



- f. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4. Retribusi Perizinan Tertentu :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Trayek
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
  - e. Retribusi Perpanjangan IMT

#### **2.4.3.4. Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha**

Penataan regulasi di Kabupaten Bangka dalam rangka mendukung iklim usaha dan investasi sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka. Regulasi yang sudah diterbitkan untuk mendukung iklim usaha antara lain :

1. Peraturan Daerah Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan di Kabupaten Bangka;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;



25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17B Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Pariwisata;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka;
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17A Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Objek Wisata Bahari di Wilayah Kabupaten Bangka;
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi Smart in PIRT dalam Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Bangka;
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka;
34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 78 Tahun 2021;
35. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka
36. Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Bangka; dan
37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40A Tahun 2020 tentang Masterplan Kawasan Pantai Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2020-2030;



38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik;
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Perorangan Di Kabupaten Bangka;
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangka.

#### **2.4.3.5. Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 mencapai angka 76,75. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 73,43. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 masuk dalam kategori "Sedang". Dan pada tahun 2020 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka 77,39 dalam skala 0 sampai 100.



## 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

### 2.4.4.1. Kualitas Tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

**Tabel 2.95**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bangka**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.315	2.927	5.791	1.179	1.215
2.	Jumlah Penduduk	316.093	318.756	337.337	323.107	327.395
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	73,23	91,82	171,66	36,48	37,11

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

### 2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Semakin tingginya persentase dependencyratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada Tahun 2022, Kabupaten Bangka memperoleh bonus demografi yang dalam kata lain Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non Produktif (0-14 tahun dan  $\geq 65$  tahun) seperti yang tergambar di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.96**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif**  
**di Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	41.868	25	39.331	25	81.199	25
2	15-64	115.810	69	109.100	68	224.910	69
3	$\geq 65$	10.212	6	11.073	7	21.285	7
<b>Jumlah</b>		<b>165.869</b>	<b>167.890</b>	<b>100</b>	<b>159.504</b>	<b>100</b>	<b>327.394</b>

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita peroleh rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang secara definisinya merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Rumus ratio ketergantungan adalah :

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$$

Dimana :

$DR$  = Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

$P_{0-14}$  = Jumlah Penduduk Usia 0-14

$P_{15-64}$  = Jumlah Penduduk Usia 15-64

$P_{65}$  = Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun ke atas

Sehingga didapat sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{81.199 + 21.285}{224.910} \times 100\%$$
$$\text{Rasio K} = 45,57\%$$

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan sampai tingkat daerah agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

#### 2.4.4.3. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam penguasaan informasi. Berikut Tabel Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	79.351	143.486	1.504	521	5.503

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, 2022

Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2021 berjumlah 521 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.504 orang pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh Virus Corona (COVID-19) yang memaksa masyarakat untuk mengurangi kunjungan ke tempat umum dan berinteraksi dengan banyak orang. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung perpustakaan meningkat menjadi 5.503 orang.

#### 2.4.4.4. Kepegawaian

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah termasuk Pemkab Bangka adalah Indeks Profesionalitas ASN yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi (pendidikan formal), Kompetensi (Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya), Kinerja (penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja individu dan organisasi), dan Disiplin (riwayat hukuman disiplin).

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka selama empat tahun terakhir, walaupun masih berada pada kategori “Rendah”, akan tetapi menunjukkan perbaikan secara kontinyu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.98**  
**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018**	2019	2020	2021	2022*
<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	58,80	67,26	63,73	63,86	63,86
<b>Kategori</b>	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2022\*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga masuk kategori “Sangat Rendah” dengan nilai 58,80. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi pengukuran berdasarkan ketentuan dari pusat. Selanjutnya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, maka pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,26 dengan kategori “Rendah”, namun untuk tahun 2020 Indeks Profesionalitas ASN turun lagi menjadi sebesar 63,73 dengan kategori “Rendah”. Untuk tahun 2021 dan 2022, Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 63,86 masih dengan kategori “Rendah”.

## 2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke

depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (*Sustainable Development Goals* (SDGs)), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

**Gambar 2.18**  
**Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)**



Kabupaten Bangka telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara detail, sinkronisasi SDG's dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.99**  
**Bidang dan Tujuan Utama**  
**Sustainable Development Goals (SDG's) dan Capaian**  
**Kinerja Daerah Tahun 2022**

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2023	Capaian SDG's Tahun 2022	Kategori
1	Kemiskinan	Mengurangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan aspek	Angka Kemiskinan (%)	4,97	4,26	BT
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,30	0,67	BT
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,05	0,15	BT



No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2023	Capaian SDG's Tahun 2022	Kategori
2	Makanan	Mengurangi kelaparan melalui peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama per 1.000 Penduduk (Kg/1000 Penduduk)	111.580	111.580	T
			Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan (%)	8 kecamatan	8 Kecamatan	T
			Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal)	2.688	2.626	BT
			Ketersediaan Protein Per Kapita (gram)	77,31	83,72	T
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,44	71,37	BT
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	4,22	1,12	BT
			Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup	56,71	57,29	BT
			Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0	0,02	BT
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	8,27	BT
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,95	12,80	BT
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	89,13	88,48*	BT
			Indeks Pembangunan Gender	68,9	67,90*	BT
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)	100	90,05	BT
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	100	95,38	BT



No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2023	Capaian SDG's Tahun 2022	Kategori
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Rasio Elektrifikasi	100	99,48	BT
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,12	-0,73	BT
			Peningkatan PDRB per Kapita (%)	4,97	1,26	BT
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,12	5,42	
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	80,24	72,34	BT
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	100	98,73	BT
			Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten	97,15	86,04	BT
10	Ketimpangan	Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara	Indeks Gini	0,264	0,262	T
			Indeks Williamson	0,177	0,269	T
			Kriteria Bank Dunia	-	0,187	
11	Hunian	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk			
			▪ Rasio Pemukiman Layak Huni	100	99,9998	BT
			▪ Rasio Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0065	0,015	BT
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,60	90,04	BT
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT untuk Makanan (%)	45,11	56,40	T
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan (%)	54,89	43,60	T
13	Iklim	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	32,4	32,28	BT
			Ketaatan terhadap RTRW	100	99,22	BT



No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2023	Capaian SDG's Tahun 2022	Kategori
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air (%)	75	73,00	BT
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber yang tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara (%)	50	53,00	T
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Praktik <i>Illegal Fishing</i> dan Perusakan Sumber Daya Kelautan	Kewenangan provinsi	Kewenangan provinsi	Kewenangan provinsi
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Rasio Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	95	93,00	BT
			Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	T
			Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka (%)	8,43	8,92	BT
16	Lembaga	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Hasil Evaluasi AKIP	A	72,27 (BB)	BT
			Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	T
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	85,40	98,35	T
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	15,4	54,64	T
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	34,79	20,00	BT





No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2023	Capaian SDG's Tahun 2022	Kategori
			Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Pembangunan	100	100	T
			Perlindungan dan Pembinaan KDRT	100	100	T
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi	100	99	BT

Sumber : Bappeda Kabupaten Bnagka, 2023 (Data Diolah)

## 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Bangka tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### A. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Target dan capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.100**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)	100%	99,21%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	40,85%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

## B. Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*). Target dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.101**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,69%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,23%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,15%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	71,32%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,09%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	71,47%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita DM	Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

### C. Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.102**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	87,62%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	95,32%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

#### D. Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.103**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

### E. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Jenis pelayanan dasar Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.104**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	87,89%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

## F. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Target dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.105**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	76,27%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	43,72%

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, 2023

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah salah satu kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 4 tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

### **3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022**

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus



kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

### 3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam periode 2018–2022, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp. 1.094.530.542.128,- pada tahun 2018 menjadi Rp.1.405.507.082.077,- pada tahun 2022. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 3 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 101,21%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2021**

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
1	2	3	4
2018	1.127.240.309.650	1.094.530.542.128	97,10%
2019	1.245.694.085.600	1.258.858.376.954	101,06%
2020	1.140.955.837.297	1.136.647.385.711	99,62%
2021	1.150.552.228.075	1.157.430.770.680	100,60%
2022	1.305.675.039.221	1.405.507.082.077	107,65%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1.179.067.383.657</b>	<b>1.210.594.831.510</b>	<b>101,21%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022

Persentase pencapaian pendapatan daerah meningkat dari tahun 2018-2022. Sementara itu, pada tahun 2020 persentase pencapaian pendapatan daerah menurun dari pada tahun 2019. Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Bangka ini terjadi dikarenakan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir tahun 2019 pertama kali muncul di Kota Wuhan China dan menyebar keseluruhan dunia termasuk Indonesia awal tahun 2020. Namun tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Bangka kembali bangkit seiring dengan adanya kebijakan pemerintah seperti menjalankan protokol kesehatan dan vaksin bagi seluruh warga masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuannya. Secara keseluruhan realisasi pendapatan dari tahun 2018-2022 tren bersifat fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Daerah ada 3 (tiga)

komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran perkembangan angka-angka capaiannya dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi terhadap pendapatan
1	2	3	4	5
<b>Pendapatan Asli daerah</b>				
2018	180.745.019.150	173.056.934.829	95,75%	13,75%
<b>2019</b>	128.943.712.050	144.668.128.852,62	112,19%	11,49%
<b>2020</b>	126.497.504.000	155.729.845.760	123,11%	13,70%
<b>2021</b>	135.750.792.450	141.922.360.592	104,55%	12,26%
<b>2022</b>	153.303.935.200	186.489.553.929	121,65%	13,27%
<b>Rata-Rata</b>	130.397.336.167	147.440.111.735	111,45%	12,89%
<b>Dana Transfer</b>				
2018	946.495.290.500	921.473.607.299	97,36%	84,19%
<b>2019</b>	866.946.514.550	853.236.403.540	98,42%	67,78%
<b>2020</b>	970.647.643.297	937.414.954.496	96,58%	82,47%
<b>2021</b>	973.206.246.625	986.355.181.088	101,35%	85,22%
<b>2022</b>	1.138.963.401.821	1.205.779.140.938	105,87%	85,79%
<b>Rata-Rata</b>	936.933.468.157	925.668.846.375	98,78%	81,09%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
2018	-	-	0,00%	0,00%
<b>2019</b>	249.803.859.000	260.953.844.561	104,46%	20,73%
<b>2020</b>	43.810.690.000	43.502.585.455	99,30%	3,83%
<b>2021</b>	41.595.189.000	29.153.229.000	70,09%	2,52%
<b>2022</b>	13.407.702.200	13.238.387.211	98,74%	0,94%
<b>Rata-Rata</b>	111.736.579.333	111.203.219.672	74,52%	5,60%

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 12,89%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bangka termasuk kategori sedang. Kemudian dana transfer memberikan sumbangan rata-rata sebesar 81,09%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap besar ketergantungannya atas peningkatan fiskal nasional.

Dalam Pembangunan daerah kinerja pendapatan Asli daerah adalah menjadi salah satu kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka. Berbeda dengan Dana Transfer yang sifatnya *given* sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu khusus pendapatan asli daerah akan diuraikan kinerjanya secara detail.

### 3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka selama lima tahun (2018 – 2022) memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -0,10% dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah rata-rata per tahun sebesar 13,52 %. Pertumbuhan rata-rata positif di komponen PAD yakni dari pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yaitu masing-masing sebesar 2,24% dan 2,14% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata positif pada komponen Pendapatan Transfer yakni dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yaitu sebesar 2,74% dan 3,92% per tahun. Untuk derajat desentralisasi rata-rata selama 3 tahun yakni sebesar 13,52%. Angka ini menunjukkan Kabupaten Bangka memiliki ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap**  
**Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**  
**(ribuan rupiah)**

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan		Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi
			Rp	%		
1	2018	Rp 173.056.934.829	Rp (23.013.551.944)	-11,74	Rp 1.094.530.542.128	15,81
2	2019	Rp 144.668.128.853	Rp (28.388.805.976)	-16,40	Rp 1.258.858.376.954	11,49
3	2020	Rp 155.729.845.760	Rp 11.061.716.908	7,65	Rp 1.136.647.395.404	13,70
4	2021	Rp 153.974.575.052	Rp (1.755.270.708)	-1,13	Rp 1.157.430.770.680	13,30
5	2022	Rp 186.489.553.929	Rp 32.514.978.876	21,12	Rp 1.405.507.082.077	13,27
		<b>Rata-Rata Per Tahun</b>	<b>-1.916.186.569</b>	<b>-0,10</b>	<b>1.210.594.833.449</b>	<b>13,52</b>

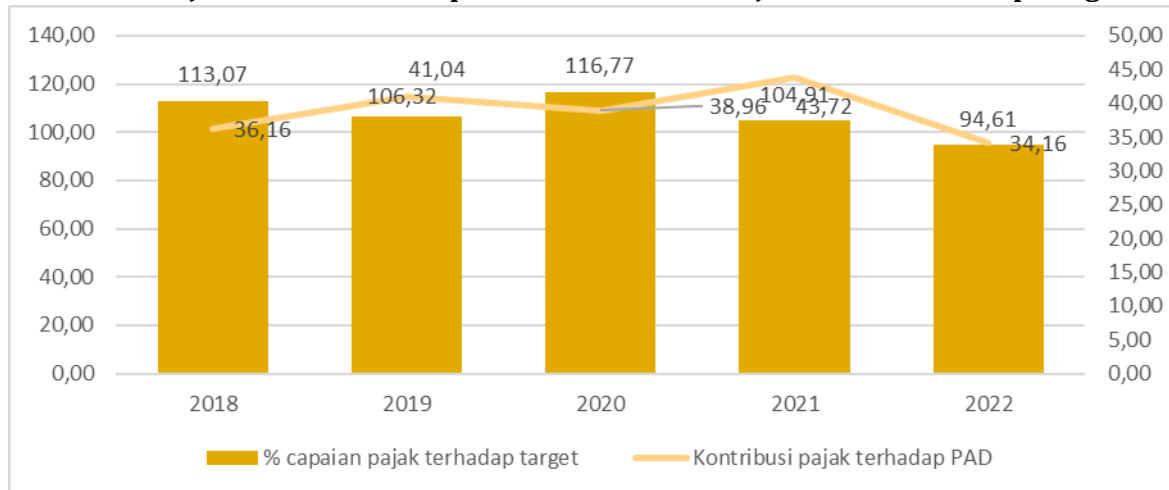
Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

- **Kinerja Pajak Daerah**

Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka merupakan pos yang cukup besar peningkatannya dibandingkan dua pos lainnya (retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), memiliki kontribusi selama tahun 2018 – 2022 berkisar antara 38,96% - 43,72%.

Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak pada tingkat 104,91% - 116,77%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

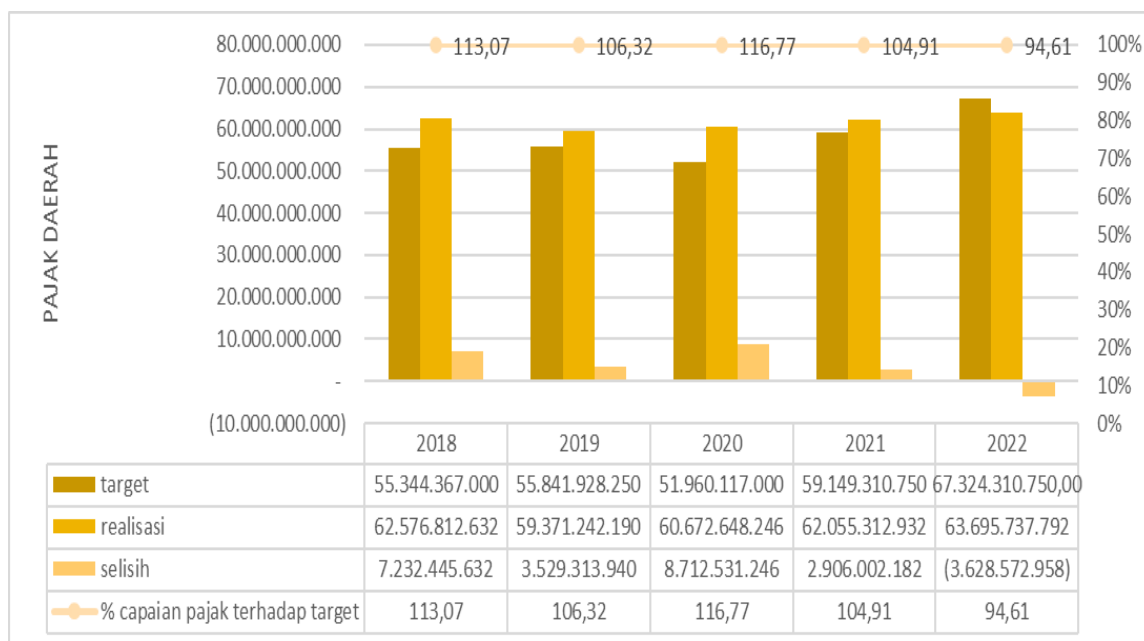
**Grafik 3.1**  
**Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan Realisasi Pajak daerah terhadap Target**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 43,72% dan terendah pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 36,16%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 116,77% dan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar 104,91%.

**Grafik 3.2**  
**Realisasi Pajak Daerah 2018-2022**

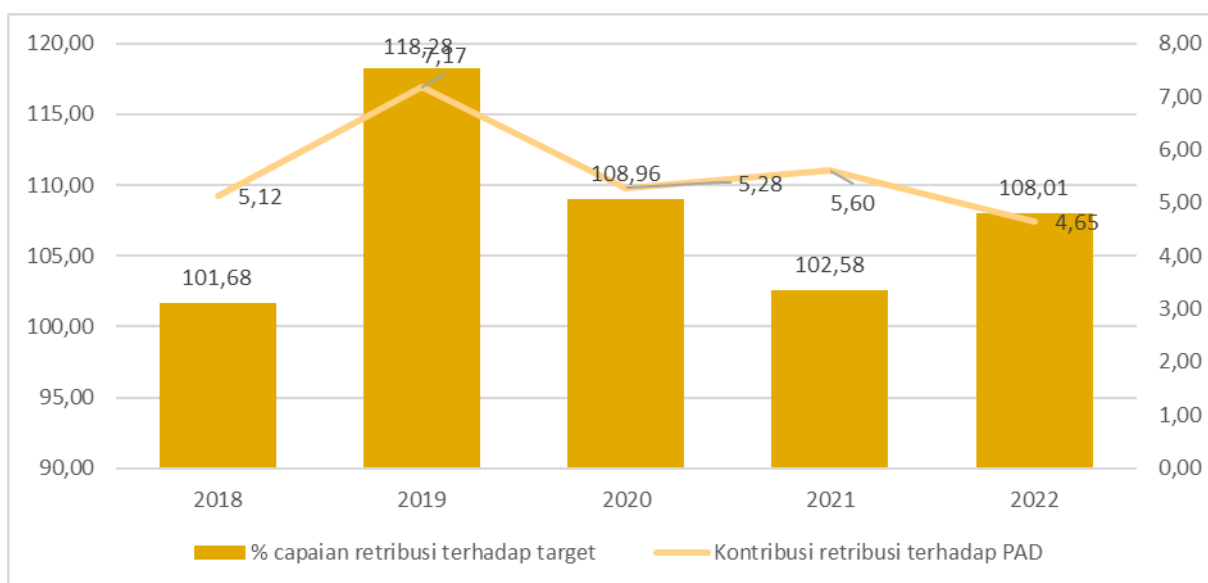


Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

- **Kinerja Retribusi Daerah**

Retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sampai tahun 2022 berkisar antara 5,12% - 7,17%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar antara 101,68% - 118,28%. Retribusi daerah diperoleh dari objek-objek retribusi yaitu : (i) retribusi jasa umum; (ii) retribusi jasa usaha; dan (iii) retribusi perizinan tertentu.

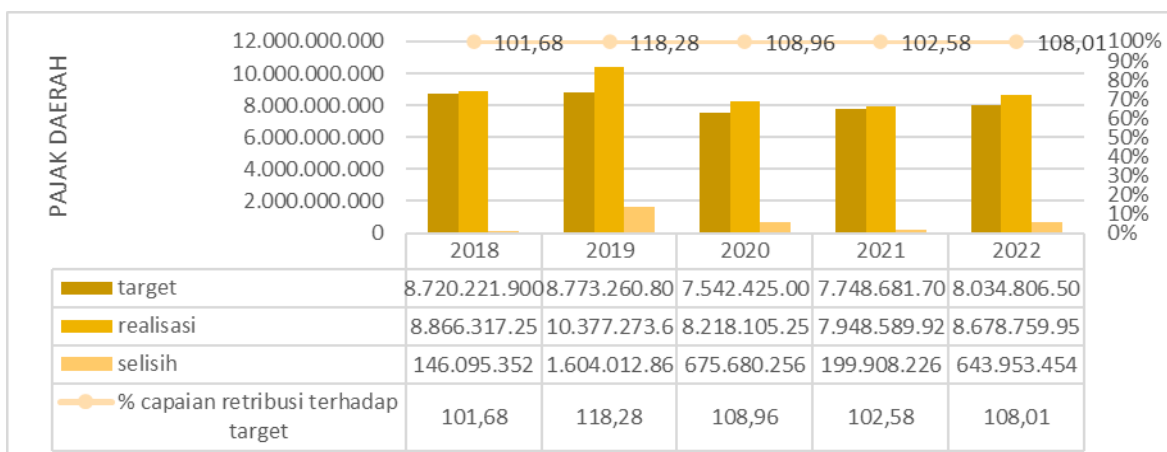
**Grafik 3.3**  
**Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dan Realisasi Pajak Daerah terhadap Target**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Dari tabel diatas kontribusi retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni mencapai hingga 7,17%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 yakni hanya sebesar 5,12%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 118,78% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 101,68%. Terjadi trend penurunan pertumbuhan kontribusi terhadap PAD dari tahun 2018-2022 yang disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah pusat terkait retribusi perizinan yang dihilangkan seperti IMB, izin gangguan dll.

**Grafik 3.4**  
**Realisasi Retribusi Daerah 2018-2022**



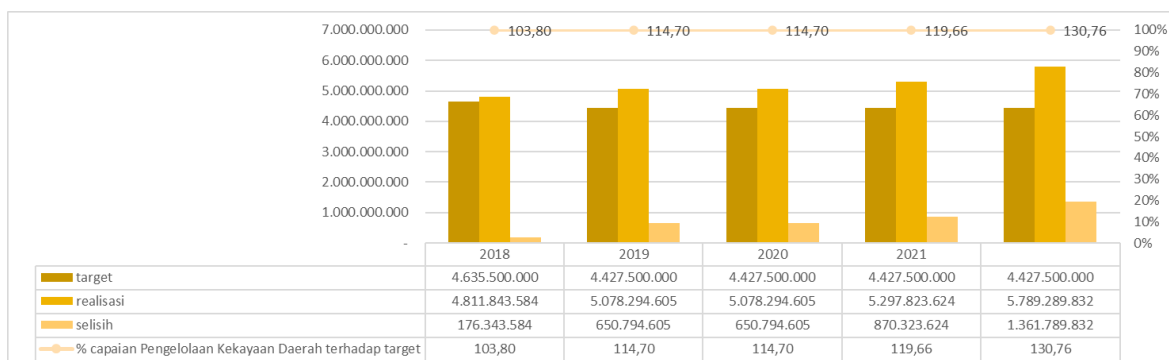
Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018 retribusi daerah sebesar 8,86 milyar rupiah namun justru mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar masing-masing 10,37 milyar rupiah. Dengan demikian, trend pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2018 – 2022 rata-rata terkontraksi sebesar 12,04%.

• **Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pencapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,81 milyar rupiah dan meningkat menjadi 5,78 milyar rupiah pada tahun 2022. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari komponen penyertaan modal pada Bank Sumsel, JAMKRIDA dan BUMD.

**Grafik 3.5**  
**Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD dan Realisasi terhadap Target**

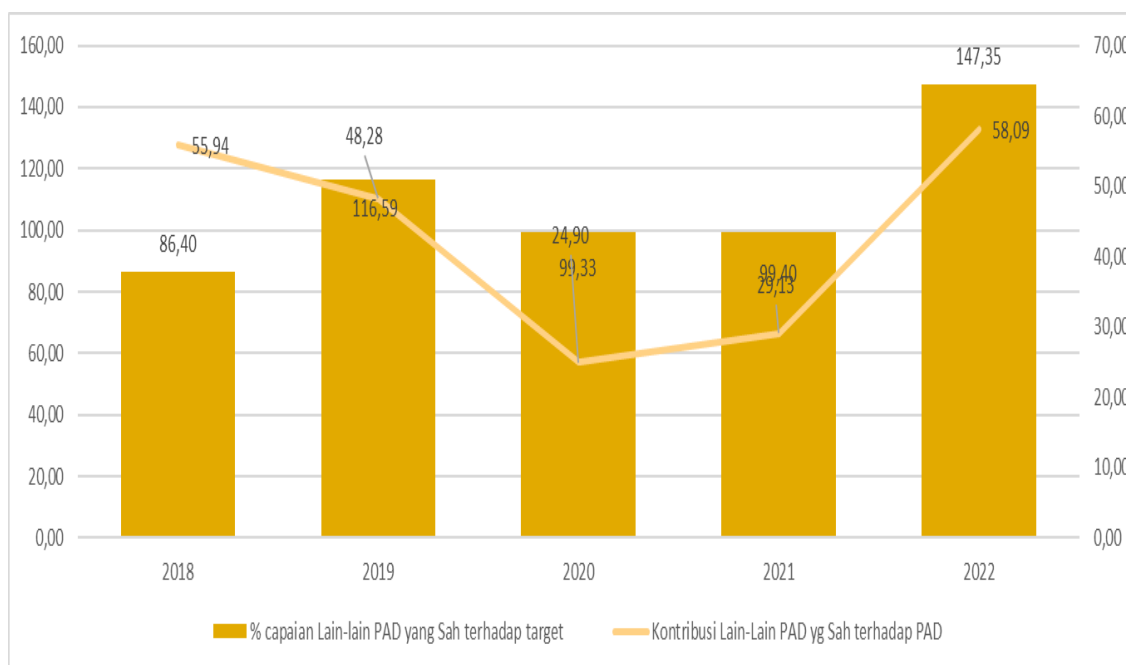


Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

- **Kinerja Lain-Lain PAD yang sah**

Kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Bangka terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar 55,94% atau sebesar 96,80 milyar rupiah, tahun 2020 terkontraksi menjadi 24,90% atau sebesar 38,78 milyar rupiah. Selanjutnya di tahun 2022 meningkat menjadi 108,32 milyar rupiah atau 58,09%. Dari sisi realisasi anggaran terhadap target menunjukkan fluktuasi yang beragam, pada tahun 2018 terealisasi 86,40% dari target sebesar 112,04 milyar rupiah. namun pada tahun 2022 justru mengalami perbaikan mencapai 147,35% dari target sebesar 73,51 milyar rupiah.

**Grafik 3.6**  
**Kontribusi Lain-Lain PAD yang sah terhadap PAD dan Realisasi terhadap Target**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.1.2 Kinerja Pendapatan Transfer

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bangka menunjukkan trend yang fluktuatif. Hasil ini terlihat dari realisasi pendapatan tranfer tahun 2018 sebesar 921,47 milyar rupiah dan meningkat menjadi 1,07 triliun rupiah pada tahun 2019 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 di Angka 931,41 milyar rupiah. Capaian dari komponen pendapatan transfer tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Grafik 3.7**  
**Kinerja Pendapatan Transfer 2018-2022**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Kemandirian Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bangka termasuk kategori rendah. Ini ditunjukkan dengan dana transfer memberikan sumbangan rata-rata sebesar 86,48%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap besar ketergantungannya atas peningkatan fiskal nasional.

### 3.1.1.3 Kinerja Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan hibah merupakan katalisator utama pembentukan dana dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kurun waktu lima tahun, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend yang cenderung. Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh tidak terealisasinya pos lain-lain realisasi pendapatan daerah yang sah pada selama periode 2018 hingga 2022. Secara detail, perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun 2018 - 2022 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hibah	-	38.781.854.798	43.502.585.455	-	13.042.991.000
2	Dana Darurat		-	-	-	



No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	29.153.229.000	195.396.211
	<b>Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>38.781.854.798</b>	<b>43.502.585.455</b>	<b>29.153.229.000</b>	

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dari perbandingan tersebut, kapasitas keuangan daerah Kabupaten Bangka cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif dengan rataan per tahun yang berkisar pada level 3,86%. Tahun 2019 rasio tersebut sebesar 10,35% kemudian tahun 2020 naik menjadi 11,09%. Kemudian kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 11,80% di tahun 2021.

### 3.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2018–2022 dipergunakan untuk upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun (RKPD) atas dasar RPJMD 2019-2023 yang telah disusun sebelumnya. Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yaitu: “BANGKA SETARA”. Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan

Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kondisi daerah, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumber daya untuk membiayai pembangunan tersebut. Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka pada kurun waktu 2018-2022 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel. 3.5**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2018	1.091.645.963.943	1.072.744.879.105	98,27
2019	1.220.475.235.922	1.106.321.263.979	90,65
2020	1.140.863.689.098	1.022.675.825.831	89,64

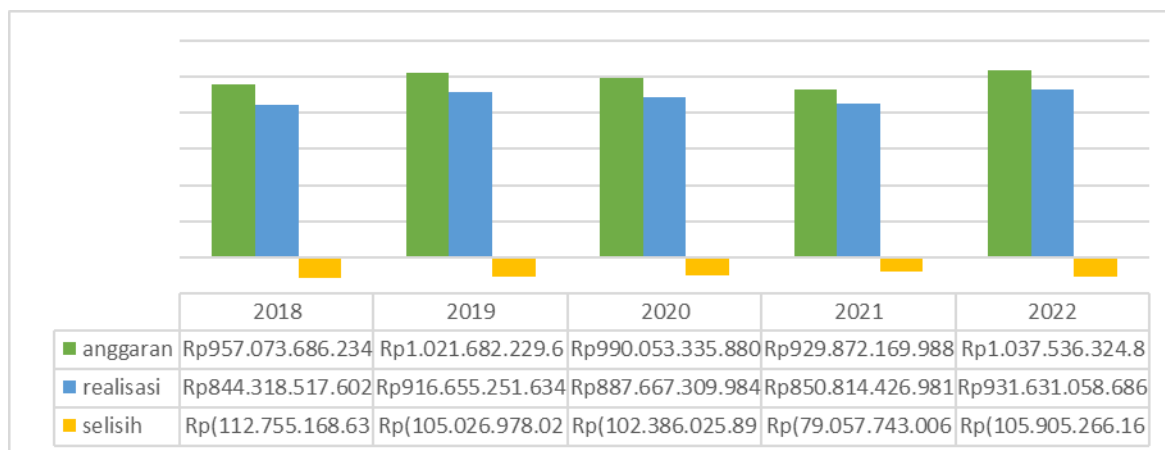
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2021	1.265.194.776.534	1.172.454.542.650	92,67
2022	1.428.064.472.737,07	1.299.818.887.715	91,02

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.2.1 Belanja operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

**Grafik 3.8**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bangka 2018-2022**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

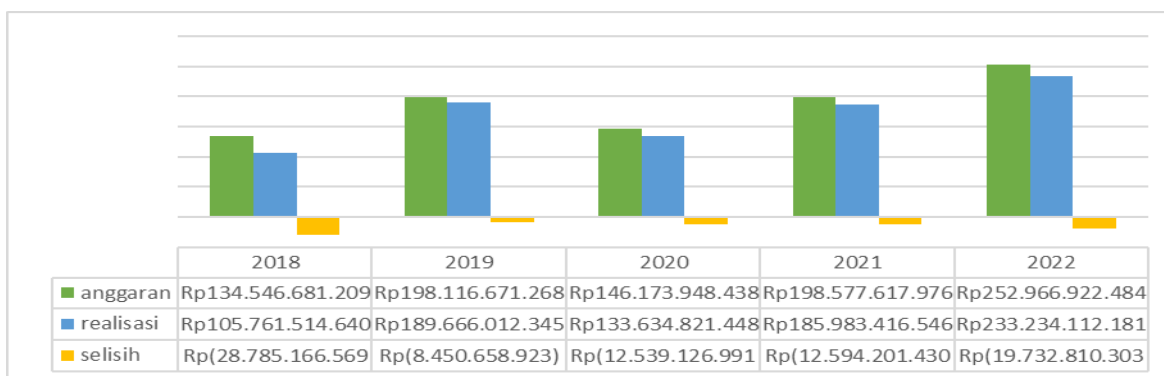
Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Belanja Operasional pada tahun 2022 mencapai 931,63 milyar rupiah atau sebesar 89,79%. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2028 yang hanya terealisasi sebesar 88,22%. Realisasi belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan, pendidikan, industri kecil dan menengah (UKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.

### 3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal

meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan sebagainya. Realisasi belanja modal pada tahun 2021 mencapai 93,66%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 91,42%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan efektifnya penggunaan belanja sehingga anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran jauh dibawah target. Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.9**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bangka 2018-2022**

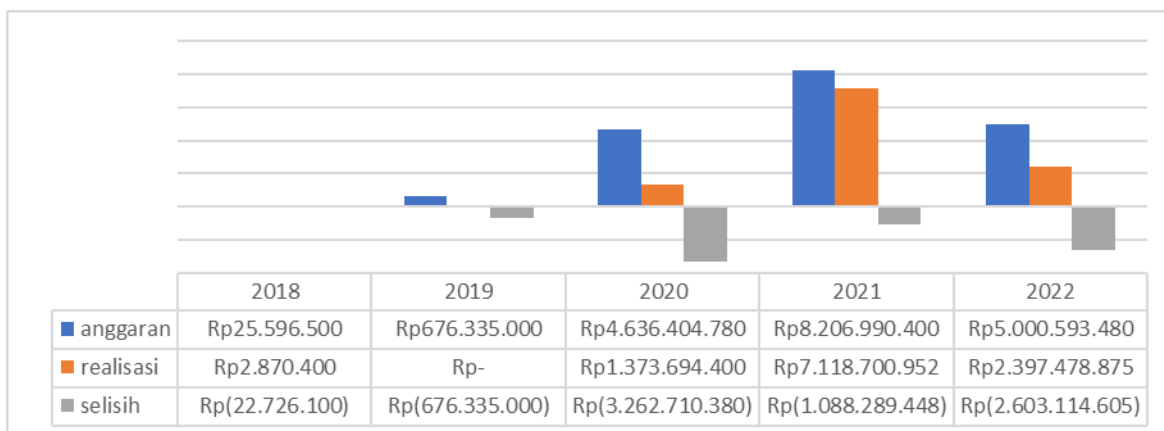


Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda APBD tahun berkenaan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. Perkembangan realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.10**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangka 2018-2022**

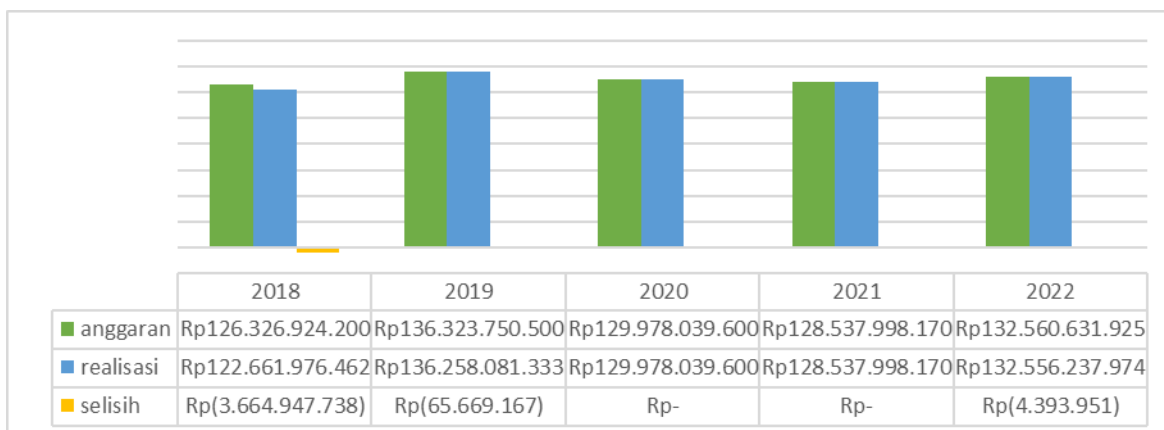


Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer diberikan dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan daerah dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memprioritaskan untuk pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan. Belanja transfer diperoleh dari bantuan keuangan provinsi ke kabupaten dan bantuan keuangan provinsi atau kabupaten kepada desa. Berdasarkan grafik dibawah, menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rentang kinerja antara 97,10 % sampai dengan 100%. Selengkapnya perkembangan kinerja belanja transfer selama periode 2018 – 2022 tersaji pada grafik berikut ini.

**Grafik 3.11**  
**Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Bangka 2018-2022**





Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Gambaran lebih rinci tentang anggaran dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

Uraian		Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	Rencana	957.073.686.234	1.021.682.229.654	990.053.335.880	929.872.169.988	1.037.536.324.848
	Realisasi	844.318.517.602	916.655.251.634	887.667.309.984	850.814.426.981	931.631.058.686
	%	88,22	89,72	89,66	91,50	89,79
Belanja Pegawai	Rencana	465.829.563.413	492.458.666.602	468.637.709.510	490.405.835.682	501.382.213.670
	Realisasi	410.671.392.306	433.542.911.120	420.696.684.958	439.937.485.499	437.149.234.967
	%	88,16	88,04	89,77	89,71	87,19
Belanja Barang dan Jasa	Rencana	427.768.354.821	493.241.328.853	479.445.039.170	406.547.014.136	489.111.167.665
	Realisasi	378.528.413.927	449.677.367.947	428.928.679.231	380.516.554.087	450.063.522.896
	%	88,49	91,17	89,46	93,60	92,02
Belanja Subsidi	Rencana	350.000.000	350.000.000	0	200.000.000	500.000.000
	Realisasi	350.000.000	0	0	115.860.120	260.388.170
	%	100,00	0,00	0,00	57,93	52,08
Belanja Hibah	Rencana	56.354.596.000	32.382.234.200	37.660.587.200	31.559.320.169	40.604.193.514
	Realisasi	48.348.096.910	30.305.311.667	35.015.292.795	29.126.414.989	38.446.789.953
	%	85,79	93,59	0,00	92,29	94,69
Belanja Bantuan Sosial	Rencana	6.771.172.000	3.250.000.000	4.310.000.000	1.160.000.000	5.938.750.000
	Realisasi	6.420.614.460	3.129.660.900	3.026.653.000	1.118.112.287	5.711.122.700
	%	94,82	96,30	70,22	96,39	96,17
Belanja Modal	Rencana	134.546.681.209	198.116.671.268	146.173.948.438	198.577.617.976	252.966.922.484
	Realisasi	105.761.514.640	189.666.012.345	133.634.821.448	185.983.416.546	233.234.112.181
	%	78,61	95,73	91,42	93,66	92,20
Belanja Tak Terduga	Rencana	25.596.500	676.335.000	4.636.404.780	8.206.990.400	5.000.593.480
	Realisasi	2.870.400	0	1.373.694.400	7.118.700.952	2.397.478.875
	%	11,21	0,00	0,00	86,74	47,94
Belanja Transfer	Rencana	126.326.924.200	136.323.750.500	129.978.039.600	128.537.998.170	132.560.631.925
	Realisasi	122.661.976.462	136.258.081.333	129.978.039.600	128.537.998.170	132.556.237.974
	%	98,99	98,99	99,99	99,97	99,97
Belanja Daerah	Rencana	1.091.645.963.943	1.356.798.986.422	1.270.841.728.698	1.265.194.776.534	1.428.064.472.737
	Realisasi	1.072.744.879.105	1.242.579.345.311	1.152.653.865.431	1.172.454.542.650	1.299.818.887.715
	%	98,27	91,58	90,70	92,67	91,02
Surplus/Defisit	Rencana	-90.732.578.493	111.104.900.822	129.885.891.401	114.642.548.459	-122.389.433.516
	Realisasi	21.785.663.022	16.279.031.642	-16.006.470.027	9.218.792.491	105.688.194.362
	%	-24,01	-14,65	12,32	-8,04	-86,35

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pembiayaan Daerah dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022 dianggarkan sebesar Rp568.755.352.690,- dengan realisasi sebesar Rp573.417.646.762 atau 100,82 persen dengan uraian sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	90.732.578.493,22	91.819.237.798	101,20
2019	111.104.900.822	111.104.900.822	100,00
2020	129.885.891.401	130.649.028.178	100,59
2021	114.642.548.459	114.642.548.459	100,00
2022	122.389.433.516	125.201.931.505	102,30
<b>Total</b>	<b>568.755.352.691</b>	<b>573.417.646.762</b>	<b>100,82</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

#### 3.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SILPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dianggarkan sebesar Rp 577.163.336.691,00 dengan realisasi sebesar Rp 581.825.630.762,00 atau 100,81 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	93.132.578.493	94.219.237.798	101,17

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2019	113.604.900.822	113.604.900.822	100,00
2020	130.393.875.401	131.157.012.178	100,59
2021	114.642.548.459	114.642.548.459	100,00
2022	125.389.433.516	128.201.931.505	102,24
<b>Total</b>	<b>577.163.336.691</b>	<b>581.825.630.762</b>	<b>100,81</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022 dianggarkan sebesar Rp 8.407.984.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.407.984.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00 persen sebagaimana yang tergambar dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	2.400.000.000	2.400.000.000	100,00
2019	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00
2020	507.984.000	507.984.000	100,00
2021	-	-	0,00
2022	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>8.407.984.000</b>	<b>8.407.984.000</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

### 3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar 1,299 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 1,072 trilyun rupiah.

#### 3.1.4.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data rata - rata pertumbuhan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Bangka tahun 2018-2022, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran meliputi belanja dan



pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 – 2022 secara rinci tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
1	2018	410.671.392.306	952.482.902.643	43,12
2	2019	433.542.911.120	1.106.321.263.979	39,19
3	2020	420.696.684.958	1.023.183.809.831	41,12
4	2021	439.937.485.499	1.172.454.542.650	37,52
5	2022	437.149.234.967	1.302.818.887.715	33,55
	<b>Rataan</b>	<b>428.399.541.770</b>	<b>1.111.452.281.363</b>	<b>38,54</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir yakni sebesar 38,54%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Bangka relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD dan pengeluaran dalam APBD lebih banyak digunakan untuk program pelayanan untuk masyarakat.

#### 3.1.4.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data realisasi belanja Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022, maka diperoleh gambaran proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022 tersaji pada tabel berikut ini

**Tabel 3.11**  
**Proporsi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rataan Proporsi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>78,71</b>	<b>73,77</b>	<b>77,01</b>	<b>72,57</b>	<b>71,67</b>	<b>74,75</b>
	Belanja Pegawai	38,28	34,89	36,50	37,52	33,63	<b>36,17</b>
	Belanja Barang dan Jasa	35,29	36,19	37,21	32,45	34,63	<b>35,15</b>
	Belanja Subsidi	0,03	0,00	0,00	0,01	0,02	<b>0,01</b>
	Belanja Hibah	4,51	2,44	3,04	2,48	2,96	<b>3,09</b>

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rataan Proporsi
	Belanja Bantuan Sosial	0,60	0,25	0,26	0,10	0,44	0,33
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>9,86</b>	<b>15,26</b>	<b>11,59</b>	<b>15,86</b>	<b>17,94</b>	<b>14,10</b>
3	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,61</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>11,43</b>	<b>10,97</b>	<b>11,28</b>	<b>10,96</b>	<b>10,20</b>	<b>10,97</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir proporsi belanja operasi berada dikisaran 74,75%, kemudian diikuti oleh belanja modal dengan kisaran 14,10%, belanja transfer sebesar 10,97% dan belanja tak terduga hanya sebesar 0,18% saja. Dari sisi belanja operasional, belanja pegawai memiliki proporsi terbesar dalam kurun waktu tersebut dengan besaran mencapai 36,17%, kemudian belanja barang jasa dengan proporsi sebesar 35,15% dan belanja subsidi menjadi belanja operasi dengan proporsi terkecil yakni hanya sebesar 0,01% saja.

### 3.1.4.3 Analisa Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah kurun waktu tahun 2018 - 2022 dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2018 - 2022 cenderung fluktuatif, yaitu realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah sebesar 144,44 milyar rupiah pada tahun 2018, 16,27 milyar rupiah pada tahun 2019, defisit 16,01 milyar rupiah pada tahun 2020, kembali surplus 9,29 milyar rupiah pada tahun 2021 dan surplus kembali 105,68 milyar rupiah . Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama periode tersebut seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya, hanya ketika pada tahun 2020 mengalami defisit anggaran.

Namun untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, sehingga angka surplus/defisit anggaran tersebut harus dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.530.542.128,17	1.258.858.376.954	1.136.647.395.404	1.181.673.335.140	1.405.507.082.077
2	Realisasi Belanja Daerah	950.082.902.642,72	1.242.579.345.311	1.152.653.865.431	1.172.454.542.650	1.299.818.887.715
<b>A1</b>	<b>Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>144.447.639.485</b>	<b>16.279.031.642</b>	<b>-16.006.470.027</b>	<b>9.218.792.491</b>	<b>105.688.194.362</b>
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.400.000.000,00	0	507.984.000	0	3.000.000.000
<b>A2</b>	<b>Surplus/(Defisit) Riil</b>	<b>142.047.639.485</b>	<b>16.279.031.642</b>	<b>-16.514.454.027</b>	<b>9.218.792.491</b>	<b>102.688.194.362</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pinjaman daerah, bila realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit riil anggaran, maka akan memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Realisasi penutupan defisit riil pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2018–2022 dapat digambarkan komposisinya pada tabel berikut.

**Tabel 3.13**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	92.842.963.529	113.604.900.822	130.393.875.401	114.642.548.459	125.339.422.816
2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.376.274.269		763.136.777		2.862.508.689
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai UU			-	-	

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	94.219.237.798	113.604.900.822	131.157.012.178	114.642.548.459	128.201.931.505
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	113.604.900.821	129.368.225.714	114.642.548.459	123.116.940.186	230.890.125.867

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 92,84 milyar rupiah atau 8,65 % dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018, 113,60 milyar rupiah atau 9,14% dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 sebesar 130,39 milyar rupiah atau 11,31% dari realiasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2021 sebesar 114,64 milyar rupiah atau 9,78% dari total realisasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2022 sebesar 125,33 milyar atau 9,64% dari total realisasi belanja daerah. Besarnya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan relatif kecilnya realisasi defisit riil anggaran atau bahkan terjadinya surplus riil anggaran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir.

## 3.2 Neraca Daerah

### 3.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah

satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur value for money. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2018-2022 seperti terlihat pada Tabel dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a) Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.
- b) Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- c) Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2018-2022, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
- d) Ekuitas dana yang meliputi dana lancar dan dana investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan Neraca Daerah dari Tahun 2018- 2022 dapat dilihat tabel 3.14.

**Tabel 3.14**

**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>ASET</b>					
1.1	<b>ASET LANCAR</b>					
1.1	Kas di Kas Daerah					
.1		98.928.587. 906,58	115.707.147 .435,31	78.538.876. 786,49	92.837.371. 150,04	92.837.371.15 0,04
1.1	Kas di Bendahara					



No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
.2	Penerimaan	-	17.378.000,00	18.529.500,00	16.385.800,00	16.385.800,00
1.1 .3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.391,00	60.603,00	11.040.258.396,32	11.040.258.396,32
1.1 .4	Kas di BLUD	13.760.803.837,92	11.676.759.482,92	29.743.379.729,12	11.040.258.396,32	11.040.258.396,32
1.1 .5	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	1.445.407.470,07	1.445.407.470,07
1.1 .6	Kas di Bendahara BOS	915.509.077,25	2.992.990.483,00	6.336.244.443,00	-	-
1.1 .7	Kas lainnya	96.809.282,92	88.987.294,92	96.932.169,92	89.284.669,92	89.284.669,92
1.1 .8	Setara Kas	-	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.1 .9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.1 .10	Piutang Pendapatan	118.810.204.016,61	162.684.107.710,38	94.608.767.910,44	75.988.963.949,97	75.988.963.949,97
1.1 .11	Piutang Lainnya	583.723.611,91	576.843.611,96	568.443.611,96	852.644.139,30	852.644.139,30
1.1 .12	Penyisihan Piutang	(11.094.651.203,59)	15.226.150.868,10	17.638.055.593,71	18.636.448.769,36	18.636.448.769,36
1.1 .13	Beban Dibayar Dimuka	999.744.455,00	-	-	-	-
1.1 .14	Persediaan	20.547.334.677,60	18.939.217.472,16	22.508.733.037,53	22.230.669.342,72	22.230.669.342,72
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>243.548.065.662,25</b>	<b>297.456.883.013,55</b>	<b>214.781.514.197,75</b>		
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
1.2 .1	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>					
1.2 .1.1	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	-	-	-		
1.2 .1.2	Investasi dalam Obligasi	-	-	-		
1.2 .1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-		
1.2 .1.4	Dana Bergilir	-	-	-		
1.2 .1.5	Deposito Jangka Panjang	-	-	-		
1.2 .1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	18.611.117.652,00	18.101.419.992,00	17.338.283.215,00	15.860.801.348,00	15.860.801.348,00



No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	18.611.117.652,00	<b>18.101.419.992,00</b>	<b>17.338.283.215,00</b>	<b>15.860.801.348,00</b>	<b>15.860.801.348,00</b>
1.2	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>					
1.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	54.775.456.998,00	55.137.987.605,00	55.649.815.141,00	147.820.635.366,00	147.820.635.366,00
1.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-		
	<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>54.775.456.998,00</b>	<b>55.137.987.605,00</b>	<b>55.649.815.141,00</b>	<b>147.820.635.366,00</b>	<b>147.820.635.366,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>73.386.574.650,00</b>	<b>73.239.407.597,00</b>	<b>72.988.098.356,00</b>	<b>163.681.436.714,00</b>	<b>163.681.436.714,00</b>
1.3	<b>ASET TETAP</b>					
1.3	Tanah	249.697.057.354,53	252.901.121.909,93	252.179.216.223,17	216.777.662.071,65	216.777.662.071,65
1.3	Peralatan dan Mesin	299.761.619.574,92	328.713.999.757,89	371.429.444.565,97	420.374.367.273,60	420.374.367.273,60
1.3	Gedung dan Bangunan	807.074.601.508,35	854.633.880.395,47	899.219.415.094,77	943.908.650.844,92	943.908.650.844,92
1.3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.372.242.849.280,95	1.514.007.680.374,22	1.569.582.823.142,87	1.681.801.231.839,47	1.681.801.231.839,47
1.3	Aset Tetap lainnya	43.503.625.901,74	46.705.660.972,41	48.859.776.206,09	51.979.990.519,08	51.979.990.519,08
1.3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.234.174.997,00	3.103.385.640,00	14.732.356.497,00	13.781.509.452,16	13.781.509.452,16
1.3	Akumulasi Penyusutan	(1.219.051.004.285,23)	1.650.415.938.068,00	1.518.908.625.360,12	(1.660.181.292.764,62)	(1.660.181.292.764,62)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.650.415.938.068,00</b>	<b>1.650.415.938.068,00</b>	<b>1.637.094.406.369,75</b>	<b>1.668.442.119.236,26</b>	<b>1.668.442.119.236,26</b>
1.4	<b>DANA CADANGAN</b>					
1.4	Dana Cadangan	-	-	-		
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>					
1.5	Tagihan Jangka Panjang	1.383.167.250,00	1.383.167.250,00	1.627.487.250,00	1.627.487.250,00	1.627.487.250,00
1.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	17.068.151.043,79	18.921.560.106,79	19.643.451.958,83	45.865.678.180,64	45.865.678.180,64
1.5	Aset Tidak Berwujud	272.450.467,00	673.545.763,00	509.817.735,00	1.734.740.798,00	1.734.740.798,00
1.5	Aset lain-lain	13.918.263.779,77	15.323.149.372,15	33.021.130.154,91	37.633.630.948,51	37.633.630.948,51
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>32.642.032.779,77</b>	<b>36.301.422.372,15</b>	<b>54.801.887.154,91</b>	<b>83.426.854.948,51</b>	<b>83.426.854.948,51</b>



No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		540,56	491,94	098,74	891,15	91,15
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.906.039.597.185,07</b>	<b>2.057.413.651.170,49</b>	<b>1.979.665.906.022,23</b>	<b>2.121.414.946.990,39</b>	<b>2.121.414.946.990,39</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>					
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				<b>89.230.461,92</b>	<b>89.230.461,92</b>
2.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	93.018.682,92	88.980.461,92	88.980.461,92	-	-
2.1	Utang Bunga	-	-	-	-	-
2.1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2.1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.924.567.292,44	3.661.492.718,96	4.618.208.926,63	4.635.922.978,66	4.635.922.978,66
2.1	Utang Beban	19.134.536.347,00	14.067.754.976,00	8.357.397.819,79	29.400.613.048,82	29.400.613.048,82
2.1	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.101.168.742,00	4.344.100.986,00	12.992.445.457,00	8.861.784.074,00	8.861.784.074,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>31.253.291.064,36</b>	<b>22.162.329.142,88</b>	<b>26.057.032.665,34</b>	<b>42.987.550.563,40</b>	<b>42.987.550.563,40</b>
2.2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
2.2	Utang Dalam Negeri	-	-	-		
2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>31.253.291.064,36</b>	<b>22.162.329.142,88</b>	<b>26.057.032.665,34</b>	<b>42.987.550.563,40</b>	<b>42.987.550.563,40</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>					
3.1	EKUITAS	1.874.786.306.120,71	2.035.251.322.027,61	1.953.608.873.356,90	2.078.427.396.426,99	2.078.427.396.426,99
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.906.039.597.185,07</b>	<b>2.057.413.651.170,49</b>	<b>1.979.665.906.022,23</b>	<b>2.121.414.946.990,39</b>	<b>2.121.414.946.990,39</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Bangka (Diolah) Tahun 2018-2022

### 3.3 Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah Kabupaten Bangka selama empat tahun ke depan tahun anggaran 2023 sampai dengan 2026 yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga dan belanja transfer serta proyeksi



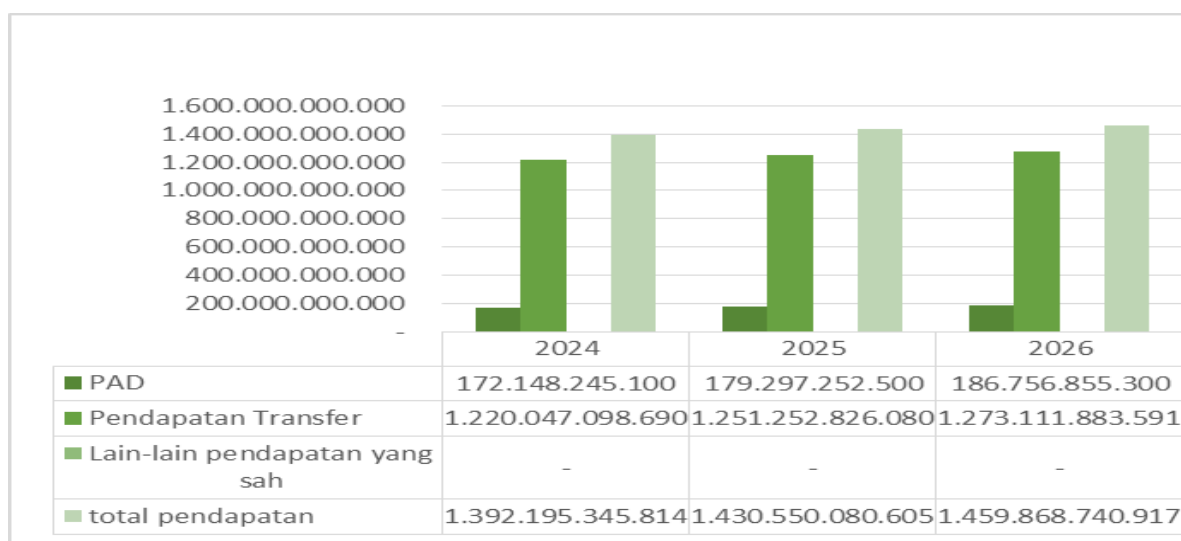
penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka selama empat tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi - asumsi yang diperoleh berdasarkan analisa data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi kedepan, prediksi belanja - belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama tiga tahun kedepan. Disamping itu, perlu juga dilakukan perhitungan mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan selama tiga tahun kedepan.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk tiga tahun ke depan dari tahun 2024 - 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

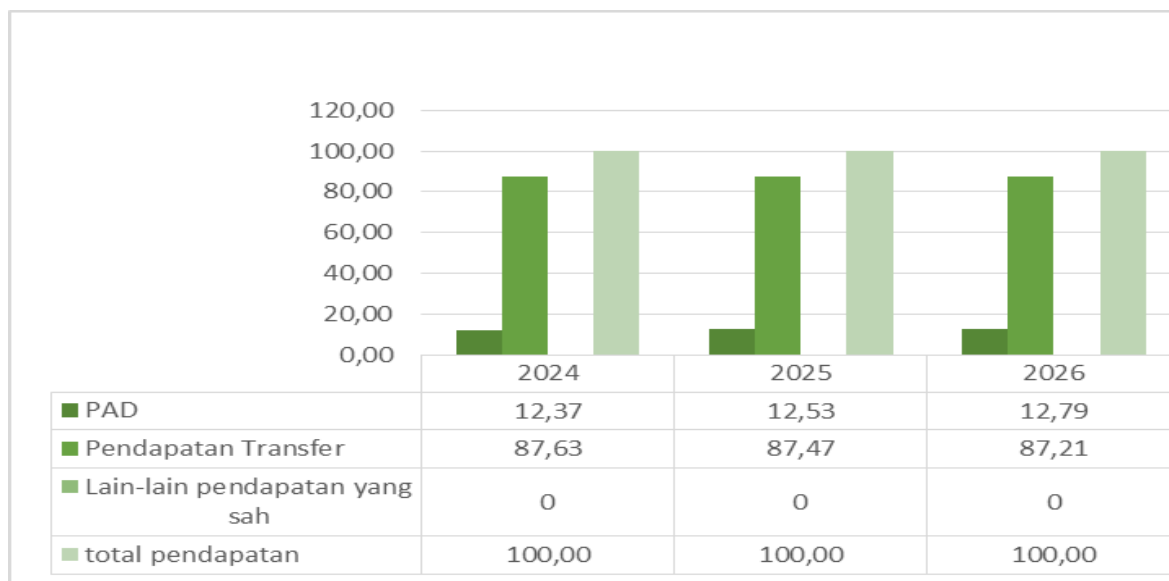
**Grafik 3.12**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, ketergantungan keuangan Kabupaten Bangka pada pendapatan transfer masih cukup tinggi yaitu sekitar 87,63% dan diharapkan perannya akan semakin berkurang mencapai 87,21% pada tahun 2026, sementara PAD ditargetkan mampu meningkat rata-rata 3,46% per tahun yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 12,37% dan pada akhir tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 12,79%.

**Grafik 3.13**  
**Proyeksi % Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



*Sumber: Proyeksi Keuangan Daerah 2023*

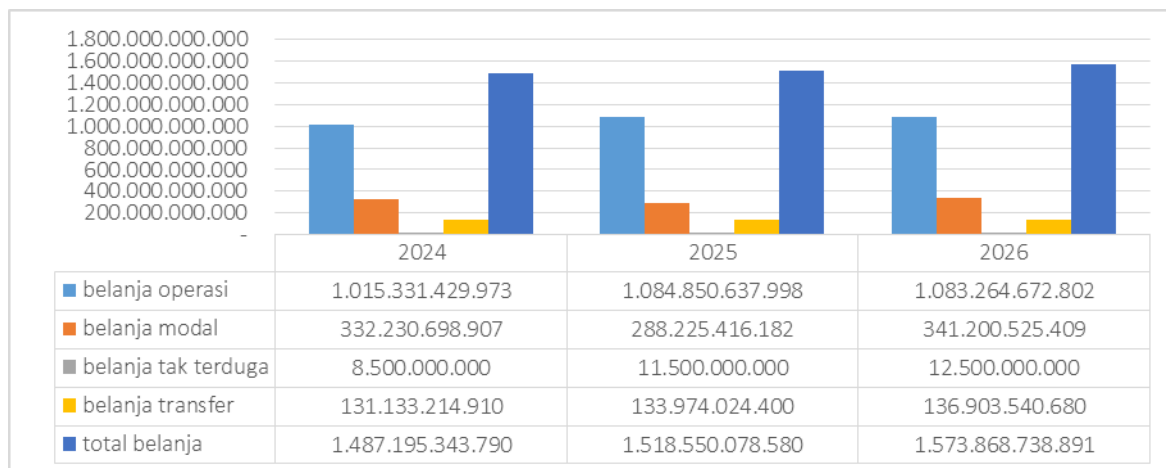
Untuk peningkatan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkret bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

### 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Bangka empat tahun ke depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang

sangat signifikan. Untuk tiga tahun kedepan, belanja daerah Kabupaten Bangka diproyeksikan sebagai berikut.

**Grafik 3.14**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Proyeksi Keuangan Daerah 2023

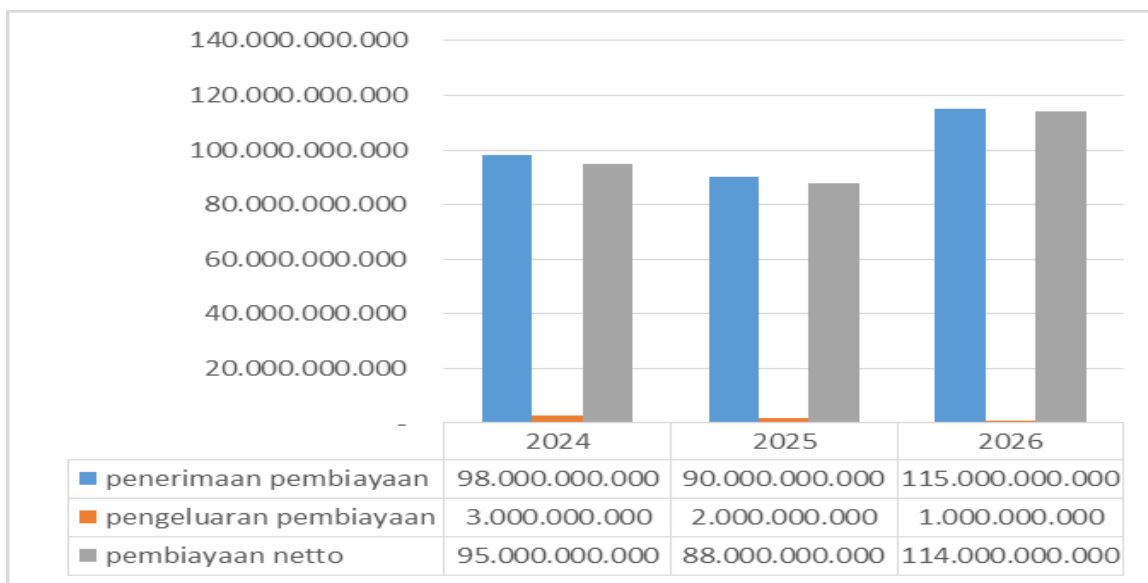
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja operasi yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari – hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, proyeksi komposisi belanja operasi rata-rata adalah sebesar 69,51% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar 21,00%, belanja transfer sebesar 8,78% dan belanja tak terduga sebesar 0,71% saja dari total belanja daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 1,94% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja operasi direncanakan sebesar 2,23%, belanja modal sebesar 0,90%, belanja tak terduga sebesar 15,69% sedangkan pertumbuhan belanja transfer adalah sebesar 1,47%.

### 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.

**Grafik 3.15**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2023

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. Oleh karena itu proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah harus lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.

Untuk lebih jelasnya proyeksi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Keuangan Daerah 2024-2026**

NO.	URAIAN		PROYEKSI		
			2024	2025	2026
1	2		5	6	7
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.392.195.343.790</b>	<b>1.430.550.078.580</b>	<b>1.459.868.738.891</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>172.148.245.100</b>	<b>179.297.252.500</b>	<b>186.756.855.300</b>
	a	Hasil Pajak Daerah	69.822.042.600	72.412.440.400	75.098.942.000
	b	Hasil Retribusi Daerah	8.142.694.500	8.290.891.600	8.441.785.800
	c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.486.828.500	4.546.952.000	4.607.881.000
	d	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	89.696.679.500	94.046.968.500	98.608.246.500
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.220.047.098.690</b>	<b>1.251.252.826.080</b>	<b>1.273.111.883.591</b>
	a	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>926.530.017.190</b>	<b>947.416.328.080</b>	<b>965.286.118.291</b>
	1)	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>859.606.201.190</b>	<b>879.022.462.080</b>	<b>895.384.569.291</b>
	a)	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>665.013.012.190</b>	<b>673.507.391.080</b>	<b>681.479.189.000</b>
		(1) Dana Bagi Hasil	148.070.393.000	155.666.404.000	163.652.091.000
		(2) Dana Alokasi Umum	516.942.619.190	517.840.987.080	517.827.098.000
	b)	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>194.593.189.000</b>	<b>205.515.071.000</b>	<b>213.905.380.291</b>
		(1) DAK Fisik	62.403.147.000	72.059.930.000	78.966.511.291
		(2) DAK Non Fisik	132.190.042.000	133.455.141.000	134.938.869.000
	2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>9.500.000.000</b>
	3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>			
	4)	<b>Dana Keistimewaan</b>			
	5)	<b>Dana Desa</b>	<b>57.423.816.000</b>	<b>58.893.866.000</b>	<b>60.401.549.000</b>
	b	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>293.517.081.500</b>	<b>303.836.498.000</b>	<b>307.825.765.300</b>
	1)	Pendapatan Bagi Hasil	288.517.081.500	298.336.498.000	301.825.765.300
	2)	Bantuan Keuangan	5.000.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				



NO.	URAIAN		PROYEKSI		
			2024	2025	2026
1	2		5	6	7
	a	Hibah			
	b	Dana Darurat			
	c	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>		<b>1.487.195.343.790</b>	<b>1.518.550.078.580</b>	<b>1.573.868.738.891</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>1.015.331.429.973</b>	<b>1.084.850.637.998</b>	<b>1.083.264.672.802</b>
	a	Belanja Pegawai	532.657.373.383	543.473.807.718	552.977.206.202
	b	Belanja Barang dan Jasa	387.369.530.190	485.456.799.980	489.007.378.400
	c	Belanja Bunga			
	d	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	e	Belanja Hibah	91.960.743.400	51.386.074.300	34.951.589.400
	f	Belanja Bantuan Sosial	2.343.783.000	3.533.956.000	5.328.498.800
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>332.230.698.907</b>	<b>288.225.416.182</b>	<b>341.200.525.409</b>
	a	Belanja Tanah			
	b	Belanja Peralatan dan Mesin	63.131.763.000	57.596.152.800	60.170.700.900
	c	Belanja Bangunan dan Gedung	91.366.156.200	52.385.383.800	56.738.609.200
	d	Belanja Jalan, Jaringan dan irigasi	174.392.550.207	177.741.700.882	223.549.999.509
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.340.229.500	502.178.700	741.215.800
	f	Belanja Modal Aset Lainnya			
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>8.500.000.000</b>	<b>11.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRASFER</b>		<b>131.133.214.910</b>	<b>133.974.024.400</b>	<b>136.903.540.680</b>
	a	Belanja Bagi Hasil	7.796.473.710	8.070.333.200	8.354.072.780
	b	Belanja Bantuan Keuangan	123.336.741.200	125.903.691.200	128.549.467.900
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>(95.000.000.000)</b>	<b>(88.000.000.000)</b>	<b>(114.000.000.000)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	a	Penerimaan Pembiayaan			



NO.	URAIAN		PROYEKSI		
			2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	1)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)Tahun Sebelumnya	98.000.000.000	90.000.000.000	115.000.000.000
	2)	Pencairan Dana Cadangan			
	3)	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	4)	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	5)	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	6)	Penerimaan Piutang Daerah			
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>98.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>115.000.000.000</b>
	<b>b</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
	1)	Pembentukan Dana Cadangan			
	2)	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
	3)	Pembayaran Pokok Utang			
	4)	Pemberian Pinjaman Daerah			
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>95.000.000.000</b>	<b>88.000.000.000</b>	<b>114.000.000.000</b>
	<b>c</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2023



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka**

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

##### **4.1.1 Permasalahan Daerah**

Permasalahan daerah mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus. Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan mendasar pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bangka pada periode 2024-2026 mencakup:

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Umum,
2. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Bidang Infrastruktur;
4. Bidang Ekonomi; dan
5. Bidang Lngkungan hidup.



Penjelasan secara lebih rinci terhadap permasalahan tersebut selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

**a. *Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal***

Permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku dan mentalitas birokrat. Salah satu aspek reformasi yang sangat penting selain reformasi struktur adalah melakukan perombakan *mindset* para birokrat. Hal ini terkait dengan transformasi perubahan kultural (nilai-nilai dan perilaku). Permasalahan terkait perubahan perilaku dan mentalitas dan *mindset* birokrat yang cenderung menempatkan dirinya sebagai agen kekuasaan dari pada agen pelayanan. Perilaku ini berpengaruh dengan sikap birokrat seperti rendahnya lambatnya pelayanan publik, sikap disiplin pegawai, resistensi terhadap perubahan, distribusi tugas dan tanggungjawab yang kurang proporsional. Beberapa permasalahan di atas dapat menyebabkan rendahnya profesionalitas birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu aspek yang terpenting dalam melakukan perubahan perilaku dan mentalitas birokrat adalah dengan penyusunan dan pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada ASN secara konsisten dan proporsional.

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi saat ini ingin membangun birokrasi ASN yang memiliki daya *adaptif* dan *agile* yaitu birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Birokrasi ASN ini harus melaksanakan *core values* ASN berahlak yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

2. Meningkatkan pengawasan internal. Upaya pengawasan internal perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan level penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menambah aparatur pengawasan baik secara kualitas maupun

kuantitas serta menerapkan mekanisme pengawasan berjenjang pada masing level organisasi.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Permasalahan ini terkait dengan pembiayaan pembangunan yang masih memerlukan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja masih kurang. Hal ini terlihat dari regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat dinamis dan masih terdapat beberapa perencanaan yang bersifat rutinitas sehingga belum berdampak pada perubahan pembangunan secara mendasar.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan profesional. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan pelayanan publik adalah sistem, prosedur pelayanan masih harus ditingkatkan dan kepatuhan terhadap pelayanan publik masih terdapat kekurangan. Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 masih belum mencapai target RPJMD 2019-2023, dimana pada Tahun 2022 angka IKM 85,27, sedangkan target RPJMD 85,40. Pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum optimal, budaya kerja melayani oleh petugas, SOP pelayanan yang masih belum dilaksanakan dengan baik, kompetensi SDM dalam bidang Informasi Teknologi masih perlu ditingkatkan.
5. Kurangnya Profesionalitas ASN. Hal ini terlihat mulai dari proses pengangkatan dan penempatan PNS pada Jabatan Struktural masih ada yang belum sesuai kompetensi, pangkat dan golongan serta pola rekrutment masih berorientasi pada Hubungan Patrimonial. Profesionalitas ASN diukur dari riwayat pendidikan formal, riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, penilaian prestasi kerja ASN dan riwayat penjatuhan hukuman disiplin. Pada tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,00 dan termasuk dalam kategori masih rendah.
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Saat ini, hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka tahun 2022 capaiannya baru mencapai 71,31 dengan

predikat BB. Untuk meningkatkan nilai AKIP ini perlu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*), pelaporan kinerja dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi, evaluasi kinerja yang berjenjang dan berkesinambungan serta capaian kinerja yang sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

7. Meningkatkan penerapan *E-Government*. Hal ini terlihat dari penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan TIK, sarana dan prasarana untuk mendukung TIK masih harus ditingkatkan, belum terintegrasinya aplikasi dan keterbukaan informasi publik. Penerapan *E-Government* tersebut dilihat dari Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka yang masih rendah yaitu sebesar 1,85 pada tahun 2022 karena kebijakan internal terkait dengan pelaksanaan SPBE masih bersifat parsial atau sektoral.

**b. *Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah***

Kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan, Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bangka berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan

mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator *impact* yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Bangka mencapai nilai 72,95. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 72,45 bahkan lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional yang hanya mencapai 72,91. Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung, nilai IPM Kabupaten Bangka menempati urutan ke 3 yaitu di bawah Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Bangka masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bangka pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 71,37; (2) Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) sebesar 12,80 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) sebesar 8,27 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di angka 12.860.000.

**c. *Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Belum Optimal***

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas,

menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Bangka akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kabupaten Bangka.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

***d. Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan***

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kabupaten Bangka adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kabupaten Bangka menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian. Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kualitas pembangunan perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi.** Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih menghadapi permasalahan dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar dapat memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Beberapa fenomena yang mewarnai pertumbuhan perekonomian berkaitan dengan

masih rentannya pertumbuhan tersebut pada gejolak ekonomi dunia, masih belum mampu memberikan dukungan secara maksimal pada upaya untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor-sektor unggulan.** Beberapa sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perikanan, agro industri, dan sektor perdagangan, dan pariwisata perlu didorong untuk agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Beberapa permasalahan terkait dengan upaya ini adalah:

*Pertama*, pertumbuhan sub sektor pertanian dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas pertanian, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian perlu ditingkatkan, dukungan seluruh *stakeholder* dalam rantai tata niaga dan laju alih fungsi lahan pertanian yang perlu dikendalikan.

*Kedua*, pertumbuhan sub sektor Perikanan dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan.

*Ketiga*, kontribusi pertumbuhan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi kunjungan wisatawan, kawasan wisata yang berkualitas dan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata yang perlu ditingkatkan.

*Keempat*, pertumbuhan sub sektor agroindustri dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi ketersediaan bahan baku perlu ditingkatkan kualitasnya, fasilitas permodalan harus didukung oleh *stakeholder*, adanya dukungan ketersediaan pasar, dukungan infrastruktur bidang agroindustri, penelitian dan pengembangan produk, kualitas produksi, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri harus ditingkatkan serta peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing.

*Kelima*, pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB perlu ditingkatkan juga. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di Kabupaten Bangka yang masih perlu ditingkatkan, tertib ukur untuk tera dan tera ulang alat UTTP, terpenuhinya ketersediaan barang kebutuhan pokok barang penting serta informasi harga kebutuhan pokok, pembangunan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masih harus ditingkatkan, perlunya peningkatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi, pertemuan dengan *stakeholder* Ekpor Impor masih harus ditingkatkan, perlunya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor dan keikutsertaan Kabupaten Bangka dalam pameran promosi dagang baik tingkat nasional maupun lokal masih harus ditingkatkan.

**3. Peningkatan investasi.** Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2019-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan investasi yang signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19, sedangkan investasi pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan baik PMA maupun PMDN. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh *pertama*, Penanaman Modal Asing (PMA) masih perlu ditingkatkan, terkait beberapa aspek seperti pelayanan perizinan ditingkatkan dan keamanan berinvestasi yang harus dijaga. *Kedua*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terkait beberapa aspek seperti kerjasama penanaman modal perlu ditingkatkan dan jaminan ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

**e. *Kualitas Lingkungan Hidup yang Semakin Terdegradasi***

Kerusakan lingkungan hidup menjadi permasalahan yang mendasar di Kabupaten Bangka terutama dampak dari aktivitas penambangan baik di darat, daerah aliran sungai serta penambangan di laut, aktivitas perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat serta cemaran pada aliran sungai akibat aktivitas pabrik yang membuang limbah cair ke badan sungai. Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 memiliki skor 66,38 dengan perhitungan dari 4 (empat) indeks komposit yaitu Indeks Kualitas Udara yang memiliki skor 84,50, Indeks Kualitas Air yang rendah dengan nilai

55,50, Indeks Kualitas Air Laut 60,50 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Laut dengan skor 65,50. IKLH Kabupaten Bangka Tahun 2021 lebih rendah dari skor IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 72,05 dan lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 71,43. Sedangkan pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Bangka mengalami penurunan dengan skor 64,91 menurun sebesar 1,47 poin atau 2,21 persen dari tahun 2021 yang memiliki skor 66,38. Penurunan IKLH pada tahun 2022 disebabkan indeks kualitas air mengalami penurunan menjadi 60,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 63,14. Namun, jika dilihat dari tolak ukur kualitas air, maka kualitas air di Kabupaten Bangka masih masuk kategori tercemar ringan. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 86,55, mengalami penurunan dibanding hasil pengukuran IKU pada tahun 2021 memiliki nilai 87,36. Hasil pengukuran ini termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO<sub>2</sub> yang rata-rata berasal dari sektor transportasi masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO<sub>2</sub> yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), luas tutupan lahan di Kabupaten Bangka seluas 35.589,8730 hektar dari luas wilayah administrasi 302.879,47 hektar sehingga skor IKTL pada tahun 2022 sebesar 33,31. Nilai ini meningkat dari angka IKTL Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebesar 33,15. Dengan skor IKTL Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 33,31 menunjukkan bahwa indeks kualitas lahan Kabupaten Bangka berada pada kriteria kurang. Untuk itu perlu upaya untuk penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan perlu publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Kerusakan lingkungan hidup ini juga berdampak pada intensitas kejadian bencana di wilayah Kabupaten. Pada tahun 2022, Indeks Resiko Bencana (IRB) di Kabupaten Bangka sebesar 168,40 dengan kategori beresiko tinggi sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai IRB yang lebih rendah yaitu 158,52 dengan kategori resiko tinggi yang artinya Kabupaten Bangka memiliki resiko bencana yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota



di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika dibandingkan dengan IRB Nasional yang nilainya 134,16 maka IRB Kabupaten Bangka maupun IRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh lebih tinggi atau beresiko tinggi terjadinya Bencana.

IRB Kabupaten Bangka yang tinggi ini dikarenakan daerah rawan bencana ada di 6 (enam) Kecamatan yaitu Sungailiat, Riau Silip, Belinyu, Merawang, Mendo Barat dan Pemali dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Kejadian Bencana pada tahun 2022 yang terjadi terutama bencana banjir/genangan air akibat dari tutupan lahan yang terus berkurang dan pendangkalan aliran sungai akibat penambangan, kebakaran lahan, angin puting beliung dan banjir rob akibat pasangannya tinggi air laut.

#### **4.1.2. Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah pada setiap urusan.

##### **4.1.2.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

###### **a. Urusan Bidang Pendidikan**

Permasalahan pembangunan pada urusan Pendidikan sebagai berikut.

1. Masih rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah yang hanya berada pada angka 8,27 pada tahun 2022, angka ini masih jauh dibawah target RPJMD yaitu angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,04 di tahun 2023.
2. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 12,80 masih berada di bawah target yang diharapkan yaitu 12,95 di tahun 2023.
3. Masih terdapat anak putus sekolah baik di jenjang SD/MI dan SMP/Mts
4. Cakupan PAUD yang mengalami penurunan secara signifikan
5. Cakupan Pendidikan Non Formal yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sedangkan wilayah perdesaan belum tersentuh secara optimal
6. Sebaran tenaga pengajar yang belum merata di antar wilayah
7. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang masih harus di tingkatkan



b. Urusan Bidang Kesehatan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kesehatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan Ibu hamil, angka kematian ibu masih tinggi. Pada tahun 2022, angka kematian ibu mencapai 57,30/100.000 Kelahiran Hidup atau absolutnya ada 3 (tiga) orang ibu yang meninggal yaitu di wilayah kerja Puskesmas Sinar Baru 1 orang, wilayah kerja Puskesmas Belinyu 1 orang dan 1 orang di wilayah kerja Puskesmas Puding Besar. Penyebab kematian ibu adalah *post SC* ada 2 kasus dan *epiderma post abortus spontan* ada 1 kasus. Jumlah kematian ibu perlu perhatian khusus sehingga dapat diturunkan pada tahun yang akan datang.
2. Angka kematian bayi pada tahun 2022 mencapai 8,40/1000 kelahiran hidup dengan angka absolut ada 44 Kematian Bayi dari 5.236 Kelahiran Hidup, angka kematian bayi ini harus terus ditekan dari tahun ke tahun.
3. Masih tingginya kejadian *demam berdarah dengue* dan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap penyakit-penyakit menular akibat perubahan cuaca ekstrim.
4. Perlunya pencegahan dini terhadap penyakit-penyakit tidak menular dan peningkatan sosialisasi terhadap PHBS.
5. Belum maksimalnya sosialisasi terkait konsumsi gizi ibu hamil, dan pencegahan kehamilan di usia anak.
6. Masih belum optimalnya akses terhadap kesehatan yang berkualitas, ini disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, jaminan pembiayaan kesehatan serta luasnya cakupan pelayanan.
7. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya kesehatan.

c. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:



1. Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap, proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 baru mencapai mencapai 75,61%.
  2. Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah tahun 2022 sebesar 0,77% berdasarkan data plotting RDTR) dan 0,05% berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.
  3. Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan drainase di kawasan rawan banjir.
  4. Kurangnya jaringan irigasi yang berkualitas pada kawasan pertanian sentra produksi padi. Jaringan irigasi yang dibangun hingga tahun 2022 sudah mencapai 99,55 persen tetapi debit air irigasi yang sampai ke sawah masih sangat terbatas.
  5. Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
  6. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada tahun 2022 rata-rata sebesar 85,30 persen. Permasalahan ketaatan pada RTRW ini pada kesesuaian peruntukan kawasan lindung yang hanya sebesar 72,22 persen, sedangkan kesesuaian peruntukan kawasan budidaya sudah baik sebesar 98,38 persen.
- d. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum dapat mengakses air bersih. Pada tahun 2022, rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sebesar 90,05 persen dan yang belum dapat mengakses air bersih sebesar 9,95 persen sehingga perlu peningkatan akses penyediaan air bersih yang memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan ke rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih.
2. Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara



3. Akses air minum aman sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 masih rendah.
  4. Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
  5. Rumah tidak layak huni pada tahun 2022 masih menyisakan 2,06 persen atau 1.573 rumah. Namun keterbatasan APBD menyebabkan belum tuntasnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
  6. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh yang belum tuntas, pada tahun 2022 masih menyisakan 0,015 persen atau seluas 45,26 Ha dari total luas Kabupaten Bangka 302.879 Ha. Pemukiman kumuh ini tersebar di Nelayan, Parit Pekir, HOS Cokroaminoto, dan Mantung.
- e. Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan pembangunan pada urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:
1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih belum optimal
  2. Kualifikasi SDM Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemadam kebakaran dan Penanggulangan bencana masih rendah
  3. Sarana dan Prasarana Satuan Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana yang kurang standar
  4. Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 adalah 168,40 masuk dalam kategori resiko tinggi.
  5. Belum ada dokumen terkait kebencanaan seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Rencana Bencana (KRB), Rencana Kontingensi dan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka yang perlu dilakukan reviu kembali
  6. Belum ada *early warning system* terkait kebencanaan yang ada di Kab. Bangka dan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih mendiami daerah rawan bencana

7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti *illegal logging*, *illegal mining* dan membuang sampah sembarangan.

f. Urusan Bidang Sosial

Permasalahan pembangunan pada urusan Sosial sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,26%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 4,81%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 4,45% dan nasional yang sebesar 9,54%. Namun jika dilihat indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Bangka sebesar 0,67 sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 0,6. Untuk indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Bangka sebesar 0,15 sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 0,13.
2. Jumlah Penduduk penyandang masalah sosial pada tahun 2022 yang terdiri dari lanjut usia terlantar sebanyak 177 orang, penyandang cacat sebanyak 1.048 orang, dan pengungsi dan korban Bencana 247 orang.
3. Jumlah penghuni panti asuhan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 136 orang.
4. Data masyarakat miskin yang belum *up to date* dan terintegrasi dengan baik sehingga sering terjadi perbedaan data.
5. Penerima bantuan sosial dari pemerintah (PKH, BPNT) yang kurang tepat sasaran akibat permasalahan data yang tidak akurat.
6. Masyarakat miskin belum sepenuhnya ter-cover layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan
7. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial belum optimal
8. Panti Asuhan milik pemerintah daerah terpusat di Kota Sungailiat sedangkan kapasitasnya terbatas

#### 4.1.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### a. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada urusan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 222.288 orang, sedangkan pada tahun 2021 hanya 159.365 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 62.923 orang.
2. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,921 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,940 atau mengalami penurunan sebesar 0,019.
3. Angka pengangguran pada tahun 2022 masih tinggi yaitu sebesar 5,39% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 222.290 jiwa. Angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 204.935 jiwa dan pengangguran sebanyak 17.355 jiwa.
4. Pendidikan angkatan kerja yang relative rendah, pencari kerja pada tahun 2022 didominasi oleh angkatan kerja dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang *soft skill* dan *attitude* angkatan kerja masih kurang
5. Sebaran tenaga kerja yang tidak merata, masih sangat dominan di kota

##### b. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender, Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 sebesar 88,36.
2. Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 48,63 persen pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Bangka)



3. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
4. Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional
5. Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik
6. Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

c. Urusan Bidang Pangan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pangan sebagai berikut:

1. Skor PPH konsumsi belum mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2022 skor PPH baru mencapai 90,04 dari target yang ditetapkan pemerintah pusat 95,00.
2. Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi, kurangnya konsumsi sayur dan buah serta umbi-umbian menyebabkan masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga belum optimal
4. Pemberdayaan kelompok wanita dan pembinaan yang berkesinambungan selaku agen percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan perlu tingkatkan
5. Masih terdapat pangan segar yang beredar di masyarakat belum aman untuk dikonsumsi;
6. Meningkatkan jumlah produk pangan segar yang bersertifikat prima dan bersertifikasi halal
7. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan
8. Keterbatasan dalam mengontrol dan mengintervensi rantai pasok dan distribusi pangan



9. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat
10. Akurasi deteksi dini daerah rawan pangan yang kurang optimal dan penanganan daerah rawan pangan yang belum optimal

d. Urusan Bidang Pertanahan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanahan sebagai berikut:

1. sebagian masyarakat tidak bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan sarana umum (pembangunan/ pelebaran jalan, siring, pasar, dll) jika tidak ada ganti rugi dari pemerintah
2. masih ada aset lahan milik Pemkab Bangka yang belum memiliki sertifikat
3. sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki, lahan yang bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 31,90%.
4. rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi lahan terutama lahan pertanian/perkebunan

e. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut

1. Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2022 baru mencapai 64,91 dengan kategori sedang.
2. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Bangka
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk sampah.
4. Masih minimnya bank sampah dan TPS3R
5. Kapasitas TPA yang sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah.
6. Belum adanya master plan pengelolaan persampahan secara terpadu
7. Pelayanan persampahan belum optimal karena layanan persampahan baru mencakup wilayah perkotaan dan masih terdapat wilayah yang belum terlayani sarana pengangkutan secara maksimal
8. Pengelolaan sampah dilakukan oleh rumah tangga, namun tidak semua rumah tangga sudah melakukan pengelolaan sampah.





9. Makin besarnya timbulan sampah, peningkatan laju timbulan sampah perhari yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai
  10. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih relatif rendah
  11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih terutama masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan
  12. Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena aktivitas penambangan, perluasan pemukiman penduduk, dan kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang
  13. Belum optimalnya penegakan aturan terkait tata ruang yang dampaknya merugikan usaha pelestarian lingkungan
- f. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Permasalahan pembangunan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut :
1. Cakupan penerbitan akta Perkawinan tahun 2022 sebesar 48,00 persen.
  2. Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun 97,00 persen.
  3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 99,39 persen.
  4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 74,87 persen.
  5. masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan
  6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data pada dokumen kependudukan, sehingga data yang tersedia kurang akurat.
  7. Perlu optimalisasi kemudaha layanan dokumen pendudukan melalui teknologi informasi yang sudah ada
- g. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.



1. Persentase BUMDes yang aktif di setiap desa masih rendah. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangka 62 unit, yang aktif sebanyak 29 unit, kurang aktif sebanyak 26 unit dan tidak aktif sebanyak 7 unit.
  2. Pembinaan dan pengawasan terhadap APBDesa yang perlu ditingkatkan sehingga belanja anggaran desa tepat sasaran dan akuntabel;
  3. Belum optimalnya peran Pendamping Desa dalam meningkatkan kategori desa mandiri;
  4. Menyelesaikan administrasi batas desa yang masih belum ditetapkan
  5. Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan
  6. Belum berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan kurangnya peran serta lembaga keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha
- h. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Permasalahan pembangunan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut
1. Angka TFR Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 2,33 masih diatas target nasional yaitu 2,1
  2. Unmeet Need KB masih di angka 9,00
  3. ASFR 15-19 masih berada di angka 23,29
  4. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- i. Urusan Bidang Perhubungan
- Permasalahan pembangunan pada urusan Perhubungan sebagai berikut
1. Masih rendahnya Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB, pada tahun 2022 hanya sebesar 5,54%
  2. belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada
  3. Kondisi angkutan umum di perkotaan maupun perdesaan yang memprihatinkan



4. Terminal dalam kota yang tidak memadai dengan kondisi sebagai terminal sementara
  5. Belum optimalnya layanan KIR kendaraan umum dan angkutan barang
  6. Belum maksimalnya penyediaan lampu penerangan jalan umum
  7. masih rendahnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya
  8. belum optimalnya peran forum lalu lintas
- j. Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi
- Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka tahun 2022 pada angka 1,85 termasuk kategori cukup.
  2. Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi termasuk internet di daerah pedesaan, bahkan masih ada desa yang belum terlayani internet sama sekali
  3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Bangka
- k. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Permasalahan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:
1. Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik
  2. Produktivitas koperasi dan UMKM masih rendah
  3. Kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah
  4. Jumlah koperasi aktif tahun 2022 masih rendah, sebanyak 211 unit sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 109 unit atau 51,66 %
  5. Jumlah UMKM pada tahun 2022 sebanyak 54.033 UMKM



6. Kesulitan UMKM dalam mengakses modal, pengembangan produk yang berdaya saing serta jaringan pemasaran yang masih terbatas

l. Urusan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan Penanaman Modal sebagai berikut.

1. Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka.
2. Belum optimalnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM.
3. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi

m. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Pembinaan olahraga belum terarah.
2. Masih banyak event kejuaraan yang belum berjenjang dan sifatnya lokal dan situasional
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
4. Masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.
5. Kualifikasi Pelatih berstandar nasional yang masih rendah

n. Urusan Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan pada urusan Statistik sebagai berikut:

1. Belum tersedia meta data/data statistik sektoral
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang Statistik

o. Urusan Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan pada urusan Persandian sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana pengamanan data dan informasi yang dimiliki

p. Urusan Bidang Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perpustakaan sebagai berikut:

1. Budaya literasi masyarakat masih rendah, tergerus dengan adanya teknologi digital
2. Budaya gemar membaca yang masih rendah
3. Armada perpustakaan keliling yang terbatas dan belum bisa menjangkau permukiman dengan akses jalan yang sempit
4. Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan masih kurang dengan koleksi buku yang terbatas
5. Jumlah tenaga pustakawan berdasarkan jurusan dan jenjang kependidikan masih sangat terbatas
6. Pelayanan perpustakaan masih belum berbasis teknologi informasi (e-perpustakaan)
7. Koleksi buku cetak yang semakin berkurang

q. Urusan Bidang Kebudayaan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Bangka
2. Masih kurangnya promosi event budaya yang ada di Kabupaten Bangka baik melalui media baik cetak maupun elektronik lokal maupun nasional

r. Urusan Bidang Kearsipan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kearsipan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan NSPK kearsipan yang berlaku sehingga terjadi penumpukan volume jumlah arsip pada masing-masing unit kerja
2. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip statis dan arsip yang berketerangan permanen dengan cara akuisisi ke lembaga kearsipan daerah yang sesuai dengan ketentuan kearsipan yang

berlaku. Belum tersedianya Depo Arsip yang sesuai dengan peraturan kearsipan yang berlaku

3. Terbatasnya SDM serta masih rendahnya kesadaran pengelola arsip pada unit kerja dalam mengelola arsip.
4. Kualitas pengelolaan arsip masih rendah, pada tahun 2022 mendapatkan nilai 48,07 dari hasil penilaian Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

#### 4.1.2.3. Urusan Pilihan

##### a. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut

1. Pertumbuhan sub sektor Perikanan dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan.
2. Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai
3. Ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan
4. Masih adanya *illegal fishing* (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
5. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
6. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi
7. Biaya produksi untuk perikanan budidaya terutama pakan masih cukup tinggi/mahal sehingga berpengaruh terhadap penghasilan petambak/petani
8. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 28.055,24 Ton
9. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 2.668,813 Ton, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3.555,521 Ton.



b. Urusan Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanian sebagai berikut.

1. Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
2. Masih rendahnya produksi padi dan cabai sehingga ketergantungan dari luar daerah masih tinggi
3. Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakat masyarakat miskin terhadap akses sumber daya pertanian
4. Kenaikan harga sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida yang berimbas pada kenaikan biaya produksi sehingga pendapatan petani cenderung stagnan atau turun
5. Perlu peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit ternak seperti penyakit kuku dan mulut
6. Pemberdayaan kelompok tani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian masih belum perlu ditingkatkan
7. Peran penyuluh pertanian sebagai corong informasi dan percepatan penerapan teknologi pertanian belum optimal

c. Urusan Bidang Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan Pariwisata sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek – objek wisata daerah
2. masih rendahnya investasi di sektor pariwisata
3. belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata
4. belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya.



5. minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait)
  6. kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat
  7. produksi dan pengembangan cinderamata khas daerah masih sangat terbatas
  8. dokumen RIRA KSPP Provinsi sudah tersusun namun belum ada implementasi yang tertuang dalam rencana aksi.
  9. Menurunnya kualitas objek wisata akibat masih banyaknya penambangan timah ilegal yang beroperasi disekitar objek wisata
  10. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan Pariwisata
  11. Masih minimnya pembinaan dan penghargaan terhadap pelaku budaya
  12. Beberapa daya tarik wisata berada pada kawasan hutan lindung dan produksi sehingga menghambat investasi pariwisata
  13. Masih minimnya SDM yang bekerja dalam sektor Pariwisata di Kabupaten Bangka yang mempunyai lisensi dan terverifikasi
  14. Belum optimalnya akses, amenitas, atraksi, alokasi, awareness; sarana dan prasarana umum kepariwisataan
- d. Urusan Bidang Perdagangan
- Permasalahan pembangunan pada urusan Perdagangan sebagai berikut:
1. masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
  2. belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk lokal ke luar daerah
  3. belum optimalnya upaya peningkatan kualitas produk lokal
  4. perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan
  5. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 7,94 %



e. Urusan Bidang Perindustrian

Permasalahan pembangunan pada urusan Perindustrian sebagai berikut:

1. perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya.
2. Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan
3. kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri

**4.1.2.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah**

a. Sekretariat Daerah.

Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan ketersediaan data dari Perangkat Daerah masih rendah.
3. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi masih memperoleh skor 62,97 dengan predikat B pada tahun 2022.
4. Kualitas kebijakan yang dihasilkan masih belum optimal
5. Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang masih kurang
6. Pengawasan terhadap kinerja BLUD dan BUMD perlu dilakukan secara berkala
7. Tim Inflasi Daerah yang bertanggung jawab terhadap inflasi belum bekerja secara optimal
8. Kajian terhadap kebutuhan organisasi dalam pencapaian tujuan daerah belum dilakukan secara maksimal

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM kesekretariatan DPRD.
2. Perlunya peningkatan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk legislasi daerah.

**4.1.2.5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah**

a. Unsur Perencanaan

Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan
2. Belum optimalnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen-dokumen sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Unsur Keuangan

Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi.
2. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD sehingga pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat.

c. Unsur Kepegawaian

Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:

1. Distribusi pegawai belum proporsional sesuai dengan formasi dan kebutuhan.
2. Belum optimalnya penempatan pegawai dalam hal kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan dan tugas.

3. Belum optimalnya penerapan sistem e-kinerja ASN
  4. Terbatasnya kemampuan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan ASN
  5. Aplikasi pengolah data kinerja belum terintegrasi dan belum optimal pemanfaatannya.
- d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

Profesionalitas ASN masih rendah, hal ini terlihat dari Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 yang hanya sebesar 64,00 persen dan masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan pada dimensi kualifikasi ASN yaitu tingkat pendidikan formal yang dimiliki ASN masih terdapat 14,15 persen ASN yang memiliki pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Pada dimensi kompetensi banyak ASN pejabat struktural belum mengikuti diklat kepemimpinan sedangkan pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional serta masih banyak ASN belum mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 20 jam pelajaran per tahun dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN tersebut yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

- e. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

1. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di daerah belum memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sehingga perlu langkah strategis mengoptimalkan kelembagaan yang ada dengan bersinergi dengan BRIN sehingga kelembagaan Penelitian dan Pengembangan daerah bisa diakomodir dengan baik.
2. Perlunya dorongan dari lembaga penelitian dan pengembangan daerah dalam memotivasi dan mendorong Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam rangka memperbaiki layanan dan pencapaian sasaran strategis.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan daerah yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

4. Belum optimalnya peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan daerah dalam penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai peneliti dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian.

#### **4.1.2.6. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Belum optimalnya capaian evaluasi AKIP, pada tahun 2022 sudah mendapat predikat BB dengan skor 71,31 tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan
3. Masih belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Perangkat Daerah sehingga perlu dorongan dari Inpsektorat untuk mendamping Perangkat Daerah menerapkan unsur-unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.
4. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

## **4.2. Analisis dan Penetapan Isu Strategis**

### **4.2.1. Analisis Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis dirumuskan dengan melihat urgensi permasalahan-permasalahan yang ada untuk menjadi isu yang harus diutamakan. Rumusan isu strategis Daerah menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun

jangka panjang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Bangka untuk perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 2024-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi isu-isu lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, provinsi dan analisis permasalahan menurut urusan pemerintahan, dan kemudian diperoleh daftar calon isu strategis.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Analisis Isu Strategis**



#### **4.2.1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Bangka adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel.

Kebijakan pengurangan subsidi energi BBM dan tarif dasar listrik dari pemerintah berdampak pada risiko inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin,

penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2024-2026.

Kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer daerah menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor pemerintahan. Kreativitas pemerintah daerah untuk mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

Tantangan dalam RPJMN: (i) menjalankan reformasi birokrasi publik; (ii) membuka partisipasi publik; (iii) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup.

RPJMN dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara umum memberikan tantangan kepada pemerintah Kabupaten Bangka membuat perencanaan pembangunan 2024-2026 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **4.2.1.2 Sustainable Development Goals (SDG's)**

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (SDG's) merupakan amanah dari Inpres Nomor. 1 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG's Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan.

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai

pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (*Sustainable Development Goals* (SDGs)), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada tahun 2015.

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2018-2023 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018-2023.

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia pada tingkat global, nasional dan regional untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. Agenda Resmi untuk Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 bidang dan tujuan utama sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

No	Bidang	Tujuan
1	Kemiskinan	Menghapus kemiskinan dalam berbagai bentuk dimanapun
2	Makanan	Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua



No	Bidang	Tujuan
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi
10	Ketimpangan	Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara
11	Huni	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan.
13	Iklm	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16	Kelembagaan	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: United Nation.Org.





#### 4.2.1.3 *Forum Group of Twenty (G 20)*

G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Forum tersebut selanjutnya merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin.

Peran nyata G20 adalah sebagai berikut.

1. Penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial.
2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak.
3. Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19, penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, *hand sanitizer*, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.
4. Isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan

Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politik yang kemudian berujung pada *Paris Agreement on Climate Change* di 2015, dan *The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

#### **4.2.2. Penetapan Isu Strategis**

Berbagai kajian lingkungan isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumber daya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Bangka dari berbagai lingkungan isu strategis, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bangka. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPD Kabupaten Kepulauan Bangka 2024-2026, karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Pejabat Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan sampai terpilihnya Kepala Daerah definitif. Beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Bangka, diuraikan di bawah ini.

##### **4.2.2.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*)**

Pemerintah Kabupaten Bangka harus lebih serius dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Setiap aparatur di Pemerintahan Kabupaten Bangka harus merubah pola pikir dan budaya pikir seperti melakukan pelanggaran hukum, pemborosan anggaran, pelayanan publik yang kurang cepat, tepat dan profesional, penyalahgunaan wewenang, *e-Government* belum berjalan lancar, menuju tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, bebas KKN, transparan dan akuntabel.

##### **4.2.2.2 Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik**

Peningkatan kandungan teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi pemerintah memiliki peran yang strategis bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam upaya penyebaran informasi, efektivitas dan efisiensi anggaran, pengendalian korupsi, meluasnya akses informasi masyarakat, memperpendek hubungan kerja antar institusi dan personal.

Pemerintah Kabupaten Bangka telah berupaya menerapkan *e-Government*, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya infrastruktur *bandwidth* internet, infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Bangka dan masih terbatasnya pengetahuan SDM aparatur dan masyarakat dalam teknologi informasi dan kelembagaannya.

#### **4.2.2.3 Penguatan Rantai Nilai (*Value Chain*) Tata Niaga Produk Pertanian**

Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam komoditas dunia seperti : lada, karet, sawit, dan timah. Beberapa produk tersebut harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Penguatan rantai nilai produk unggulan dilakukan dengan aktivitas operasi, logistik, pemasaran dan penjualan, jasa, aktivitas pendukung, pengadaan, dan pengembangan teknologi.

Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Terkadang petani masih terikat Kontrak Farming kepada pengumpul. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga dunia.

#### **4.2.2.4 Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian daerah**

Pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Bangka ke depan yang akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Belum optimalnya kualitas kemitraan pariwisata, objek wisata dan promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bangka masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata ke depan agar mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2.2.5 Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap produksi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah serius dan strategis yang harus dihadapi dalam kemantapan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bangka harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ini. Jika tidak dikendalikan akan berdampak pada produksi bahan pangan yang ada di Kabupaten Bangka akan terganggu.

Langkah yang tepat untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan ini adalah dengan meningkatkan luas tanam lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana

pertanian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian kaitannya dengan keberlanjutan kebutuhan pangan penduduk serta adanya penjaminan/perlindungan lahan dari pemerintah.

Disisi lain, permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Bangka juga cenderung dapat meningkatkan perkonomian salah satunya adalah maraknya tambak udang (kelompok perikanan), baik dari lahan eks tambang, pertanian dan lainnya menjadi pertanian. Aktivitas ini secara tidak langsung minimal dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja dan memberikan potensi PAD sehingga alih fungsi lahan sektor ini dapat diupayakan dalam peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang sehingga sejalan dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal.

#### **4.2.2.6 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata dan Berkualitas**

Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, membutuhkan ketersediaan sumber daya (*petugas kesehatan yang professional, sarana dan prasarana pendukung dan pembiayaan kesehatan*) dan standar pelayanan.

Kabupaten Bangka masih kekurangan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi dan belum terdistribusi secara merata. Faktor pembiayaan seringkali menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas walaupun sudah ada asuransi kesehatan.

#### **4.2.2.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan harus berkualitas**

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satu ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan secara perspektif jarak dan keterjangkauan layanan. Di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022, teridentifikasi masih ada beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD dan pendidikan dasar belum mampu tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana dan non fisik seperti sosial, budaya dan kapasitas finansial. Untuk itu, perlu adanya perwujudan aksesibilitas dan cakupan akses layanan bidang pendidikan, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2.2.8 Peningkatan perlindungan dan Pemenuhan hak anak**

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah kabupaten dan kota umumnya lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditandai dengan belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang di bangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Untuk itu perlunya komitmen dan jaminan terpenuhinya hak anak dan perlindungan terhadap anak.

#### **4.2.2.9 Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) 2030 dengan menetapkan prinsip *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya.

#### **4.2.2.10 Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur serta konektivitas antara wilayah**

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

#### **4.2.2.11 Peningkatan kualitas fungsi ekologis**

Fungsi ekologis suatu kawasan sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Menurunnya fungsi ekologis di Kabupaten Bangka ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara oleh sampah dan limbah kimia, menyusutnya tutupan hutan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kebutuhan lahan baru untuk perumahan dan kegiatan-kegiatan lain sebagai pendukung, berkurangnya daerah resapan air dan tangkapan air, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya bencana lingkungan hidup seperti banjir dan kekeringan.

Di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022, masih sulit untuk mengakomodir 20% RTH Publik dari 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Bangka. Meskipun dari tahun 2017, Kabupaten Bangka telah mendapat penghargaan Adipura, namun tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama dalam penanganan sampah harus menjadi perhatian penting bagi pembangunan di Kabupaten Bangka.



## BAB V

### TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

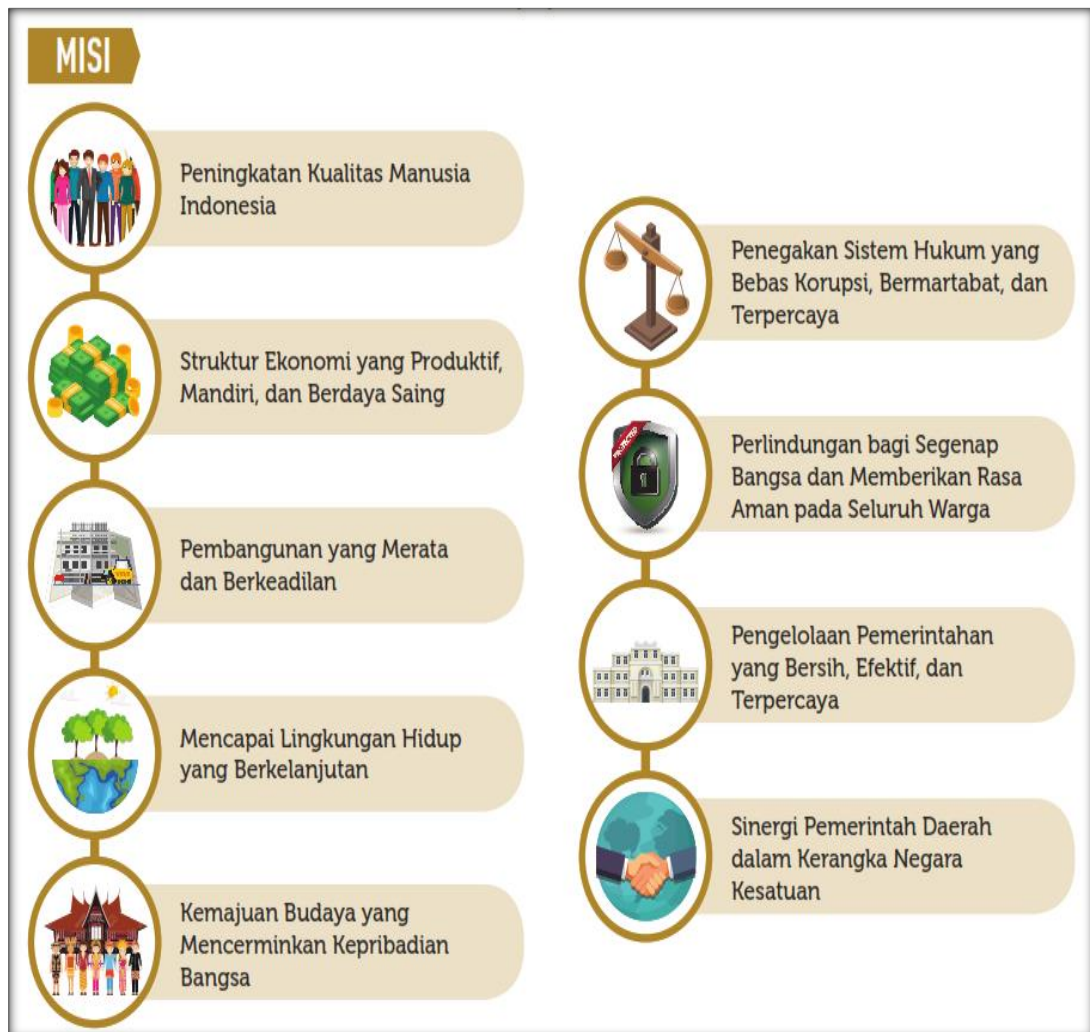
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah : "Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera". Upaya-upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan, yaitu :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Disamping itu, visi RPJMN untuk periode 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” dengan upaya untuk mewujudkannya melalui 9 (sembilan) misi yang disebut dengan NAWACITA KEDUA yang dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut :

**Gambar 5.1**  
**Misi Nawacita Kedua Pada RPJMN Tahun 2020-2024**







Untuk mencapai Visi dan Misi Nawacita Kedua ini, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga berupaya mendorong sinkronisasi pembangunan Kabupaten Bangka dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026. Tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

### **5.1.1 Tujuan Pembangunan Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, visi, misi dan agenda pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 dan tujuan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, maka tujuan

dan indikator tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Bangka melalui RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dijelaskan pada Tabel 5.1.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1.1**  
**Matriks Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>	Indeks Pembangunan Manusia
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur</b>	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi</b>	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah
<b>Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

### 5.1.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bangka, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Pada RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 ini dilakukan penyusunan terhadap sasaran RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 sebagaimana yang nampak pada matriks sasaran di bawah ini.

Berangkat dari tujuan serta indikator kinerjanya yang dikemukakan pada Tabel 5.1.1 di atas, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 beserta indikator sasarannya disajikan pada Tabel 5.1.2 di bawah ini.

**Tabel 5.1.2**  
**Matriks Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**

Sasaran	Indikator Sasaran
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
	Indeks SPBE
	Indeks Profesionalitas ASN
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
	Angka Harapan Lama Sekolah
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
	Angka Stunting
Sasaran 2.3 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total
Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender
	Status Kabupaten Layak Anak
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur
	Indeks Williamson
Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi
	Pengeluaran Per Kapita
	Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)
Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
	Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 4.3 : Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money Tourism</i>
Sasaran 4.4 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	Indeks Ketahanan Bencana Daerah



Selanjutnya tujuan, indikator tujuan dan target RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 5.3 sedangkan tabel 5.4 mendeskripsikan keterkaitan antara keterkaitan, tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.



**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Kinerja**  
**RPD Kabupaten Bangka 2024-2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2026)
				2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Nilai)	B (61,94)	B (62,40)	B (62,90)	B (63,40)	B (63,40)
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	72,95	73,57	73,87	74,17	74,17
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Nilai)	76,04	79,21	82,38	85,55	85,55
4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah (Nilai)	70,42	70,67	70,92	71,17	71,17
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	64,91	64,91	65,18	65,50	65,50



**Tabel 5.4**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**RPD Kabupaten Bangka 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (71,31)	BB (72,50)	BB (72,75)	BB (73,12)	BB (73,12)
			Indeks SPBE	Nilai	1,85	2,25	2,45	2,65	2,65
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	63,86	64,08	64,31	64,87	64,87
		Sasaran 1.2 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	84,06	84,51	84,93	85,25	85,25
		Sasaran 1.3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,13	82,42	83,81	85,09	85,09
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,29	8,31	8,33	8,33
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,82	12,84	12,86	12,86
		Sasaran 2.2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,37	71,42	71,45	71,47	71,47
			Angka Stunting	Persentase	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31
		Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,33	2,31	2,29	2,28	2,28



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
		Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,84	88,91	88,95	88,97	88,97
			Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Madya (611)	Madya (625)	Madya (632)	Madya (653)	Madya (653)
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,184	0,187	0,191	0,193	0,193
			Indeks Williamson	Nilai	0,182	0,177	0,175	0,173	0,173
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,87	3,73	3,79	4,33	4,33
			Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	12.863	12.891	12.923	12.958	12.958
			Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	33.091	35.791	37.223	38.712	38.712
		Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,26	4,24	4,23	4,21	4,21
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,39	5,37	5,35	5,33	5,33
		Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money Tourism</i>	Milyar Rupiah	154,28	162,22	173,41	185,76	185,76
		Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0,219	0,217	0,215	0,213	0,213



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 5.1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	64,91	64,91	65,18	65,50	65,50
			Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,29	0,31	0,34	0,35	0,35





## 5.2 Cascading Kinerja Pembangunan Daerah

Cascading kinerja pembangunan daerah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Tujuan Daerah, Sasaran Strategis Daerah, Sasaran Strategis Perangkat Daerah hingga Sasaran Program Perangkat Daerah (*outcome*) yang mendukung pencapaian Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis Daerah atau Indikator Kinerja Utama Daerah secara vertikal (*vertical alignment*) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan kinerja. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis daerah perlu pembagian peran hasil dari setiap Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan Sasaran Program Perangkat Daerah.

Cascading Kinerja Kabupaten Bangka dibagi berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat sebagai berikut:

# LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## TUJUAN

### MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- Indeks Reformasi Birokrasi

### SASARAN STRATEGIS DAERAH

#### MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

- Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten • Indeks SPBE • Indeks Profesionalitas ASN

#### MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

- Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

#### MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

- Indeks Kepuasan Masyarakat

### SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah</li> </ul>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah (DKP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Audit Pengawasan Eksternal Daerah (LAKE)</li> </ul>	<b>Meningkatnya Kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu</li> </ul>	<b>Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DINKOMINFOTIK)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintergrasi</li> </ul>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Dimensi Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>	<b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATPOL PP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan</li> </ul>
<b>Meningkatnya Manajemen SDM dan Pelayanan Kepegawaian Yang Handal (BKPSDMD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK</li> </ul>	<b>Meningkatnya SDM yang Berkualitas (BKPSDMD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai &gt; 64</li> </ul>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (SETDA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Indeks Komponen RB Area Penataan dan Penguatan Organisasi</li> <li>• Nilai Indeks Komponen RB Area Tata Laksana</li> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik</li> <li>• Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH</li> </ul>		<b>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (BPPKAD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD</li> </ul>	<b>Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi</li> </ul>
<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase batas administrasi kewilayahan yang diselesaikan</li> <li>• Nilai Indeks EKPPDPersentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik</li> <li>• Persentase Pengelolaan Dana Hibah Tepat Sasaran</li> <li>• Nilai Indeks RB Komponen Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>		<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian (SETDA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Implementasi Rekomendasi Kebijakan Perekonomian</li> <li>• Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Daerah</li> <li>• Level Kematangan UKPBJ</li> </ul>		<b>Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal (INSPEKTORAT)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapabilitas Pengawasan Internal APIP (IACM)</li> <li>• Tingkat Maturitas SPIP</li> </ul>	<b>Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada</li> </ul>
					<b>Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKPENCAPIL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>
					<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (KECAMATAN)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP</li> </ul>

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1**

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH 1**

### **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI**

- Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
- Indeks SPBE
- Indeks Profesionalitas ASN

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah (DKP)</b>	<b>Meningkatnya Kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)</b>	<b>Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DINKOMINFOTIK)</b>	<b>Meningkatnya Manajemen SDM dan Pelayanan Kepegawaian Yang Handal (BKPSDMD)</b>	<b>Meningkatnya SDM yang Berkualitas (BKPSDMD)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Audit Pengawasan Eksternal Daerah (LAKE)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintergrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai &gt; 64</li></ul>
<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (SETDA)</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)</b>		<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian (SETDA)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Indeks Komponen RB Area Penataan dan Penguatan Organisasi</li><li>• Nilai Indeks Komponen RB Area Tata Laksana</li><li>• Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik</li><li>• Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase batas administrasi kewilayahan yang diselesaikan</li><li>• Nilai Indeks EKPPDPersentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik</li><li>• Persentase Pengelolaan Dana Hibah Tepat Sasaran</li><li>• Nilai Indeks RB Komponen Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase implementasi rekomendasi kebijakan perekonomian</li><li>• Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Daerah</li><li>• Level Kematangan UKPBJ</li></ul>		

# LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 1

<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah (DKP)</b>	<b>Meningkatnya Kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)</b>	<b>Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DINKOMINFOTIK)</b>	<b>Meningkatnya Manajemen SDM dan Pelayanan Kepegawaian Yang Handal (BKPSDMD)</b>	<b>Meningkatnya SDM yang Berkualitas (BKPSDMD)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal Daerah (LAKE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai &gt; 64</li> </ul>

## SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

<b>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</b>	<b>Meningkatnya Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurangnya 10 Tahun (DKP)</b>	<b>Meningkatnya Jaringan Intra Pemerintah (JIP) (DINKOMINFOTIK)</b>	<b>Meningkatnya Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin (BKPSDMD)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif</li> <li>• Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyusunan Arsip</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan</li> <li>• Persentase Nilai Aspek Kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Rencana Kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan</li> <li>• Persentase Pengadaan ASN Sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN</li> <li>• Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat</li> <li>• Persentase Penempatan SDM Sesuai Standar Kompetensi</li> <li>• Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS</li> <li>• Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja ASN Sesuai Ekspektasi</li> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan dan Melaksanakan Peraturan Disiplin</li> </ul>
<b>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BAPPEDA)</b>	<b>Meningkatnya Kerjasama Kelitbangan dalam Menciptakan Inovasi dan Teknologi (BAPPEDA)</b>		<b>Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (DINKOMINFOTIK)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Inovasi Daerah</li> </ul>	<b>Meningkatnya Layanan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan (Sekretariat DPRD)</b>	<b>Meningkatnya Keamanan Informasi (DINKOMINFOTIK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE</li> </ul>
<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</b>		<b>Meningkatnya Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Sekretariat DPRD)</b>	<b>Meningkatnya Integrasi Data Sektoral Daerah (DINKOMINFOTIK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks KAMI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti</li> </ul>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah (BAPPEDA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu</li> </ul>	<b>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (DINKOMINFOTIK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Data Sektoral yang terintegrasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah</li> </ul>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (SELURUH PD)</b>	<b>Meningkatnya Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Sekretariat DPRD)</b>	<b>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (DINKOMINFOTIK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Dimensi Kompetensi ASN</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai kinerja Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat</li> </ul>	<b>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (DINKOMINFOTIK)</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1**

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH I**

### **Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (SETDA)**

- Nilai Indeks Komponen RB Area Penataan dan Penguatan Organisasi
- Nilai Indeks Komponen RB Area Tata Laksana
- Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik
- Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH

### **Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)**

- Persentase batas administrasi kewilayahan yang diselesaikan
- Nilai Indeks EKPPD Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik
- Persentase Pengelolaan Dana Hibah Tepat Sasaran
- Nilai Indeks RB Komponen Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan

### **Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian (SETDA)**

- Persentase implementasi rekomendasi kebijakan perekonomian
- Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Daerah
- Level Kematangan UKPBJ

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Sesuai Standar (SETDA)**

- Persentase Layanan Keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP

### **Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Di Bidang Pemerintahan (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Di Bidang Perekonomian (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi di Bidang Kelembagaan (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan

### **Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kesra dan Masyarakat (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Kesra dan Masyarakat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pembangunan yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi di Bidang Ketata Laksanaan (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan

### **Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Teknis & Pengkajian Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum (SETDA)**

- Persentase Produk Hukum Daerah yang Disusun dan Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Persentase Permasalahan Hukum dan HAM yang terselesaikan

### **Meningkatnya PBJ yang Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu (SETDA)**

- Persentase Paket PBJ yang Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu

### **Meningkatnya Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Peningkatan AKIP (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP

### **Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perumusan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemerintahan (SETDA)**

- Persentase Rumusan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1**

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH 2**

### **MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL**

- Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)**

- Cakupan Dimensi Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (BPPKAD)**

- Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD

### **Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal (INSPEKTORAT)**

- Kapabilitas Pengawasan Internal APIP (IACM)
- Tingkat Maturitas SPIP

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD)**

- Penetapan APBD Tepat Waktu
- Persentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Sesuai SOP
- Penyusunan dan Penyampaian LKPD Sesuai SAP Tepat Waktu
- Persentase Layanan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertangani
- Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertangani

### **Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah (BPPKAD)**

- Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah

### **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (INSPEKTORAT)**

- Nilai Hasil Kapabilitas APIP

### **Meningkatnya Maturitas SPIP (INSPEKTORAT)**

- Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPPKAD)**

- Indek Kinerja Pengelolaan BMD
- Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu

### **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah (SELURUH PD)**

- Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (SELURUH PD)**

- Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 1**

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH 3**

**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT**

- Indeks Kepuasan Masyarakat

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATPOL PP)</b>	<b>Menurunnya Potensi Konflik Sosial Di Masyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b>	<b>Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan (DINDUKPENCAPIL)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (KECAMATAN)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/ Pemilukada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP</li> </ul>

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada (SATPOL PP)</b>	<b>Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (BADAN KESBANGPOL)</b>	<b>Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (BADAN KESBANGPOL)</b>	<b>Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (DINDUKPENCAPIL)</b>	<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik (KECAMATAN)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Penerbitan KIA</li> <li>• Presentase Penerbitan KK</li> <li>• Presentase Penerbitan KTP-EL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP</li> </ul>
<b>Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada (SATPOL PP)</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b>		<b>Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKPENCAPIL)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Parpol yang diberikan pembinaan politik</li> <li>• Presentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Cakupan penerbitan akta kematian</li> <li>• Presentase Cakupan penerbitan akta Perkawinan</li> <li>• Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran</li> </ul>	
	<b>Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat (BADAN KESBANGPOL)</b>		<b>Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan (DINDUKPENCAPIL)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Ormas yang aktif</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Instansi Yang Melakukan Pks Pemanfaatan Data</li> </ul>	
	<b>Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial (BADAN KESBANGPOL)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial</li> </ul>			

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2**

**"MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM"**

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- Indeks Pembangunan Manusia

## **SASARAN STRATEGIS**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT**

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Lama Sekolah

### **MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT**

- Angka Harapan Hidup
- Angka Stunting

### **TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

- Angka Kelahiran Total

### **MENINGKATNYA KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**

- Indeks Pembangunan Gender
- Status Kabupaten Layak Anak



# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2**

“MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM**

- Indeks Pembangunan Manusia

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT**

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Lama Sekolah

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pemerataan Pendidikan (DINDIKPORA)**

- APS SD
- APS SMP

### **Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar (DINDIKPORA)**

- Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP

### **Meningkatnya Akses Satu Tahun Prasekolah dari PAUD (DINDIKPORA)**

- Angka Kesiapan Sekolah

### **Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal (DINDIKPORA)**

- APS Non Formal

### **Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (DINDIKPORA)**

- Persentase Pemuda yang berdaya saing

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar (DINDIKPORA)**

- APM SD
- APM SMP

### **Meningkatnya Kualitas Proses Pembelajaran Pendidikan Dasar (DINDIKPORA)**

- Kualitas Pembelajaran Jenjang SD
- Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP
- Kualitas Pengelolaan Kurikulum Sekolah
- Proporsi GTK bersertifikat Jenjang SD
- Proporsi GTK bersertifikat Jenjang SMP

### **Meningkatnya Pemerataan Layanan PAUD (DINDIKPORA)**

- APM 5-6
- Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dgn peraturan & ketentuan yg berlaku
- Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan
- Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG
- Indeks Distribusi Guru

### **Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal (DINDIKPORA)**

- Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan
- Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan
- Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan NF

### **Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan (DINDIKPORA)**

- Persentase Pemuda dan Organisasi Pemuda yang aktif

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2**

**"MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM"**

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Prestasi Keolahragaan Daerah (DINDIKPORA)**

- Persentase Cabor yang Meraih Medali Dalam Tingkat Propinsi

### **Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat (DKP)**

- Indeks Pembangunan Literasi
- Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga (DINDIKPORA)**

- Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga
- Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memenuhi Standar
- Persentase Atlet yang Berprestasi

### **Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (DKP)**

- Tingkat Kepuasan Pemustaka

### **Meningkatntnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (DKP)**

- Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca

# LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2

“MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM”



**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat (DINKES)**

- Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
- Angka Kematian bayi (per 1.000 KH)
- Prevalensi Balita Gizi Buruk
- Angka Kesakitan (Morbiditas)

**Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat (DINPANPERTAN)**

- Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)
- Ketersediaan Protein (gram/Kapita/Hari)

**Meningkatnya Kualitas Konsumsi (DINPANPERTAN)**

- Skor Pola Pangan Harapan (%)

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2**

“MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM”



## **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (DP2KBP3A)**

- Ketersediaan kebijakan pengendalian penduduk yang disediakan sesuai dengan ketentuan

## **Meningkatnya Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Di Seluruh Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangka (DP2KBP3A)**

- Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
- Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
- Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
- Presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga

## **Meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP (DP2KBP3A)**

- Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP
- Cakupan Peserta KB Aktif

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 2**

“MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM**

- Indeks Pembangunan Manusia

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH IV**

### **MENINGKATNYA KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**

- Indeks Pembangunan Gender
- Status Kabupaten Layak Anak

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, KUALITAS HIDUP, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)**

- Ratio KDRT
- ANUGERAH PRAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT MADYA
- Akumulasi Poin Penilaian Kab. Layak Anak

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (DP2KBP3A)**

- Persentase Kasus Kekerasan Yang terselesaikan

### **Meningkatnya Kesetaraan Gender Di Berbagai Bidang Pembangunan (DP2KBP3A)**

- Persentase OPD yang menerapkan PPRG

### **Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan (DP2KBP3A)**

- Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan

### **Meningkatnya Kualitas Data Terpilah Gender Dan Anak Yang Up To Date (DP2KBP3A)**

- Profile Gender dan anak Kabupaten

### **Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemenuhan Hak Anak (DP2KBP3A)**

- Persentase Lembaga PHA yang Berkualitas

### **Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak (DP2KBP3A)**

- Presentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 3**

*“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”*

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

- Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH**

### **MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR**

- Indeks Pemerataan Infrastruktur
- Indeks Williamson

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Rumah Yang Layak Bagi Masyarakat (DINPERKPP)</b>	<b>Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Pengusahaan Atas Tanah (DINPERKPP)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</li><li>• Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase rumah tangga yang menggunakan Air Minum</li><li>• Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Cakupa Ketersediaan Rumah Layak Huni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kepatuhan Pengelolaan Pengusahaan Atas Tanah</li></ul>
<b>Meningkatnya Konektivitas Transporasi dalam Daerah (DISHUB)</b>	<b>Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas (DISHUB)</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rasio Konektivitas Kab/Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan</li></ul>			

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 3**

*“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”*

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR**

- Indeks Pemerataan Infrastruktur
- Indeks Williamson

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (DPUPR)**

- Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
- Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik

### **MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR (DPUPR)**

- Persentase rumah tangga yang menggunakan Air Minum
- Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Akses Air Bersih (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah secara Komunal (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Permukiman (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Penataan Bangun Gedung (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya (DPUPR)</b>	<b>Terselenggaranya Pengembangan Jasa Kontruksi (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Sistem Penglolaan Sampah (DPUPR)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap</li> <li>• Persentase Jembatan dalam kondisi mantap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi yang Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Rumah tangga yang menggunakan air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Desa/ Kelurahan Yang Memiliki SPAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Drainase dalam kondisi baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketaatan Terhadap Penataan Bangunan Gedung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Bangunan dan Lingkungannya Yang Tertata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase SDM Jasa Kontruksi yang Terlatih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase desa/ kelurahan yang memiliki TPA/TPST/ SPA/TPS3R/ TPS</li> </ul>

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 3**

*“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”*

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR**

- Indeks Pemerataan Infrastruktur
- Indeks Williamson

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Pemenuhan Rumah Yang Layak Bagi Masyarakat (DINPERKPP)</b>	<b>Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Pengusahaan Atas Tanah (DINPERKPP)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks kepatuhan pengelolaan pengusahaan atas tanah</li></ul>

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Penanganan Rumah Korban Bencana (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Akses terhadap Sarana dan Prasarana Perumahan (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Upaya Pencegahan Kawasan Kumuh (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh (DINPERKPP)</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Pengusahaan Atas Tanah (DINPERKPP)</b>	<b>Menurunnya Konflik Pertanahan (DINPERKPP)</b>	<b>Terfasilitasinya Penyelesaian Ganti Kerugian (DINPERKPP)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Rumah Korban Bencana yang di rekonstruksi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase rumah yang memiliki akses sarana dan prasarana perumahan yang layak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Usaha Yang Memiliki Izin Lokasi</li><li>• Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Terselesaikan</li></ul>



# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 3**

*“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”*

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR**

- Indeks Pemerataan Infrastruktur
- Indeks Willmiamson

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Konektivitas Transporasi dalam Daerah (DISHUB)**

- Rasio Konektivitas Kab/Kota

### **Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas (DISHUB)**

- Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum (DISHUB)**

- Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum

### **Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas (DISHUB)**

- Persentase Sarana dan Prasarana/Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Kondisinya Baik

# LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”

## TUJUAN

### MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## SASARAN STRATEGIS DAERAH

MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA JUMLAH UANG YANG DIBELANJAKAN WISATAWAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Pengeluaran Per Kapita</li> <li>• Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kemiskinan</li> <li>• Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spending of Money Tourism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Gini</li> </ul>

## SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (DINA KERPERINDAG)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (DINA KERPERINDAG)	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (DINSOS)	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah (DINPARBUD)	Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah (DINPEMDES)
Meningkatnya Produksi Perikanan (DINPERKAN)	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan Serta Peternakan (DINPANPERTAN)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat (DINSOS)	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (DINPARBUD)	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat (KECAMATAN)
Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (DINPMP2KUMK)	Meningkatnya Kualitas UMKM (DINPMP2KUMK)	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah (DINA KERPERINDAG)		
Meningkatnya Penanaman Modal (DINPMP2KUMK)				

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA**

- Pertumbuhan Ekonomi
- Pengeluaran Per Kapita
- Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (DINA KERPERINDAG)**

- Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

### **Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (DINA KERPERINDAG)**

- Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas Promosi terhadap Pelaku Usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam Negeri (DINA KERPERINDAG)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri</li></ul>
<b>Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional (DINA KERPERINDAG)</b>		<b>Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Dagang (DINA KERPERINDAG)</b>	<b>Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen (DINA KERPERINDAG)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Alat standar tera/tera ulang</li></ul>

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

*“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”*

## TUJUAN

### MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## SASARAN STRATEGIS DAERAH I

### MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA

- Pertumbuhan Ekonomi
- Pengeluaran Per Kapita
- Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)

## SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Meningkatnya Produksi Perikanan (DINPERKAN)

- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
- Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan

## SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	Meningkatna Pelayanan Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	Meningkatnya Sarana dan prasarana Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan (DINPERKAN)	Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (DINPERKAN)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Nelayan yang Dilayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih</li> </ul>
Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	Meningkatnya Pelayanan Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	Meningkatnya Data dan Informasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (DINPERKAN)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pembudidaya yang Dilayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>	

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

*"Meningkatkan Pembangunan Ekonomi"*

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA**

- Pertumbuhan Ekonomi
- Pengeluaran Per Kapita
- Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan Serta Peternakan (DINPANPERTAN)**

- Jumlah Produksi Padi
- Jumlah Produksi Cabe
- Jumlah Populasi Sapi
- Jumlah Produksi Lada
- Jumlah Produksi Sawit

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatkan Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Bibit unggul Pertanian dan Peternakan (DINPANPERTAN)</b>	<b>Meningkatkan Pengendalian OPT (DINPANPERTAN)</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian (DINPANPERTAN)</b>	<b>Meningkatkan Pemanfaatan dan Penggunaan Saprasi Pertanian (DINPANPERTAN)</b>	<b>Meningkatkan Penanggulangan Penyakit Ternak (DINPANPERTAN)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Bibit Unggul Pertanian</li><li>• Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Bibit ternak Unggul</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Saprasi Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi</li><li>• Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin</li></ul>

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH I**

### **MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA**

- Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi
- Pengeluaran Per Kapita
- Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Kualitas UMKM (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Penanaman Modal (DINPMP2KUMK)**

- Persentase Koperasi Yang Berkualitas

- Persentase Peningkatan Umkm Yang Berkualitas

- Jumlah Realisasi Penanaman Modal

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Koperasi Aktif (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Pemberdayaan UMKM (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Potensi Peluang Investasi Daerah (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Pengendalian Investasi di Daerah (DINPMP2KUMK)**

- Persentase Koperasi yang Aktif

- Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha

- Persentase Potensi Peluang Investasi

- Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal

### **Meningkatnya Koperasi Sehat (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya saing (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Promosi Investasi di Daerah (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DINPMP2KUMK)**

- Persentase Koperasi Sehat

- Persentase Usaha Mikro yang naik kelas

- Persentase Promosi Investasi

- Persentase data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola

### **Meningkatnya SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi (DINPMP2KUMK)**

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (DINPMP2KUMK)**

- Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi

- IKM Bidang Pelayanan Perizinan

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

*"Meningkatkan Pembangunan Ekonomi"*

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH II**

### **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

- Angka Kemiskinan
- Tingkat Pengangguran Terbuka

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (DINSOS)**

- Persentase PPKS Yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial

### **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat (DINSOS)**

- Persentase Penurunan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

### **Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah (DINAKERPERINDAG)**

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pemberdayaan Sosial (DINSOS)**

- Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial

### **Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial (DINSOS)**

- Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial

### **Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (DINSOS)**

- Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan

### **Meningkatnya Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke RTKD (DINAKERPERINDAG)**

- Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD

### **Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (DINAKERPERINDAG)**

- Persentase Pencari Kerja yang kompeten

### **Meningkatnya Rehabilitasi Sosial (DINSOS)**

- Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial

### **Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja (DINAKERPERINDAG)**

- Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

### **Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja (DINAKERPERINDAG)**

- Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH III**

### **MENINGKATNYA JUMLAH UANG YANG DIBELANJAKAN WISATAWAN**

- *Spending of Money Tourism*

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah (DINPARBUDAYA)**

- Indeks Pelestarian Budaya Daerah

### **Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (DINPARBUDAYA)**

- Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
- Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Perlindungan Budaya Daerah (DINPARBUDAYA)</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Budaya (DINPARBUDAYA)</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Budaya (DINPARBUDAYA)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata (DINPARBUDAYA)</b>	<b>Meningkatnya Pemasaran Pariwisata (DINPARBUDAYA)</b>	<b>Meningkatnya Kemitraan Pariwisata (DINPARBUDAYA)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• indeks perlindungan budaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indeks pengembangan budaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indeks pemanfaatan budaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Destinasi Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Pemasaran Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kemitraan Pariwisata</li></ul>



# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 4**

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

- Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH IV**

### **MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN**

- Indeks Gini

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Pemerintahan Desa (DINPEMDES)**

- Persentase Desa Mandiri
- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

### **Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat (KECAMATAN)**

- Persentase Desa/Kelurahan mandiri

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **Meningkatnya Penataan Desa yang Sudah Ditetapkan (DINPEMDES)**

- Desa yang Tertata Wilayahnya

### **Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa (DINPEMDES)**

- Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik
- Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik

### **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (KECAMATAN)**

- Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif Dalam Musrenbang

### **Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (KECAMATAN)**

- Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif

### **Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Desa (DINPEMDES)**

- Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif

### **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum (KECAMATAN)**

- Persentase Tomas/Toga/Topa yang Berperan Aktif Dalam Menjaga Trantibum

### **Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (KECAMATAN)**

- Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa

# **LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN TUJUAN 5**

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”

## **TUJUAN**

### **MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

## **SASARAN STRATEGIS DAERAH**

### **MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
- Indeks Ketahanan Bencana Daerah

## **SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat (DINSOS)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Daerah (BPBD)</b>	<b>Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran (SATPOL PP)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah</li> <li>• Persentase Pengelolaan Sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penurunan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pencapaian SPM Kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)</li> </ul>

## **SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang (DPUPR)</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Lingkungan (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana (BPBD)</b>	<b>Meningkatnya Pencegahan Kebakaran (SATPOL PP)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran</li> </ul>
<b>Meningkatnya Penanganan Sampah (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana (DINSOS)</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadaman Kebakaran (SATPOL PP)</b>
Persentase Penanganan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi maupun teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi</li> </ul>
<b>Meningkatnya Pengurangan Sampah (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran (SATPOL PP)</b>
Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan Tk. Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan diklat lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran</li> </ul>
<b>Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DLH)</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (DLH)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelayanan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup</li> </ul>			

## BAB VI

### STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka merupakan rumusan perencanaan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD dengan efektif dan efisien. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024–2026, dengan memperhatikan faktor atau lingkungan strategis yang mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Faktor-faktor pengaruh tersebut berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang memiliki keterkaitan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka.

#### 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah :

1. Mempercepat transformasi digital pelayanan publik untuk mewujudkan pengelolaan birokrasi yang efektif dan efisien. Reformasi pelayanan public akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim ivestasi daerah.
2. Mendorong ekonomi kerakyatan dengan membentuk dan memperkuat kelompok-kelompok kewirausahaan UMKM sebagai penggerak sosial ekonomi daerah, Penguatan UMKM perlu didorong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.



3. Penciptaan nilai tambah produk komoditi pertanian. Pengembangan produk pertanian dilakukan melalui industrialisasi dengan menciptakan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah seperti sawit, karet, lada, ubi kayu dan komoditas alternative lainnya.
4. Penciptaan peluang investasi kepariwisataan melalui pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional sebagai trigger sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Bangka.
5. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (*pro-environment*), agar kelestarian tetap terjaga dan kapasitas daya dukung dan daya tampung pembangunan masih dapat dinikmati generasi jangka panjang.

Selain itu, perlu dipertimbangkan perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi Covid 19 yang sudah beralih ke digitalisasi. Pengembangan transformasi digital dalam seluruh pelayanan publik, dan peningkatan konektivitas dan perluasan cakupan layanan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dari rumah masing-masing secara digital.

#### **6.1.1 Strategi Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi melalui transformasi digital dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan.
2. Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan UMKM.
3. Membangun generasi yang handal melalui perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang komprehensif dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
4. Pengarustamaan gender berbasis penguatan kelembagaan perempuan dalam peran serta aktif dalam pembangunan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) dalam pembiayaan pembangunan.

6. Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil
7. Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada daya dukung lingkungan (*pro environment*)

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

**Tabel 6.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Tujuan 1</b> <b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>Sasaran 1.1</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis di semua Level Pemerintahan ❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian yang Berorientasi pada Hasil
	<b>Sasaran 1.2</b> Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	
	<b>Sasaran 1.3</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	
<b>Tujuan 2</b> <b>Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Sasaran 2.1</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	❖ Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif Dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan Standar hidup Layak Masyarakat ❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan dalam Peran Serta
	<b>Sasaran 2.2.</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Masyarakat	
	<b>Sasaran 2.3</b> Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<b>Sasaran 2.4</b> Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk <b>Sasaran 2.5</b> Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Aktif Dalam Pembangunan
<b>Tujuan 3</b> <b>Meningkatkannya Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Sasaran 3.1</b> Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur	❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan
<b>Tujuan 4</b> <b>Meningkatkan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Sasaran 4.1</b> Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa <b>Sasaran 4.2</b> Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat <b>Sasaran 4.3</b> Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan <b>Sasaran 4.4</b> Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM
<b>Tujuan 5</b> <b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Sasaran 5.1</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	❖ Melaksanakan Pembangunan Yang Berorientasi pada Pro Environment

Strategi terdiri dari setiap sasaran secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan, sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Fokus Strategi Arah Kebijakan 2024-2026**

<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>			
<b>SASARAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Sasaran: 1.1 1.2 1.3	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dalam Proses Bisnis di semua Level Pemerintahan		
	Melakukan Akselerasi Pembangunan melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Membangun Sistem Pengendalian yang Berorientasi pada Hasil		
Sasaran: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Membangun Generasi yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan yang Komprehensif dan Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat		
	Pengarutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan dalam Peran Serta Aktif dalam Pembangunan		
Sasaran: 3.1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan		
Sasaran: 4.1 4.2 4.3	Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata Dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM		
Sasaran: 5.1	Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada Pro Environment		

### 6.1.2 Arah Kebijakan untuk mendukung Strategi

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan

program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6.3**  
**Kerangka Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah 2024-2026**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan ❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada Hasil	❖ Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat
1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		❖ Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasidan penegakan peraturan daerah
1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat		❖ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi ❖ Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yangbersih dan efisien





SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang berorientasi pada hasil</li> <li>❖ Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerja pembangunan daerah</li> <li>❖ Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dan pembangunan</li> </ul>
2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membangun Generasi Yang Handal melalui Jaminan Kesehatan yang Komprehensif dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat</li> <li>❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat</li> <li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat</li> <li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan</li> <li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan</li> <li>❖ Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh pembangunan perempuan</li> <li>❖ Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial</li> <li>❖ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</li> </ul>
2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		
2.1.5 Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan		
3.1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) Pembiayaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan</li> <li>❖ Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership.</li> <li>❖ sistem jaringan infrastruktur yang mendukung struktur ruang</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat</li> </ul>



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas kumuh</li> <li>❖ Penciptaan sanitasi yang layak bagi masyarakat</li> </ul>
<p>4.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa</p> <p>4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>4.3 Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan</p> <p>4.4 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan melalui UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif</li> <li>❖ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian</li> <li>❖ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif</li> <li>❖ Pengembangan KEK Pariwisata</li> <li>❖ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian</li> <li>❖ Pengintegrasian perencanaan penganggaran daerah dan desa dalam menekan angka kemiskinan</li> <li>❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian</li> <li>❖ Pemberian insentif kemudahan investasi dalam mendorong industrialisasi pertanian</li> <li>❖ Pemanfaatan E-commerce dalam efisiensi tata niaga produk pertanian</li> <li>❖ Peningkatan produktivitas komoditi unggulan pertanian</li> <li>❖ Optimalisasi pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan sinergis</li> </ul>
5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada <i>Pro Environment</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada <i>Pro Environment</i></li> </ul>

## 6.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan



masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program. Perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang merefleksikan tujuan daerah dalam jangka waktu pelaksanaan RPD.

### **6.2.1 Unggulan Pembangunan Daerah**

Perumusan program daerah menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Berdasarkan konsep THIS dirumuskan dan ditetapkan 6 (Enam) Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangka. Program tersebut terdiri dari :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas dan pengembangan serta pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi digital, dan inovasi daerah untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing.

2. Pembangunan Ekonomi

Fokus pada percepatan pemulihan ekonomi sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 terutama sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, ekspor serta peningkatan investasi daerah. Pemulihan ekonomi difokuskan pada sektor yang berpengaruh pada kenaikan PDRB.

3. Pembangunan Pemerintahan

Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang professional, transparansi dalam pelaksanaan layanan publik dan pengadaan barang dan jasa dan optimalisasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional.

4. Pembangunan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah

Fokus pada pembukaan akses menuju sentra-sentra perekonomian dan pariwisata guna mengatasi ketimpangan antar wilayah sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan konektivitas berpedoman pada Rencana Tata Ruang, yang berdampak pada meningkatnya kapasitas daerah



dalam mengatasi bencana, percepatan pembangunan pedesaan dan pemerataan jumlah penduduk antar wilayah.

5. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Fokus kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. Pemerataan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

6. Pembangunan Lingkungan

Fokus pada kegiatan yang mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola hutan, meminimalisir alir fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan.

### 6.2.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dengan menjabarkan strategi pembangunan daerah berdasarkan arah kebijakan umum dan perumusan program. Rumusan program pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan indikator capaian sebagaimana dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 6.4**  
**Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dalam Proses Bisnis di semua Level Pemerintahan</li><li>❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Membangun Sistem Pengendalian yang Berorientasi pada Hasil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat</li><li>❖ Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi dan penegakan peraturan daerah</li><li>❖ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi</li><li>❖ Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien</li><li>❖ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang berorientasi pada hasil</li><li>❖ Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerja pembangunan daerah</li><li>❖ Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desa dalam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</li><li>❖ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li><li>❖ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>❖ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li><li>❖ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li><li>❖ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li><li>❖ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</li><li>❖ Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li><li>❖ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>❖ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li><li>❖ Program Penyelenggaraan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</li><li>❖ Indeks SPBE</li><li>❖ Indeks Profesionalitas ASN</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
		pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>Persandian untuk Pengamanan Informasi</li><li>❖ Program Kepegawaian Daerah</li><li>❖ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ul>	
			<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Penyelenggaraan Pengawasan</li><li>❖ Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>❖ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li><li>❖ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun sebelumnya</li><li>❖ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pendaftaran Penduduk</li><li>❖ Program Pencatatan Sipil</li><li>❖ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li><li>❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)</li><li>❖ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan)</li><li>❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan)</li><li>❖ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			<p>Kebangsaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li><li>❖ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li><li>❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li><li>❖ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li><li>❖ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li><li>❖ Program Pengelolaan Arsip</li><li>❖ Program Penataan Desa</li></ul>	
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat</li><li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat</li><li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>❖ Program Pengembangan Kurikulum</li><li>❖ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>❖ Program Pengendalian Perizinan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Angka Harapan Lama Sekolah</li><li>❖ Angka Rata-Rata Lama Sekolah</li><li>❖ Angka Harapan Hidup</li><li>❖ Angka Stunting</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
	<p>meningkatkan standar hidup layak masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan dalam Peran Serta Aktif dalam Pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan</li><li>❖ Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh pembangunan perempuan</li><li>❖ Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial</li><li>❖ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</li></ul>	<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>❖ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>❖ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li><li>❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan</li><li>❖ Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman</li><li>❖ Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li><li>❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li><li>❖ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>❖ Program Penanganan Kerawanan Pangan</li><li>❖ Program Pengawasan Keamanan Pangan</li><li>❖ Program Pengendalian Penduduk</li><li>❖ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>❖ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Total Fertility Rate</li><li>❖ Indeks Pembangunan Gender</li><li>❖ Status Kabupaten Layak Anak</li></ul>





NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			(KS) ❖ Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan ❖ Program Perlindungan Perempuan ❖ Program Peningkatan Kualitas Keluarga ❖ Program Pengelolaan Data Gender dan Anak ❖ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ❖ Program Perlindungan Khusus Anak--6	
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar Kawasan</li><li>❖ sistem jaringan infrastruktur yang mendukung struktur ruang</li><li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat</li><li>❖ Penciptaan sanitasi yang layak bagi masyarakat</li><li>❖ Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema <i>Public Private Partnership</i>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>❖ Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li><li>❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>❖ Program Pengembangan</li></ul>	❖ Indeks Pemerataan Infrastruktur



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat</li><li>❖ Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas kumuh</li></ul>	<p>Pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Penataan Bangunan Gedung</li><li>❖ Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan</li><li>❖ Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>❖ Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li><li>❖ Program Pengembangan Perumahan</li><li>❖ Program Kawasan Permukiman</li><li>❖ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</li><li>❖ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>❖ Program Pengelolaan Izin Lokasi</li><li>❖ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li><li>❖ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</li><li>❖ Program Penatagunaan Tanah</li><li>❖ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)</li></ul>	
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Berbasis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>❖ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pertumbuhan Ekonomi</li><li>❖ Pengeluaran Perkapita</li><li>❖ Kemiskinan</li><li>❖ Pengangguran Terbuka</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
	Pariwisata dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan melalui UMKM	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian</li><li>❖ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif</li><li>❖ Pengembangan KEK Pariwisata</li><li>❖ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian</li><li>❖ Pengintegrasian perencanaan penganggaran daerah dan desa dalam menekan angka kemiskinan</li><li>❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian</li><li>❖ Pemberian insentif kemudahan investasi dalam mendorong industrialisasi pertanian</li><li>❖ Pemanfaatan E-commerce dalam efisiensi tata niaga produk pertanian</li><li>❖ Peningkatan produktivitas komoditi unggulan pertanian</li><li>❖ Optimalisasi pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan sinergis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li><li>❖ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li><li>❖ Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li><li>❖ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>❖ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li><li>❖ Program Pengembangan Ekspor</li><li>❖ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li><li>❖ Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri</li><li>❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li><li>❖ Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner</li><li>❖ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li><li>❖ Program Penyuluh Pertanian</li><li>❖ Program Penyuluh Pertanian</li><li>❖ Program Perizinan Usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <i>Spending of Money</i></li><li>❖ Indeks Gini</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			<p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>❖ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>❖ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li><li>❖ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li><li>❖ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>❖ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>❖ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li><li>❖ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>❖ Program Pengembangan UMKM</li><li>❖ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>❖ Program Promosi Penanaman Modal</li><li>❖ Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>❖ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>❖ Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman</li></ul>	



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			<p>Modal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pemberdayaan Sosial</li><li>❖ Program Rehabilitasi Sosial</li><li>❖ Program Perlindungan Jaminan Sosial</li><li>❖ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li><li>❖ Program Perencanaan Tenaga Kerja</li><li>❖ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>❖ Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>❖ Program Hubungan Industrial</li><li>❖ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</li><li>❖ Program Pemasaran Pariwisata</li><li>❖ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li><li>❖ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>❖ Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>❖ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li></ul>	



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li><li>❖ Program Administrasi Pemerintahan Desa</li><li>❖ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li><li>❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)</li></ul>	
5.	Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada Pro Environment	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan</li><li>❖ Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan</li><li>❖ Peningkatan kesiagaan bencana dari aspek pra, pada saat dan pasca bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>❖ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>❖ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>❖ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li><li>❖ Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>❖ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li><li>❖ Indeks Ketahanan Bencana Daerah</li></ul>



NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			<p>Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li><li>❖ Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li><li>❖ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>❖ Program Pengelolaan Persampahan</li><li>❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li><li>❖ Program Penanggulangan Bencana</li><li>❖ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li><li>❖ Program Penanganan Bencana</li></ul>	



### 6.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tema Tahunan Pembangunan RPD merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan kebijakan yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu tiga tahun. Tema merasionalkan pencapaian visi dan misi pembangunan selama 3 tahun sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Tema Pembangunan selama 3 (Tiga) tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Tabel 6.5**  
**Tema Fokus Pembangunan**

TEMA PEMBANGUNAN		
2024	2025	2026
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju pembangunan ekonomi inklusif”	“Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Daya Saing Daerah”	“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Kesejahteraan”
JABARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		
1. Penguatan kapasitas birokrasi	1. Penguatan kapasitas birokrasi	1. Penguatan kapasitas birokrasi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	2. Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	2. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3. Kesejahteraan dan perlindungan sosial	3. Pembangunan SDM	3. Pembangunan SDM
4. Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan	4. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	4. Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan
5. Pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA)	5. Penguatan infrastruktur Sumber Daya Alam (SDA)	5. Penguatan infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA)
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup	6. Pengelolaan Lingkungan Hidup	6. Pengelolaan Lingkungan Hidup





#### **6.2.4 Kerangka Pendanaan Program Perangkat Daerah**

Program perangkat daerah telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program dan kegiatan yang tersebar di seluruh Perangkat sesuai perumpunan urusan Perangkat Daerah. Program/kegiatan tersebut telah disusun pagu indikatifnya oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya beserta pagu indikatif untuk seluruh program/kegiatan dapat digambarkan pada tabel 6.6 berikut ini :

Tabel 6.6  
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/Indikator (Program to Outcome)	Tujuan/Indikator Kinerja	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi			B (61,94)	B (62,40)	983.187.393.860	B (62,90)	969.888.259.322	B (63,40)	1.009.216.068.814	B (63,40)	2.962.291.721.995	
1.1	Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			BB (71,31)	BB (72,50)	746.274.465.457	BB (72,75)	779.925.410.820	BB (73,12)	811.100.961.337	BB (73,12)	2.337.300.837.614	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks SPBE			1,85	2,25		2,45		2,65		2,65		
		Indeks Profesionalitas ASN			63,86	64,08		64,31		64,87		64,87		
1.1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		Urusan Penunjang pemerintahan	28,80	29,00	685.829.501.367	29,53	719.406.497.072	30,00	749.319.632.642	28,75	2.154.555.631.081	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah			12,49	12,75		13,00		13,50		13,50		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI			0%	0%		0%		0%		0%		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			64,42	68,00		70,00		72,00		72,00		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah			n/a	3		4		4		4		
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik			100%	100%		100%		100%		100%		
1.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah		Unsur Perencanaan,	n/a	100%	3.252.802.400	100%	2.501.734.820	100%	2.437.376.461	100%	8.191.913.681	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Indeks kualitas Data perencanaan pembangunan daerah			n/a	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti			100%	100%		100%		100%		100%		
1.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah		Unsur Perencanaan	n/a	100,00	380.000.000	100%	391.400.000	100%	403.142.000	100%	1.174.542.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
1.1.4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah		Unsur Penelitian dan Pengembangan	n/a	100%	634.021.850	100%	549.761.800	100%	572.478.350	100%	1.756.262.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Inovasi Daerah			n/a	70,96		90,21		90,21		90,21		
1.1.5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP		Unsur Pengawasan	Level 3	Level 3	311.500.000	Level 3	318.613.880	Level 3	331.294.713	Level 3	961.408.593	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
1.1.6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	100,00	100,00	19.150.000.000	100%	19.586.620.000	100%	20.591.413.606	100%	59.328.033.606	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			100,00	100,00		100%		100%		100%		
		Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100,00	100,00		100%		100%		100%		
		persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan			116,67	100,00		100%		100%		100%		
		Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			N/a	100,00		100%		100%		100%		

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.1.7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	100%	100%	30.177.112.250	100%	30.527.112.250	100%	30.577.112.250	100%	91.281.336.750	Perangkat Daerah Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
		Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		
1.1.8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	75	1.697.241.760	85%	1.727.241.670	95%	1.737.241.670	95%	5.161.725.100	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
1.1.9	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	100,00%	2.401.880.000	100,00%	2.401.880.000	100,00%	2.401.880.000	100,00	7.205.640.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
		Presentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE		n/a	66,67%		83,33%		100,00%		100,00		
1.1.10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Presentase Data Sektor yang terintegrasi	Bidang Statistik	n/a	58,82%	166.370.230	79,41%	166.370.230	100%	166.370.230	100%	499.110.690	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Statistik
1.1.11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Bidang Persandian	n/a	1	135.922.000	1	145.922.090	1	115.922.090	1	397.766.180	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Persandian
1.1.12	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	Unsur Kepegawaian	100%	100%	1.707.265.600	100%	1.758.483.568	100%	1.940.010.675	100%	5.405.759.843	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		Presentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN		7,35%	14,47%		15,37%		16,09%		16,09%		
		Presentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi		n/a	70%		72,00%		74,00%		74,00%		
		Presentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat		100%	100%		100%		100%		100%		
		Presentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi		100%	100%		100%		100%		100%		
		Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin		100%	100%		100%		100%		100%		
		Presentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS		0,16	0,33		0,41		0,49		0,49		
1.1.13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	n/a	25	430.848.000	30	443.773.440	35	507.086.650	35	1.381.708.090	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Latihan
1.2	Sasaran 1.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya		WTP	WTP	147.592.234.000	WTP	159.751.065.856	WTP	166.141.043.693	WTP	473.484.343.549	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		84,06	84,51		84,93		85,25		85,25		
1.2.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APiP	Unsur Pengawasan	Level 3	Level 3	316.750.000	Level 3	323.983.776	Level 3	336.878.330	Level 3	977.612.106	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
1.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat waktu	Unsur Keuangan	n/a	100%	139.436.000.000	100%	150.683.700.000	100%	156.711.048.000	100%	446.830.748.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Presentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	Unsur Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		
		Penyusunan dan Penyampaian LKPD sesuai SAP Tepat Waktu	Unsur Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		
		Presentase Layanan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani	Unsur Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		
		Presentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani	Unsur Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD	Unsur Keuangan	100%	100%	2.997.000.000	100%	3.329.700.000	100%	3.462.888.000	100%	9.789.588.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Unsur Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		
1.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	Unsur Keuangan	n/a	100%	4.842.484.000	100%	5.413.682.080	100%	5.630.229.363	100%	15.886.395.443	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
1.3	Sasaran 1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,13	82,42	89.320.694.403	83,81	30.211.782.646	85,09	31.974.063.783	85,09	151.506.540.832	
1.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53,76%	60%	418.100.500	65%	432.100.500	65,00%	432.100.500	65,00%	1.282.301.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan KK		100%	100%		100%		100,00%				
		Persentase Perekaman KTP EL		99,40%	99,50%		99,50%		99,50%				
1.3.2	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	332.255.000	100%	332.255.000	100%	332.255.000	100%	996.765.000	
		Persentase cakupan penerbitan Akta Perkawinan		48,49%	50%		60%		70%				
		Persentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran		96,82%	97%		98%		99%				
1.3.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 OPD	20 OPD	178.647.965	20 OPD	178.647.965	20 OPD	178.647.965	20 OPD	535.943.895	
1.3.4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	Unsur Wilayah	100%	100%	10.778.371.910	100%	11.667.701.262	100%	12.362.843.634	100%	34.808.916.806	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Wilayah Kecamatan
1.3.5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan)	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga Trantibum	Unsur Wilayah	100%	100%	127.650.000	100%	131.651.600	100%	145.340.840	100%	404.642.440	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Wilayah Kecamatan
1.3.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan)	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	Unsur Wilayah	100%	100%	646.810.000	100%	657.371.120	100%	753.696.938	100%	2.057.878.058	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Wilayah Kecamatan
1.3.7	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum	80%	80%	1.580.000.000	90%	1.619.500.000	100%	1.659.987.500	100	4.859.487.500	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
1.3.8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Unsur Pemerintahan Umum	100%	100	59.735.981.380	100	853.898.818	100	1.592.769.930	100%	62.182.650.128	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pemilih pemula disatukan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik			35%		67%		98%				
1.3.9	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	Unsur Pemerintahan Umum	100%	100%	120.000.000	100%	123.000.000	100%	126.075.000	100%	369.075.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
1.3.10	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Unsur Pemerintahan Umum	100%	100%	1.150.000.000	100%	1.178.750.000	100%	1.208.218.750	100%	3.536.968.750	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
1.3.11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum	80%	100%	495.000.000	100%	507.375.000	100%	520.059.375	100%	1.522.434.375	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
1.3.12	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	n/a	7,4%	13.350.000.000	5,80%	12.076.365.700	4%	12.197.000.000	4%	37.623.365.700	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak			80%		92%		96%				
1.3.13	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Bidang Kearsipan	41,00%	45,00%	355.176.000	50,00%	399.410.000	50,00%	409.700.000	50,00%	1.164.286.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
		Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyusunan Arsip		53,00%	55,00%		60,00%		65,00%				
		Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis		30,50%	35,50%		40,50%		50,50%				

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan		30,00%	40,00%		45,00%		55,00%		55,00%		
		Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		45,35%	48,35%		52,35%		62,35%		62,35%		
		Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan		33,35%	38,35%		43,35%		53,35%		53,35%		
		Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan		43,35%	45,35%		50,35%		55,35%		55,35%		
		Persentase Nilai Aspek Kelembagaan		40,35%	45,35%		50,35%		55,35%		55,35%		
1.3.14	Program Penataan Desa	Desa yang Tertata Wilayahnya	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32,26	35,48	52.701.648	38,71	53.755.681	41,94	55.368.351	41,94	161.825.680	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		72,95	73,57	278.792.156.727	73,87	293.034.407.033	74,17	303.414.723.716	74,17	875.241.287.477	
2.1	Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		8,27	8,29	161.953.060.679	8,31	169.812.941.850	8,33	174.679.100.642	8,33	506.445.103.171	
		Angka Harapan Lama Sekolah		12,80	12,82		12,84		12,86		12,86		
2.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Bidang Pendidikan	95,71%	95,81%	142.258.933.500	95,91%	152.901.366.850	96,00%	156.832.543.535	96,00%	451.992.843.885	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
		APM AMP		72,97%	73%		73,25%		73,50%		110,00%		
		Kualitas Pembelajaran Jenjang SD		1,89	2,09		2,29		2,49		2,49		
		Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP		1,91	2,11		2,31		2,51		2,51		
		APM 5-6		48,1%	51,10%		54,10%		57,10%		57,10%		
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan		40,85%	41%		43%		45%		45%		
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG		25,31%	25,41%		25,51%		25,61%		25,61%		
2.1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah	Bidang Pendidikan	49,33	49,53	868.500.000	49,63	955.350.000	49,73	1.050.885.000	49,73	2.874.735.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
		Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		70%	80%		90%		100%		100%		
2.1.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD	Bidang Pendidikan	44,71%	44,81%	300.000.000	44,91%	330.000.000	45%	363.000.000	45%	993.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
		Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP		32,09%	32,19%		32,29%		32,39%		32,39%		
		Indeks Distribusi Guru		0,57%	0,67%		0,77%		0,87%		0,87%		
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal		91,86%	94%		96%		98%		98%		
2.1.4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan	Bidang Pendidikan	n/a	80%	225.000.000	90%	232.500.000	100%	240.750.000	100%	698.250.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan
2.1.5	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Bidang Perpustakaan	53,33%	56,67%	450.627.179	65,33%	458.725.000	70%	479.000.000	70%	1.388.352.179	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
		Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca		30,21%	35,28%		40,35%		50,87%		50,87%		
2.1.6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69,67%	41,05%	1.500.000.000	41,05%	1.650.000.000	41,05%	1.815.000.000	41,05%	4.965.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.1.7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	58,33%	79,17%	16.350.000.000	90,00%	13.285.000.000	92,50%	13.897.922.107	92,50%	43.532.922.107	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar		100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase atlet yang berprestasi		94,67%	96,67%		98%		100%		100%		

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.2	Sasaran 2.2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		71,37	71,42	111.873.671.000	71,45	118.134.415.500	71,47	123.434.582.874	71,47	353.442.669.374	
		Angka Stunting		1,34	1,33		1,32		1,31		1,31		
2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan	82%	100%	110.054.710.000	100%	116.175.058.400	100%	121.285.390.064	100%	347.515.158.464	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat		0,43	0,43 Indeks		0,44 Indeks		0,45 Indeks		0,45 Indeks		
		Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya		0%	100%		100%		100%		100%		
2.2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDMk sesuai standar	Bidang Kesehatan	0%	0,68%	545.880.000	0,70%	600.468.000	0,75%	660.514.800	100%	1.806.862.800	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
2.2.3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar	Bidang Kesehatan	88%	89%	353.081.000	90%	388.389.100	91%	427.228.010	77%	1.168.698.110	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
2.2.4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS	Bidang Kesehatan	0,69	0,70	245.000.000	0,73	269.500.000	0,75	296.450.000	0,75	810.950.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
2.2.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang memiliki Lumbung Pangan	Bidang Pangan	4,90%	6,17%	137.000.000	7,40%	141.000.000	8,60%	150.000.000	8,60%	428.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2.2.6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Bidang Pangan	33%	34%	280.000.000	40%	294.000.000	45%	313.000.000	42%	887.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
		Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan		84,62%	85%		86%		87%		87%		
		Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian		1,4%	1,5%		1,6%		1,7%		1,7%		
2.2.7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Pangan	n/a	10%	103.000.000	15%	106.000.000	16%	117.000.000	16%	326.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2.2.8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	Bidang Pangan	80%	83%	155.000.000	85%	160.000.000	90%	185.000.000	90%	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2.3	Sasaran 2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total		2,33	2,31	2.704.871.016	2,29	2.776.085.297	2,28	2.901.796.974	2,28	8.382.753.286	
2.3.1	Program Pengendalian Penduduk	ketersediaan kebijakan pengendalian penduduk yang disediakan sesuai dengan ketentuan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725.260.766	1 Kebijakan	752.329.738	1 Kebijakan	795.019.296	1 Kebijakan	2.272.609.800	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,81	14,45	1.066.800.000	14,85	1.090.589.640	15,15	1.132.250.164	19,25	3.289.639.804	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Peserta KB Aktif		72,12	73,92		74,15		75,1				
2.3.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82	123	912.810.250	150	933.165.919	164	974.527.514	175	2.820.503.682	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe		54	56		58		164		62		
		Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia		24	26		28		164		32		
		presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga		100	100		100		100		100		

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.4	Sasaran 2.4 Meningkatkan Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender		88,84	88,91	2.260.554.032	88,95	2.310.964.387	88,97	2.399.243.226	88,97	6.970.761.645	
		Status Kabupaten Layak Anak		Madya/611	Madya/ 625		Madya/632		Madya/653		Madya/653		
2.4.1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,11	100%	350.125.000	100%	357.932.788	100%	371.605.820	100%	1.079.663.607	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang terselesaikan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	622.750.000	100%	636.637.325	100%	660.956.871	100%	1.920.344.196	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36,43	37,90	283.208.263	38,65	289.523.807	40,15	300.583.617	40,15	873.315.687	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profile Gender dan anak Kabupaten	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,00	1,00	56.750.000	1,00	58.015.525	1,00	60.231.718	3,00	174.997.243	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga PHA yang berkualitas	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55,93	60,00	429.066.100	70,00	438.634.274	80,00	455.390.103	80,00	1.323.090.477	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	518.654.669	100%	530.220.668	100%	550.475.098	100%	1.599.350.435	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Tujuan 3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah		76,04	79,21	175.180.780.866	82,38	203.730.337.239	85,55	207.130.104.242	85,55	586.041.222.348	
3.1	Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur		0,184	0,187	175.180.780.866	0,191	203.730.337.239	0,193	207.130.104.242	0,193	586.041.222.348	
		Indeks Williamson		0,182	0,177		0,175		0,173		0,173		
3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60%	65%	7.337.121.365	66,30%	8.804.545.638	67,73%	8.892.591.094	67,73%	25.034.258.097	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik		60%	61%		62,42%		63,67%		63,67%		
3.1.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% Rumah tangga yang menggunakan air minum	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64,24	66,19	800.000.000	66,85	960.000.000	67,52	969.600.000	67,52	2.729.600.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Perentase Desa/Kelurahan yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,00	15,00	400.000.000,00	20,00	480.000.000,00	25,00	576.000.000,00	25,00	1.456.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23,46	24,90	900.000.000	25,39	1.080.000.000	25,90	1.090.800.000	25,90	3.070.800.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase Dalam Kondisi Baik	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,29%	75,39%	13.690.000.000	77,59%	14.508.000.000	79,79%	14.653.080.000	79,79%	42.851.080.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.1.6	Program Pengembangan Pemukiman	Cakupan pengembangan infrastruktur permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100%	100%	5.476.656.314	100%	6.571.987.577	100%	6.637.707.453	100%	18.686.351.344	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.7	Program Penataan Bangunan Gedung	Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	1.154.580.392	100%	1.385.496.471	100%	1.399.351.435	100%	3.939.428.298	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.8	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	532.881.887	100%	639.458.264	100%	645.852.846	100%	1.818.192.997	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.9	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,74%	75,98%	122.841.020.391,48	76,74%	141.929.522.169,78	77,51%	143.915.891.818,99	77,51%	408.686.434.380	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang terlatih	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	349.014.517	100%	418.817.420	100%	423.005.594	100%	1.190.837.531	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.11	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	100%	730.000.000	100%	626.500.000	100%	705.000.000	100%	2.061.500.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.12	Program Kawasan Pemukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8,30%	69,57%	1.436.250.000	97,56%	1.444.675.000	100,00%	1.641.600.000	100%	4.522.525.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.13	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	100	220.000.000	100	268.000.000	100	290.000.000	100%	778.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.14	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100%	100%	260.000.000	100%	300.000.000	100%	315.500.000	100%	875.500.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.15	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	100%	100%	30.000.000	100,00	35.000.000	100%	40.000.000	100%	105.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.16	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan	Bidang Pertanahan	100%	100%	50.000.000	100,00	55.000.000	100%	55.000.000	100%	160.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.17	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang terselesaikan	Bidang Pertanahan	100%	100%	75.000.000	100,00	75.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.1.18	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	Bidang Pertanahan	40%	70%	200.000.000	85%	200.000.000	90%	200.000.000	245,00	600.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
3.1.19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	Bidang Perhubungan	62,00	62,00	18.698.256.000	66,00	23.948.334.700	77,00	24.604.124.000	77,00	67.250.714.700	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
		Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan		70,00	75,00	80,00	85,00						
4	Tujuan 4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah		70,42	70,67	31.681.388.806	70,92	33.251.243.413	71,17	34.606.202.291	71,17	99.538.834.510	
4.1	Sasaran 4.1 Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi		4,87	3,73	15.751.639.100	3,79	16.348.139.591	4,33	16.949.602.406	4,33	49.049.381.097	
		Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)		12.863	12.891	12.923	12.958						
		Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku) Ribu Rupiah		33.091*	35.791	37.223	38.712						
4.1.1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	100%	100%	1.725.000.000	100%	1.764.330.000	100%	1.854.840.129	100%	5.344.170.129	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100%	100%		100%		100%				
		Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu		100%	100%		100%		100%				
4.1.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	Bidang Perindustrian	n/a	0,50%	420.000.000	0,70%	425.000.000	0,80%	435.000.000	0,80%	1.280.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
4.1.3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS	Bidang Perindustrian	n/a	25%	40.000.000	30%	40.000.000	40%	40.000.000	40%	120.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
4.1.4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	Bidang Perindustrian	n/a	10	45.000.000	15	45.000.000	20	45.000.000	20	135.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
4.1.5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	Bidang Perdagangan	n/a	70%	45.000.000	75%	45.000.000	80%	45.000.000	80	135.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
4.1.6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	Bidang Perdagangan	n/a	70%	3.180.000.000	70%	3.180.000.000	70%	3.180.000.000	70	9.540.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
4.1.7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	Bidang Perdagangan	n/a	90%	170.000.000	90%	170.000.000	100%	160.000.000	100	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
4.1.8	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	Bidang Perdagangan	n/a	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100	180.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
4.1.9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Bidang Perdagangan	n/a	31,04%	145.000.000	39,29%	145.000.000	43,13%	145.000.000	43,13	435.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
4.1.10	Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi terhadap pelaku usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan	n/a	75%	95.000.000	75%	95.000.000	75%	95.000.000	75	285.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.1.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	Bidang Pertanian	58%	60%	1.425.543.845	65%	1.434.992.400	70%	1.451.984.085	70%	4.312.520.330	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
		Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih ternak Unggul		55%	60%		65%		70%		70%		
4.1.12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	Bidang Pertanian	75%	80%	1.208.000.000	85%	1.217.343.600	90%	1.226.819.882	90%	3.652.163.482	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
4.1.13	Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditanggulangi	Bidang Pertanian	75%	80%	565.000.000	85%	567.000.000	90%	633.000.000	90%	1.765.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
4.1.14	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	Bidang Pertanian	60%	65%	376.000.000	70%	378.260.000	75%	382.000.000	75%	1.136.260.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
4.1.15	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	Bidang Pertanian	75%	80%	1.722.956.155	85%	1.730.067.100	90%	1.808.276.924	90%	5.261.300.179	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
4.1.16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin	Bidang Pertanian	70%	87,50%	50.000.000	89,75%	50.000.000	91%	50.000.000	91%	150.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
4.1.17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	24,00	24,00	1.115.000.000	24%	1.399.250.000	24%	1.553.778.000	72,00	4.068.028.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
		Persentase Nelayan yang Dilayani	Bidang Kelautan dan Perikanan	81,33	82,12		82,50%		83%		83%		
		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	1,20	1,20		1,20		1,20		3,60		
4.1.18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	9,62	9,62	851.000.000	9,62	985.000.000	9,62	1.060.000.000	28,86	2.896.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pembudidaya yang Dilayani		80	82,12		82,5		83		83,00		
		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)		23,60	25,42		25,42		25,42		76,27		
4.1.19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	Bidang Kelautan dan Perikanan	na	100	210.000.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	675.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi	Bidang Kelautan dan Perikanan	na	100		100		100		100		
4.1.20	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	na	100	285.000.000	100,00	320.000.000	100	360.000.000	100	965.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	na	100		100,00		100		100		
		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	na	5		5		5		15		
4.1.21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33,90%	42%	91.000.000	45%	93.940.000	50%	96.758.200	50%	281.698.200	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.1.22	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33,90%	42%	34.739.100	45%	35.086.491	50%	36.139.086	50%	105.964.677	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.1.23	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,35%	1,38%	235.000.000	1,42%	235.700.000	1,46%	242.771.000	1,46%	713.471.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.1.24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,85%	3,04%	128.000.000	3,36%	131.110.000	3,76%	135.043.300	10,15%	394.153.300	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.1.25	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15,03%	15,19%	385.000.000	15,20%	395.000.000	15,27%	406.850.000	15,27%	1.186.850.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.1.26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Peluang Investasi	Bidang Penanaman Modal	40%	45%	36.000.000	50%	38.520.000	55%	39.675.600	55%	114.195.600	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
4.1.27	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Investasi	Bidang Penanaman Modal	100%	100%	85.880.000	100%	89.180.000	100%	91.855.400	100%	266.915.400	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
4.1.28	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	Bidang Penanaman Modal	88,75	89,00	549.000.000	90%	557.730.000	90%	574.461.900	90%	1.681.191.900	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
4.1.29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	Bidang Penanaman Modal	100,00%	100,00%	458.520.000	100%	474.040.000	100%	488.261.200	100,00%	1.420.821.200	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
4.1.30	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	Bidang Penanaman Modal	n/a	100%	15.000.000	100%	16.590.000	100%	17.087.700	100%	48.677.700	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
4.2	4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan		4,26	4,24	3.292.500.000	4,23	3.507.500.000	4,21	3.683.900.000	4,21	10.483.900.000	
		Tingkat Pengangguran Terbuka		5,39	5,37		5,35		5,33		5,33		
4.2.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial	79%	80%	1.347.500.000	82%	1.397.500.000	85%	1.407.500.000	85%	4.152.500.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
4.2.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial	50%	50%	310.000.000	55%	320.000.000	58%	390.000.000	58%	1.020.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
4.2.3	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang Sosial	59,86%	60%	620.000.000	62%	770.000.000	65%	846.400.000	65%	2.236.400.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
4.2.4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Sosial	n/a	85%	400.000.000	90%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	1.220.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
4.2.5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	Bidang Ketenagakerjaan	n/a	66,00	20.000.000	77,00	20.000.000	88%	20.000.000	88%	60.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.2.6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	Bidang Ketenagakerjaan	n/a	53,3	270.000.000	56	270.000.000	60	270.000.000	60	810.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
4.2.7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Bidang Ketenagakerjaan	n/a	83,00	150.000.000	92	150.000.000	100%	150.000.000	100%	450.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
4.2.8	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Bidang Ketenagakerjaan	51,40%	46,50	175.000.000	47,77	180.000.000	49,04	180.000.000	49,04	535.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
4.3	Sasaran 4.3 Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	Spending of Manoev (Milyar Rupiah)		154,28	162,22	3.475.000.000	173,41	3.819.500.000	185,76	4.000.182.700	185,76	11.294.682.700	
4.3.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata	77,53	77,53	1.330.000.000	77,60	1.462.000.000	77,80	1.517.832.700	77,80	4.309.832.700	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
4.3.2	Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata	63,51	63,51	770.000.000	64,00	847.000.000	65,00	847.000.000	65,00	2.464.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
4.3.3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	Bidang Pariwisata	78,36	78,36	240.000.000	78,50	264.000.000	79,00	266.200.000	79,00	770.200.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
4.3.4	Program Pengembangan Kebudayaan	indeks pengembangan budaya	Bidang Budaya	35,80	75,00	985.000.000	75,70	1.083.000.000	75,70	1.190.800.000	75,70	3.258.800.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
		indeks pemanfaatan budaya		10,35	60,54		73,70		73,70				
4.3.5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	Bidang Budaya	51,97	74,43	150.000.000	74,43	163.500.000	74,43	178.350.000	74,43	491.850.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
4.4	Sasaran 4.4 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini		0,219	0,217	9.162.249.706	0,215	9.576.103.822	0,213	9.972.517.186	0,213	28.710.870.714	
4.4.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34%	37%	1.836.876.985	40%	1.873.614.525	40%	1.929.822.960	34%	5.640.314.470	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik		100%	100%		100%		100%				
4.4.2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	100%	2.997.936.821	100%	3.057.895.557	100%	3.149.632.424	0%	9.205.464.803	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.4.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	100%	4.327.435.900	100%	4.644.593.740	100%	4.893.061.801	100%	13.865.091.441	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100%	100%		100%		100%				
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,91	64,91	18.353.623.531	65,18	18.645.831.572	65,50	19.501.639.827	65,50	56.501.094.930	
5.1	Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,91	64,91	18.353.623.531	65,18	18.645.831.572	65,50	19.501.639.827	65,50	56.501.094.930	
		Indeks Ketahanan Bencana Daerah		0,29	0,31		0,34		0,35		0,35		
5.1.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	369.000.000	100%	369.000.000	100%	366.000.000	100%	1.104.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Kinerja (Program to Outcome)	Urusan Bidang/Unsur	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.1.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	475.623.180	100%	477.000.000	100%	483.000.000	100%	1.435.623.180	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.3	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keekaragaman Hayati yang dikelola	Bidang Lingkungan Hidup	n/a	100%	2.004.654.522	100%	2.005.100.000	100%	2.041.600.000	100%	6.051.354.522	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi meupun teknis	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	70.460.100	100%	206.460.100	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan	Bidang Lingkungan Hidup	n/a	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	30.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	107.712.000	100%	107.715.000	100%	109.200.000	100%	324.627.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	35.683.200	100%	35.685.000	100%	36.200.000	100%	107.568.200	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan dan Fasilitasi pengaduan lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
5.1.10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	Bidang Lingkungan Hidup	10,01%	28%	7.290.817.979	30%	7.307.337.000	30%	7.514.790.000	30%	22.112.944.979	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah		52,82%	71%		70%		70%		70%		
5.1.11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	1.456.250.000	100%	1.747.500.000	100%	1.764.975.000	100%	4.968.725.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.1.12	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	2.781.066.650	100%	2.768.494.572	100%	2.640.414.727	100%	8.189.975.949	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.1.13	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	n/a	75,00%	3.189.816.000	80%	3.185.000.000	85%	3.835.000.000	85,00%	10.209.816.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	n/a	100%		100%		100%				
		Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	n/a	100%		100%		100%				
5.1.14	Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat terhadap Kejadian Pasca Bencana	Bidang Sosial	n/a	40%	525.000.000	45%	525.000.000	50%	590.000.000	50%	1.640.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
<b>Total</b>						<b>1.487.195.343.790</b>		<b>1.518.550.078.580</b>		<b>1.573.868.738.891</b>		<b>4.579.614.161.261</b>	



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN**

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat. Secara empiris, trend realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka 5 tahun terakhir (2018–2022) menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Bangka karena adanya situasi yang tidak biasa (munculnya pandemi Corona Virus Disease / Covid – 19), yang dimulai pada tahun 2020. Untuk itu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama

Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2024-2026 dapat dilihat pada Gambar 7.1.

**Gambar 7.1**  
**Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026**



Diperlukan analisis secara komprehensif untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah melalui analisis pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

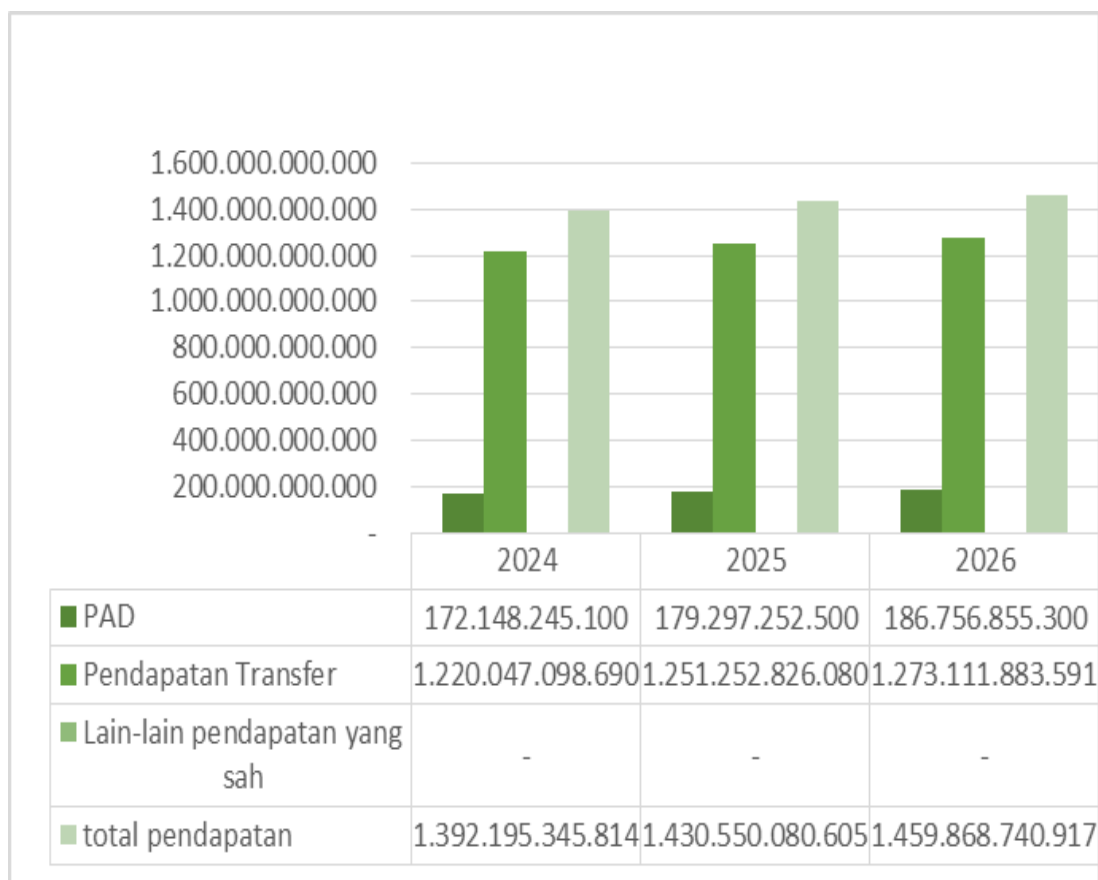


Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

### 7.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah 2024-2026

Kerangka pendapatan daerah untuk tiga tahun ke depan dari tahun 2024 - 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

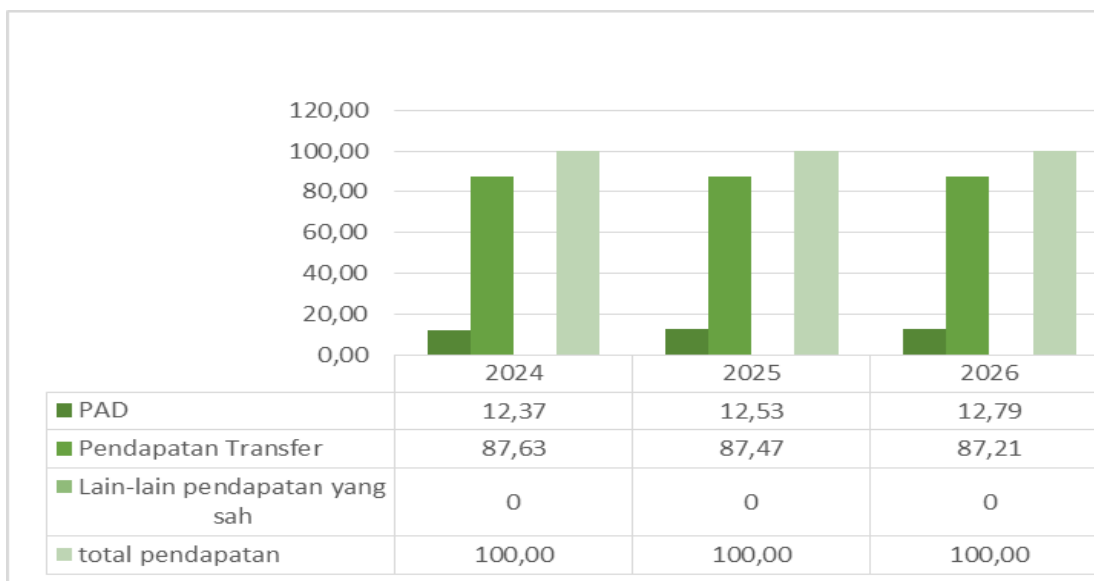
**Grafik 7.1**  
**Kerangka Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, ketergantungan keuangan Kabupaten Bangka pada pendapatan transfer masih cukup tinggi yaitu sekitar 87,63% dan diharapkan perannya akan semakin berkurang mencapai 87,21% pada tahun 2026, sementara PAD ditargetkan mampu meningkat rata-rata 3,46% per tahun yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 12,37% dan pada akhir tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 12,79%.

**Grafik 7.2**  
**Kerangka Distribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



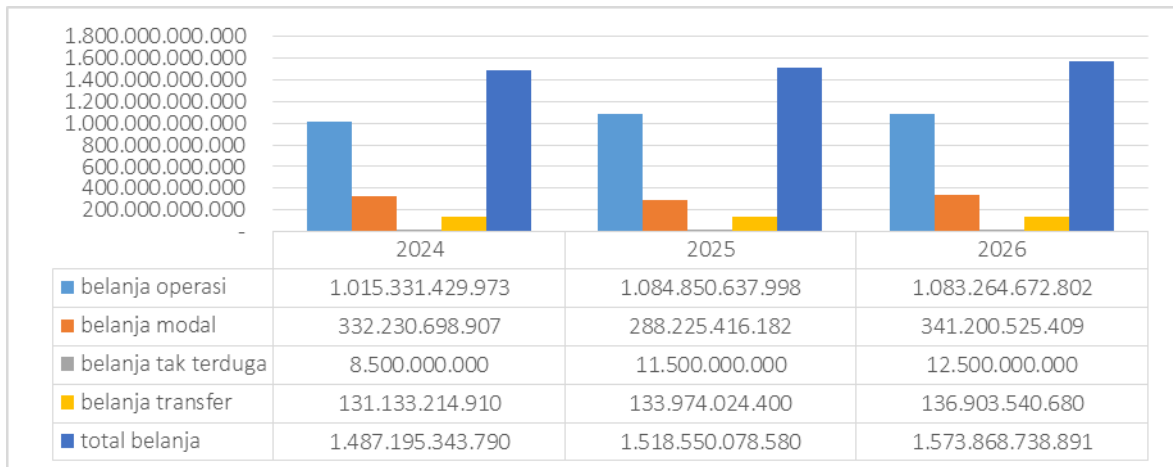
Sumber: Proyeksi Keuangan Daerah 2023

Untuk peningkatan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkret bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

### 7.1.2 Kerangka Belanja Daerah 2024-2026

Kerangka belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Bangka empat tahun ke depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Untuk tiga tahun kedepan, belanja daerah Kabupaten Bangka diproyeksikan sebagai berikut.

**Grafik 7.3**  
**Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Proyeksi Keuangan Daerah 2023

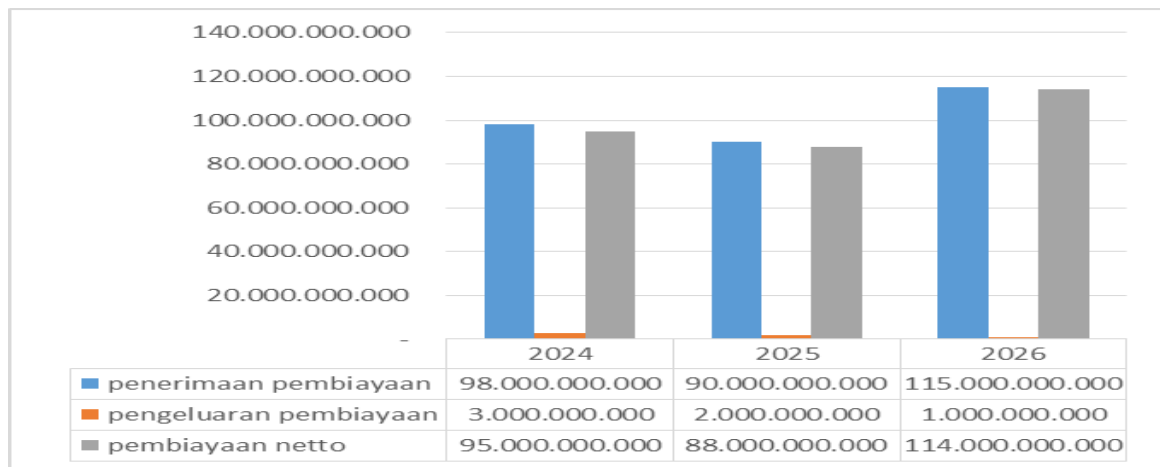
Kerangka belanja daerah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja operasi yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari – hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, proyeksi komposisi belanja operasi rata-rata adalah sebesar 69,51% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar 21,00%, belanja transfer sebesar 8,78% dan belanja tak terduga sebesar 0,71% saja dari total belanja daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 1,94% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja operasi direncanakan sebesar 2,23%, belanja modal sebesar 0,90%, belanja tak terduga sebesar 15,69% sedangkan pertumbuhan belanja transfer adalah sebesar 1,47%.

### 7.1.3 Kerangka Pembiayaan Daerah 2024-2026

Apabila dikaitkan antara kerangka pendapatan daerah dengan kerangka belanja daerah Kabupaten Bangka, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.

**Grafik 7.4**  
**Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026**



Sumber: Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2023

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. Oleh karena itu proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah harus lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.

Didalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026 ini analisis kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasimerupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah



Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Transfer diberikan dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan daerah dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memprioritaskan untuk pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2024-2026**

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.392.195.343.790	1.430.550.078.580	1.459.868.738.891
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	98.000.000.000	90.000.000.000	115.000.000.000
	Total Penerimaan	1.490.195.343.790	1.520.550.078.580	1.574.868.738.891
	Dikurangi :			
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.026.831.429.973	1.098.350.637.998	1.096.764.672.802
	Belanja Operasi	1.015.331.429.973	1.084.850.637.998	1.083.264.672.802



No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000	11.500.000.000	12.500.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	2000000000	1000000000
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Daerah</b>	<b>463.363.913.817</b>	<b>422.199.440.582</b>	<b>478.104.066.089</b>

## 7.2 Program Perangkat Daerah dan Dukungan Anggarannya

Hal mendasar yang melatar belakangi Perubahan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini merubah secara signifikan nomenklatur program perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemuktahirannya, Program Perangkat Daerah ini dikelompokkan berdasarkan:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
3. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Urusan pemerintah pilihan
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan
7. Unsur pengawasan unsur pemerintahan
8. Unsur kewilayahan
9. Unsur pemerintahan umum, dan
10. Unsur kekhususan

Terdapat 134 (Seratus tiga puluh empat) program perangkat daerah yang dilaksanakan untuk pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Untuk lebih jelasnya rincian Program Perangkat daerah beserta dukungan anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL 7.2**  
**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>				969.744.629.700,00		1.041.767.179.700,00		1.079.515.508.009,00		3.091.027.317.409,00			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				819.393.299.200,00		886.034.507.300,00		916.328.864.293,00		2.621.756.670.793,00			
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				335.666.243.300,00		357.111.446.000,00		371.541.149.893,00		1.064.318.839.193			
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,46	26,48	192.013.809.800,00	26,50	202.692.229.150,00	26,52	213.053.971.358,00	26,52	607.760.010.308	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,07	10,14		10,16		10,18	10,18			
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	66,66	67		69		71	71			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	3	3		4		4	4			
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD Perangkat Daerah dikali 100%	100%	100%		100%		100%	100%			
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Jumlah anak usia 7 s.d 12 thn yang sedang belajar di SatPen Jenjang SD Sederajat dibagi Jumlah anak usia 7 s.d 12 thn pada Kab/Kota yg bersangkutan dikali 100%	95,71%	95,81%	142.258.933.500,00	95,91%	152.901.366.850,00	96,00%	156.832.543.535,00	96,00	451.992.843.885,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
				APM SMP	Jumlah anak usia 13 s.d 15 thn yang sedang belajar di SatPen Jenjang SMP Sederajat dibagi Jumlah anak usia 13 s.d 15 thn pada Kab/Kota yg bersangkutan dikali 100%	72,97%	73%		73,25%		73,50%	110,00			
				Kualitas Pembelajaran Jenjang SD	Rata-rata nilai untuk kualitas pembelajaran manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif, Pembelajaran praktik vs teori, dan pembelajaran jarak jauh di survei lingkungan belajar Jenjang SD	1,89	2,09		2,29		2,49	2,49			
				Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP	Rata-rata nilai untuk kualitas pembelajaran manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif, Pembelajaran praktik vs teori, dan pembelajaran jarak jauh di survei lingkungan belajar Jenjang SMP	1,91	2,11		2,31		2,51	2,51			
				APM 5-6	Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dibagi Jumlah Penduduk usia 5-6 tahun dikali 100%	48,1%	51,10%		54,10%		57,10%	57,10%			
				Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang terlayani dalam pelayanan dasar pada pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar teknis (SPM)	40,85%	41%		43%		45%	45%			
				Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) yang terdaftar di satuan PAUD formal dan memiliki sertifikat PPG dibagi dengan total pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) yang	25,31%	25,41%		25,51%		25,61%	25,61%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah	Nilai komposit guru dan kepala sekolah terhadap pengelolaan pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik.	49,33	49,53	868.500.000,00	49,63	955.350.000,00	49,73	1.050.885.000,00	49,73	2.874.735.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
			Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah satuan PAUD yang menyusun kurikulum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku / Jumlah satuan PAUD x 100%	70%	80%		90%		100%		100%			
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD	Jumlah guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan tenaga pendidikan yang ada.	44,71%	44,81%	300.000.000,00	44,91%	330.000.000,00	45%	363.000.000,00	45%	993.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
			Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP	Jumlah guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan tenaga pendidikan yang ada.	32,09%	32,19%		32,29%		32,39%		32,39%			
			Indeks Distribusi Guru	Indeks pemerataan pendidik PAUD tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu.	0,57%	0,67%		0,77%		0,87%		0,87%			
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal	ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis (SPM)	91,86%	94%		96%		98%		98%			
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan	Jumlah satuan pendidikan NonFormal yang patuh terhadap penyelenggara perizinan / Jumlah satuan pendidikan Non Formal x 100%	n/a	80%	225.000.000,00	90%	232.500.000,00	100%	240.750.000,00	100%	698.250.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>263.657.270.000,00</b>		<b>280.929.683.000,00</b>		<b>292.112.285.900,00</b>		<b>836.699.238.900,00</b>		
1	2	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,25	27,00	152.458.599.000,00	27,10	163.496.267.500,00	27,15	169.442.703.026,00	27,15	485.397.569.526,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,80	11,00		11,10		11,15		11,15			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	61,08	64%		64%		64%		64%			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	Na	3		3		3		3			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	97,97%	98%		98,10%		98,20%		98,20%			
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	(Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80%) + (Persentase Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20%)	82%	100%	110.054.710.000,00	100%	116.175.058.400,00	100%	121.285.390.064,00	100%	347.515.158.464,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat	Hasil dari 12 indikator IKS dibagi 12	0,43	0,43 Indeks		0,44 Indeks		0,45 Indeks		0,45 Indeks			
			Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	Jumlah Fasyankes yang meningkat status akreditasinya dibagi jumlah Fasyankes yang disurvei akreditasi dikali 100	0%	100%		100%		100%		100%			
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan sesuai standar dibagi seluruh SDM Kesehatan dikali 100%	0%	0,68%	545.880.000,00	0,70%	600.468.000,00	0,75%	660.514.800,00	100%	1.806.862.800,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar	Jumlah keamanan pangan yang di awasi di bagi jumlah sarana tempat keamanan pangan di kali 100	88%	89%		353.081.000,00	90%
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS	Rumah Tangga yang melaksanakan 8-10 indikator PHBS/Rumah Tangga yang disurvei	0,69	0,70	245.000.000,00	0,73	269.500.000,00	0,75	296.450.000,00	0,75	810.950.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
1	03		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>170.388.427.500,00</b>		<b>199.736.410.700,00</b>		<b>202.488.029.900,00</b>		<b>572.612.868.100,00</b>	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,8	29,30	15.450.902.633,76	29,80	21.211.083.160,51	30,30	21.519.174.657,60	30,30	58.181.160.451,87	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,99		13,49		13,99		13,99			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSMD	n/a	57,80		60,80		65,60		65,60			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		3,00		4,00		4,00			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
1	03	02	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Saluran Irigasi x 100%	60,00%	65,00%	7.337.121.365,01	66,30%	8.804.545.638,01	67,73%	8.892.591.094,39	67,73%	25.034.258.097,41	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik ditambah persentase drainase dalam kondisi baik dibagi 2	60,00%	61,20%		62,42%		63,67%		63,67%			
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	% Rumah tangga yang menggunakan air minum	Jumlah Rumah tangga yang terlayani Air Bersih dibagi Jumlah rumah tangga Keseluruhan x 100%	64,24	66,19	800.000.000,00	66,85	960.000.000,00	67,52	969.600.000,00	67,52	2.729.600.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Perentase Desa/Kelurahan yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelurahan/Desa yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dibagi Jumlah Kelurahan/Desa x 100%	10,00	15,00	400.000.000,00	20,00	480.000.000,00	25,00	576.000.000,00	25,00	1.456.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	Jumlah Desa yang Memiliki SPAL dibagi Jumlah Kawasan Desa yang Tertinggal x100%	23,46	24,90	900.000.000,00	25,39	1.080.000.000,00	25,90	1.090.800.000,00	25,90	3.070.800.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	% Drainase Dalam Kondisi Baik	panjang drainase kabupaten dalam baik dibagi panjang drainase kabupaten dikali 100persen	73,29%	75,39%	13.690.000.000,00	77,59%	14.508.000.000,00	79,79%	14.653.080.000,00	79,79%	42.851.080.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	07	Program pengembangan permukiman	Cakupan pengembangan infrastruktur permukiman	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman dalam kondisi baik + Panjang saluran permukiman dalam kondisi baik / 2 x 100%	100%	100%	5.476.656.314,20	100%	6.571.987.577,04	100%	6.637.707.452,81	100%	18.686.351.344,05	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program penataan bangunan gedung	Ketaatan terhadap penataan bangunan gedung	Jumlah Bangunan Layanan Publik yang baik / Jumlah bangunan layanan publik x 100%	100,00%	100,00%	1.154.580.392,22	100,00%	1.385.496.470,66	100,00%	1.399.351.435,37	100,00%	3.939.428.298,25	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	Jumlah bangunan Publik yang tertata / Jumlah bangunan Publik x 100%	100,00%	100,00%	532.881.886,50	100,00%	639.458.263,80	100,00%	645.852.846,44	100,00%	1.818.192.996,74	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik > 40 Km/jam	73,74%	75,98%	122.841.020.391,48	76,74%	141.929.522.169,78	77,51%	143.915.891.818,99	77,51%	408.686.434.380,25	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang terlatih	(Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih) / (Jumlah Tenaga Terampil) x 100%	100,00%	100,00%	349.014.516,83	100,00%	418.817.420,20	100,00%	423.005.594,40	100,00%	1.190.837.531,43	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah advice planing yang di keluarkan / jumlah permohonan advice planing x 100%	100,00%	100,00%	1.456.250.000,00	100,00%	1.747.500.000,00	100,00%	1.764.975.000,00	100,00%	4.968.725.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>7.678.884.000,00</b>		<b>7.852.357.400,00</b>		<b>8.174.455.000,00</b>		<b>23.705.696.400,00</b>		
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	27	27,70	5.032.634.000,00	27,90	5.213.182.400,00	28,20	5.222.355.000,00	28,20	15.468.171.400,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11	11,80		12,00		12,50		12,50		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	63,40	90,00		95,00		100,00		100,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		3		4		4		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	(Jumlah Rumah yang Terkena Dampak) / (Rumah yang Direkonstruksi) x 100 Persen	n/a	98,26	730.000.000,00	98,36	626.500.000,00	98,48	705.000.000,00	98,48	2.061.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Luas pemukiman kumuh tahun n-1 dikurangi luas pemukiman kumuh tahun n dibagi luas pemukiman kumuh tahun n-1 dikali 100	8,30%	69,57%	1.436.250.000,00	97,56%	1.444.675.000,00	100,00%	1.641.600.000,00	100,00%	4.522.525.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	(Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani) / (Total Luas Kawasan Kumuh) x 100 Persen	100,00	100,00	220.000.000,00	100,00	268.000.000,00	100,00	290.000.000,00	100,00	778.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	(Jumlah Perumahan yang Memiliki Sarana dan Prasarana yang Layak) / (Jumlah Seluruh Perumahan) x 100 Persen	100,00	100,00	260.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	315.500.000,00	100,00	875.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>32.802.726.400,00</b>		<b>30.994.763.200,00</b>		<b>32.228.531.100,00</b>		<b>96.026.020.700,00</b>	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,37	27,32	9.761.000.000,00	27,35	9.083.000.000,00	27,38	9.281.410.000,00	27,38	28.125.410.000,00	Satpol PP
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,88	10,20		10,25		10,28		10,28		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	na	60,75		60,78		60,82		60,82		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	na	3,25		3,35		3,50		3,50		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%		70,00%		72,00%		75,00%		75,00%		
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,23	25,45	3.720.843.750,00	26,00	3.881.902.928,00	26,65	4.274.706.372,70	26,65	11.877.453.050,70	BPBD
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,62	9,75		9,95		10,62		10,62		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD		65,00		65,75		70,00		70,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	3,00		3,00		3,00		3,00		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	05	02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada Umum	(Jumlah Pelanggaran pada Tahun (n-1) - Tahun n) / (Jumlah Pelanggaran pada Tahun (n-1)) x 100%		7,4%	13.350.000.000,00	5,80%	12.076.365.700,00	4,00%	12.197.000.000,00	4,00%	37.623.365.700,00	Satpol PP
				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	(Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Diselesaikan) / (Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Dilaporkan/Terjadi) x 100%		80%		92,00%		96,00%		96,00%		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	Jumlah kejadian bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana yang terjadi x 100%	100%	100%	2.781.066.650,00	100%	2.768.494.572,00	100%	2.640.414.727,30	100%	8.189.975.949,30	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	(Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Damkar) / (Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten) x 100%		75,00%	3.189.816.000,00	80,00%	3.185.000.000,00	85,00%	3.835.000.000,00	85,00%	10.209.816.000,00	Satpol PP
				Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	(Jumlah Penanganan Kebakaran yang Ditangani) / (Jumlah Kejadian Kebakaran) x 100%		100%		100%		100%	100%	100%		
				Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran	(Jumlah Investigasi Kebakaran yang dilakukan) / (Jumlah Kebakaran yang terjadi) x 100%		100%		100%		100%	100%	100%		
1	06		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>9.199.748.000,00</b>		<b>9.409.847.000,00</b>		<b>9.784.412.500,00</b>		<b>28.394.007.500,00</b>	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,00	27,00	5.997.248.000,00	27,50	5.997.347.000,00	28,00	6.130.512.500,00	29,00	18.125.107.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,75		13,00		13,50		25,00		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	65,00	66,00		67,00		68,00		68,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	2		2		2		2		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Jumlah PPKS Yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial dibagi Jumlah PPKS Pemberdayaan Sosial yang Terdata dikali 100 %	79%	80%	1.347.500.000,00	82%	1.397.500.000,00	85%	1.407.500.000,00	85%	4.152.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	$\frac{Y-Z}{Y} \times 100\%$ Jumlah PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial x 100% Jumlah PMKS Rehabilitasi Sosial yang terdata	50%	50%	310.000.000,00	55%	320.000.000,00	58%	390.000.000,00	58%	1.020.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	$\frac{S}{Y} \times 100\%$ Jumlah PMKS Lurus yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial x 100% Jumlah PMKS yang terdata	59,86%	60%	620.000.000,00	62%	770.000.000,00	65%	846.400.000,00	65%	2.236.400.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	Jumlah layanan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana / Jumlah kejadian pasca bencana X 100%	N/a	40%	525.000.000,00	45%	525.000.000,00	50%	590.000.000,00	50%	1.640.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan pemeliharaan / Jumlah Taman Makam pahlawan X 100%	N/a	85%	400.000.000,00	90%	400.000.000,00	100%	420.000.000,00	100%	1.220.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>150.351.330.500,00</b>		<b>155.732.672.400,00</b>		<b>163.186.643.716,00</b>		<b>469.270.646.616,00</b>	
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>9.387.611.600,00</b>		<b>9.692.919.600,00</b>		<b>10.246.134.100,00</b>		<b>29.326.665.300,00</b>	
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,07	25,31	8.772.611.600,00	25,59	9.072.919.600	25,62	9.626.134.100	25,62	27.471.665.300	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,05	11,08		11,12		11,17		11,17		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%				
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,05	64,25		64,55		64,65		64,65				
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		4		4		4				
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100	90		90		100		100				
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Daerah dibagi jumlah kegiatan keseluruhan RTKD dikali 100 persen	n/a	66,00	20.000.000,00	77,00	20.000.000,00	88,00	20.000.000,00	88,00	60.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan kompetensi ditambah jumlah pencaker yang melakukan pemagangan dibagi jumlah pencari kerja dikali 100 persen	n/a	53,3	270.000.000	56	270.000.000	60	270.000.000	60	810.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	(jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL) + (jumlah pencaker yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja) + (jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULDI) / jumlah pencaker x 100%	n/a	83,00	150.000.000,00	92,00	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100,00	450.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan syarat kerja (memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama x 100%	51,40%	46,50	175.000.000,00	47,77	180.000.000,00	49,04	180.000.000,00	49,04	535.000.000,00	
2	08		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>9.268.825.984,00</b>		<b>9.471.060.803,44</b>		<b>9.832.855.326,13</b>		<b>28.572.742.113,58</b>	
2	8	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,25	28,9	7.008.271.952,00	30,15	7.160.096.416,53	32,65	7.433.612.099,64	32,65	21.601.980.468,17	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,1	11,86		12,75		13,45		13,45			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	N/a	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	N/a	64		67		70		70			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	2		2,5		2,75		2,75			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	N/a	100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	Jumlah OPD yang menerapkan PPRG dibagi Jumlah seluruh OPD x 100%	79,11	100,00	350.125.000,00	100,00	357.932.787,50	100,00	371.605.819,98	100,00	1.079.663.607,48	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terlayani dibagi Jumlah Kasus x 100%	100,00	100,00	622.750.000,00	100,00	636.637.325,00	100,00	660.956.870,82	100,00	1.920.344.195,82	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	Jumlah perempuan yg berpartisipasi di kelembagaan dibagi Jumlah perempuan x 100%	36,43	37,90	283.208.263,00	38,65	289.523.807,26	40,15	300.583.616,70	40,15	873.315.686,97	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profile Gender dan anak Kabupaten	Jumlah buku Profile Gender dan anak Kabupaten	1,00	1,00	56.750.000,00	1,00	58.015.525,00	1,00	60.231.718,06	3,00	174.997.243,06	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	persentase lembaga PHA yang berkualitas	Jumlah lembaga PHA yang berkualitas di bagi jumlah lembaga PHA yang ada dikali 100%	55,93	60,00	429.066.100,00	70,00	438.634.274,03	80,00	455.390.103,30	80,00	1.323.090.477,33	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	Jumlah Kasus kekerasan anak yang terlayani dibagi jumlah kasus kekerasan anak x 100%	100,00	100,00	518.654.669,00	100,00	530.220.668,12	100,00	550.475.097,64	100,00	1.599.350.434,76	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>15.624.105.000,00</b>		<b>16.072.879.700,00</b>		<b>16.752.315.709,00</b>		<b>48.449.300.409,00</b>		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,80	29,00	14.949.105.000,00	29,50	15.371.879.700,00	30,00	15.987.315.709,00	30,00	46.308.300.409,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,75		13,00		13,25	13,25	13,25			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%	0%	0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,42	68,00		70,00		72,00	72,00	72,00			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		4,00		4,00	4,00	4,00			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
2	09	02	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang memiliki Lumbung Pangan	Jumlah desa yang mempunyai lumbung pangan di bagi jumlah desa/kelurahan di kali 100%	4,90%	6,17%	137.000.000,00	7,40%	141.000.000,00	8,60%	150.000.000,00	8,60%	428.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah cadangan pangan daerah tahun berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan pemerintah tahun awal RPJMD / jumlah cadangan pangan pemerintah tahun awal RPJMD x 100%	33%	34%	280.000.000,00	40%	294.000.000,00	45%	313.000.000,00	45%	887.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan	Jumlah jenis bahan pokok terdistribusi merata / jumlah jenis bahan pangan yang ditetapkan x 100%	84.62%	85%		86%		87%						
		Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian	(Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n) - (Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n-1) / (Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n-1) x 100%	1.4%	1.5%		1.6%		1.7%						
2	09	04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan dibagi jumlah penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	n/a	10%	103.000.000,00	15%	106.000.000,00	16%	117.000.000,00	16%	326.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	09	05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	(Jumlah sample aman yang diuji menggunakan Rapid Test Kit dan jumlah sample aman yang diuji di lab terakreditasi/seluruh sample yang diuji menggunakan Rapid Test kit dan jumlah seluruh sample yang diuji lab terakreditasi) x 100%	80%	83%	155.000.000,00	85%	160.000.000,00	90%	185.000.000,00	90%	500.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	10		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					<b>355.000.000,00</b>		<b>365.000.000,00</b>		<b>370.000.000,00</b>		<b>1.090.000.000,00</b>	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase usaha yang memiliki izin lokasi	jumlah izin lokasi yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan izin lokasi yang diajukan yang memenuhi persyaratan dikali 100 persen	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	105.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	jumlah sengketa tanah yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah dikali 100 persen	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	160.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang terselesaikan	jumlah bidang tanah yang diganti rugi dibagi jumlah rencana bidang tanah yang akan diganti rugi dikali 100 persen	100,00	100,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	225.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	Luas Lahan Pemda yang siap untuk Dimanfaatkan dibagi Total Luas Lahan Pemda x 100%	40,00	70,00	200.000.000,00	85,00	200.000.000,00	90,00	200.000.000,00	90,00	600.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
2	11		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>19.782.148.000,00</b>		<b>20.233.921.900,00</b>		<b>21.039.347.300,00</b>		<b>61.055.417.200,00</b>	
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,08%	26,50%	9.380.657.119,00	26,75%	9.814.084.900,00	27,00%	10.368.097.200,00	27,00%	29.562.839.219,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,94%	14,00%		14,25%		14,50%		14,50%		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	n/a	59,50		59,60		59,70		59,70		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		4,00		4,00		4,00		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	43,91%	92,00%		94,00%		95,00%		95,00%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dibagi Target Dokumen Perencanaan dikali 100%	100%	100%	369.000.000,00	100%	369.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.104.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Nilai IKLH tahun berjalan dibagi Nilai IKLH tahun sebelumnya dikali 100%	100%	100%	475.623.180,00	100%	477.000.000,00	100%	483.000.000,00	100%	1.435.623.180,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Jumlah luasan keanekaragaman hayati yang dikelola dibagi Jumlah seluruh luasan keanekaragaman hayati dikali 100%	n/a	100%	2.004.654.522,00	100%	2.005.100.000,00	100%	2.041.600.000,00	100%	6.051.354.522,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik	Jumlah Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah dibagi Jumlah Penghasil Limbah B3 Target Pembinaan dikali 100%	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	60.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi maupun teknis	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dibagi Jumlah Target Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dikali 100%	100%	100%	68.000.000,00	100%	68.000.000,00	100%	70.460.100,00	100%	206.460.100,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	07	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (HMA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan	Jumlah Perda yang diselesaikan dibagi Jumlah Perda yang ditergetkan dikali 100%	n/a	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	30.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang menerima pembinaan dibagi Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100%	100%	100%	107.712.000,00	100%	107.715.000,00	100%	109.200.000,00	100%	324.627.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten dibagi Jumlah calon penerima dikali 100%	100%	100%	35.683.200,00	100%	35.685.000,00	100%	36.200.000,00	100%	107.568.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pelayanan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100%	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	60.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	Jumlah pengurangan sampah dibagi Potensi timbul sampah dikali 100%	10,01%	28%	7.290.817.979,00	30%	7.307.337.000,00	30%	7.514.790.000,00	30%	22.112.944.979,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase Penanganan Sampah	Jumlah penanganan sampah dibagi Potensi timbul sampah dikali 100%	52,82%	71%		70%		70%	70%			
2	12		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>9.070.512.700,00</b>		<b>9.277.660.000,00</b>		<b>10.646.963.800,00</b>		<b>28.995.136.500,00</b>	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	27,33	29,00	8.141.509.235,00	29,53	8.334.656.535	30,00	9.703.960.335	30,00	26.180.126.105,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,52	11,00		13,00		13,50	13,50			
				Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
				Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,42	68,00		70,00		72,00	72,00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		3,00		3,00		3,00				
		Presentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00				
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	53,76%	60,00%	418.100.500,00	65,00%	432.100.500,00	65,00%	432.100.500,00	65,00%	1.282.301.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
			Persentase Perekaman KTP-EL	Jumlah Perekaman KTP-EL dibagi Jumlah Penduduk wajib KTP-EL di bagi 100%	99,40%	99,50%		99,50%		99,50%		99,50%			
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pengajuan akta kematian dikali 100 %	100,00%	100,00%	332.255.000,00	100,00%	332.255.000,00	100,00%	332.255.000,00	100,00%	996.765.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi
			Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan dibagi jumlah pengajuan akta perkawinan dikali 100 %	48,49%	50,00%		60,00%		70,00%		70,00%			
			Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%	96,82%	97,00%		98,00%		99,00%		99,00%			
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data	16 OPD	20 OPD	178.647.965,00	20 OPD	178.647.965,00	20 OPD	178.647.965,00	20 OPD	535.943.895,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi	
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>10.437.701.000,00</b>		<b>10.676.071.300,00</b>		<b>11.101.039.800,00</b>		<b>32.214.812.100,00</b>		
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	23,76	24,45	5.550.185.546,00	25,72	5.690.805.536,92	26,52	5.966.216.064,03	27,85	17.207.207.146,95	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,50	13,00		13,25		13,50		13,75			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	66%										
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5								0%			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
2	13	02	Program Penataan Desa	Desa yang Tertata Wilayahnya	(Jumlah Desa yang Tertata Wilayahnya dibagi Jumlah Seluruh desa di Kab. Bangka) x 100%	32,26	35,48	52.701.648,00	38,71	53.755.680,96	41,94	55.368.351,39	41,94	161.825.680,35	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik	(Jumlah Desa dengan Status Maju dibagi Jumlah Seluruh desa di Kab. Bangka) x 100%	34%	37%	1.836.876.985,00	40%	1.873.614.524,70	40%	1.929.822.960,44	34%	5.640.314.470,14	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik	(Jumlah Desa dengan Penyerapan APBDes diatas 80% dibagi Jumlah Seluruh desa di Kab. Bangka) x 100%	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	(Jumlah Lembaga desa yang Aktif dibagi Jumlah Seluruh Lembaga desa di Kab. Bangka) x 100%	100%	100%	2.997.936.821,00	100%	3.057.895.557,42	100%	3.149.632.424,14	0%	9.205.464.802,56	Perangkat Daerah Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>					<b>2.704.871.016,00</b>		<b>2.776.085.296,56</b>		<b>2.901.796.973,87</b>		<b>8.382.753.286,42</b>	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	ketersediaan kebijakan pengendalian penduduk yang disediakan sesuai dengan ketentuan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk sesuai dengan ketentuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725.260.766,00	1 Kebijakan	752.329.737,98	1 Kebijakan	795.019.295,95	1 Kebijakan	2.272.609.799,93	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKIP	Jumlah Peserta KB MKIP / Jumlah Peserta KB x 100%	12,81	14,45	1.066.800.000,00	14,85	1.090.589.640,00	15,15	1.132.250.164,25	19,25	3.289.639.804,25	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB aktif / Jumlah PUS x 100 %	72,12	73,92		74,15		75,1				
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah keluarga anggota BKB hadir pertemuan BKB, mendapat materi menjadi orang tua hebat dan menggunakan Kartu kembang anak (KKA)	82	123	912.810.250,00	150	933.165.918,58	164	974.527.513,66	175	2.820.503.682,24	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	Jumlah PIK R yang mendapatkan pembinaan yang di tunjukan dengan cakupan laporan kegiatan PIK R pada aplikasi SIGA (R/I/PIK R)	54	56		58		164	62			
				Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	Jumlah kelompok BKL yang melaporkan pelaksanaan kegiatan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	24	26		28		30	32			
				presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah balai penyuluh kb yang melaporkan melalui SIGA (formulir RIUPPKA) di bagi Jumlah balai penyuluh KB X 100%	100	100		100		100	100			
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>27.896.256.000,00</b>		<b>33.533.334.700,00</b>		<b>34.669.124.000,00</b>		<b>96.098.714.700,00</b>	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,46	26,00	9.198.000.000,00	27,00	9.585.000.000,00	28,00	10.065.000.000,00	28,00	28.848.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	15,31	16,00		17,00		18,00	18,00			
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,42	68,00			70,00		72,00					
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00			4,00		4,00					
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100,00	100,00			100,00		100,00					
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum	Jumlah Trayek Angkutan dibagi Angkutan yang Tersedia dikali 100%	62,00	62,00	18.698.256.000,00	66,00	23.948.334.700,00	77,00	24.604.124.000,00	77,00	67.250.714.700,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
				Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana/Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Kondisinya Baik dibagi Perlengkapan jalan yang Tersedia dikali 100%	70,00	75,00		80,00		85,00		85,00		
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>10.040.818.770,00</b>		<b>10.267.027.380,00</b>		<b>10.718.144.580,00</b>		<b>31.025.990.730,00</b>	
2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,80	29,00	5.941.697.010,00	29,53	6.137.905.710,00	30,00	6.579.022.910,00	30,00	18.658.625.630,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,75		13,00		13,50		13,50		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,42	68,00		70,00		72,00		72,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	3,9	3,90		4,00		4,10		4,10		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan secara mandiri	N/A	75	1.697.241.760,00	85	1.727.241.670,00	95	1.737.241.670,00	95	5.161.725.100	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dibagi Jumlah seluruh PD dikali 100 %	n/a	100,00%	2.401.880.000,00	100,00%	2.401.880.000,00	100,00%	2.401.880.000,00	100,00	7.205.640.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
				Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE dibagi Jumlah seluruh SPLP dikali 100 %	n/a	66,67%		83,33%		100,00%		100,00		
2	17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					<b>873.739.100,00</b>		<b>890.836.491,00</b>		<b>917.561.585,73</b>		<b>2.682.137.176,73</b>	
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi yang aktif dibagi jumlah koperasi yang diawasi dikali 100 persen	33,90%	42,00%	91.000.000,00	45%	93.940.000,00	50%	96.758.200,00	50%	281.698.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi yang sehat dibagi jumlah koperasi yang dinilai dikali 100 persen	33,90%	42,00	34.739.100,00	45,00	35.086.491,00	50,00	36.139.085,73	50,00%	105.964.676,73	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan/jumlah anggota koperasi dikali 100%	1,35%	1,38%	235.000.000,00	1,42%	235.700.000,00	1,46%	242.771.000,00	1,46%	713.471.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	Jumlah UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha dibagi seluruh UMKM dikali 100%	2,85%	3,04%	128.000.000,00	3,36%	131.110.000,00	3,76%	135.043.300,00	10,15%	394.153.300,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dibagi jumlah seluruh usaha mikro dikali 100%	15,03%	15,19%	385.000.000,00	15,20%	395.000.000,00	15,27%	406.850.000,00	15,27%	1.186.850.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					<b>8.825.644.900,00</b>		<b>9.030.057.109,00</b>		<b>9.398.240.114,27</b>		<b>27.253.942.123,27</b>	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,14	26,12	7.681.244.900,00	26,35	7.853.997.109,00	26,47	8.186.898.314,27	26,47	23.722.140.323,27	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,15	10,25		10,36		10,45	10,45	10,45	10,45		
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	52,84	64,12		64,56		65,15	65,15	65,15	65,15		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	3,49	3,50		3,60		3,70	3,70	3,70	3,70		
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	70,00	75,00		76,50		78,00	78,00	78,00	78,00		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Peluang Investasi	Jumlah Peluang Investasi dibagi Jumlah Potensi Peluang Investasi dikali 100%	40%	45%	36.000.000,00	50%	38.520.000,00	55%	39.675.600,00	55%	114.195.600,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Investasi	Jumlah Promosi dibagi Jumlah Sektor dikali 100%	100,00%	100,00%	85.880.000,00	100,00%	89.180.000,00	100,00%	91.855.400,00	100,00%	266.915.400,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan	88,75	89,00	549.000.000,00	90,00	557.730.000,00	90,00	574.461.900,00	90,00	1.681.191.900,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	Jumlah investor yang dilakukan pengendalian dibagi jumlah seluruh investor dikali 100%	100,00%	100,00%	458.520.000,00	100%	474.040.000,00	100%	488.261.200,00	100,00%	1.420.821.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola		100%	15.000.000,00	100%	16.590.000,00	100%	17.087.700,00	100%	48.677.700,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	
2	19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>17.850.000.000,00</b>		<b>14.935.000.000,00</b>		<b>15.712.922.107,00</b>		<b>48.497.922.107,00</b>	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Aktif	Rata-rata Persentase Pemuda yang Aktif dan Organisasi Pemuda yang Aktif	69,67%	41,05%	1.500.000.000,00	41,05%	1.650.000.000,00	41,05%	1.815.000.000,00	41,05%	4.965.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga  % sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar  % atlet yang berprestasi	Rata-rata pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Persentase Pengembangan Cabang Olahraga dan Persentase Organisasi Olahraga dibagi 2)  Rata-rata nilai sarpras olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi yang berstandar  Jumlah Atelet yang berprestasi / Jumlah atlet yang dibina x 100%	58,33%	79,17%	16.350.000.000,00	90,00%	13.285.000.000,00	92,50%	13.897.922.107,00	92,50%	43.532.922.107,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>166.370.230,00</b>		<b>166.370.230,00</b>		<b>166.370.230,00</b>		<b>499.110.690,00</b>	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	Penilaian Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi yang dilaksanakan secara mandiri	n/a	58,82%	166.370.230,00	79,41%	166.370.230,00	100,00%	166.370.230,00	100%	499.110.690,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Statistik
2	21		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>135.922.000,00</b>		<b>145.922.090,00</b>		<b>115.922.090,00</b>		<b>397.766.180,00</b>	
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Penilaian Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggaraan layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi	N/A	1	135.922.000,00	1	145.922.090,00	1	115.922.090,00	1	397.766.180,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Persandian
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>1.135.000.000,00</b>		<b>1.246.500.000,00</b>		<b>1.369.150.000,00</b>		<b>3.750.650.000,00</b>	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	indeks pengembangan budaya  indeks pemanfaatan budaya	average dari % pelaku tradisi yang memahami nilai tradisi dan karakter bangsa serta % Objek Budaya yang direvitalisasi  Average dari % Responden yang puas dengan fasilitas budaya; % Peningkatan kelompok seni yang berprestasi; serta % Kerjasama budaya yang ditindaklanjuti	35,80 10,35	75,00 60,54	985.000.000,00	75,70 73,70	1.083.000.000,00	75,70 73,70	1.190.800.000,00	75,70 73,70	3.258.800.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	average dari % pengguna pusat informasi budaya yang aktif; % Objek budaya yang diinventarisir; % tradisi budaya yang memiliki HAKI; % Benda/situs dan kawasan cagar	51,97	74,43	150.000.000,00	74,43	163.500.000,00	74,43	178.350.000,00	74,43	491.850.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
2	23		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>					<b>6.441.628.200,00</b>		<b>6.552.615.800,00</b>		<b>6.819.056.000,00</b>		<b>19.813.300.000,00</b>	
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah  Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah  Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI  Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah  Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat  Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat  Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK  Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD  Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	23,01 10,78 0% N/a N/a	24,00 11,79 0% 65,00 3,00	5.991.001.021,00	25,00 12,79 0% 67,00 4,00	6.093.890.800,00	26,00 13,79 0% 69,00 4,00	6.340.056.000,00	26,00 13,79 0% 69,00 4,00	18.424.947.821,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Jumlah Pemustaka (responden sesuai rumus Sloovin, 285 responden per 1000 pengunjung berusia 10-59 tahun) yang menyatakan puas/sangat puas minimal empat puluh persen dari Survey Pemustaka (sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota)	53,33%	56,67%	450.627.179,00	65,33%	458.725.000,00	70,00%	479.000.000,00	1.388.352.179,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
			Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk usia ≥ 7 Tahun	30,21%	35,28%		40,35%		50,87%	50,87%			
2	24		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>355.176.000,00</b>		<b>399.410.000,00</b>		<b>409.700.000,00</b>	<b>1.164.286.000,00</b>		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif		41,00%	45,00%	355.176.000,00	50,00%	399.410.000,00	50,00%	409.700.000,00	1.164.286.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
				Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip		53,00%	55,00%		60,00%		65,00%	65,00%		
				Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis		30,50%	35,50%		40,50%		50,50%	50,50%		
				Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan		30,00%	40,00%		45,00%		55,00%	55,00%		
				Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		45,35%	48,35%		52,35%		62,35%	62,35%		
				Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan		33,35%	38,35%		43,35%		53,35%	53,35%		
				Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan		43,35%	45,35%		50,35%		55,35%	55,35%		
				Persentase Nilai Aspek Kelembagaan		40,35%	45,35%		50,35%		55,35%	55,35%		
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>28.087.794.000,00</b>		<b>28.460.791.300,00</b>		<b>29.313.633.791,00</b>	<b>85.862.219.091,00</b>	
3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>9.520.771.000,00</b>		<b>9.738.201.700,00</b>		<b>10.125.837.500,00</b>	<b>29.384.810.200,00</b>		
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,05	28,15	7.059.771.000,00	28,30	6.803.951.700,00	28,65	6.917.059.500,00	20.780.782.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,69	10,70		10,80		11,05	11,05		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0	0		0,00		0,00	0,00		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	72,00	72,10		72,15		72,20	72,20		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	na	4,00		4,12		4,25	4,25		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	60,15	60,45		60,65		60,85	60,85		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan : target sapras x 100	24,00	24,00	1.115.000.000,00	24,00	1.399.250.000,00	24,00	1.553.778.000,00	4.068.028.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Nelayan yang Dilayani	<i>nelayan yang dilayani : jumlah nelayan yang ada x 100</i>	81,33	82,12		82,50		83,00		83,00				
		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	<i>nelayan yang dilatih : jumlah nelayan x 100</i>	1,20	1,20		1,20		1,20		3,60				
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	<i>sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan : target sapras x 100</i>	9,62	9,62	851.000.000,00	9,62	985.000.000,00	9,62	1.060.000.000,00	28,86	2.896.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
				Persentase Pembudidayaan yang Dilayani	<i>pembudidayaan ikan yang dilayani : jumlah pembudidayaan ikan yang ada x 100</i>	80,00	82,12		82,50		83,00		83,00		
				Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	<i>pembudidayaan yang dilatih : jumlah pembudidayaan x 100</i>	23,60	25,42		25,42		25,42		76,27		
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	<i>jumlah usaha perikanan tangkap yang diawasi : total usaha bidang tangkap yang harus diawasi x 100</i>	na	100	210.000.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	675.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
				Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan ikan yang Diawasi	<i>jumlah usaha perikanan bidang pembudidayaan yang diawasi : total usaha bidang pembudidayaan ikan yang harus diawasi x 100</i>	na	100		100		100		100		
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	<i>jumlah sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan : target sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang akan diadakan x 100</i>	na	100,00	285.000.000,00	100,00	320.000.000,00	100,00	360.000.000,00	100	965.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
				Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<i>jumlah pelayanan yang diberikan : target pelayanan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan x 100</i>	na	100,00		100,00		100,00		100		
				Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	<i>jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memperoleh pelatihan : jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan x 100</i>	na	5		5		5		15		
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					<b>9.019.523.000,00</b>		<b>9.139.926.500,00</b>		<b>9.430.715.400,00</b>		<b>27.590.164.900,00</b>	
3	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	<i>Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat</i>	26,37	26,47	6.679.523.000,00	26,67	6.566.926.500,00	26,75	6.799.682.700,00	26,75	20.046.132.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	<i>Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat</i>	16,88	16,90		17,10		17,15		17,15		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	<i>Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK</i>	0%	0%		0%		0%		0%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	<i>Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD</i>	N/a	60,00		65,00		70,00		70,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	<i>Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5</i>	N/a	3		4		4		4		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	<i>Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%</i>	100%	100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	Average terhadap Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata; Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan; Persentase Sarana yang Memenuhi Standar dan Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,53	77,53	1.330.000.000,00	77,60	1.462.000.000,00	77,80	1.517.832.700,00	77,80	4.309.832.700,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	Average atas Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata; Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif serta Persentase Tindakan atas Produk Wisata	63,51	63,51	770.000.000,00	64,00	847.000.000,00	65,00	847.000.000,00	65,00	2.464.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	Average Persentase Desa Wisata yang Atraktif; Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif; Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif serta Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	78,36	78,36	240.000.000,00	78,50	264.000.000,00	79,00	266.200.000,00	79,00	770.200.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>5.347.500.000,00</b>		<b>5.377.663.100,00</b>		<b>5.552.080.891,00</b>		<b>16.277.243.991,00</b>	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	Jumlah Penggunaan Benih/Bibit Unggul Tahun Berjalan dikurangi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Tahun awal RPJMD dikali 100%	58%	60%	1.425.543.845,00	65%	1.434.992.400,00	70%	1.451.984.085,00	70%	4.312.520.330,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
				Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih ternak Unggul	Jumlah Penggunaan Benih/Bibit ternak Unggul Tahun Berjalan dikurangi jumlah Penggunaan Benih/Bibit Ternak unggul Tahun Awal RPJMD) di bagi jumlah Penggunaan Benih/Bibit ternak unggul Tahun awal RPJMD dikali 100%	55%	60%		65%		70%	70%			
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	Jumlah Sapras yang di manfaatkan di bagi dengan jumlah seluruh sapras pertanian di kali 100%	75	80	1.208.000.000,00	85%	1.217.343.600,00	90	1.226.819.882,00	90	3.652.163.482,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditanggulangi	Jumlah Ternak yang sakit / jumlah seluruh ternak jx 100%	75%	80%	565.000.000,00	85%	567.000.000,00	90%	633.000.000,00	90%	1.765.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	(Luas serangan OPT yang bisa dikendalikan / luas keseluruhan seragam OPT) x 100%	60%	65%	376.000.000,00	70%	378.260.000,00	75%	382.000.000,00	75%	1.136.260.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	07	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	(Jumlah kapasitas kelembagaan di penyuluh pertanian / jumlah seluruh poktan) x 100%	75	80	1.722.956.155,00	85	1.730.067.100,00	90	1.808.276.924,00	90	5.261.300.179,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin	(Jumlah usaha peternakan tahun berjalan dikurangi jumlah usaha peternakan tahun awal RPJMD) dibagi jumlah usaha peternakan awal RPJMD) x 100%	70%	87,50%	50.000.000,00	89,75%	50.000.000,00	91,00%	50.000.000,00	91,00%	150.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>3.695.000.000,00</b>		<b>3.695.000.000,00</b>		<b>3.685.000.000,00</b>		<b>11.075.000.000,00</b>	
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	Jumlah pelaku Usaha Perdagangan yang didaftar / Jumlah Pelaku usaha x 100%	n/a	70	45.000.000,00	75	45.000.000,00	80	45.000.000,00	80	135.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	Jumlah Sarana yang diperbaiki/ jumlah sarana yang ada x 100%	n/a	70	3.180.000.000,00	70	3.180.000.000,00	70	3.180.000.000,00	70	9.540.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	(Persentase pemantauan dan pelaksanaan operasi pasar) / (jumlah sarana perdagangan) x 100	n/a	90	170.000.000,00	90	170.000.000,00	100	160.000.000,00	100	500.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	(Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang) / (jumlah pelaku usaha ekspor unggulan) x 100	n/a	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	180.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Jumlah Alat standar tera/tera ulang yang ada / Jumlah alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan ) x 100%	n/a	31,04	145.000.000,00	39,29	145.000.000,00	43,13	145.000.000,00	43,13	435.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	
3	30	07	Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi terhadap pelaku usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam Negeri	(Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi) / (jumlah pelaku usaha yang menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri) x 100	n/a	75	95.000.000,00	75	95.000.000,00	75	95.000.000,00	75	285.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	
3	31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI</b>					<b>505.000.000,00</b>		<b>510.000.000,00</b>		<b>520.000.000,00</b>		<b>1.535.000.000,00</b>		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi / jumlah IKM x 100%	n/a	0,50	420.000.000,00	0,70	425.000.000,00	0,80	435.000.000,00	0,80	1.280.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri	
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS	Jumlah Izin Usaha Industri yang terintegrasi ke SHINAS / jumlah Izin Usaha Industri melalui OSS x 100%	n/a	25	40.000.000,00	30	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	120.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SHINAS	Jumlah Industri yang menyampaikan informasi / jumlah industri yang memiliki akun SHINAS x 100%	n/a	10	45.000.000,00	15	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	135.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri	
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>155.184.734.040,00</b>		<b>157.356.858.040,00</b>		<b>161.253.210.040,00</b>		<b>473.794.802.120,00</b>		
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>85.260.268.000,00</b>		<b>87.207.392.000,00</b>		<b>91.678.744.000,00</b>		<b>264.146.404.000,00</b>		
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	26,83	29,25	64.385.268.000,00	29,50	65.856.442.000,00	29,80	69.232.490.265,00	29,80	199.474.200.265,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,93	12,63		12,67		12,75		12,75				
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI terkait Pengelolaan Keuangan dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
			Persentase Temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	65,64	67,00		67,00		67,00		67,00				
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	4,00		4,00		4,00		4,00				
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	96,98	97,22		97,26		97,38		97,38				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP	Realisasi layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP / jumlah permintaan layanan keprotokolan KDH/WKDH x 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
		Persentase rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan	Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan / jumlah target rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan x 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
		Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan	Jumlah Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan / jumlah target rumusan kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan x 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
		Percentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP	Jumlah Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP / jumlah target rumusan kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP x 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun/jumlah dokumen rumusan kebijakan yang seharusnya disusun) x 100%	100,00	100,00	19.150.000.000,00	100,00	19.586.620.000,00	100,00	20.591.413.606,00	100,00	59.328.033.606,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
			Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun/jumlah dokumen rumusan kebijakan yang seharusnya disusun) x 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	(Jumlah produk hukum yang ditetapkan/jumlah produk hukum yang diajukan OPD)*100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
			persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan	(Jumlah kasus hukum pemerintah daerah yang terselesaikan/jumlah kasus hukum yang masuk)*100%	116,67	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun/jumlah dokumen rumusan kebijakan yang seharusnya disusun) x 100%	N/a	100,00		100,00		100,00		100,00			
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun/jumlah dokumen rumusan yang seharusnya disusun) x 100%	100,00	100,00	1.725.000.000,00	100,00	1.764.330.000,00	100,00	1.854.840.129,00	100,00	5.344.170.129,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
			Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun/jumlah dokumen rumusan yang seharusnya disusun) x 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Paket PBj yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	((Jumlah Paket Pengadaan E-Tender diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal RUP/jumlah paket pengadaan e-tender) x 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
4	02		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>69.924.466.040,00</b>		<b>70.149.466.040,00</b>		<b>69.574.466.040,00</b>		<b>209.648.398.120,00</b>		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	24,76	25,12	39.747.353.790,00	25,87	39.622.353.790,00	26,32	38.997.353.790,00	26,32	118.367.061.370,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,88	10,00		10,58		11,18		11,18			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	N/a	64,00		64,25		64,50		64,50				
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		3		4		4				
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
		Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	jumlah layanan administrasi bagi DPRD sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang harus diberikan bagi DPRD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Produk Hukum yang diselesaikan tepat waktu terhadap Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan dalam 1 tahun x 100 Persen	100,00	100,00	30.177.112.250,00	100,00	30.527.112.250,00	100,00	30.577.112.250,00	100,00	91.281.336.750,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
			Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	jumlah layanan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai SOP dibagi jumlah layanan penyerapan aspirasi masyarakat dikali 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>194.553.495.250,00</b>		<b>207.987.877.340,00</b>		<b>216.506.040.351,00</b>		<b>619.047.412.941,00</b>	
5	01		<b>PERENCANAAN</b>					<b>12.843.607.400,00</b>		<b>11.998.566.940,00</b>		<b>12.714.405.101,00</b>		<b>37.556.579.441,00</b>	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,8	30,00	9.210.805.000,00	29,53	9.105.432.120,00	30,00	9.873.886.640,00	30,00	28.190.123.760,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	13,93		13,93		15,00		15,00			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	66,42	68,00		70,00		72,00		72,00			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		4,00		4,00		4,00			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan = $\sum(20\% \text{keselarasan RPJPD} + 30\% \text{Keselarasan RPJMD/RPD} + 50\% \text{Keselarasan RKPD})$	n/a	100,00	3.252.802.400,00	100,00	2.501.734.820,00	100,00	2.437.376.461,00	100,00	8.191.913.681,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Indeks kualitas Data perencanaan pembangunan daerah	Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah = $\sum(\text{elemen data perencanaan bidang infrastruktur} + \text{elemen data bidang pemerintahan dan sumber daya manusia} + \text{elemen data bidang ekonomi dan SDA}) \text{ dibagi } 3 \times 100\%$	n/a	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah semua Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan PD = Σ (keselarasan Renstra terhadap RPJMD + Keselarasan Renja terhadap RKPD + Keselarasan Renja terhadap Renstra)</i>	n/a	100,00	380.000.000,00	100,00	391.400.000,00	100,00	403.142.000,00	100,00	1.174.542.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
5	02		<b>KEUANGAN</b>				<b>170.627.734.000,00</b>		<b>184.752.808.000,00</b>		<b>192.107.023.000,00</b>		<b>547.487.565.000,00</b>			
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	<i>Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat</i>	26,43	28,80	23.352.250.000,00	29,00	25.325.725.920,00	29,53	26.302.857.637,00	29,53	74.980.833.557,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan	
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	<i>Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat</i>	12,76	12,49		12,75		13,00	13,00	13,00			
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	<i>Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK</i>	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	<i>Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD</i>	70,00	70,00		71,00		72,00	72,00	72,00			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	<i>Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5</i>	n/a	3		4		5	5	5			
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	<i>Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%</i>	N/a	70%		75%		80%	80%	80%			
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat waktu	<i>PENETAPAN RANCANGAN PERDA APBD TEPAT WAKTU * (tepat waktu = 100%, tidak tepat waktu = 50%)</i>	N/a	100%	139.436.000.000,00	100%	150.683.700.000,00	100%	156.711.048.000,00	100%	446.830.748.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	
				Persentase layanan penatausahaan perbendaharaan Daerah sesuai SOP	<i>Jumlah bulan layanan sesuai SOP dibagi jumlah bulan layanan dalam 1 tahun x 100 Persen</i>	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
				Penyusunan dan penyampaian LKPD sesuai SAP tepat waktu	<i>3 Bulan Setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan * (Tepat Waktu = 100%) dan ** (Tidak Tepat Waktu = 50%)</i>	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
				Persentase layanan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	<i>Jumlah bulan layanan yang tertangani dibagi bulan layanan 1 tahun x 100 Persen</i>	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
				Persentase layanan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	<i>Jumlah bulan layanan yang tertangani dibagi bulan layanan 1 tahun x 100 Persen</i>	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD	<i>Σ (% dokumen perencanaan dan penatausahaan disusun tepat waktu + % BMD yang diamankan + % Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola yang dilakukan sesuai peraturan) / 3</i>	100	100	2.997.000.000,00	100	3.329.700.000,00	100	3.462.888.000,00	100	9.789.588.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	
				Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	<i>Σ (% Laporan BMD Semester 1 + % Laporan BMD Semester 2 yang disusun dan disampaikan tepat waktu) / 2</i>	100%	100%		100%		100%	100%	100%			
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	<i>Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi Belanja Daerah Dibagi Target Pajak Daerah x 100 Persen</i>	N/a	100%	4.842.484.000,00	100%	5.413.682.080,00	100%	5.630.229.363,00	100%	15.886.395.443,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	03	KEPEGAWAIAN				10.017.284.000,00		10.242.967.160,00		10.605.047.250,00		30.865.298.410,00			
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	23,65	24,00	8.310.018.400,00	24,50	8.484.483.592,00	25,00	8.665.036.575,00	25,00	25.459.538.567,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,05	12,00		12,23		13,00		13,00			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	62,00	63,20		63,86		64,00		64,00			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	3		4		4		4			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	Jumlah Rencana Kebutuhan ASN yang penempatannya sesuai peta jabatan dibagi Jumlah ASN yang penempatannya sesuai peta jabatan dikali 100%	100%	100%	1.707.265.600,00	100%	1.758.483.568,00	100%	1.940.010.675,00	100%	5.405.759.843,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN	Jumlah Pengadaan ASN yang Sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN dibagi Jumlah Pengadaan ASN yang dilaksanakan dikali 100%	7,35%	14,47%		15,37%		16,09%		16,09%			
			Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dibagi jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dikali 100%	n/a	70,00%		72,00%		74,00%		74,00%			
			Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola secara up to date, akurat dan cepat dibagi seluruh Data Kepegawaian dikali 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
			Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Kinerja ASN Sesuai Ekspektasi dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Se Kabupaten Bangka dikali 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan peraturan disiplin dibagi Jumlah Perangkat Daerah Se Kab. Bangka dikali 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
			Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	Jumlah PNS Tugas Belajar yang Lulus dibagi PNS Tugas Belajar dikali 100%	0,16	0,33		0,41		0,49		0,49			
5	04	PENDIDIKAN DAN LATIHAN				430.848.000,00		443.773.440,00		507.086.650,00		1.381.708.090,00			
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN	Perhitungan IP ASN dimensi kompetensi	n/a	25	430.848.000,00	30	443.773.440,00	35	507.086.650,00	35	1.381.708.090,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Latihan
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				634.021.850,00		549.761.800,00		572.478.350,00		1.756.262.000,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan dikali 100 persen	N/a	100%	634.021.850,00	100%	549.761.800,00	100%	572.478.350,00	100%	1.756.262.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Indeks Inovasi Daerah	= $\sum$ (Skor Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) + Skor Satuan Inovasi Daerah)	N/a	70,96		80,61		90,21		90,21			
6			<b>UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN</b>					<b>11.129.855.000,00</b>		<b>11.384.033.000,00</b>		<b>11.837.182.200,00</b>		<b>34.351.070.200,00</b>	
6	01		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					<b>11.129.855.000,00</b>		<b>11.384.033.000,00</b>		<b>11.837.182.200,00</b>		<b>34.351.070.200,00</b>	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,80	29,00	10.501.605.000,00	29,53	10.741.435.344,00	30,00	11.169.009.157,00	30,00	32.412.049.501,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,75		13,00		13,50		13,50			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	n/a	63,00		65,00		67,00		67,00			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		4,00		4,00		4,00			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3	Level 3	316.750.000,00	Level 3	323.983.776,00	Level 3	336.878.330,00	Level 3	977.612.106,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Hasil penilaian Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	Level 3	Level 3	311.500.000,00	Level 3	318.613.880,00	Level 3	331.294.713,00	Level 3	961.408.593,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>60.200.133.800,00</b>		<b>61.564.722.700,00</b>		<b>64.015.352.000,00</b>		<b>185.780.208.500,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN PUDING BESAR</b>					<b>3.929.208.800,00</b>		<b>4.018.941.900,00</b>		<b>4.178.918.700,00</b>		<b>12.127.069.400,00</b>	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,93	26,78	3.689.528.800,00	26,81	3.774.261.900,00	26,84	3.934.238.700,00	26,84	11.398.029.400,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,07	11,38		11,41		11,43		11,43			
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	60,75	61,25		62,45		62,75		62,75			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		3		4		4			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	45.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan ) x 100%	100%	100%	117.530.000,00	100%	117.530.000,00	100%	117.530.000,00	100%	352.590.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%		100%		100%				
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan ) x 100%	100%	100%	14.150.000,00	100%	14.150.000,00	100%	14.150.000,00	100%	42.450.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	93.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	289.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN PEMALI</b>				<b>3.882.129.500,00</b>		<b>3.970.787.500,00</b>		<b>4.128.847.400,00</b>		<b>11.981.764.400,00</b>		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,10	25,13	3.585.370.500,00	25,16	3.692.787.500,00	25,19	3.833.847.400,00	25,19	11.112.005.400,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,30	11,33		11,36		11,39		11,39		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BRPSDMD	63,10	63,30		63,50		63,80		63,80		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	3,1		3,2		3,5		3,5		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	90%	90%		90%		90%		90%		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	47.800.000,00	100%	53.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	155.800.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan ) x 100%	100,00%	100,00%	107.459.000,00	100,00%	110.000.000,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	337.459.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan) x 100%	94%	95%	20.000.000,00	97%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	60.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	121.500.000,00	100%	95.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	316.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN MENDO BARAT</b>				<b>4.408.888.150,00</b>		<b>4.499.347.500,00</b>		<b>4.678.447.100,00</b>		<b>13.586.682.750,00</b>		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	24,72	25,10	4.165.888.150,00	26,00	4.243.347.500,00	26,00	4.399.447.100,00	26,00	12.808.682.750,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,62	11,35		12,00		12,25	12,25				
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%	0%				
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	62,00	62,00		63,00		64,00	64,00				
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		3,20		3,70	3,70				
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	80%	83%		85%		87%	87%				
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	23.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	153.000.000,00	100%	157.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	485.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100,00%		100,00%		100,00%	100,00%				
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	35.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	74.000.000,00	100%	82.000.000,00	100%	79.000.000,00	100%	235.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN MERAWANG</b>					<b>4.119.386.250,00</b>		<b>4.213.462.500,00</b>		<b>4.381.182.300,00</b>	<b>12.714.031.050,00</b>		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,77	25,90	3.919.386.250,00	26,00	3.953.062.500,00	26,25	4.060.220.300,00	26,25	11.932.669.050,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,62	10,50		11,50		12,50	12,50				
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%	0%				
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	61,00	62,00		62,15		62,50	62,50				
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	N/a	3		3		4	4				
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	90%	90%		90%		90%	90%				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.450.000,00	100%	15.913.500,00	100%	46.363.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan ) x 100%	100,00%	100,00%	115.000.000,00	100,00%	118.450.000,00	100,00%	122.003.500,00	100,00%	355.453.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan) x 100%	94%	95%	10.000.000,00	97%	10.300.000,00	100%	10.609.000,00	100%	30.909.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	60.000.000,00	100%	116.200.000,00	100%	172.436.000,00	100%	348.636.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN RIAU SILIP</b>				<b>3.429.250.500,00</b>		<b>3.507.565.900,00</b>		<b>3.647.187.000,00</b>		<b>10.584.003.400,00</b>		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,00	28,00	3.266.750.500,00	29,00	3.340.765.900,00	30,00	3.464.542.350,00	30,00	10.072.058.750,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	11,35	11,40		11,50		11,70		11,70		
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%		0%		0%		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,00	64,00		64,00		64,00		64,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	3	3		3		4		4		
				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	70%	70%		80%		90%		90%		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	12.500.000,00	100%	13.800.000,00	100%	36.300.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan ) x 100%	100%	100%	104.000.000,00	100%	105.300.000,00	100%	107.000.000,00	100%	316.300.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	9.000.000,00	83,33%	10.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	31.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	39.500.000,00	100%	39.000.000,00	100%	49.844.650,00	100%	128.344.650,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN BAKAM</b>				<b>3.401.316.000,00</b>		<b>3.478.994.300,00</b>		<b>3.617.478.000,00</b>		<b>10.497.788.300,00</b>		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,70	26,00	3.176.857.000,00	26,50	3.238.994.300,00	27,00	3.363.478.000,00	27,00	9.779.329.300,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,62	11,00			11,50		11,75		11,75			
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%			0%		0%		0%			
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	n/a	61,25			62,00		62,50		62,50			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3			3,5		4		4			
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	-	90%			90%		90%		90%			
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	90.000.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	(Jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi Jumlah Total desa yang Ada di kecamatan ) x 100%	100,00%	100,00%	107.959.000,00	100,00%	111.000.000,00	100,00%	111.500.000,00	100,00%	330.459.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum dibagi Jumlah Total Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan ) x 100%	100%	100%	23.500.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	72.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	68.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	82.500.000,00	100%	225.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01		<b>KECAMATAN BELINYU</b>				<b>14.245.207.000,00</b>		<b>14.570.531.100,00</b>		<b>15.150.521.300,00</b>		<b>43.966.259.400,00</b>		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	25,93%	26,43%	8.896.957.166,00	26,53%	8.569.731.378,00	26,73%	8.789.496.437,00	26,73%	26.256.184.981,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	9,35%	11,50%		11,55%	11,60%		11,60%			
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0%	0%		0%	0%		0%			
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD		62		62,5	63		63			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		3,2	3,5		3,5			
7	01			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	90%	90%		90%	90%		90%			
		02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	(Jumlah Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dibagi Jumlah Total SOP yang Ada di kecamatan) x 100%	100,00%		3.665.061.934,00	100%	4.365.373.262,00	100%	4.690.284.434,00	100%	12.720.719.630,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional / Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	10,78	11,00		11,25		12,00		12,00		Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD	64,76	64,78		64,80		64,82		64,82				
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3,00		3,10		3,15		3,15				
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%	100%	100%		100%		100%		100%				
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Unsur Masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen	80,00	80,00	1.580.000.000,00	90,00	1.619.500.000,00	100,00	1.659.987.500,00	100,00	4.859.487.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan politik/jumlah parpol mendapatkan Kursi di DPRD x 100 %	100,00	100,00	59.735.981.380,00	100,00	853.898.818,00	100,00	1.592.769.930,00	100,00	62.182.650.128,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah pemilih pemula di satuan pendidikan menengah yang telah mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah seluruh pemilih pemula di satuan pendidikan dikali 100 persen		35,00%		67,00%		98,00%		98,00%		
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah ormas yang terdaftar di kali 100 persen	100,00	100,00	120.000.000,00	100,00	123.000.000,00	100,00	126.075.000,00	100,00	369.075.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terealisasi dibagi target yang direncanakan di kali 100 persen	100,00	100,00	1.150.000.000,00	100,00	1.178.750.000,00	100,00	1.208.218.750,00	100,00	3.536.968.750,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi dibagi seluruh kejadian konflik yang terjadi dikali 100 persen	80,00	100,00	495.000.000,00	100,00	507.375.000,00	100,00	520.059.375,00	100,00	1.522.434.375,00	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>JUMLAH</b>							<b>1.487.205.343.790,00</b>		<b>1.518.550.078.580,00</b>		<b>1.573.868.738.891,00</b>		<b>4.579.624.161.261,00</b>		

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 8.1 Indikator Kinerja Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, tentu tidak terlepas dari tujuan serta sasaran kinerja daerah yang hendak dicapai hingga berakhirnya periode RPD di tahun 2026. Untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut, perlu dirumuskan dan ditetapkan suatu alat ukur keberhasilan pencapaian yakni “Indikator Kinerja” serta menentukan target kinerja daerah per tahun hingga kondisi akhir RPD.

Penetapan Indikator dan Target Kinerja Daerah Tahun 2024-2026 selain mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022-2026, juga memperhatikan kondisi awal, kondisi empiris serta hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan target kinerja selama kurun waktu tiga tahun mendatang yang berasal dari *internal* maupun *eksternal*. Data *internal* dapat berupa pencapaian dan pengukuran yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah, sementara data *eksternal* dapat berupa pengukuran yang dilakukan oleh instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bangka seperti Badan Pusat Statistik, Polres Bangka, BMKG, dll.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun yang kemudian diperkuat dengan target kinerja tahunan. Tujuan RPD 2024-2026 yang telah dirumuskan dan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya, untuk mengukur capaian dari 5 (lima) tujuan tersebut, dirumuskan 5 (lima) indikator kinerja tujuan yang telah ditentukan target-target kinerjanya yang dapat memenuhi unsur S.M.A.R.T (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*). Keterkaitan antara tujuan, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Tujuan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024– 2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/ Nilai)	B (61,94)	B (62,40)	B (62,90)	B (63,40)	B (63,40)
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	72,95	73,57	73,87	74,17	74,17
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Nilai)	76,04	79,21	82,38	85,55	85,55
4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah (Nilai)	70,42	70,67	70,92	71,17	71,17
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	64,91	64,91	65,18	65,50	65,50

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir periode RPD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian IKU dan IKK ini selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi perencanaan pembangunan daerah guna penyusunan dan perbaikan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang baik tahunan maupun lima tahunan. Kinerja



Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPD 2024-2026 ini, dirumuskan menjadi IKU dan IKK yang dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

## **8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU adalah ukuran keberhasilan dari capaian suatu sasaran strategis Pemerintah Daerah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

IKU dirumuskan dan ditetapkan dari sasaran strategis RPD 2024-2026, yang diturunkan dari tujuan RPD 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dari 5 (lima) tujuan dalam RPD 2024-2026, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam 13 (tiga belas) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
8. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
9. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
11. Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
12. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dari 13 (tiga belas) sasaran di atas, maka ditetapkan 24 (dua puluh empat) IKU Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :



**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Capaian			Kondisi
				Awal 2022	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (71,31)	BB (72,50)	BB (72,75)	BB (73,12)	BB (73,12)
		Indeks SPBE	Nilai	1,85	2,25	2,45	2,65	2,65
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	63,86	64,08	64,31	64,87	64,87
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	84,06	84,51	84,93	85,25	85,25
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,13	82,42	83,81	85,09	85,09
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,29	8,31	8,33	8,33
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,82	12,84	12,86	12,86
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,37	71,42	71,45	71,47	71,47
		Angka Stunting	Persentase	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,33	2,31	2,29	2,28	2,28
7	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,84	88,91	88,95	88,97	88,97





No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Capaian			Kondisi
				Awal 2022	2024	2025	2026	Akhir
		Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Madya/ 611	Madya/ 625	Madya/ 632	Madya/ 653	Madya/ 653
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,184	0,187	0,191	0,193	0,193
		Indeks Williamson	Nilai	0,182	0,177	0,175	0,173	0,173
9	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,87	3,73	3,79	4,33	4,33
		Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.863	12.891	12.923	12.958	12.958
		Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	33.091	35.791	37.223	38.712	38.712
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,26	4,24	4,23	4,21	4,21
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,39	5,37	5,35	5,33	5,33
11	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money Tourism</i>	Milyar Rupiah	154,28	162,22	173,41	185,76	185,76
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0,219	0,217	0,215	0,213	0,213
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	64,91	64,91	65,18	65,50	65,50
		Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,29	0,31	0,34	0,35	0,35



### 8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Gambaran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dapat diketahui melalui capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum dengan menggunakan indikator-indikator kinerja makro sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kemiskinan;
3. Angka Pengangguran;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pendapatan per Kapita; dan
6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*).



Sedangkan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah merupakan gambaran keberhasilan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan ini disebut sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan berdasarkan urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu :

**1. Urusan Pemerintahan Wajib**, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanian;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olah raga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan; dan
- x. kearsipan.



2. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, terdiri atas :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan; dan
  - e. perindustrian.
3. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri atas:
  - a. sekretariat Daerah; dan
  - b. sekretariat DPRD.
4. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. penelitian dan pengembangan.
5. **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri atas:
  - a. inspektorat daerah.
6. **Urusan Kewilayahan**, terdiri atas:
  - a. kecamatan.

Penetapan IKK Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026  
sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 8.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026**  
**(Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)**

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus																				
<b>I.</b>	<b>Capaian Kinerja Makro</b>																										
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72,95	73,57	73,87	74,17	<p><math>IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]</math> Dimana:  <math>X_{(1)}</math> : Indeks harapan hidup  <math>X_{(2)}</math> : Indeks pendidikan = <math>\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata-rata lama sekolah})</math>  <math>X_{(3)}</math> : Indeks standar hidup layak                      Indeks <math>X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{[X_{(i)maks} - X_{(i)min}]}</math>                      Dimana:  <math>X_{(1)}</math> : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)  <math>X_{(2)}</math> : Nilai maksimum sekolah <math>X_{(i)}</math>  <math>X_{(3)}</math> : Nilai minimum sekolah <math>X_{(i)}</math></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(i))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 <sup>a)</sup></td> <td>300.000 <sup>b)</sup></td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																								
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																								
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																								
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																								
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																								



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
2.	Angka Kemiskinan	Angka	4,26	4,23	4,21	4,21	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ <p>dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>proverty gap</i>) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y<sub>i</sub> = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk</p>
3.	Angka Pengangguran	%	5,39	5,37	5,35	3,33	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,87	3,73	3,79	4,33	$PE = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PE = Pertumbuhan Ekonomi PDRBt = Nilai PDRB periode tahun berjalan PDRBt-1 = Nilai PDRB periode tahun sebelumnya</p>
5.	Pendapatan per kapita	Juta rupiah	52,57	56,60	58,72	60,93	$\text{Pendapatan perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}}$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
6.	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	Indeks	0,219	0,217	0,215	0,213	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:            Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i            Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampel kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:            G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah            0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang            G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>
<b>II</b>	<b>Capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah</b>						
<b>A.</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>						
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	53,73	53,83	53,93	54,03	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,18	95,28	95,38	95,48	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$
1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	76,45	76,55	76,65	76,75	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$
1.4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	%	26,21	30,10	35,10	40,10	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,26	0,27	0,28	0,28	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten / kota yang terakreditasi	%	71,43	85,71	100	100	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$
2.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,69	92,00	95,00	98,00	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$
2.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	97,23	98,50	99,00	100	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$
2.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$
2.6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,15	96,00	97,00	98,00	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$
2.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$





No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71,32	72,50	73,00	73,50	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,09	96,50	97,00	97,50	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,47	72,25	72,50	73,00	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100\%$
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100\%$
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$
3.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	56,35	60,25	60,85	61,05	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)}} \times 100\%$
3.2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	2,20	2,25	2,30	2,35	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)}} \times 100\%$
3.3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	96,93	96,99	97,00	97,45	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)}}{\text{luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota}} \times 100\%$
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87,61	87,62	87,65	87,70	$\frac{\text{jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,32	95,35	95,40	95,45	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/ kota}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	73,83	73,90	73,95	74,00	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$
<b>4.</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>						
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	$\frac{\text{jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021}}{\text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020}} \times 100\%$
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	8,30	69,57	97,56	100	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,29	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$
4.5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	7,41	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit perumahan kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
5.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
5.3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	87.188	87.500	87.750	90.000	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	153.229	490	590	610	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	1.389	1.400	1.450	1.500	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
5.6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.7.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	menit	40	15	15	15	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>						
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	75	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$
6.2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	30,65	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
<b>B.</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>						
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,66	1,70	1,73	1,75	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$
1.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,35	4,45	4,47	4,50	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
1.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,63	72,02	72,30	72,45	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
1.4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,71	26,76	26,78	27,00	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
1.5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	15,96	16,20	16,55	16,63	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,08	12,50	12,90	13,13	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
2.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,025	0,023	0,022	0,021	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)}} \times 100\%$
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	0,010	0,009	0,009	0,008	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$
<b>3.</b>	<b>Pangan</b>						
3.1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	30,15	50,00	60,00	70,00	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$
<b>4.</b>	<b>Pertanahan</b>						
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}} \times 100\%$
4.2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	20	30	40	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$
4.3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$
4.4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal	%	0	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah pemerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
	dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
4.5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$
4.6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tana garapan}} \times 100\%$
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	64,91	64,91	65,18	65,50	<b>IKLH = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 x IKL)</b> Ket : IKA = Indeks kualitas air IKU = Indeks kualitas udara IKL = Indeks kualitas lahan
5.2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	62,86	99,00	100	100	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	70,00	72,00	73,00	74,00	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
6.1.	Perekaman KTP Elektronik	%	100	99,5	99,6	99,7	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$
6.2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	53,76	60	70	80	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$
6.3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,82	98,1	98,2	98,3	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$





No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
							Jumlah anak usia 0-18 tahun
6.4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	48,48	51,51	57,57	63,63	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
7.1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)}} \times 100\%$
7.2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	16,12	32,25	40,32	48,38	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)}} \times 100\%$
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
8.1	Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2,33	2,31	2,29	2,28	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,42	76,75	77,15	77,95	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,68	9,50	9,25	9,00	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>						



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
9.1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	rasio	0,8	0,83	0,86	0,89	Rasio konektivitas kabupaten atau kota = $(IK\ 1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK\ 2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$
9.2.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (V/C Ratio)	rasio	0,17	0,18	0,19	0,20	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	76,47	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
10.2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	96,56	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$
10.3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	79,36	79,36	79,36	79,36	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota (dihitung dari populasi penduduk usia 10 s.d. 65 tahun)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
<b>11.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
11.1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	90,04	92,00	93,00	94,00	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
11.2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
12.1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	%	133,01	91,80	91,20	91,60	$\frac{\text{(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,69	4,71	4,73	4,75	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,415	1,515	1,615	1,715	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
13.3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali	5	5	6	7	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>						
14.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
14.2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>						
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	4	4	4	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>						



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
16.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	11,86	11,86	11,86	11,86	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
17.1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,81	62,14	62,47	62,80	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,48	64,52	64,56	64,60	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)
<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>						
18.1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai	56,72	61,00	65,00	69,00	$T = (a + i + s + j) / 4$ Ket : T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
18.2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	45,00	55,00	65,00	70,00	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ Ket : T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dgn NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/kota dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
<b>C.</b>	<b>Urusan Pilihan</b>						
<b>1.</b>	<b>Perikanan</b>						
1.1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	30.765,052	31.277,05	31.789,05	32.301,05	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota. (sumber data : one data KKP)
<b>2.</b>	<b>Pariwisata</b>						
2.1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	n/a	17,14	19,51	20,40	$\frac{\text{jumlah wisman tahun n} - \text{jumlah wisman tahun n-1}}{\text{jumlah wisman tahun n-1}} \times 100\%$
2.2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	7,16	8,09	8,78	9,16	$\frac{\text{jumlah wisnu tahun n} - \text{jumlah wisnu tahun n-1}}{\text{jumlah wisnu tahun n-1}} \times 100\%$
2.3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	15,01	16,05	16,71	16,81	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
2.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	n/a	n/a	n/a	n/a	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku}}{\text{Total PDRB harga berlaku}} \times 100\%$
			Tidak bisa menetapkan target karena BPS belum melakukan penghitungan PDRB sektor pariwisata				
2.5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,441	0,468	0,482	0,496	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$
<b>3.</b>	<b>Pertanian</b>						
3.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	10,40	10,50	10,55	10,60	$\frac{\text{Produktivitas pertanian per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
<b>4.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
4.1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	%	0	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$
<b>5.</b>	<b>Perdagangan</b>						
5.1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	28,04	32,37	34,87	37,37	$\frac{\text{Realisasi pupuk}}{\text{Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)}} \times 100\%$
5.3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,78	89,48	92,11	97,87	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
<b>6.</b>	<b>Perindustrian</b>						
6.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	15,90	21,40	23,90	26,40	$\frac{\text{(jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
6.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	94,94	97,81	98,96	99,71	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
6.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	6,09	7,66	7,77	7,98	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
6.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Tertulis : tidak perlu diisi	Tertulis : tidak perlu diisi	Tertulis : tidak perlu diisi	Tertulis : tidak perlu diisi	Ket : Di normalisasi oleh Kemendagri
6.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
6.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	125	125	125	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
<b>D.</b>	<b>Fungsi Penunjang</b>						
<b>1.</b>	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>						
1.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	13,03	12,50	12,00	11,50	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
							Total belanja APBD
1.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	13,27	14,20	15,19	16,26	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	Tingkat Maturitas SPIP
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	Tingkat Kualitas APIP
1.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	68,26	68,30	68,35	68,50	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - tranfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
1.6.	Opini Laporan Keuangan	%	WTP*	WTP	WTP	WTP	Opini Laporan Keuangan
<b>2.</b>	<b>Pengadaan</b>						
2.1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021}} \times 100\%$
2.2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	45,00	60,00	65,00	70,00	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah keseluruhan pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	58,66	63,00	65,00	68,00	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$
<b>3.</b>	<b>Kepegawaian</b>						





No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
3.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,25	77,06	75,23	74,66	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas}}{\text{Jumlah pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$
3.2.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,28	22,42	21,91	20,79	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
3.3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,07	58,86	75,60	97,34	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
<b>4.</b>	<b>Manajemen Keuangan</b>						
4.1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,33	2,40	2,45	2,50	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$
4.2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	30,81	31,00	31,35	31,50	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$
4.3.	Assets Management	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Total Assets Management 1. Apakah ada daftar asset Tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset Tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
4.4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	10,69	10,25	10,00	9,75	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$



No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
5.	<b>Transparansi dan partisipasi publik</b>						
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	$\frac{\text{belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 merupakan kebijakan jangka menengah dan pedoman transisi sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. RPD ini memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan RPD ini berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (tahap keempat), hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten tahun 2019-2023, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenaan, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.

Pedoman Transisi pada RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masa berlaku RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah RPJMD Tahun 2019-2023 berakhir, maka Dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka, sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

## 9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka tahun 2024–2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan pada periode tersebut perlu disusun kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka serta pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan sebaik- baiknya mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan tetap terjaga;
6. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka berkewajiban mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik;



7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terjadi perkembangan kondisi dan isu-isu strategis daerah tidak sesuai atau belum terakomodir dalam program dan target RPD ini, maka RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat dilakukan revisi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.